



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, *stakeholder*, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 “Pangkep Mandiri, Maju, Berdaya Saing, Religius Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru”.
- (2) Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, memuat:
 - a. mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - b. mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan;
 - c. mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif;
 - d. mewujudkan Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentraman;

- e. mewujudkan Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh;
- f. mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan;
- g. mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan;
- h. mewujudkan Daya Saing Daerah untuk Kestinambungan Pembangunan;

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 28 November 2024
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 6

REGISTRASI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.119.24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya untuk menentukan arah pembangunan daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan daerah, khususnya perencanaan jangka panjang daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahnya telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya.

Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka waktu tahun 2025-2045 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2045.

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah seperti yang tertuang pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga *time frame* perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga *time frame* tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Perencanaan ini disusun ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang pada prosesnya dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran tujuan dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga 2045. Visi pembangunan jangka panjang daerah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan periode RPJMD.

Gambaran capaian pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 20 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 73,23 atau naik sebesar 6,14 dari tahun 2005 yaitu 67,09, dan masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dari 3 (tiga) dimensi IPM yang berkontribusi besar pada peningkatan IPM yaitu pada Indeks Kesehatan melalui komponen Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu sebesar 72,87. Dari aspek kesejahteraan penduduk, tingkat kemiskinan sepanjang 2005 hingga 2023 turun sebesar 9,39 persen, dari 22,79 persen di tahun 2005 menjadi 13,40 persen pada tahun 2023, dan masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

antara lain; Indeks Kesulitan Geografis (IKG) tinggi, berada pada urutan nomor 3 di Provinsi Sulawesi Selatan; Jumlah penduduk hampir miskin relatif banyak; dan Program perlindungan sosial masih belum tepat sasaran.

Kondisi Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif di mana pada tahun 2005 tingkat pertumbuhan sebesar 5,61 persen dan pada tahun 2023 sebesar 4,75 persen, dan berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan dan di bawah Nasional. Selama beberapa terakhir struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi dan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2010 sebesar 28,21 juta, senantiasa mengalami kenaikan sampai pada tahun 2023 menjadi 91,86 juta. Gini Ratio belum menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2015 hingga 2023, karena hanya turun sebesar 0,037 dari angka 0,391 menjadi 0,354. Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2005 sebesar 14,10 persen cenderung mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5,05 persen. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak lepas dari peran pihak-pihak swasta, didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari kebijakan daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dengan membuka Kerjasama dibidang penyerapan tenaga kerja di daerah didukung oleh Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kerjasama Desa serta Program Hubungan Industrial.

Transformasi pembangunan menjadi paradigma baru pembangunan yang dijabarkan dalam RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045. Transformasi ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, serta tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif, yang merupakan 3 (tiga) misi pembangunan pertama.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi Stabilitas Sosial Politik, serta Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh. Hal ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketahanan keluarga dan masyarakat inklusif sebagai basis utama ketahanan sosial dan pemajuan kebudayaan. Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentraman, Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh merupakan 2 (dua) misi yang tercakup sebagai landasan transformasi.

Transformasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga

kesinambungan pembangunan merupakan 3 misi kerangka implementasi transformasi.

Penyusunan RPJPD menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan. Mengingat kedudukannya yang strategis dan panjangnya jangka waktu yang tertuang dalam rencana pembangunan.

Secara prosesnya, perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.

- a) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
- b) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c) Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

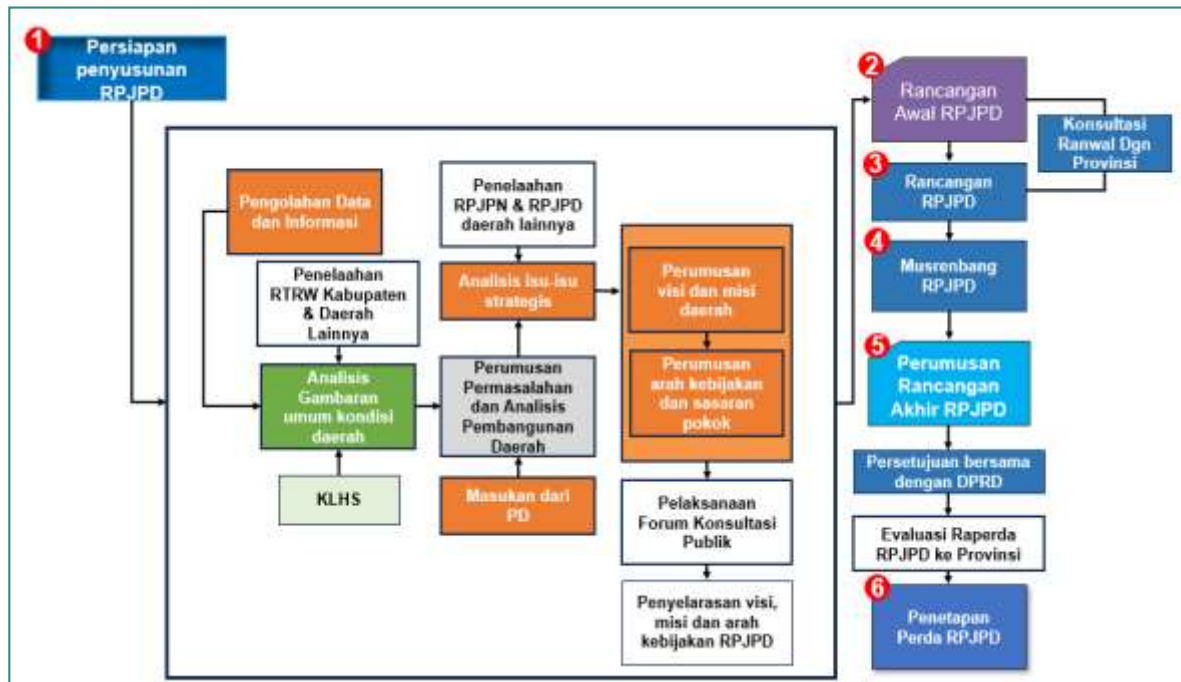
Pendekatan teknokratis pada penyusunan RPJPD ini digunakan untuk evaluasi kinerja pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang, penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten, RPPLH Kabupaten, RPJPD daerah tetangga, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk pendekatan partisipatif yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok merupakan bentuk penjabaran dari pendekatan politik, yang juga diperkuat melalui penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan menggunakan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, perlu didukung dengan kontribusi pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Dalam upaya perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten menjadi hal yang mutlak dilakukan. Sinergitas perencanaan provinsi terhadap pembangunan nasional dilakukan melalui 8 (delapan) misi, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan sebagai komitmen Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menjaga keselarasan pembangunan nasional, dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama keberhasilan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 memiliki arti penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, dan menjadi

dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali, sekaligus menjadi acuan bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang daerah.

Gambar I.1



Bagan Alir Penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sumber: Hasil Modifikasi dari Permendagri 86 Tahun 2017

Berakhirnya periode RPJPD 2005-2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep akan diiringi dengan penyusunan RPJPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep tahun 2025-2045. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen perencanaan, termasuk RPJPD sehingga dapat meminimalisir dampak negative pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat tersebut, maka KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya tampung dan daya dukung telah melampaui batas, maka kebijakan, rencana dan/ atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki menyesuaikan dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJPD, penyusunan Rancangan Awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke Pemerintah Pusat, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJPD, penyusunan

Rancangan Akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJPD oleh DPRD, evaluasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, beberapa landasan hukum menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun RPJPD, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkep 2011- 2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Penyusunan RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan. RPJPN dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional dan provinsi. Sesuai dengan amanat pada pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017, pada penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 juga harus mempedomani RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011-2031 yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011-2031 melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah/tujuan pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan; dan
2. RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005 – 2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Gambar I.2

Posisi RPJP Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

Sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 perlu ditelaah, baik dari

tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Adapun beberapa dokumen yang akan ditelaah dalam penyusunan RPJPD ini antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan (RPJPD) Tahun 2025-2045;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar yang merupakan bagian dari kawasan Makassar.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011-2031
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan; dan
2. Agar tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan RPJPD adalah:

1. Merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045.
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
4. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk setiap jangka waktu lima tahun.
6. Menjadi pedoman penyusunan Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, dan sistematika penulisan.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Refleksi pembangunan daerah, menguraikan secara singkat hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, aspek geografi dimana didalamnya menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim dan demografi yang menjelaskan karakteristik demografi daerah. aspek kesejahteraan masyarakat yang menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi, karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya, aspek daya saing yang terdiri dari daya saing ekonomi daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan, daya saing SDM yang menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pegerak perekonomian daerah. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah yang menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah. Daya Saing Iklim Investasi yang menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah. Aspek Pelayanan Umum yang menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil /capaian, serta isu strategis daerah yang harus diperhatikan dan dikedepankan termasuk hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai visi dan misi RPJPD. Visi dan misi RPJPD akan menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk tiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing – masing tahapan. Setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

f. BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada jangka panjang. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005-2025 telah menjadi acuan pembangunan Pangkajene dan Kepulauan selama hampir 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menghadirkan banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat Pangkajene dan Kepulauan, Pangkajene dan Kepulauan dan secara lebih luas, Indonesia.

Pangkajene dan Kepulauan memiliki berbagai macam potensi dan peluang pembangunan selama 20 tahun terakhir, diantaranya kekayaan alam dan bahari yang melimpah, keanekaragaman hayati yang khas, potensi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tinggi, dan posisi geografis yang strategis di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dinamika pembangunan turut membentuk derajat kesejahteraan masyarakat Pangkajene dan Kepulauan dan sekitarnya. Berbagai faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditinjau secara komprehensif mengenai sejauh apa intervensi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu menghadirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat Pangkajene dan Kepulauan.

Salah satu faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pembangunan adalah perubahan iklim. Beberapa risiko bencana hidrometeorologis, antara lain: banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim, dan abrasi. Risiko bencana banjir tampak pada area perkotaan dan padat penduduk. Sedangkan risiko kekeringan kategori tinggi ditemukan di beberapa wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Guna memberikan gambaran yang utuh mengenai pencapaian dan tantangan dan strategi untuk perencanaan pembangunan ke depannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka evaluasi RPJPD perlu dilakukan secara komprehensif. Sesuai ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, secara normatif pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005-2025 diukur melalui pencapaian sasaran pokok pada pelaksanaan 4 periode RPJMD, yaitu RPJMD Tahun 2005–2010, RPJMD Tahun 2011 -2016, RPJMD Tahun 2016 – 2021, dan RPJMD Tahun 2021-2026.

Hasil evaluasi diharapkan akan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, menyinergikan dan menyinkronkan perencanaan antar waktu, antar pelaku maupun antar wilayah Kabupaten/Kota se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan

daerah serta kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana pembangunan.

Visi RPJPD Tahun 2005-2025 ini masih menggunakan rumusan Visi Kabupaten Pangkep 2010 yang di perpanjang masa pencapaiannya. Alasan penggunaan rumusan visi ini karena visi ini tersebut belum dapat dicapai pada tahun 2010. Pelambatan pencapaian ini terutama disebabkan oleh melambatnya kemampuan pelaksanaan pembangunan sebagai berlanjut untuk beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 adalah “Menjadi Daerah Maju Dan Mandiri di Sulawesi Selatan yang Didukung Oleh Struktur Ekonomi Dan Struktur Wilayah Yang Kuat Dengan Dijiwai Oleh Nilai-Nilai Keagamaan Pada Tahun 2025”.

Visi singkat ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Pangkep yang menginginkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimasa yang akan datang menjadi daerah yang maju di Sulawesi Selatan dalam berbagai dimensi kehidupan, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan alam, posisi geografis, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan tatanan budaya masyarakat lokal.

Sejalan dengan visi tersebut dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki, maka visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi daerah yang maju mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mantap;
2. Mengembangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat; dan
3. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD terhadap 17 indikator sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 dengan rata-rata capaian kinerja RPJPD sampai dengan periode akhir tahun berjalan 95,99%. Predikat kriteria penilaian realisasi kinerja pembangunan dengan kategori SANGAT TINGGI. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kemampuan dalam menjaga berkelanjutan pelaksanaan RPJMD setiap periode lima tahunnya terhadap sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005-2025. 17 indikator sasaran pokok RPJPD yang tercapai (Indikator) dan yang belum tercapai (Indikator) disimpulkan sebagai berikut:

a. Indikator Sasaran Pokok RPJPD yang Telah Tercapai

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 72,5, dapat tercapai 74,11.
2. Indeks Pelayanan Publik, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 81,55, dapat tercapai 83,49.
3. Pertumbuhan Ekonomi, Dari kondisi awal ditahun 2005 sebesar 9,84, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 4,80 - 6,35, dapat tercapai sebesar 4,93.
4. PDRB/kapita, Dari kondisi awal ditahun 2005 sebesar 32,22, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 77,45, dapat tercapai sebesar 86,74.
5. Rasio Gini, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 0,300, dapat tercapai sebesar 111,33%.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 67,43, dapat tercapai sebesar 67,69.

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG), Dari kondisi awal ditahun 2005 sebesar 87,75, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 90,12, dapat tercapai sebesar 90,61.

b. Indikator Sasaran Pokok RPJPD yang Tidak Tercapai

1. Indeks Reformasi Birokrasi, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 dengan nilai >70-80 (BB), dapat tercapai dengan nilai 53,76 (CC).
2. Nilai SAKIP, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 dengan nilai >80-90 (A), dapat tercapai dengan nilai 62,59 (B).
3. Indeks Inovasi Daerah, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 60, dapat tercapai 56,9 dengan kategori inovatif.
4. Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 76,09, dapat tercapai sebesar 75,24.
5. Tingkat kemiskinan, Dari kondisi awal pada periode pertama sebesar 17,36, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 9,83, dapat tercapai sebesar 13,92.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dari kondisi awal pada periode pertama sebesar 9,64, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 4,37, dapat tercapai sebesar 5,23.
7. Tingkat Inflasi, Dari kondisi awal pada periode pertama sebesar 2,87, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 2,0-4,0, dapat tercapai sebesar 5,81.
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dari kondisi awal ditahun 2005 sebesar 63,60, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 71,17, dapat tercapai sebesar 69,79.
9. Indeks Desa Membangun (IDM), ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 0,759, dapat tercapai sebesar 0,6921.
10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Dari kondisi awal ditahun 2005 sebesar 58,93, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 92,82, dapat tercapai sebesar 64,12.
11. Indeks Reformasi Birokrasi, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 dengan nilai >70-80 (BB), dapat tercapai dengan nilai 53,76 (CC).
12. Nilai SAKIP, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 dengan nilai >80-90 (A), dapat tercapai dengan nilai 62,59 (B).
13. Indeks Inovasi Daerah, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 60, dapat tercapai 56,9 dengan kategori inovatif.
14. Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 76,09, dapat tercapai sebesar 75,24.
15. Tingkat kemiskinan, Dari kondisi awal pada periode pertama sebesar 17,36, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 9,83, dapat tercapai sebesar 13,92.
16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dari kondisi awal pada periode pertama sebesar 9,64, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 4,37, dapat tercapai sebesar 5,23.
17. Tingkat Inflasi, Dari kondisi awal pada periode pertama sebesar 2,87, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 2,0-4,0, dapat tercapai sebesar 5,81.
18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dari kondisi awal ditahun 2005 sebesar 63,60, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 71,17, dapat tercapai sebesar 69,79.
19. Indeks Desa Membangun (IDM), ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 0,759, dapat tercapai sebesar 0,6921.

20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Dari kondisi awal ditahun 2005 sebesar 58,93, ditargetkan sampai dengan tahun 2025 mencapai 92,82, dapat tercapai sebesar 64,12.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai penjelasan aspek geografi dan demografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mencakup karakteristik lokasi wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan aspek demografi.

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Peran Strategis Daerah

Dinamika ekonomi, kondisi sosial budaya, perkembangan teknologi, tantangan tata kelola pemerintahan, serta berbagai perkembangan lain yang terjadi, baik ditingkat lokal, nasional dan global dalam dua puluh tahun mendatang akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan di wilayah Sulawesi khususnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu diperlukan pemetaan potensi dan isu utama pembangunan yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan untuk wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka panjang. Potensi pembangunan wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak dapat dipisahkan dari letak geografis dan sumber daya yang dimiliki.

2.1.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km², tetapi setelah diadakan analisis bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km².

Secara geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak pada posisi 4°40'LS-8°00'LS dan 110°BT-119°48'67'BT. Sementara itu secara administratif wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berbatasan dengan beberapa kabupaten disekitarnya untuk wilayah daratan, dan untuk wilayah kepulauan berbatasan dengan beberapa pulau/provinsi, berikut ini rinciannya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar (Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali).

Wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbagi dalam 13 (tiga belas) Kecamatan dan 103 (seratus tiga) desa/kelurahan dengan luas 891,74 Km². Dari 13 (tiga belas) kecamatan, 4 (empat) kecamatan merupakan wilayah kepulauan, dan 9 (sembilan) kecamatan berada di daratan. Kecamatan Balocci merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yakni 143,48 Km² atau sekitar 12,90% dari total luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mandalle dengan luas 40,16 Km² atau sekitar 3,61% dari luas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut ini rincian luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

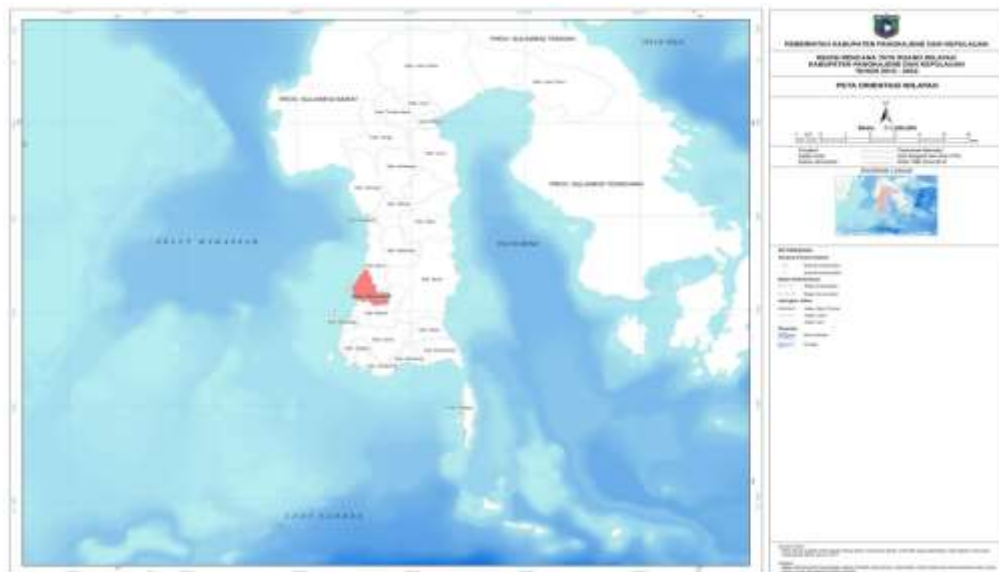
Tabel II.I.
Wilayah Administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Dirinci Tiap Kecamatan, Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persen Terhadap Luas Wilayah (%)
1.	Lk. Tangaya	Sapuka	120	10,79
2.	Lk. Kalmas	Kalu-Kaluang	91,5	8,23
3.	Lk. Tuppabiring	Mattiro Sompe	54,44	4,89
4.	Lk. Tupabbiring Utara	Mattiro Kanja	85,56	7,69
5.	Pangkajene	Pangkajene	47,39	4,26
6.	Minaste'ne	Minasate	76,48	6,88
7.	Balocci	Balleangin	143,48	12,9
8.	Tondong Tallasa	Bantimurung	111,2	10
9.	Bungoro	Samalewa	90,12	8,1
10.	Labakkang	Labakkang	98,46	8,85
11.	Ma'rang	Bonto-Bonto	75,22	6,76
12.	Segeri	Segeri	78,28	7,04
13.	Mandalle	Tamarupa	40,16	3,61
Total Luas			1112,29	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Secara spasial, orientasi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam konstelasi Provinsi Sulawesi Selatan serta batas wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

Gambar II.1.
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021.

Gambar II.2.
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan, masing-masing wilayah memiliki jarak tempuh yang berbeda menuju ibukota kabupaten. Kecamatan yang jarak tempuhnya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya, yaitu sejauh 291,29 km. Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pangkajene disusul Kecamatan Minasatene, masing-masing berjarak 2 km dan 2,5 km.

2.1.1.1.2. Topografi

Kemiringan lereng adalah kenampakan permukaan alam yang disebabkan adanya perbedaan ketinggian antar dua tempat. Sudut yang membentuk dua ketinggian tersebut biasanya disebut sebagai sudut kemiringan. Daerah yang relatif datar memiliki nilai kemiringan yang kecil, untuk daerah berupa dataran tinggi biasanya memiliki nilai kemiringan lereng yang tinggi. Secara garis besar kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan data kontur dari citra satelit Spot 6/7 tahun 2019, diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori sudut kemiringan yang dirincikan tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

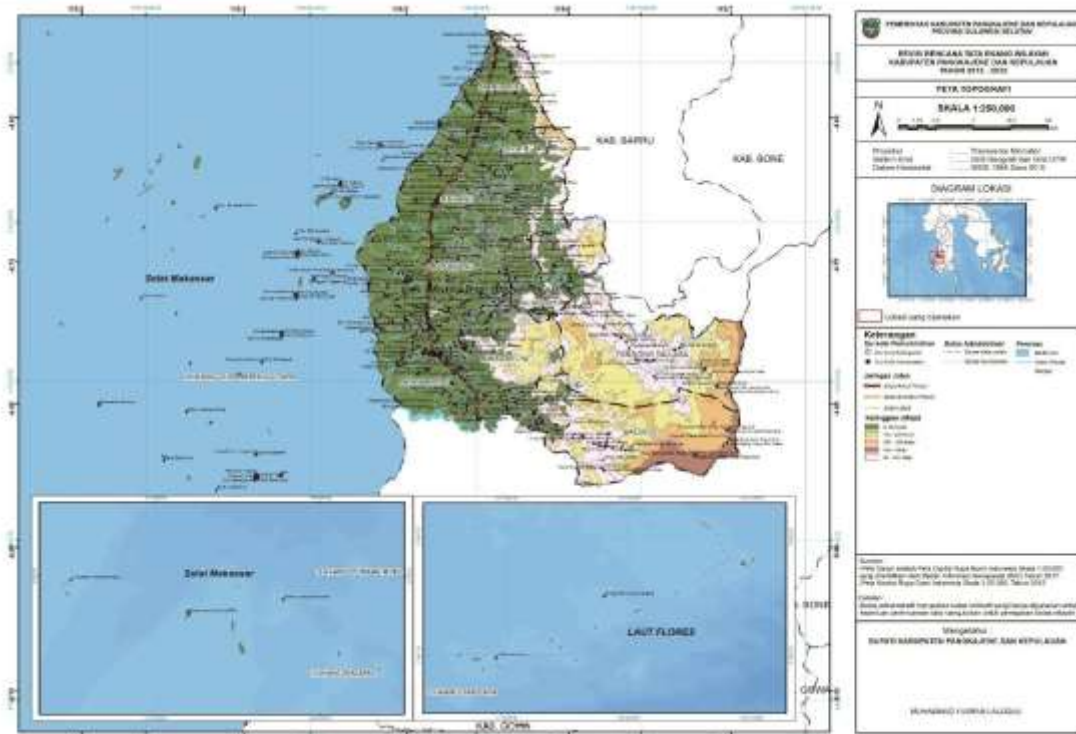
Tabel II.2.
Klasifikasi Sudut Lereng Masing-Masing Kecamatan (Ha) di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Kecamatan	Klasifikasi Kemringan Lereng						Luas (Ha)
		>40%	0 - 2%	15-25%	2-5 %	25-40%	5-15%	
1.	Lk. Tangaya	-	4.795,26	-	-	-	-	4.795,26
2.	Lk. Kalmas	-	3.581,86	-	-	-	-	3.581,86
3.	Lk. Tuppabiring	-	174,31	-	-	-	-	174,31
4.	Lk. Tupabbiring Utara	-	407,13	-	-	-	-	407,13
5.	Pangkajene	1,05	4.086,21	1,75	-	4,14	-	4.093,15
6.	Minaste'ne	1.611,42	5.078,23	559,63	23,15	1,189,0	139,81	8.601,28
7.	Balocci	2.439,16	2.839,30	3,017,37	246,09	3,134,32	1,714,65	13.390,89
8.	Tondong Tallasa	3.096,49	2.314,22	3,201,01	206,96	2,858,86	2,253,18	13.930,72
9.	Bungoro	1.110,01	5.054,83	995,07	328,04	922,16	613,35	9.023,46
10.	Labakkang	72,37	10.086,14	82,44	73,57	83,58	107,78	10.505,88
11.	Ma'rang	345,04	8.192,10	321,12	146,08	333,98	222,45	9.560,77
12.	Segeri	492,19	4.493,90	441,31	128,61	433,16	369,41	6.358,58
13.	Mandalle	424,69	3.128,40	335,29	118,00	376,26	195,52	4.578,16
	Total Luas	9.592,42	54.231,89	8.954,99	1.270,50	9.335,50	5.616,15	89.001,45

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi sudut kelerengan antara 0-2% dengan luas 54.231,890 Ha mendominasi wilayah Kabupaten Pangkajene dan tersebar secara luas di Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Ma'rang, kemudian sudut kelerengan diatas 40% dengan luas 9.592,420 Ha yang dominan berada di Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Balocci. Sementara itu klasifikasi sudut kelerengan antara 2-5% merupakan klasifikasi sudut kelerengan terkecil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu seluas 1.270,500 Ha yang berada di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Balocci, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Gambar II.3.
Peta Topografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023



S

umber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021.

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1) Wilayah Daratan

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

2) Wilayah Kepulauan

Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

- 1) Kecamatan Liukang Tupabiring;
- 2) Kecamatan Liukang Tupabiring Utara;
- 3) Kecamatan Liukang Kalmas; dan
- 4) Kecamatan Liukang Tangaya.

2.1.1.1.3. Morfologi (Ketinggian Wilayah)

Morfologi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupa dataran rendah, membentang dari pantai barat, perbukitan di bagian timur dan pulau-pulau kecil. Bentuk morfologi tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, mulai dari dataran rendah, pesisir, hingga dataran tinggi. Dataran rendah, dan pesisir berada di Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle. Sementara itu wilayah kepulauan berada di Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabbiring, dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Wilayah dataran tinggi, seperti Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Tabel II.3.
Klasifikasi Ketinggian Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Dirinci Tiap Kecamatan, Tahun 2023

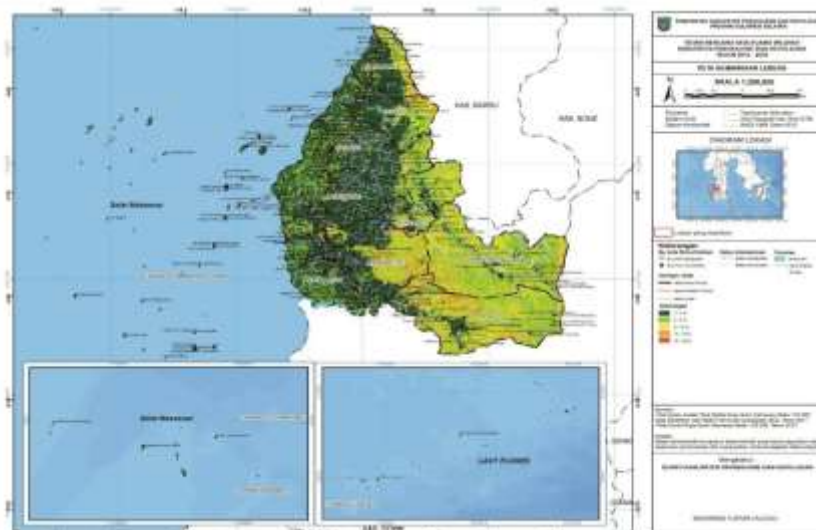
No.	Kelas Ketinggian, Persebaran Lokasi dan Luas		
	Klasifikasi Ketinggian	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Ketinggian 000-100 Mdpl	Kec. Liukang Tangaya	4,795.26
		Kec. Liukang Kalmas	3,581.86
		Kec. Liukang Tupabbiring	174.31
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	407.13
		Kec. Pangkajene	4,093.15
		Kec. Minasatene	5,672.33
		Kec. Balocci	2,275.41
		Kec. Tondong Tallasa	1,799.38
		Kec. Bungoro	6,966.84
		Kec. Labakkang	10,456.14
		Kec. Ma'rang	9,041.80
		Kec. Segeri	5,562.64
		Kec. Mandalle	3,680.31
2.	Ketinggian 100 - 200 Mdpl	Kec. Minasatene	934.46
		Kec. Balocci	2,580.75
		Kec. Tondong Tallasa	3,360.41
		Kec. Bungoro	1,202.72
		Kec. Labakkang	41.60
		Kec. Ma'rang	418.50
		Kec. Segeri	426.56
		Kec. Mandalle	532.91
3.	Ketinggian 200-300 Mdpl	Kec. Minasatene	1,043.56
		Kec. Balocci	2,070.98
		Kec. Tondong Tallasa	2,941.16
		Kec. Bungoro	501.35
		Kec. Labakkang	8.14
		Kec. Ma'rang	91.62
		Kec. Segeri	127.93
4.	Ketinggian 300-400 Mdpl	Kec. Minasatene	747.07
		Kec. Balocci	1,523.14
		Kec. Tondong Tallasa	2,513.67

No.	Kelas Ketinggian, Persebaran Lokasi dan Luas		
	Klasifikasi Ketinggian	Lokasi	Luas (Ha)
		Kec. Bungoro	212.62
		Kec. Ma'rang	8.84
		Kec. Segeri	76.02
		Kec. Mandalle	98.86
5.	Ketinggian 400-500 Mdpl	Kec. Minasatene	199.48
		Kec. Balocci	1,244.39
		Kec. Tondong Tallasa	2,165.77
		Kec. Bungoro	122.03
		Kec. Segeri	63.97
		Kec. Mandalle	47.65
6.	Ketinggian 500-600 Mdpl	Kec. Minasatene	4.38
		Kec. Balocci	1,135.12
		Kec. Tondong Tallasa	2,165.77
		Kec. Bungoro	17.89
		Kec. Segeri	57.60
		Kec. Mandalle	33.60
7.	Ketinggian 600-700 Mdpl	Kec. Balocci	1,167.39
		Kec. Tondong Tallasa	724.31
		Kec. Segeri	41.48
		Kec. Mandalle	1.74
8.	Ketinggian 700-800 Mdpl	Kec. Balocci	495.89
		Kec. Tondong Tallasa	206.61
		Kec. Segeri	2.39
9.	Ketinggian 800-900 Mdpl	Kec. Balocci	382.72
		Kec. Tondong Tallasa	94.68
10.	Ketinggian 1.000-1.100 Mdpl	Kec. Balocci	322.71
		Kec. Tondong Tallasa	71.50
11.	Ketinggian 1.100-1.200 Mdpl	Kec. Balocci	46.53
		Kec. Tondong Tallasa	2.65
12.	Ketinggian 1.200-1.300 Mdpl	Kec. Balocci	14.06
Total Luas			90.984,82

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ketinggian 100-200 Mdpl merupakan kelas ketinggian yang dominan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tersebar di Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 49.548,000 Ha, kemudian kelas ketinggian 200-300 Mdpl, tersebar di Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 9.497,900 Ha. Sementara itu kelas ketinggian 1.200-1.300 Mdpl merupakan kelas ketinggian terkecil, berada di Kecamatan Balocci dengan luas 14,060 Ha.

Gambar II.4.
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021.

2.1.1.1.4. Geologi

Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi batuan Gunung Api Formasi Camba, batuan Gunung Api Lompobattang, batuan Gunung Api Terpropilitkan, batuan terobosan, batugamping formasi Camba, endapan alluvium dan pantai, formasi Camba, formasi Sekala, formasi Tonasa, kompleks Melange, dan kompleks tektonik Bantimala.

Berdasarkan hasil analisis geologis menunjukkan bahwa jenis batuan endapan aluvium dan pantai mendominasi jenis batuan yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana luasnya mencapai 27.520,710 Ha, kemudian disusul formasi Tonasa dengan luas 19.713,410 Ha. Sementara itu jenis batuan batugamping Formasi Camba merupakan jenis batuan yang hanya terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas hanya 45,250 Ha dan merupakan jenis batuan terkecil. Berikut ini rincian formasi batuan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirinci tiap kecamatan.

Tabel II.4.
Kondisi Geologi (Jenis Batuan) di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2023

No.	Struktur Geologi, Lokasi dan Luas		
	Klasifikasi / Struktur Geologi	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Batuan Gunung api Formasi Camba	Kec. Balocci	2.449,18
		Kec. Tondong Tallasa	1.184,92
		Kec. Bungoro	174,94
		Kec. Labakkang	278,02
		Kec. Ma'rang	635,58
		Kec. Segeri	596,08
		Kec. Mandalle	1.563,71
2.	Batuan Gunungapi Lompobattang	Kec. Balocci	1.292,97
		Kec. Tondong Tallasa	1.282,68
		Kec. Bungoro	126,21
		Kec. Segeri	117,18
3.	Batuan Gunungapi Terpropilitkan	Kec. Tondong Tallasa	947,47
4.	Batuan Terobosan	Kec. Minasatene	104,44
		Kec. Balocci	1.128,03
		Kec. Tondong Tallasa	1.532,80
		Kec. Bungoro	241,93
		Kec. Labakkang	1,81
5.	Batugamping Formasi Camba	Kec. Tondong Tallasa	45,25
		Kec. Segeri	1.221,63
6.	Endapan Aluvium dan Pantai	Kec. Pangkajene	4.080,92
		Kec. Minasatene	3.659,42
		Kec. Balocci	870,40
		Kec. Bungoro	3.501,83
		Kec. Labakkang	5.722,92
		Kec. Ma'rang	4.191,94
		Kec. Segeri	3.177,31
		Kec. Mandalle	2.315,97
7.	Kompleks Tektonik Bantimala	Kec. Tondong Tallasa	1.529,97
		Kec. Bungoro	1.279,84
		Kec. Ma'rang	494,49
		Kec. Segeri	270,80
8.	Formasi Tonasa	Kec. Pangkajene	12,23
		Kec. Minasatene	4.178,22
		Kec. Balocci	7.650,31
		Kec. Tondong Tallasa	5.013,80
		Kec. Bungoro	1.814,97
		Kec. Labakkang	554,48
		Kec. Ma'rang	40,73
		Kec. Segeri	412,49
	Kec. Mandalle	36,18	

No.	Struktur Geologi, Lokasi dan Luas		
	Klasifikasi / Struktur Geologi	Lokasi	Luas (Ha)
9.	Kompleks Melange	Kec. Tondong Tallasa	2.393,83
		Kec. Bungoro	1.242,02
		Kec. Ma'rang	484,53
10.	Formasi Sekala	Kec. Minasatene	659,19
		Kec. Bungoro	641,70
		Kec. Labakkang	3.948,65
		Kec. Ma'rang	3.713,50
		Kec. Segeri	563,09
		Kec. Mandalle	595,60
11.	Formasi Camba	Kec. Segeri	1.221,63
		Kec. Mandalle	66,70
12.	Tidak Ada Data	Kec. Liukang Tangaya	4.795,26
		Kec. Liukang Kalmas	3.581,86
		Kec. Liukang Tupabbiring	174,31
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	407,13
		Total Luas	89.001,44

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka terdapat 4 (empat) bagian besar dari kondisi struktur geologi yang menyusun tanah dan batuan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dan informasi tentang kondisi geologi sangat penting artinya dalam memanfaatkan lahan dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya. Adapun struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

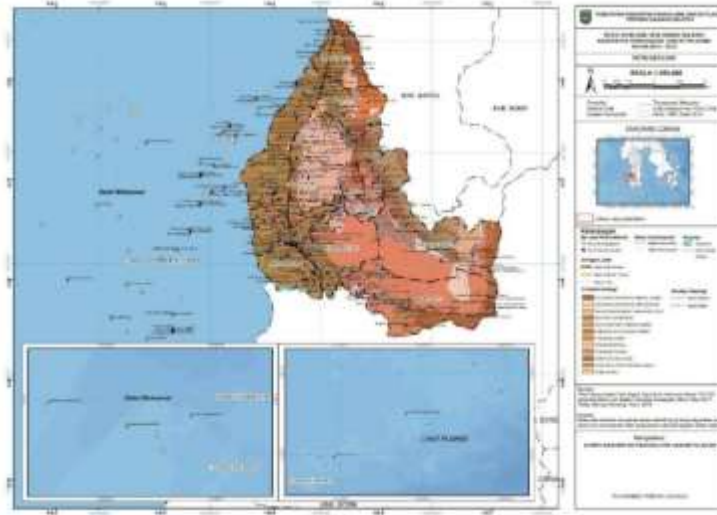
1. Endapan Permukaan: jenis endapan permukaan ini berupa jenis tanah alluvial, daerah rawa, endapan pantai, delta dan daerah aliran sungai.
2. Batuan Sedimen: jenis batuan sedimen meliputi batuan berpasir, batuan kerikil, kerakal konglomerat, batuan berlempung, batuan lanau, napal, tuvaran, lava dan breksi.
3. Batuan sedimen bercampur batuan gunung api: jenis struktur batuan ini terbentuk dari formasi camba: terdiri dari batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api, breksi, lava, tufa, konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batuan napalm alihan.
4. Batuan Terobosan: jenis struktur batuan ini terdiri dari terobosan bersifat basa terutama batuan terobosan yang bersifat asam dan menengah, meliputi granodiamit diorite, tralit, dan batuan baku terobosan bersifat ultra basa terutama pridotil.

Secara garis besar sebaran dari jenis struktur geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari:

- a. Jenis endapan permukaan tersebar secara tidak merata pada sepanjang bagian pesisir.
- b. Jenis batuan sedimen tersebar secara tidak merata pada bagian dataran rendah.
- c. Jenis batuan sedimen berselingan gunung api dan batuan terobosan sebagian besar tersebar di dataran tinggi terutama di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa dan Ma'rang.

Berdasarkan struktur geologi, maka terdapat berbagai jenis bahan tambang, seperti basal, batu gamping, batu sabak, diorite, tras, kaolin, feldspar, lempung, marmer, batu bara dan lain-lain. Bahan galian ini tersebar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Gambar II.5.
Peta Geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023



Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021

2.1.1.1.5. Hidrogeologi

Secara umum wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki iklim laut sehingga tingkat curah hujan relatif tinggi. Keadaan iklim ini pada dasarnya hampir sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan banyaknya tersebar badan-badan air yang besar yang seperti sungai, dan air bawah tanah. Akan tetapi sebaran dari badan air tersebut memiliki perbedaan di setiap wilayah tergantung perbedaan dari curah hujan dan faktor lainnya di wilayah tersebut.

Kondisi hidrogeologi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tercermin dari potensi air tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di daerah dataran rendah bagian barat. Berikut ini rincian kondisi hidrogeologi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.5.
Hidrogeologi Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Klasifikasi Hidrogeologi	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Daerah endapan batugamping Ang. Taccipi F. Walanae & F. Tonasa, wilayah air tanah pada daerah karst.	Kec. Balocci	8.304,20
		Kec. Bungoro	18,89
		Kec. Minasatene	13,31
		Kec. Tondong Tallasa	12.146,14
2.	Daerah pegunungan berfungsi sebagai imbuhan air tanah.	Kec. Balocci	0,01
		Kec. Tondong Tallasa	0,01
3.	Wilayah dataran endapan aluvial & endapan hasil gunungapi F. Camba, Wil. Air tanah cukup dalam dgn 1 – 3 lapisan akuifer.	Kec. Balocci	4.783,35
		Kec. Bungoro	5.963,36
		Kec. Labakkang	4.782,81
		Kec. Mandalle	197,52
		Kec. Ma'rang	4.249,79
		Kec. Minasatene	6.517,62
		Kec. Pangkajene	109,11
		Kec. Segeri	3.280,49
4.	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, di beberapa tempat tersusupi air laut.	Kec. Balocci	323,40
		Kec. Bungoro	3.041,22
		Kec. Labakkang	5.723,07
		Kec. Mandalle	4.380,65
		Kec. Ma'rang	5.310,98
		Kec. Minasatene	2.070,35
		Kec. Pangkajene	3.984,04
		Kec. Segeri	3.078,09
5.	Tidak Ada Data.	Kec. Liukang Kalmas	3.581,86
		Kec. Liukang Tangaya	4.795,26
		Kec. Liukang Tupabbiring	174,31
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	407,13
		Total Luas	89.021,50

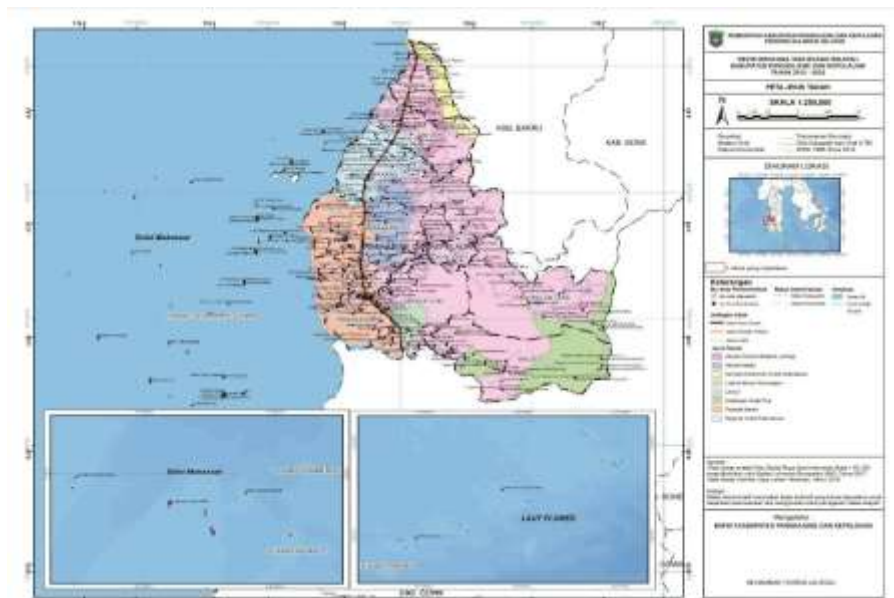
Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Potensi air tanah dalam pada khususnya di daerah dataran rendah bagian barat wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat dibagi menjadi 6 (enam) berdasarkan sebaran ke dalam lapisan pembawa air yaitu:

- Potensi air tanah pada kedalaman 25 meter, tahapan jenis lapisan batuan 11-62 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 50 meter, tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter. Potensi air tanah pada kedalaman 75 meter, tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 100 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 125 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 150 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.

Gambar II.6.

Peta Hidrogeologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021

2.1.1.1.6. Klimatologi

1.1. Curah Hujan

Curah hujan di suatu wilayah (tempat) dipengaruhi oleh keadaan iklim geografi dan perputaran/pertemuan arus udara, oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada tahun 2023, hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari yaitu 26 hari hujan dengan curah hujan 1.035 mm³. Secara rinci berikut ini keadaan hujan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2023.

Tabel II.6.

Keadaan Hujan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021-2023

No.	Bulan	Keadaan Hujan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan								
		Curah Hujan (mm ³)			Hari Hujan (Hari)			Penyinaran Matahari (Jam)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Januari	839,9	669,7	757	30	21	25	25,0	4,2	43
2.	Pebruari	397,0	834,2	1.035	20	24	26	34,5	3,9	34
3.	Maret	626,3	324,2	204	23	17	20	44,5	5,0	62
4.	April	294,0	134,7	329	11	13	21	50,9	6,9	62
5.	Mei	78,1	340,9	63	11	14	12	58,2	6,5	70
6.	Juni	87,0	198,7	139	14	20	11	63,8	6,0	65
7.	Juli	77,3	34,4	151	9	8	10	48,1	6,9	82
8.	Agustus	104,2	74,3	0	8	9	1	68,4	7,4	98
9.	September	82,5	154,9	-	11	13	-	57,2	6,7	98

No.	Bulan	Keadaan Hujan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan								
		Curah Hujan (mm ³)			Hari Hujan (Hari)			Penyinaran Matahari (Jam)		
10.	Oktober	245,4	355,0	2	17	23	1	66,2	5,3	97
11.	Nopember	542,0	567,2	317	26	24	16	43,3	5,1	76
12.	Desember	860,3	962,7	305	28	23	25	28,8	4,1	60

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024.

1.2. Angin

Keadaan angin di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tercermin dari kondisi kecepatan angin dan tekanan udara pada wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG), menunjukkan bahwa kecepatan angin rata-rata tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan Februari yaitu mencapai 22,0 Knot, kemudian pada bulan juli yaitu 19,0 knot, dan pada bulan januari, dan bulan desember kecepatan angin rata-rata berkisar 18,0 knot.

Sementara itu rata-rata tekanan udara di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertinggi terjadi pada bulan september yaitu sebesar 1.009,1 mb. Berikut ini tabel data keadaan angin di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.7.

Keadaan Angin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Bulan	Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1.	Januari	0,0	3,5	18,0	1.002,8	1.009,3	1.012,4
2.	Pebruari	0,0	3,8	22,0	1.002,2	1.008,5	1.012,0
3.	Maret	0,0	3,8	12,0	1.003,7	1.008,2	1.012,6
4.	April	0,0	4,4	12,0	1.004,0	1.008,1	1.012,1
5.	Mei	0,0	4,0	13,0	1.004,2	1.008,3	1.012,6
6.	Juni	0,0	3,7	12,0	1.005,1	1.008,4	1.011,4
7.	Juli	0,0	3,8	19,0	1.004,5	1.008,3	1.011,2
8.	Agustus	0,0	3,9	11,0	1.005,3	1.008,6	1.011,5
9.	September	0,0	3,8	13,0	1.004,7	1.009,1	1.013,2
10.	Oktober	0,0	3,3	11,0	1.004,6	1.008,5	1.012,6
11.	Nopember	0,0	3,2	13,0	1.004,7	1.008,7	1.013,1
12.	Desember	0,0	3,5	18,0	1.002,5	1.007,8	1.013,1

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024.

2.1.1.1.7. Iklim/Cuaca

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis basah (tipe B) dengan musim kemarau. Suhu udara tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2022 sebesar 33,8°C terjadi pada bulan agustus dan september dengan kelembaban udara sebesar 98%, sedangkan, suhu terendah terjadi pada bulan januari dan februari yaitu sebesar 31,8°C dengan kelembaban udara sebesar 99%. Secara rinci berikut ini keadaan udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2023.

Tabel II.8.

Keadaan Iklim/Cuaca di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

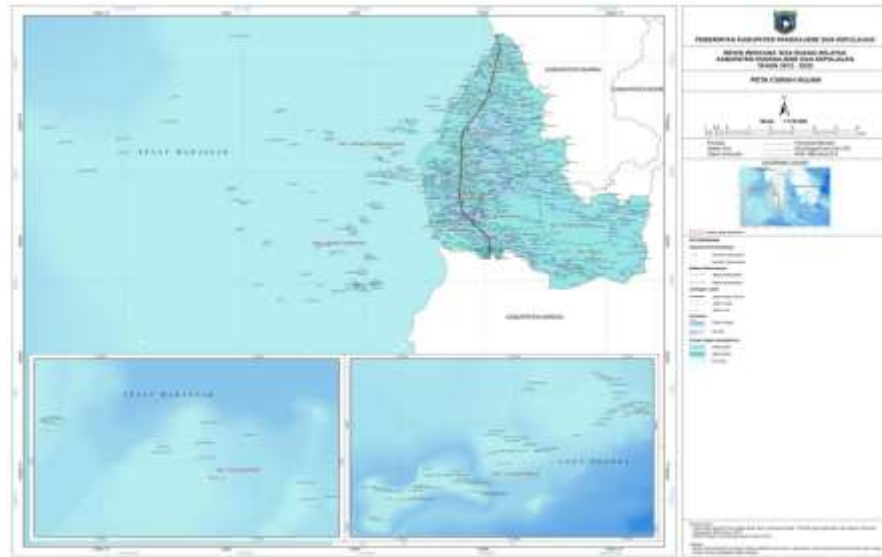
No.	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1.	Januari	23,2	27,6	31,8	64,0	84,0	99,0
2.	Pebruari	22,7	27,5	31,8	62,0	84,4	99,0
3.	Maret	23,7	28,3	32,6	57,0	81,3	98,0
4.	April	23,0	28,9	34,6	53,0	78,7	97,0
5.	Mei	23,0	29,0	33,6	55,0	79,9	99,0
6.	Juni	22,8	28,2	33,0	55,0	81,2	98,0
7.	Juli	21,6	28,9	33,3	51,0	75,5	98,0
8.	Agustus	21,4	29,3	33,8	43,0	69,7	96,0
9.	September	22,6	29,0	33,8	50,0	75,8	96,0

No.	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
10.	Oktober	23,2	28,3	33,0	59,0	81,4	98,0
11.	Nopember	23,4	28,1	32,2	61,0	81,2	98,0
12.	Desember	23,0	27,4	32,4	61,0	84,2	99,0

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024.

Gambar II.7.

Peta Curah Hujan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber : Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial BIG), Tahun 2021.

2.1.1.1.8. Tutupan Lahan

Secara garis besar tutupan lahan di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masih didominasi oleh tutupan lahan hutan rimba, persawahan maupun tambak. Tutupan lahan permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara garis besar terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan seperti di Kota Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat perkotaan kabupaten, ibukota-ibukota kecamatan. Pola tutupan lahan pada dasarnya merupakan gambaran sejauh mana aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial ekonominya.

Berdasarkan data hasil pengolahan citra satelit menggunakan GIS, menunjukkan bahwa jenis tutupan lahan hutan rimba mendominasi tutupan lahan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu seluas 31.626,290 Ha atau sekitar 35,520% dari total luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kemudian disusul tutupan lahan sawah seluas 17,585.17 Ha atau sekitar 19,750%. Sementara itu jenis tutupan lahan yang paling kecil yaitu jenis tutupan lahan yang tidak terdata (blank) dengan luas 9,230 Ha atau sekitar 0,010%. Berikut ini secara rinci diuraikan jenis tutupan lahan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.9.

Tutupan Lahan (Ha) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

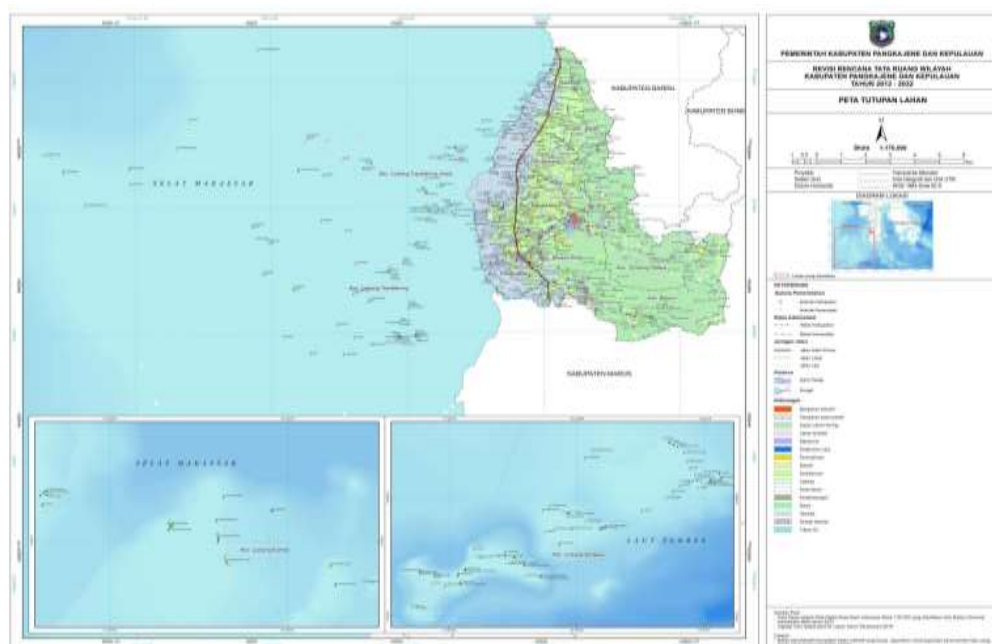
No.	Jenis Tutupan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Danau/Situ	Kec. Balocci	3,69
		Kec. Liukang Kalmas	38,75
		Kec. Liukang Tangaya	6,25
2.	Empang	Kec. Labakkang	0,32
		Kec. Liukang Tangaya	0,05
		Kec. Ma'rang	227,38
		Kec. Segeri	7,05
3.	Hutan Bakau/Mangrove	Kec. Bungoro	21,82
		Kec. Labakkang	49,93

No.	Jenis Tutupan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
		Kec. Liukang Kalmas	154,93
		Kec. Liukang Tangaya	1.827,89
		Kec. Liukang Tupabbiring	4,57
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	98,72
		Kec. Mandalle	35,69
		Kec. Ma'rang	17,12
		Kec. Pangkajene	19,52
		Kec. Segeri	23,34
4.	Hutan Rawa/Gambut	Kec. Liukang Tangaya	24,22
5.	Hutan Rimba	Kec. Balocci	11.017,03
		Kec. Bungoro	3.282,98
		Kec. Labakkang	179,74
		Kec. Liukang Kalmas	14,78
		Kec. Liukang Tangaya	320,81
		Kec. Mandalle	1.155,76
		Kec. Ma'rang	1.360,01
		Kec. Minasatene	287,40
		Kec. Segeri	1.942,81
		Kec. Tondong Tallasa	12.064,97
6.	Perkebunan/Kebun	Kec. Balocci	466,94
		Kec. Bungoro	205,01
		Kec. Labakkang	825,13
		Kec. Liukang Tangaya	1,352,70
		Kec. Liukang Tupabbiring	9,77
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	25,04
		Kec. Mandalle	673,09
		Kec. Ma'rang	2,184,70
		Kec. Minasatene	308,86
		Kec. Pangkajene	208,76
		Kec. Segeri	551,05
		Kec. Tondong Tallasa	26,56
7.	Permukiman	Kec. Balocci	130,35
		Kec. Bungoro	213,29
		Kec. Labakkang	303,02
		Kec. Liukang Kalmas	236,91
		Kec. Liukang Tangaya	227,63
		Kec. Liukang Tupabbiring	70,13
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	21,64
		Kec. Mandalle	53,85
		Kec. Ma'rang	172,32
		Kec. Minasatene	177,88
		Kec. Pangkajene	254,67
		Kec. Segeri	98,00
		Kec. Tondong Tallasa	31,67
8.	Rawa	Kec. Bungoro	26,43
		Kec. Liukang Tangaya	2,07
		Kec. Minasatene	26,44
9.	Sawah	Kec. Balocci	1.710,16
		Kec. Bungoro	2.480,87
		Kec. Labakkang	3.902,05
		Kec. Mandalle	349,79
		Kec. Ma'rang	1.719,96
		Kec. Minasatene	2.846,66
		Kec. Pangkajene	1.010,77
		Kec. Segeri	2.162,63
Kec. Tondong Tallasa	1.402,28		
10.	Sawah Tadah Hujan	Kec. Mandalle	1.141,97
11.	Semak Belukar	Kec. Balocci	23,97
		Kec. Bungoro	686,74
		Kec. Labakkang	1.365,03
		Kec. Liukang Kalmas	353,67
		Kec. Liukang Tangaya	412,53
		Kec. Liukang Tupabbiring	20,36
		Kec. Mandalle	129,28
		Kec. Ma'rang	2,85
		Kec. Minasatene	3.677,52
		Kec. Pangkajene	7,97
		Kec. Segeri	137,71
Kec. Tondong Tallasa	132,02		
12.	Sungai	Kec. Balocci	0,23
		Kec. Bungoro	93,87
		Kec. Labakkang	100,27
		Kec. Liukang Tangaya	0,60

No.	Jenis Tutupan Lahan	Lokasi	Luas (Ha)
		Kec. Mandalle	0,16
		Kec. Ma'rang	52,17
		Kec. Minasatene	97,88
		Kec. Pangkajene	201,23
		Kec. Segeri	65,94
		Kec. Tondong Tallasa	50,81
13.	Tambak	Kec. Bungoro	1.339,72
		Kec. Labakkang	3.507,50
		Kec. Liukang Tangaya	2,99
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	92,96
		Kec. Mandalle	951,99
		Kec. Ma'rang	3.478,77
		Kec. Minasatene	1.037,03
		Kec. Segeri	1.258,84
14.	Tanah Kosong/Gundul	Kec. Balocci	23,40
		Kec. Bungoro	672,73
		Kec. Labakkang	272,90
		Kec. Liukang Kalmas	904,16
		Kec. Liukang Tangaya	47,12
		Kec. Liukang Tupabbiring	30,90
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	6,41
		Kec. Mandalle	69,71
		Kec. Ma'rang	345,48
		Kec. Minasatene	141,61
		Kec. Pangkajene	160,21
		Kec. Segeri	110,53
		Kec. Tondong Tallasa	35,47
15.	Tegalan/Ladang	Kec. Balocci	15,11
		Kec. Liukang Kalmas	1.877,97
		Kec. Liukang Tangaya	593,96
		Kec. Liukang Tupabbiring	38,59
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara	162,36
		Kec. Mandalle	16,87
		Kec. Segeri	0,69
		Kec. Tondong Tallasa	186,94
16.	Blank	Kec. Liukang Kalmas	0,69
		Kec. Liukang Tangaya	8,54
	Jumlah		89.033,52

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

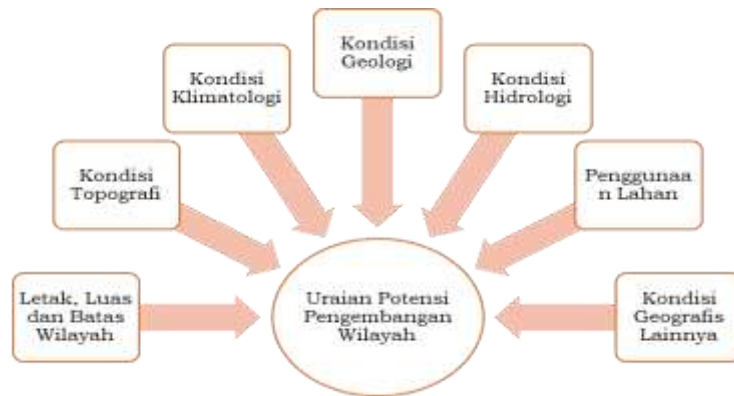
Gambar II.8.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber : Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Potensi-potensi tersebut dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, serta kondisi geografis lainnya. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pola ruang serta rencana pengembangan komoditas di setiap wilayah.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Potensi kawasan budidaya berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2036 adalah seluas 58.387,46 Ha atau sebesar 65,73% dari total luas wilayah kabupaten. Sebagian besar dari lahan budidaya tersebut merupakan lahan yang diperuntukkan untuk pertanian. Sebesar 32,07% lahan dialokasikan untuk pertanian. Selain itu, lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga didominasi oleh peruntukan perikanan yaitu sebesar 13,50% dari total wilayah. Luasnya alokasi lahan untuk pertanian dan perikanan tersebut merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mendorong perekonomian.

Tidak hanya dipengaruhi oleh luasan Pangkajene dan Kepulauan, topografi dan bentang alam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memperkaya variasi komoditas pertanian dan perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Masing-masing wilayah memiliki komoditas yang unik dan unggul sesuai dengan kondisi geografisnya. Komoditas unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini tidak hanya unggul di tingkat kabupaten saja melainkan juga di tingkat provinsi dan nasional. Bahkan untuk beberapa komoditas sudah mampu dipasarkan ke pasar internasional. Keunggulan tersebut dikarenakan jenisnya dan juga besarnya produksi yang dihasilkan oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Beberapa komoditas pertanian dan perikanan yang menjadi unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain padi, jagung, kacang tanah, kedelai, jeruk pamelon, kelapa, kakao, jambu mete, ikan bandeng, rumput laut, udang vaname, udang windu, garam dan produk turunannya.

Selain potensi pertanian dan perikanan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga memiliki potensi di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ialah potensi pertambangan dan potensi pariwisata. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki berbagai potensi energi sumber daya terbarukan dan juga berbagai galian tipe B dan tipe C. Berbicara mengenai sektor pariwisata, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi yang sangat banyak baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, maupun kawasan pertambangan. Identifikasi potensi pengembangan wilayah ini dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar dapat menjadi sektor penggerak perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.1.1.2.1. Pertanian

Potensi pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Masyarakat di wilayah ini sebagian besar adalah petani selain sebagai nelayan. Luasnya areal pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi potensi untuk ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Mengacu pada kondisi tersebut, dalam arahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 13.156,41 Ha. Areal lahan KP2B tersebut didominasi oleh areal pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Berbagai komoditi pertanian yang diusahakan oleh masyarakat seperti padi, jagung, kacang-kacangan, begitupula tanaman buah-buahan, seperti jeruk, ataupun ternak besar dan unggas.

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Pengembangan wilayah menyebabkan pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk dan secara signifikan meningkatkan kebutuhan lahan serta mengakibatkan tingkat konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. UU. No. 41 Th. 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) merupakan regulasi yang diharapkan mampu melindungi dan mengendalikan laju konversi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Kawasan pertanian ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai KP2B seluas 11.808,93 Ha. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Lebih jelasnya berikut ini rincian luas KP2B di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirinci tiap kecamatan.

Tabel II.10.
Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Balocci	654,78	5,54
2.	Bungoro	1.212,54	10,27
3.	Labakkang	3.312,59	28,05
4.	Mandalle	1.305,61	11,06
5.	Marang	1.175,22	9,95
6.	Minasa Tene	1.648,58	13,96
7.	Segeri	1.768,79	14,98
8.	Tondong Tallasa	730,81	6,19
	Jumlah	11.808,93	100,00

Sumber: Hasil Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

b. Tanaman Pangan

Tanaman pangan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh tanaman padi di areal persawahan yang sebagian telah menggunakan irigasi teknis, namun masih terdapat pula areal sawah non irigasi. Selain itu terdapat pula areal lahan kering untuk pemanfaatan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya. Untuk tanaman pangan didominasi oleh areal persawahan yang tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan khususnya wilayah daratan, dan bahkan terdapat pula areal persawahan di beberapa pulau terluar. Berikut ini data luas areal persawahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan jenis pengairan pada areal persawahan tersebut.

Tabel II.11.
Areal Persawahan Menurut Jenis Pengairan di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023

No.	Luas Areal Lahan Persawahan			
	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Luas (Ha)
1.	Liukang Tangaya	-	-	-
2.	Liukang Kalmas	-	-	-
3.	Liukang Tupabbiring	-	-	-
4.	Liukang Tupabbiring Utara	-	-	-
5.	Pangkajene	913,62	6,61	920,23
6.	Minasatene	1.652,97	476,95	2.129,43
7.	Balocci	751,85	557,35	1.309,19
8.	Tondong Tallasa	312,33	1.464,70	1.777,04
9.	Bungoro	881,07	1.171,68	2.052,75
10.	Labakkang	2.397,76	1.038,87	3.436,63
11.	Ma'rang	750,65	778,77	1.529,43
12.	Segeri	2.044,24	220,51	2.264,75
13.	Mandalle	995,54	448,05	1.529,43
	Total Luas	10.700,04	6.163,49	16.863,53

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2024

c. Tanaman Hortikultura

Potensi pengembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat besar, hal ini didukung oleh potensi lahan pengembangan yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Bungoro, dan beberapa kecamatan lainnya. Tanaman hortikultura yang diusahakan masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu hortikultura sayuran dan hortikultura buah-buahan. Hortikultura sayuran yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

adalah kangkung, dari 151 Ha mampu menghasilkan 1.526 kuintal pada tahun 2023. Berikut ini rincian luas areal panen dirinci tiap kecamatan.

Tabel II.12.
Luas Panen Tanaman Hortikultura (Komoditi Sayur) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Ha), Tahun 2023

No.	Kecamatan	Tanaman Hortikultura (Komoditi Sayur)								
		Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Rawit	Ketimun	Terung	Tomat	Kacang Panjang	Bayam	Kangkung
1.	Lk. Tangaya			2	-	1	-	1	-	3
2.	Lk. Kalmas			-	-	-	-	-	-	-
3.	Lk.Tupabbiring			-	-	-	-	-	-	-
4.	Lk.Tupabbiring Utara			-	-	-	-	-	-	-
5.	Pangkajene			4	4	4	4	6	10	8
6.	Minasatene			1	6	6	-	12	3	28
7.	Balocci	1	1	5	3	5	3	14	10	7
8.	Tondong Tallasa	2	-	3	3	2	3	2	6	7
9.	Bungoro		15	14	13	17	16	19	33	39
10.	Labakkang		-	10	4	4	3	10	14	17
11.	Ma'rang		3	4	-	1	3	10	7	17
12.	Segeri		5	7	5	9	9	12	12	13
13.	Mandalle		-	9	10	11	8	12	8	12
	Total Luas	3	24	58	47	59	48	97	102	151

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024.

Sementara itu jenis hortikultura buah-buahan yang dominan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah jeruk besar yang produksinya mencapai 193.726 kuintal di tahun 2023. Jenis komoditi buah-buahan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi jenis buah mangga, durian, jeruk besar, pisang, nanas, dan jeruk siam. Berikut ini rincian jumlah produksi buah-buahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.13.
Luas Panen Tanaman Hortikultura (Komoditi Buah) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (kuintal), Tahun 2023

No.	Kecamatan	Tanaman Hortikultura (Buah)							
		Mangga	Durian	Jeruk Siam	Pisang	Pepaya	Salak	Jeruk Besar	Sukun
1.	Liukang Tangaya	-	-	-	155	-	-	-	-
2.	Liukang Kalmas	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Liukang Tupabbiring	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Liukang Tupabbiring Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pangkajene	2.227	-	-	835	341	-	280	62
6.	Minasatene	845	-	-	1.835	110	-	225	-
7.	Balocci	1.400	58	-	10.480	136	-	770	2.620
8.	Tondong Tallasa	47	15	-	980	261	8	802	1.215
9.	Bungoro	3.263	38	-	177	147	-	135	621
10.	Labakkang	5.484	-	-	105	42	-	37.600	35
11.	Ma'rang	878	-	-	4.975	265	-	153.617	990
12.	Segeri	1.348	10	120	1.410	1.430	-	196	1.168
13.	Mandalle	6.560	72	10	6.000	36	5	101	3.025
	Total Luas	22.052	193	130	26.952	2.769	13	193.726	9.736

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024

d. Perkebunan

Subsektor perkebunan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan komoditi yang potensial dikembangkan. Beberapa jenis komoditi saat ini yang ada seperti kelapa, kakao, kopi, dan berbagai jenis komoditi perkebunan lainnya. Produksi hasil perkebunan jenis komoditi kelapa sebesar 857 ton, produksi kopi sebesar 26,79 ton dan produksi kakao sebesar 22,08 ton. Ketiga jenis komoditi tersebut merupakan hasil produksi perkebunan yang dominan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditi perkebunan yaitu Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Tondong Tallasa dan Kecamatan Balocci. Berikut ini luas areal perkebunan dan jenis komoditinya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.14.
Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha)
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha)		
		Kelapa	Kopi	Kakao
1.	Liukang Tangaya	2.367	-	-
2.	Liukang Kalmas	1.687	-	-
3.	Liukang Tupabbiring	46	-	-
4.	Liukang Tupabbiring Utara	21	-	-
5.	Pangkajene	39	-	-
6.	Minasatene	50	-	-
7.	Balocci	23	7	-
8.	Tondong Tallasa	60	101	12
9.	Bungoro	137	-	4
10.	Labakkang	212	-	-
11.	Ma'rang	181	3	4
12.	Segeri	57	2	20
13.	Mandalle	63	1	25
Total		4.943	14	65

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024

e. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu usaha ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Potensi pengembangan peternakan di wilayah ini sangat dimungkinkan mengingat areal wilayahnya yang cukup luas ditunjang dengan kondisi bentang alam yang cocok untuk pengembangan budidaya peternakan, seperti di wilayah Kecamatan Kecamatan Labakkang, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Balocci, dan beberapa kecamatan lainnya.

Jenis populasi ternak yang diusahakan oleh masyarakat secara individual, seperti ternak sapi, kerbau, kuda, maupun kambing. Jenis populasi ternak besar yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat yaitu sapi dengan jumlah populasi sebanyak 28.246 ekor, kemudian populasi kambing sebanyak 4.088 ekor. Berikut ini rincian jumlah dan jenis populasi ternak besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.15.

Jenis Populasi Ternak Besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Populasi Ternak Besar			
		Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
1.	Liukang Tangaya	-	-	35	234
2.	Liukang Kalmas	-	-	-	117
3.	Liukang Tupabbiring	-	-	-	219
4.	Liukang Tupabbiring Utara	-	-	-	194
5.	Pangkajene	605	48	1	225
6.	Minasatene	2810	162	36	562
7.	Balocci	3612	-	15	155
8.	Tondong Tallasa	4002	23	194	234
9.	Bungoro	3824	215	8	407
10.	Labakkang	4106	259	25	610
11.	Ma'rang	3546	12	2	366
12.	Segeri	3138	55	7	378
13.	Mandalle	2603	5	-	387
Total		28.246	779	323	4088

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024

Populasi unggas yang diusahakan masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan itik manila. Populasi ternak terbanyak yaitu ayam pedaging sebanyak 941.462 ekor kemudian ayam kampung sebanyak 757.500 ekor dan itik sebanyak 589.994 ekor. Berikut ini rincian jumlah ternak unggas dan persebarannya di setiap kecamatan.

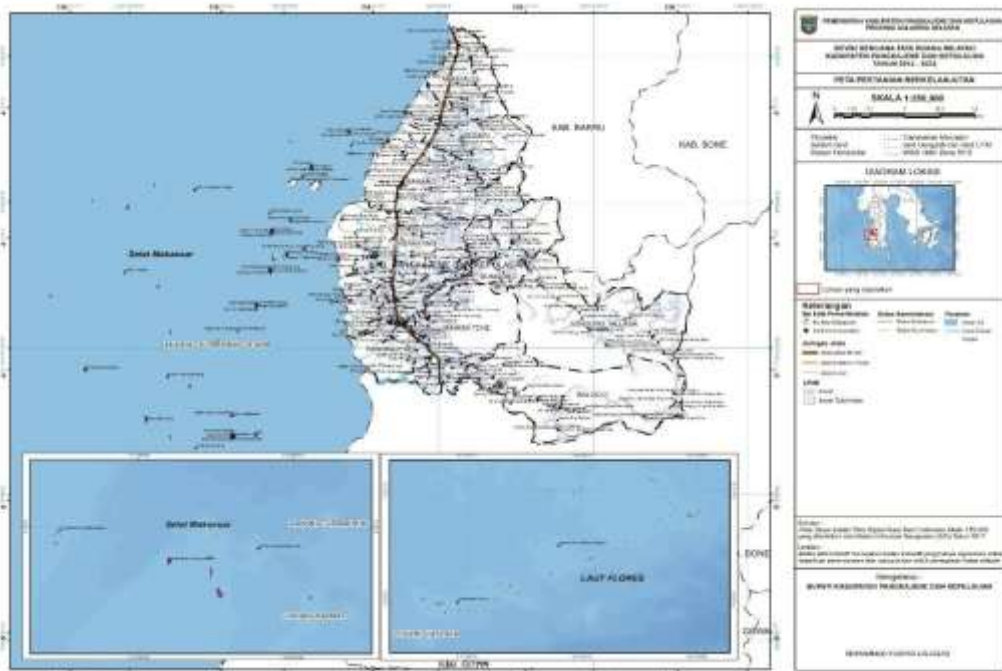
Tabel II.16.

Jenis Populasi Unggas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Populasi Ternak Unggas				
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Itik Manila
1.	Liukang Tangaya	23.482	-	-	7.965	270
2.	Liukang Kalmas	14.052	-	-	10.089	370
3.	Liukang Tupabbiring	13.446	-	-	18.585	630
4.	Lk. Tupabbiring Utara	10.567	-	-	16.815	320
5.	Pangkajene	33.708	2.598	26.078	26.078	889
6.	Minasatene	92.036	9.588	100.736	71.330	2.428
7.	Balocci	74.613	1.299	30.315	58.586	2.004
8.	Tondong Tallasa	95.255	762	20.524	77.702	2.652
9.	Bungoro	80.673	11.514	131.616	62.126	2.129
10.	Labakkang	110.216	53.762	472.144	78.823	2.768
11.	Ma'rang	62.686	4.704	54.511	48.734	1.669
12.	Segeri	88.817	4.167	85.673	68.734	2.343
13.	Mandalle	57.949	1.210	19.865	44.427	1.514
Total		757.500	89.604	941.462	589.994	19.986

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024

Gambar II.9.
Peta Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber : Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021

2.1.1.2.2. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal dengan daerah tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan. Memiliki potensi laut yang cukup luas, dengan luasnya potensi laut tersebut menjadikan sektor perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu sektor unggulan wilayah ini. Luasnya areal perairan dan laut serta banyaknya penduduk yang bergerak di sektor perikanan menjadikan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah sentra perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Perikanan Tangkap

Lokasi untuk kegiatan perikanan tangkap adalah wilayah laut daerah yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu dimana banyak digunakan oleh nelayan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti bagang, rumpon dan *purse seine* serta penangkapan dengan jenis-jenis alat tangkap lainnya.

Masalah yang umum dihadapi nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bahwa dalam keberadaan daerah penangkapan ikan yang selalu bersifat dinamis, berubah/berpindah mengikuti pergerakan ikan. Secara alami, ikan memilih habitat yang sesuai, sedangkan habitat tersebut sangat dipengaruhi kondisi oseonografi perairan. Dengan demikian daerah potensial penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh faktor oseonografi perairan. Ikan cenderung berkumpul pada lingkungan tertentu, seperti adanya peristiwa *upwelling*, dinamika arus pusaran (*eddy*), dan *front gradien* pertemuan dua massa air yang berbeda baik itu salinitas, suhu atau *klorofil-a*.

Nilai kesesuaian yang dipakai dalam melakukan wilayah penangkapan antara lain suhu, salinitas dan *klorofil-a*. Di perairan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Selat Makassar secara umum keseluruhan variabel tersebut berada pada kisaran yang sesuai yaitu suhu 27-30°C, salinitas 28-34°C serta klorofil-a rata-rata 0,2-0,6 (dimana tingkat klorofil yang baik untuk perikanan tangkap 0,3 mg/m³ (Zainuddin 2006). Kesesuaian lahan untuk kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencakup keseluruhan wilayah laut yang meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tangaya. Wilayah dengan luasan yang paling besar untuk penangkapan adalah Kecamatan Liukang Tangaya dengan luas 599.837,38 Ha, dan Kecamatan Liukang Kalmas dengan luas 267.888,25 Ha, kemudian Kecamatan Liukang Tupabiring dengan luas 94.883,23 Ha dan Kecamatan Liukang Tupabiring Utara dengan luas 105.466,74 Ha.

1) Potensi WPPNRI

Berdasarkan SK. Kemen-KP 47 Th. 2016, tentang Estimasi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berada di Selat Makassar berada dalam WPPNRI 713 memiliki potensi WPPNRI.

2) Komoditas Tangkapan dan Unggulan

Komoditas tangkapan unggulan di wilayah perikanan tangkap Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki 10 (sepuluh) jenis ikan unggulan, yaitu ikan rajungan, ikan kerapu karang, ikan teri, ikan kakap merah, cumi-cumi, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tengiri, kepiting bakau, dan ikan layang.

3) Jumlah dan Lokasi Penangkapan

Kondisi jumlah dan lokasi penangkapan ikan di wilayah perairan untuk perikanan tangkap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel II.17.
Lokasi dan Potensi Luas Area Penangkapan Ikan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Potensi Perikanan Tangkap	
	Area Penangkapan Ikan	Luas (Ha)
1.	Kecamatan Liukang Kalmas	267.888,25
2.	Kecamatan Liukang Tangaya	599.837,38
3.	Kecamatan Liukang Tupabbiring	94.883,23
4.	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	105.466,74
5.	Kecamatan Bungoro	345,67
6.	Kecamatan Labakkang	937,26
7.	Kecamatan Ma'rang	1.635,02
8.	Kecamatan Pangkajene	1.466,34
9.	Kecamatan Mandalle	1.222,84
10.	Kecamatan Segeri	773,34
Jumlah		1.674.456,07

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

b. Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki potensi lahan perikanan yang cukup luas, baik budidaya air tawar, air payau maupun air laut. Begitupula

komoditas perikanan unggulan, serta lokasi persebarannya meliputi seluruh wilayah.

1) Potensi Lahan Perikanan Budidaya (Tawar, Payau dan Laut)

Kegiatan budidaya air payau dapat dilihat hampir di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dari mulai Kecamatan Pangkajene hingga Kecamatan Mandalle. Kegiatan budidaya yang dikembangkan adalah jenis air payau, seperti budidaya udang, ikan bandeng dan kepiting. Jika dilihat dari segi kapasitas usaha yang ada, maka dapat digolongkan sebagai usaha golongan skala kecil dan menengah dengan modal yang terbatas. Berikut ini potensi perikanan budidaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.18.
Data Potensi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No	Potensi Perikanan Budidaya			
	Jenis Budidaya	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Peluang Pengembangan (Ha)
1.	Air Payau	13.494,80	10.755,47	2.739,33
2.	Air Tawar	251,50	27,70	223,80
3.	Air Laut	7.900,00	1.421,80	6.478,20
	Jumlah	21.646,30	12.204,97	9.441,33

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan data pemanfaatan, kegiatan budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu tambak, kolam dan budidaya laut, dengan total luasan pemanfaatan untuk ketiganya seluas 12.204,97 Ha. Luasan ini terdiri dari luas areal budidaya air payau 10.755,47, luas areal budidaya air tawar 27,70 Ha dan budidaya air laut seluas 1.421,80 Ha. Persentase pemanfaatan lahan untuk areal tambak berkisar 88,10%, 11,60% untuk budidaya laut dan 0,22% untuk kolam. Berikut ini rincian tingkat pemanfaatan lahan budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.19.
Tingkat Pemanfaatan Lahan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Budidaya		
		Tambak (Ha)	Kolam (Ha)	Budidaya Laut (Ha)
1.	Liukang Tangaya	-	-	655,60
2.	Liukang Kalmas	-	-	713,70
3.	Liukang Tupabbiring	-	-	-
4.	Liukang Tupabbiring Utara	135,80	-	10,00
5.	Pangkajene	2.276,40	-	3,70
6.	Minasatene	674,72	-	-
7.	Balocci	-	3,70	-
8.	Tondong Tallasa	-	-	-
9.	Bungoro	1.086,77	-	2,50
10.	Labakkang	2.569,63	-	5,70
11.	Ma'rang	2.457,39	12,00	7,50
12.	Segeri	1.074,24	10,00	3,10

No.	Kecamatan	Jenis Budidaya		
		Tambak (Ha)	Kolam (Ha)	Budidaya Laut (Ha)
13.	Mandalle	480,52	2,00	20,00
Jumlah		10.755,47	27,70	1.421,80

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2) Komoditas Unggulan (Tawar, Payau dan Laut)

Komoditas unggulan perikanan budidaya untuk 3 (tiga) jenis perikanan budidaya, yaitu budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air laut di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan potensi produksi sebesar 606,750 ton dengan rincian untuk budidaya air tawar sebesar 450 ton, budidaya air payau sebesar 45.800 ton, dan budidaya air laut sebesar 560.500 ton. Berikut ini rincian jenis komoditi unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.20.
Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Jenis Ikan Budidaya		
	Tawar	Payau	Laut
1.	Lele	Bandeng	Rumput Laut <i>Cottoni</i>
2.	Mas	Windu	Lobster
3.	-	Vaname	Kerapu
4.	-	Nila	-
5.	-	Rumput Laut <i>Gracilliria</i>	-

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sementara itu jenis komoditi yang berpotensi dikembangkan untuk usaha budidaya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti ikan hias, kerang mutiara, dan kuda laut.

Tabel II.21.
Komoditi Perikanan Budidaya Potensial
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Jenis Ikan Budidaya		
	Jenis Komoditi	Lokasi	Nama Pulau
1.	Ikan Hias	Kec. Liukang Tupabbiring	- Balang Lompo - Sarappo Lompo - Pajenekang
2.	Kerang Mutiara	Kec. Liukang Tupabbiring	Bontosua
3.	Kuda Laut	Kec. Liukang Tupabbiring	Badi

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

3) Jumlah dan Lokasi Perikanan Budidaya

Persebaran lokasi perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi seluruh wilayah kecamatan. Namun dari 3 (tiga) jenis perikanan budidaya yang dimaksud yaitu budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air laut, tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Berikut ini rincian jumlah dan persebaran lokasinya.

Tabel II.22.
Persebaran Lokasi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Perikanan Budidaya					
		Tawar		Payau		Laut	
		Jml Lokasi	Luas (Ha)	Jml Lokasi	Luas (Ha)	Jml Lokasi	Luas (Ha)
1.	Lk. Tangaya	-	-	-	-	5	857,77
2.	Lk. Kalmas	-	-	-	-	4	1.288,35
3.	Lk. Tupabbiring	-	-	-	-	7	21,00
4.	Lk. Tupabbiring Utara	-	-	2	135,80	3	136,00
5.	Pangkajene	1	0,01	6	2.283,79	1	6,20
6.	Minasatene	3	0,07	4	674,72	-	-
7.	Balocci	2	7,10	-	-	-	-
8.	Tondong Tallasa	3	0,31	-	-	-	-
9.	Bungoro	1	0,01	4	1.042,04	-	-
10.	Labakkang	-	-	9	2.594,63	2	163,00
11.	Ma'rang	4	35,39	8	2.480,69	4	589,68
12.	Segeri	4	1,23	4	1.295,44	3	83,00
13.	Mandalle	2	0,34	6	508,34	3	285,00
Jumlah		20	44,46	43	11.015,45	32	3.430,00

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

c. Tambak Garam

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah penghasil garam di Sulawesi Selatan. Produksi garam di daerah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 2 (dua) wilayah yang menjadi sentra garam, yakni Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang. Potensi lahan tambak garam di kedua wilayah tersebut mencapai sekitar 844 Ha. Potensi lahan tambak garam di Kecamatan Bungoro adalah Desa Bulu Cindea, sedangkan di Kecamatan Labakkang berada pada Desa Bontomanai, Kelurahan Pundata Baji dan Kelurahan Borimasunggu.

Tingginya produksi garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya di Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang dipengaruhi oleh kadar salinitas dan parameter kualitas air lainnya yang mendukung pengembangan produksi garam. Lebih jelasnya berikut ini tabel rincian kadar salinitas dan parameter lainnya sebagai indikasi potensi produksi dan areal tambak garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.23.
Kadar Salinitas dan Parameter Lainnya

No.	Parameter	Nilai
1.	Salinitas (permil)	>30
2.	pH	7-8
3.	Viscositas	>17
4.	Evaporasi	>22
5.	Ketinggian Air (cm)	5-10
6.	Amoniak (mg/l)	0
7.	Asam belerang (mg/l)	0

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Potensi produksi garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 90-100 ton/Ha, sehingga dengan potensi lahan sebesar 844 Ha, maka potensi produksi garam yang dapat dihasilkan pertahun adalah 75.960-84.400 ton/Ha.

d. Prasarana Perikanan

Prasarana perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini cukup banyak tersedia, seperti pasar ikan, pabrik es, tempat pelelangan ikan, tempat pembenihan ikan, dan berbagai prasarana perikanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai prasarana perikanan ini tentunya dapat meningkatkan produksi dan pemasaran hasil perikanan masyarakat di wilayah ini. Berikut ini tabel rincian jumlah dan jenis prasarana perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.24.
Jenis Prasarana Perikanan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Jenis, Lokasi, dan Jumlah Prasarana Perikanan		
	Jenis Prasarana Perikanan	Lokasi	Jumlah
1.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)		
	a. SPBN Pundata Baji	Kec. Labakkang	1 Unit
	b. SPBN Tekolabua, dan SPBN Mappasaile	Kec. Pangkajene	2 Unit
	c. SPBN Bawasalo	Kec. Segeri	1 Unit
2.	Pasar Ikan		
	a. Pasar Kalibone, Pasar Tanete, dan Pasar Kabba	Kec. Minasatene	3 Unit
	b. Pasar Balleanging, Pasar Balocci, Pasar Majenang, dan Pasar Kassi	Kec. Balocci	4 Unit
	c. Pasar Palampang	Kec. Pangkajene	1 Unit
	d. Pasar Tabo-Tabo, Pasar Sapanang, Pasar Taraweang	Kec. Bungoro	
	e. Pasar Erasa, dan Pasar Bontoa	Kec. Labakkang	2 Unit
	f. Pasar Bonto-Bonto	Kec. Ma'rang	1 Unit
	g. Pasar Segeri	Kec. Segeri	1 Unit
	h. Pasar Mandalle	Kec. Mandalle	1 Unit
i. Pasar Malaka	Kec. Tondong Tallasa	1 Unit	
3.	<i>Cold Storage</i>	Kec. Liukang Tupabiring Utara (Pulau Sabutung)	1 Unit
4.	Pabrik Es		
	a. Pabrik Es Palampang	Kec. Pangkajene	1 Unit
	b. Pabrik Es Maccini Baji	Kec. Labakkang	1 Unit
	c. Pabrik Es Kalibone	Kec. Minasatene	1 Unit
	d. <i>Ice Flake Machine (IFM)</i>	Kec. Pangkajene	1 Unit
5.	Gudang Pengolahan	Kec. Labakkang	1 Unit
6.	Tempat Pelelangan Ikan		
	a. TPI Maccini Baji	Kec. Labakkang	1 Unit
	b. TPI Kalibone	Kec. Minasatene	1 Unit
	c. TPI Palampang	Kec. Pangkajene	1 Unit
7.	Pos Kesehatan Ikan Terpadu	Kec. Labakkang	1 Unit
8.	Pembenihan Ikan		
	a. Balai Benih Ikan Air Tawar	Kec. Balocci	1 Unit
	b. Pembenihan/ <i>Hatchery</i> Ikan	Kec. Liukang Tupabiring Utara (Pulau Sabutung)	1 Unit
9.	Gudang Rumput Laut	Pulau Salemo, Kec. Liukang Tupabbiring Utara	1 Unit
		Pulau Sabalana Kec. Liukang Tangaya	1 Unit
		Kel. Pundata Baji, Kec. Labakkang	1 Unit

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.2.3. Pariwisata

Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas, berupa perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahannya, baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.

Perkembangan suatu kawasan wisata tergantung pada apa yang dimiliki oleh kawasan tersebut untuk ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peranan para pengelola kawasan wisata. Kesuksesan dari suatu kawasan wisata sangat tergantung atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*), serta beberapa faktor pendukung lainnya. Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bagian dari wilayah darat dan kepulauan, menyimpan berbagai potensi dan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Berdasarkan SK. Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 407 Th. 2009, ditetapkan sebanyak 61 (enam puluh satu) lokasi obyek wisata. Penetapan lokasi obyek wisata ini mengacu pada kondisi eksisting obyek wisata yang dikelola saat ini serta potensi pengembangan di masa mendatang. Berikut ini rincian obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.25.
Potensi Pariwisata di Wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2023

No.	Potensi Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata
1.	Wisata Bahari	
	a. Pulau Cambang-Cambang	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	b. Pulau Saugi	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	c. Pulau Samatellu Pedda	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	d. Pulau Bana-Banawang	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	e. Pulau Reang-Reang	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	f. Pulau Salemo	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	g. Pulau Sabutung	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	h. Pulau Kapoposang	Kec. Liukang Tupabbiring
	i. Pulau Saranti	Kec. Liukang Tupabbiring
	j. Pulau Pammanggangan	Kec. Liukang Tupabbiring
	k. Pulau Langkadea	Kec. Liukang Tupabbiring
	l. Pulau Badi	Kec. Liukang Tupabbiring
	m. Pulau Pajenekang	Kec. Liukang Tupabbiring
	n. Pulau Cangke	Kec. Liukang Tupabbiring
	o. Pulau Tambakulu	Kec. Liukang Tupabbiring
	p. Pulau Podang-Podang	Kec. Liukang Tupabbiring
q. Pulau Kulambing	Kec. Liukang Tupabbiring	
r. Pulau Pannambungan	Kec. Liukang Tupabbiring	
s. Pulau Bonto Sua	Kec. Liukang Tupabbiring	
2.	Wisata Sungai	
	a. Sungai Pangkajene	Kec. Pangkajene
	b. Sungai Kalibone	Kec. Minasatene
3.	Wisata Agro Boledong	
	a. Jeruk Padang Lampe	Kec. Ma'rang
	b. Ekowisata Tana Rajae (Bandeng, Udang)	Kec. Labakkang

No.	Potensi Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata
4.	Wisata Budaya	
	a. Arajang Bissu	Kec. Segeri
	b. Rumah Adat	Kec. Labakkang
5.	Wisata Religi	
	a. Situs Makam Somba Labakkang	Kec. Labakkang
	b. Situs Makam Andi Mauraga	Kec. Pangkajene
	c. Makam Arung Sabila	Kec. Minasatene
	d. Makam Andi Maruddani	Kec. Labakkang
	e. Makam Raja Siang	Kec. Bungoro
	f. Makam Puang Awalli dan Meriam	Kec. Liukang Tupabbiring Utara
	g. Makam Lipang Marasende	Kec. Liukang Kalmas
6.	Wisata Alam	
	a. Kalibbong Aloa	Kec. Minasatene
	b. Dewi Lamsang	Kec. Minasatene
	c. Leang Lonrong	Kec. Minasatene
	d. Goa/Leang Bulu Sipong	Kec. Minasatene
	e. Desa Wisata Berkasi	Kec. Bungoro
	f. Taman Wisata Ciddokang	Kec. Bungoro
	g. Kawasan Wisata Alam Mattampa	Kec. Bungoro
	h. Desa Wisata Tana Rajae	Kec. Labakkang
	i. Rest Area Wisata Limbangan	Kec. Ma'rang
	j. Pungkalawaki Pitu Sunggu	Kec. Ma'rang
	k. Bukit Teletubies Bulu Pao	Kec. Ma'rang
	l. Bulu Sorongan	Kec. Segeri
	m. Amputtang	Kec. Segeri
	n. Baruttunga	Kec. Tondong Tallasa
	o. Ere Tallasa	Kec. Tondong Tallasa
	p. Bendungan Tagari	Kec. Tondong Tallasa
	q. Air Terjun Golae	Kec. Tondong Tallasa
	r. Padang PA'bo	Kec. Tondong Tallasa
	s. Desa Wisata Tompobulu	Kec. Balocci
	t. Bulusaraung	Kec. Balocci
	u. Air Terjun Tombolo	Kec. Balocci
	v. Sumpang Bitu	Kec. Balocci
	w. Taman Batu	Kec. Balocci
	x. Suangga	Kec. Balocci
	y. Salo Mettie Cambang Cui)	Kec. Balocci
z. Galaggara	Kec. Balocci	
7.	Wisata Kuliner	
	a. Palampang	Kec. Pangkajene
	b. Bambu Runcing	Kec. Pangkajene
	c. Gasebo	Kec. Pangkajene

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.2.4. Pertambangan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertambangan, seperti marmer, pasir/kuarsa, diorit, basal, trakit, sirtu, *feldspar*, kaolin, lempung, batu gamping, batu sabak dan *trass prolipit*, serta berbagai jenis potensi tambang lainnya. Jenis tambang untuk bahan baku semen dan marmer merupakan jenis tambang yang sangat besar potensinya dan saat ini sudah dikelola, begitupula jenis tambang lainnya seperti pasir, sirtu, maupun batu gamping. Lebih jelasnya berikut ini rincian WUP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

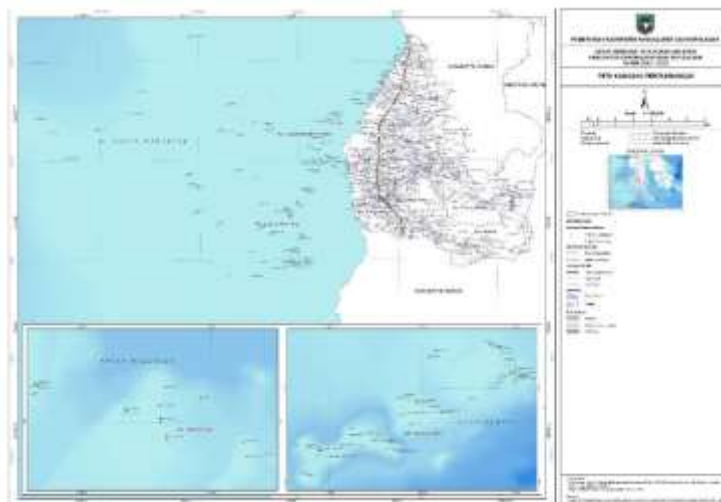
Tabel II.26.
WUP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023

No	KECAMATAN	WILAYAH PERTAMBANGAN YANG DITETAPKAN					Total Luas
		WPN	WUP Batubara	WUP Bukan Logam & Batuan	WUP Logam	WUP Radioaktif	
1	Balocci	-	423,59	3141,41	-	833,26	4398,26
2	Bungoro	-	2425,57	6441,10	156,45	-	9023,11
3	Labakkang	-	-	10505,88	-	-	10505,88
4	Liukang Kalmas	-	-	2,25	-	-	2,25
5	Liukang Tangaya	-	-	-	-	-	0,00
6	Lk. Tupabbiring	-	-	6,07	-	-	6,07
7	Lk. Tupabbiring Utara	-	-	222,52	-	-	222,52
8	Mandalle	-	-	547,51	3544,91	485,75	4578,17
9	Marang	-	1096,80	7986,53	477,43	-	9560,77
10	Minasa Tene	-	-	4969,96	40,54	-	5010,49
11	Pangkajene	-	-	4078,60	-	-	4078,60
12	Segeri	-	31,43	2678,95	3647,04	1,17	6358,58
13	Tondong Tallasa	41,95	3625,27	2532,53	2345,60	475,77	9021,12

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sul-Sel, Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa potensi kawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh potensi WUP Batubara yang tersebar di wilayah Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 3.625,27 Ha. Sementara itu WUP Bukan Logam dan Batuan seluas 2.532,53 Ha. Saat ini terdapat jenis tambang yang telah dieksploitasi yaitu jenis tambang bukan logam untuk bahan baku semen yang dikelola oleh PT. Semen Indonesia (Semen Tonasa), dan tambang marmer yang dikelola oleh beberapa perusahaan swasta.

Gambar II.10.
Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021

2.1.1.2.5. Kehutanan

Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, kawasan konservasi dan area penggunaan lain. Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan berdasarkan SK. Kemenhut. No. 434 Th. 2009, menunjukkan bahwa terjadi perubahan luas kawasan hutan, begitupula nomenklatur perubahan jenis kawasan hutan. Berdasarkan SK. Kemenhut. No. 434 Th. 2009, luas kawasan hutan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 104.227.464 Ha.

Sementara itu berdasarkan SK. KemenLHK No. 362 Th. 2019, luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 89.001,140 Ha. Berikut ini rincian peruntukan kawasan hutan dan luasannya berdasarkan SK. KemenLHK No. 362 Th. 2019, di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.27.
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kawasan Hutan					Total Luas (Ha)
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Konservasi	Area Penggunaan Lainnya	
1.	Balocci	1.081,899	247,327	-	7.636,887	4.425,550	13.391.663
2.	Bungoro	1.994,737	83,996	123,174	-	6.821,550	9.023.457
3.	Labakkang	-	-	64,814	-	1.0441,060	10.505.874
4.	Lk. Kalmas	-	-	-	-	3.581,860	21.688.160
5.	Lk. Tangaya	-	-	-	-	4.795,260	4.795.260
6.	Lk. Tupabbiring	-	-	-	-	174,310	174.310
7.	Lk. Tupabbiring Utara	-	-	-	-	407,130	407.130
8.	Mandalle	1.339,236	-	-	-	3.238,930	4.578.166
9.	Ma'rang	776,291	31,773	365,214	-	8.387,520	9.560.798
10.	Minasatene	-	972,000	-	2.880,068	4.749,210	5.721.210
11.	Pangkajene	-	-	-	-	4.093,150	4.093.150
12.	Segeri	1.005,880	-	177,315	-	5.173,090	6.356.285
13.	Tondong Tallasa	1.736,497	1.426,306	1878,024	3.732,524	5.158,650	13.932.001
Total Luas		7.934,540	2.761,402	2.608,541	14.249,479	61.872,420	104.227.464

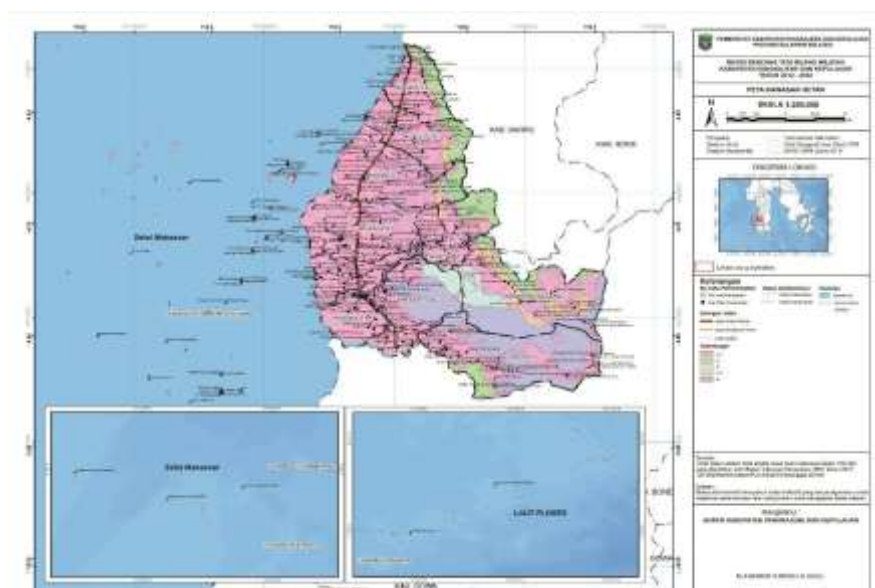
Sumber: Surat Keputusan Menteri LHK No. 362 Th. 2019

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa kawasan hutan dengan fungsi areal penggunaan lainnya (APL) merupakan areal hutan terluas di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 61.872,42 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Sementara itu kawasan hutan produksi terbatas.

Hanya sebagian kecil di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu seluas 2.608,541 Ha terdapat di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, dan Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Untuk kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No. 362 Th. 2019, seluas 7.934,540 Ha. Hutan lindung ini tersebar di 6 (enam) kecamatan, meliputi Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Gambar II.11.
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2023



Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021

2.1.1.3. Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Lingkungan merupakan tempat di mana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

2.1.3.3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Keterpeliharaan kualitas lingkungan dapat dianalisa melalui peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Kondisi ini dapat diukur melalui variabel Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang diukur berdasarkan 3 indikator komposit yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk menghitung IKLH yaitu:

- Indikator Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform.
- Indikator Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂.
- Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan (Hutan Primer dan Hutan Sekunder).

Kategori interval Nilai IKLH yang digunakan untuk menilai kualitas atau predikat lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri LHK, sebagai berikut:

Tabel II.28.
Predikat dan Nilai Kisaran IKLH

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 27 Tahun 2021

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Untuk mengetahui kualitas air sungai dan air permukaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan pengujian terhadap kualitas air sungai Pangkajene, Sungai Bantimala, dan Sungai Sengerang. Parameter yang diuji Sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Hasil Uji dan Persyaratan Kualitas Air, meliputi TSS, Ph, TDS, DHL, Kekkeruhan berada di bawah nilai ambang batas yang ditentukan.

Dalam perhitungan Indeks kualitas air di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan mengacu kepada hasil uji laboratorium tersebut. Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dimana pedoman ini juga mengatur tentang tata cara perhitungan Indeks Pencemaran Air.

Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran (IP) ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukkan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. Indeks Pencemaran (IP) mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna. Jika L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Peruntukan Air (j), dan C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi pengambilan cuplikan dari suatu alur sungai, maka PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukkan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} .

Masalah terkait kualitas air sungai ini tidak hanya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan saja melainkan juga memerlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait baik dalam level kabupaten maupun koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel II.29.
 Status Mutu Air Sungai Pangkajene, Sungai Bantimala dan
 Sungai Senggerang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 Tahun 2023

No	Sungai	Status Mutu
1	S. Pangkajene Hilir	Cemar Ringan
2	S. Pangkajene Tengah	Cemar Ringan
3	S. Pangkajene Hulu	Memenuhi Baku Mutu
4	S. Bantimala Hilir	Memenuhi Baku Mutu
5	S. Bantimala Tengah	Memenuhi Baku Mutu
6	S. Bantimala Hulu	Memenuhi Baku Mutu
7	S. Senggerang Hilir	Memenuhi Baku Mutu
8	S. Senggerang Hulu	Memenuhi Baku Mutu

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Tabel II.30.
 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2023

Indikator	Tahun							2023
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks Kualias Air (IKA)	45,71	35	56,57	64,29	59,25	56,67	61,67	76,13

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Berdasarkan Pengukuran kualitas air yang dilakukan pada tiga sungai meliputi Sungai Pangkajene, Sungai Bantimala dan Sungai Senggerang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 menunjukkan air sungai tersebut pada masing tiga titik pengukuran masih memenuhi baku mutu, kecuali pada daerah hilir dan tengah Sungai Pangkajene mengalami pencemaran ringan.

Berdasarkan data status mutu air tersebut diperoleh Indeks Kualitas Air sebesar 76,13 di tahun 2023. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa Indeks Kualitas Air Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kategori Sedang.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dijelaskan udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada didalam wilayah Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara, dimana data hasil pengukuran tersebut sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk mengetahui tingkat pencemaran atau untuk menilai keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang sedang dilaksanakan.

Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi atau komponen lain yang ada di udara bebas. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi atau komponen yang ada dan atau ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam udara ambien.

Kualitas udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri, khususnya industri besar. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran bahan bakar fosil. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa SO₂, NO₂, dan CO.

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dengan metode Passive Sampler. Jumlah lokasi yang diamati sebanyak 8 titik dengan sebanyak 2 kali pemantauan yaitu pada Bulan April dan Oktober. Lokasi pemantauan terdiri dari Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat), Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya), Pemukiman padat penduduk (urban background), dan Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi). Parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (Sulfur dioksida, SO₂) dan senyawa Nitrogen dioksida (NO₂).

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya pada periode 2016-2023 menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2016 sebesar 89,67 kemudian menurun drastis selama 4 tahun selanjutnya hingga pada tahun 2020 sebesar 78,53. Kemudian angka kualitas udara pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 81,84 dan 82,54 dengan peningkatan sebesar 0,7 poin. Hal ini menunjukkan kondisi kualitas udara tetap stabil dengan kategori baik. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 76,31. Penurunan ini menunjukkan bahwa kualitas udara kurang baik dibandingkan 2 tahun sebelumnya dengan mengarah kepada kategori sedang.

Tabel II.31.

Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2023

Indikator	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualias Udara (IKU)	89,6	87,45	85,3	85,97	78,53	81,84	82,54	76,31

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) merupakan penyempurnaan dari indeks Tutupan Lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indicator tutupan lahan sebagai satu-satunya indicator yang mewakili isu hijau. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999. Komponen tutupan lahan meliputi: Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder,

hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, Belukar dan belukar rawa dalam Kawasan hutan (SKBH), Belukar dan belukar rawa dalam Kawasan lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng, Ruang terbuka Hijau yang berupa hutan kota atau taman kota, dan Taman Keanekaragaman hayati.

Dalam perhitungan indeks kualitas tutupan lahan, luas tutupan hutan merupakan salah satu komponen yang dari luas tutupan lahan selain komponen hijau lainnya. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem yang umumnya berfungsi sebagai penjaga air, mencegah terjadinya erosi dan tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah. Berdasarkan klasifikasinya, hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mengalami gangguan, sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi alami setelah mengalami gangguan seperti perkebunan dan pertanian. Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dihitung dengan menggunakan data luas hutan hasil analisis GIS. Dengan mempertimbangkan jenis tutupan tutupan belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, maka diperoleh indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Berikut Tabel serta Grafik Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pangkep tahun 2016-2023 sebagai berikut:

Tabel II.32.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualias Tutupan Lahan (IKTL)	60,47	55,25	61,09	66,15	66,26	65,53	67,69	63,72

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kualitas air, udara dan tutupan hutan, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 sebesar 60.47 dengan kategori Cukup Baik. Namun pada tahun 2017 nilai IKLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan disemua komponen IKLH baik nilai kualitas air, udara hingga tutupan lahan menjadi 55.25 dengan kategori Kurang Baik. Nilai IKLH ini kembali meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sebesar 73,49 yang meningkat dari Tahun 2022 sebesar 5,8 poin dari 67,69 dengan kategori Cukup Baik. Peningkatan nilai tersebut disebabkan oleh peningkatan semua komponen indikator kualitas lingkungan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan upaya untuk semakin memperbaiki kondisi lingkungan dengan

menekan terjadinya pencemaran air dan udara serta memperbaiki tutupan vegetasi hutan dan Kawasan hutan lindung lainnya.

Tabel II.33.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2023

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH	KATEGORI
2016	45,71	89,6	31,96	60,47	Cukup Baik
2017	35	87,45	30,49	55,25	Kurang Baik
2018	56,57	85,3	24,1	61,09	Cukup Baik
2019	64,29	85,97	32,68	66,15	Cukup Baik
2020	59,25	78,53	55,61	66,26	Cukup Baik
2021	56,67	81,84	50,58	65,53	Cukup Baik
2022	61,67	82,54	50,56	67,69	Cukup Baik
2023	76,13	76,31	63,72	73,49	Baik

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

2.1.3.3.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Sedangkan, akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, standar peningkatan kualitas sanitasi nasional sesuai dengan standar SDGs (Sustainable Development Goals), bahwa saat ini bukan lagi pencapaian akses layak melainkan penekanan pada pencapaian target aman. Dengan adanya peningkatan standar ini maka terdapat tugas yang harus dikejar oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkannya.

Dalam rangka menuju akses sanitasi aman, pembangunan tangki septik yang sesuai dengan standar sangat penting untuk diperhatikan. Pemilihan jenis tangki septik baik secara konvensional maupun pabrikasi dapat menyesuaikan lingkungan dan kondisi masyarakat. Keberadaan tangki septik yang memenuhi standar sangat penting untuk mencegah penularan penyakit, pencemaran air dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu kesadaran akan pentingnya tangki septik yang sesuai standar dan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal harus mulai diterapkan.

Realisasi capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rentang tahun 2020 – 2023 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 0,59 persen meningkat menjadi 1,80 persen di tahun 2021 dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 2,50 persen hingga 2,97 persen di tahun 2023.

Tabel II.34.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0.59%	1.80%	2.50%	2,97

Sumber: Dokumen SSK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

2.1.3.3.3. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Sumber sampah biasanya berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit. Pasar dan sebagainya. Jenis sampah disekitar kita sangat banyak sampah medis, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah industri, sampah pertanian, sampah peternakan dan masih banyak lainnya.

Bila sampah tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang ke lingkungan maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media penularan penyakit (lalat, tikus, nyamuk, kecoa) menurunkan kualitas lingkungan (pencemaran udara, pencemaran tanah dan sumber air) dampak polutan B3 (limbah industri, pertambangan, cat, buangan gas kendaraan bermotor, baterai bekas, kaleng). Hal tersebut secara akumulasi menyebabkan gangguan kesehatan antara lain kanker, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal dan gangguan syaraf.

Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rentang tahun 2017–2023 cenderung mengalami peningkatan yang positif dimana pada tahun 2017 persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah sebesar 5.83 persen meningkat hingga 16,57 persen di tahun 2023.

Tabel II.35.
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 - 2023

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	5.83	5.33	6.66	6.8	6.8	6.83	16,57

2.1.3.3.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan proses penanganan sampah dengan cara mengumpulkan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut (1) ke tempat penampungan sementara (TPS) sampah atau (2) pengolahan sampah antara (SPA atau ITF), atau (3) langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPST) tanpa melalui proses pemindahan. Operasional pengumpulan sampah mulai dari sumber penghasil sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir diidentifikasi ada dua cara yaitu secara langsung (door to door) dan secara tidak langsung (melalui TPS). Pada pengumpulan cara langsung, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber diambil, dikumpulkan dan langsung diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Pada pengumpulan cara tidak langsung, sampah dari masing-masing sumber dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti gerobak tangan dan diangkut ke TPS untuk kemudian dibawa ke tempat pengolahan antara atau ke tempat pemrosesan akhir sampah. Data proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai saat ini belum tersedia.

2.1.3.3.5. Indeks Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Tabel II.36.
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2015-2023

										Tinggi
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	168,40	168,40	168,40	165,26	163,06	161,52	160,44	157,00	165,66	

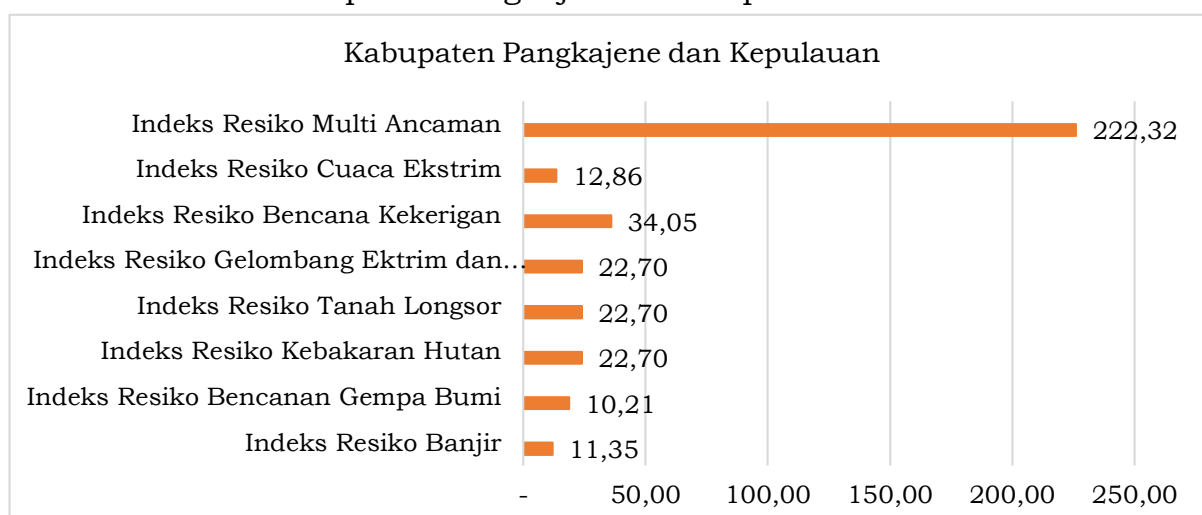
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024
(inaRISK Tahun 2024)

Berdasarkan data inaRISK-BNPB untuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tercatat selama Tahun 2022 resiko terpapar bencana yang paling besar didominasi oleh bencana kekeringan (100%), Cuaca ekstrim (92%), dan Banjir (56%)

Grafik II.1.
 Persentase Resiko Terpapar Bencana
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022



Grafik II.2.
 Indeks Risiko Bencana Per Ancaman
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023



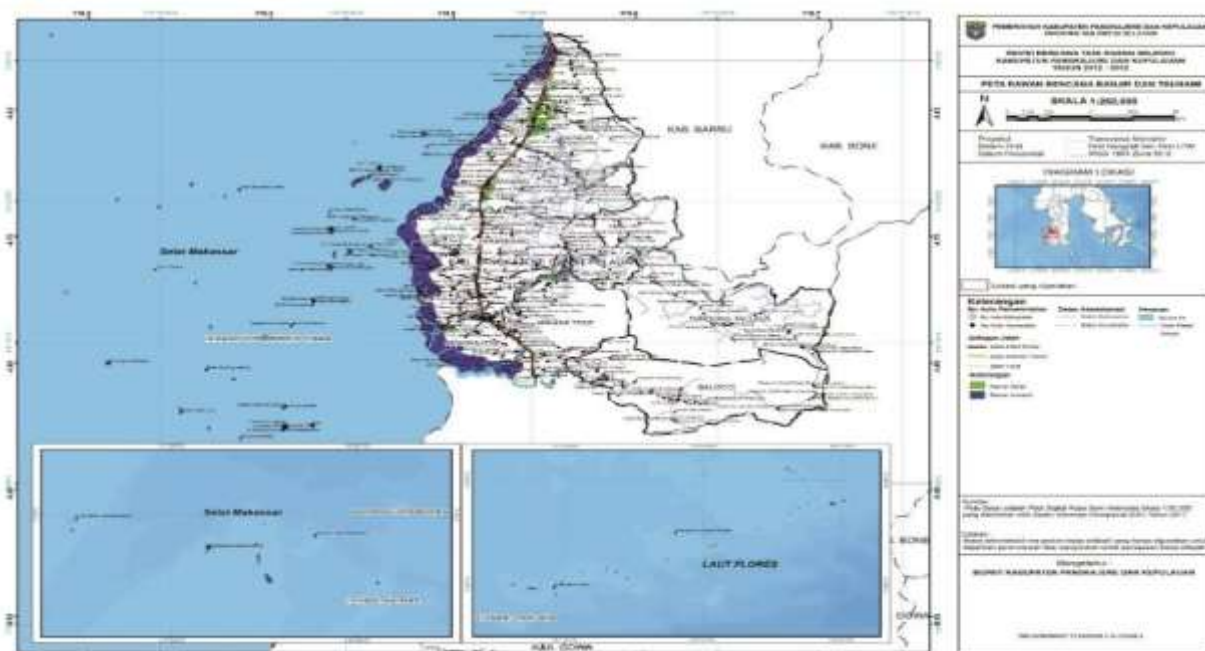
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 (IRBI Tahun 2023)

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sejarah kebencanaan yang terjadi, seperti bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2011, tanah longsor, bencana angin puting beliung, serta bencana banjir. Kejadian bencana alam khususnya banjir hingga saat ini masih terus terjadi hampir setiap tahun, dan melanda beberapa wilayah kecamatan. Berikut ini data wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan terhadap bencana alam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.37.
Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Tahun 2023

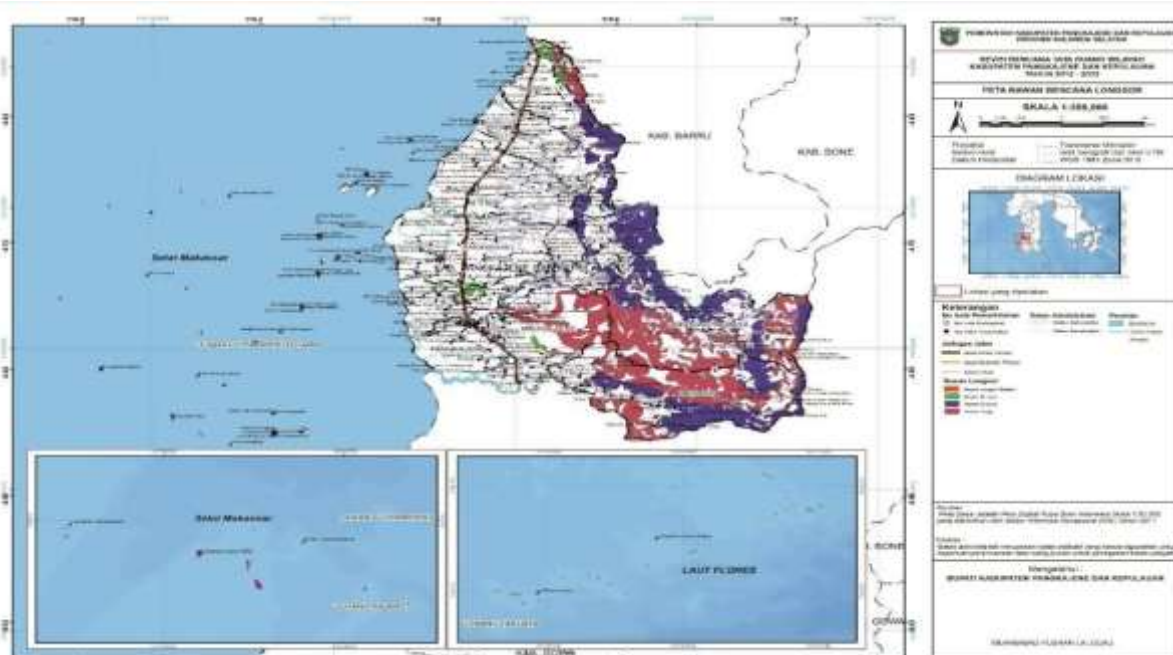
No	Kawasan Rawan Bencana	
	Jenis Kebencanaan	Lokasi
1.	Rawan Banjir	Kec. Pangkajene
		Kec. Bungoro
		Kec. Minasatene
		Kec. Labakkang
2.	Rawan Angin Puting Beliung	Kec. Pangkajene
		Kec. Bungoro
		Kec. Minasatene
		Kec. Labakkang
3.	Rawan Tanah Longsor	Kec. Minasatene
		Kec. Tondong Tallasa
		Kec. Bungoro
4.	Rawan Gelombang Pasang/ Tsunami	Kec. Pangkajene
		Kec. Minasatene
		Kec. Bungoro
		Kec. Labakkang
		Kec. Ma'rang
		Kec. Segeri
		Kec. Mandalle
		Kec. Liukang Kalmas
		Kec. Liukang Tangaya
		Kec. Liukang Tupabiring
Kec. Liukang Tupabiring Utara		
5.	Rawan Gempa Bumi	Gempa Bumi Menengah: Kec. Minasatene, Kec. Pangkajene, Kec. Balocci, Kec. Bungoro, Kec. Labakkang, dan Kec. Mandalle.
		Gempa Bumi Rendah: Kec. Minasatene, Kec. Pangkajene, Kec. Balocci, Kec. Bungoro, Kec. Labakkang, dan Kec. Mandalle, Kec. Ma'rang, Kec. Segeri, dan Kec. Mandalle.

Gambar II.12.
Peta Rawan Bencana Banjir dan Tsunami Kabupaten Pangkajene
Dan Kepulauan



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Gambar II.13.
Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2.1.1.3.6. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian

digabungkan dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Dari hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Untuk kabupaten pangkajene dan Kepulauan penilainya IKD baru di lakukan di tahun 2021, adapun hasil Penilaian IKD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.38.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai IKD	Skor	Indeks Kapasitas	Kelas
2021	0,20	0,17	0,247	Rendah
2022				
2023	0,34	0,28	0,36	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Prov. Sulawesi Selatan tahun 2022-2026

2.1.1.3.7. Persentase Penurunan Emisi GRK

Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development (PRK/LCD) adalah platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam.

Pembangunan Rendah Karbon menempatkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke 13 (Aksi Perubahan Iklim) sebagai dasar utama untuk mendukung SDGs.

Proyek PRK/LCD adalah inisiatif kegiatan aksi penurunan emisi GRK dan intensitas emisi GRK yang secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Proyek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, limbah dan blue carbon sesuai dengan sektor prioritas PRK/LCD.

Sejak tahun 2010-2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan beberapa proyek percontohan PRK/LCD melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan proyek percontohan ini rencananya akan dikembangkan dan direplikasi ke beberapa wilayah prioritas nasional sesuai dengan potensi serta kebutuhan wilayahnya. Mulai tahun 2020, pengembangan proyek PRK/LCD ini akan diutamakan pada provinsi yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Terdapat 7 provinsi prioritas sebagai percontohan implementasi PRK/LCD yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau dan Bali. Adapun proyek yang dimaksud antara lain:

1. Pemanfaatan Biogas untuk Pasokan Energi Rumah Tangga
2. Rehabilitasi Hulu DAS berbasis masyarakat
3. Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
4. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Ekonomi bagi Masyarakat Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan
5. Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Penanaman Padi dengan metode System of Rice Intensification (SRI)
6. Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Hutan
7. Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Taman Wisata Mangrove dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon – Belitung Mangrove Park (BMP)

Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang telah diterima pada platform AKSARA dari periode 2010 – sekarang adalah total 66 kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan, dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebanyak 1339.17 Ton CO₂EQ, sedangkan kontribusi pada capaian provinsi sebanyak 0.07%. Potensi penurunan Emisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rentang tahun 2019-2023 masih mengalami fluktuatif, potensi penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebanyak 2.310,3754818 Ton CO₂ eq kemudian tahun 2022 menurun menjadi 1.338,1012518 Ton CO₂ eq dan meningkat tipis pada tahun 2023 menjadi 1.339,1692518 Ton CO₂ eq.

Tabel II.39.
Persentase Penurunan Emisi GRK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019-2023

Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kab Pangkep	Satuan	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penurunan Emisi GRK	(%)	15,11	979,69	2.310,37	1.338,10	1.339,17

Sumber : Aplikasi Aksara

2.1.1.3.8. Tingkat Intensitas Emisi

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan intensitas Emisi GRK merupakan besaran Emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu. Adapun Proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor pembangunan utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2022 sektor energi -99,55 persen (-976,71), sektor industri 0,45 persen (4,44)

sedangkan tahun 2023 sektor industri sebesar 100,00 persen atau 1,07.

Tabel II.40.
Tingkat Intensitas Emisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018-2023

Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD	Satuan	Realisasi Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor :	Persen	-	-	-	-	-	-
Energi	Persen	-	25,47% (2,83)	-	99,96% (1.330,13)	-99,55% (-976,71)	-
Transportasi	Persen	-	-	-	-	-	-
Hutan dan Lahan	Persen	89,92% (3,59)	63,36% (7,04)	99,99% (964,48)	-	-	-
Pertanian	Persen	-	-	-	-	-	-
Pesisir Laut	Persen	-	-	-	-	-	-
Industri		10,08% (0,40)	11,17% (1,24)	0,01% (0,10)	0,04% (0,56)	0,45% (4,44)	100,00% (1,07)

2.1.1.3.9. Ketahanan Energi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Saat ini, ketahanan energi Indonesia tergolong dalam kategori tahan. Sebab, Indonesia masih mengimpor energi fosil seperti minyak bumi, LPG, serta BBM jenis bensin.

Ketahanan energi merupakan suatu permasalahan yang dapat dialami, dimana jumlah produksi energi mengalami penurunan setiap tahunnya, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah konsumsi energi yang selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat disebabkan karena terjadinya peningkatan dalam jumlah kendaraan, sehingga dapat meningkatkan konsumsi energi dalam penggunaan bahan bakar minyak.

Indikator-indikator yang dapat mempengaruhi ketahanan energi antara lain produksi bahan bakar minyak, jumlah kendaraan, total konsumsi bahan bakar minyak, gas alam, impor produk minyak, harga bahan bakar minyak, konsumsi elektrik per kapita, dan konsumsi batu bara dalam industri.

2.1.1.3.10. Kapasitas Air Baku

Air baku adalah air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu. Kegunaan air baku terbesar adalah untuk air minum. Dalam PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, air baku air minum dapat dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. Sumber air adalah wadah badan air. Sumber air dapat berupa (palung) sungai, danau, waduk, sumur, dan mata air. Air hujan adalah pasokan air untuk sumber air.

Pada dasarnya setiap sumber air dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Namun karena pertimbangan keterbatasan akses teknologi dan biaya maka pada umumnya hanya air dengan kualitas tertentu saja yang dipakai untuk air baku. Semakin bagus kualitas air baku semakin disukai untuk menjadi air baku air minum.

Sistem air baku adalah suatu sistem yang mengambal air baku dari sumber air baku ke sistem pengelolaan air. Sistem air baku pada sumber lain dapat disebut sebagai unit air baku yaitu sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Menurut PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Unit Air Baku dapat terdiri dari bangunan penampung air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran atau pemantauan, sistem pengadaan dan/atau sarana pembawa serta perlengkapannya. Penyebutan sistem pada sistem air baku dimaksud untuk memandangnya sebagai kumpulan dari berbagai unit-unit pendukungnya. Sedang penyebutan unit pada air baku adalah mengacu pada keberadaan unit-unit yang lain pada sistem penyediaan air minum (SPAM). Adapun kapasitas air baku Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 320,5liter perdetik dengan kapasitas terpakai 202,5 liter perdetik yang berasal dari 8 sumber air baku, yaitu mata air leang kassi, mata air mattampa, mata air ciddokang, mata air amputtang, mata air jatie, mata air uluwere, sungai padang lampe dan mata air ulu salo manggalung.

Tabel II.41.
Kapasitas Air Baku
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapasitas Air Baku	L/Det	320,5	320,5	320,5	320,5	320,5	320,5

2.1.1.3.11. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaian

Meski mayoritas penduduk telah memiliki akses terhadap air minum layak, baru sebagian kecil di antaranya yang memiliki akses terhadap air minum perpipaian. Sejumlah program rencana pengamanan air minum terus dilakukan untuk mencapai target akses masyarakat terhadap air perpipaian untuk mempermudah pengontrolan kualitas dan produksinya.

Akses air minum perpipaian penting untuk memastikan akses air minum kita aman. Sebab, kita akan lebih mudah mengontrol teknologi produksinya, perpipaannya, dan juga titik-titik penggunaannya. Jika menggunakan air minum dari sumur atau sumber mata air, sulit dipantau.

Berdasarkan data yang diolah Bappenas dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), capaian akses air minum layak selama 2011-2020 meningkat lebih kurang 1 persen per tahun. Sebaliknya, laju pertumbuhan akses perpipaian tidak sampai 1 persen dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi tersebut membuat Bappenas terus mendorong tercapainya target peningkatan akses air minum perpipaian hingga 30 persen pada 2024. Target capaian tersebut sudah dinilai aman berdasarkan hasil survei kualitas air yang dilakukan Bappenas pada 2015.

Dalam mendorong peningkatan akses air minum ini, pemerintah telah melakukan sejumlah program di tingkat hulu maupun hilir. Program itu, antara lain, membangun penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) untuk masyarakat perdesaan, program nasional penyediaan air minum di perkotaan, dan sejumlah program pendanaan seperti dana alokasi khusus maupun hibah.

Untuk mencapai air minum aman, kita masih perlu melakukan program rencana pengamanan air minum. Ini dilakukan untuk mengetahui titik risiko dan kontaminasi sehingga bisa mengontrol serta mencegah terjadinya rekontaminasi air minum yang sudah diolah dengan baik dan disalurkan ke rumah tangga.

Peran masyarakat sangat penting dalam mengelola air secara bijak. Sebab, data kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan air selama pandemi.

Sekitar 89 persen rumah tangga di Indonesia memiliki sumber air minum yang layak dan terlindungi. Namun, baru 6,9 persen sumber air minum yang aman untuk dikonsumsi. Kondisi ini memberi dampak buruk untuk masyarakat, khususnya anak-anak. Buruknya akses air minum dan sanitasi juga berkontribusi terhadap angka stunting yang dialami oleh 28 persen anak Indonesia. Tantangan penyediaan air bersih bertambah dengan adanya perubahan iklim dan cuaca ekstrem, perubahan tata guna lahan di daerah tangkapan air mengakibatkan berkurangnya resapan air ke tanah. Selain itu, perubahan iklim turut mengganggu ketersediaan air baku karena musim kemarau semakin panjang dan kering, sedangkan saat musim hujan menjadi lebih singkat dan intensitas tinggi.

Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam 7 tahun terakhir terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 – 2022, dari 56,65 persen tahun 2016 naik terus hingga 65,31 persen di tahun 2022.

Tabel II.42.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Tahun						Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	59.50	61.42	61.65	63.68	65.31		data rumah tangga yang terlayani Jaringan Perpipaan PDAM dan BPSAM yang memenuhi syarat kualitas air minum

2.1.1.3.12. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Setiap individu membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Makanan yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap kondisi fisiologis tubuh. Oleh karena itu, asupan makanan harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas ditentukan berdasarkan kandungan gizi dari komoditas pangan dimana di dalamnya terkandung beragam nilai gizi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian kuantitas merupakan jumlah asupan makanan yang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan umur dan jenis kelamin.

Untuk memenuhi aspek kualitas dan kuantitas tersebut maka sekarang kita mengenal konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), artinya setiap makanan yang dikonsumsi harus beragam komoditasnya, bernilai gizi yang baik bagi kesehatan tubuh, seimbang yaitu sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan aman dari cemaran yang berpotensi mengganggu kesehatan.

Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi di tingkat keluarga dapat menentukan kualitas konsumsi masyarakat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Adapun parameter yang mengukur situasi konsumsi pangan masyarakat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Maka PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok

pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Pola pangan harapan (PPH) ini ditunjukkan melalui skor dengan skor maksimal 100. Oleh karena itu semakin beragam dan proporsional konsumsi pangan masyarakat maka skor PPH-nya makin tinggi.

Konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang (B2SA) ini berkaitan erat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Karena implementasi pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat keluarga akan berdampak pada cakupan masyarakat yang lebih luas sehingga memengaruhi capaian skor PPH. Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (berasal dari 100% dibagi 3).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi Indikator Kinerja Pemerintah untuk menilai kualitas konsumsi masyarakat. Skor PPH ini juga menjadi dasar perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal. Untuk meningkatkan skor PPH, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Beberapa diantaranya adalah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal sebagai acuan yang lebih operasional dalam implementasinya.

Nilai skor pangan harapan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama satu dekade mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun 2018 hingga tahun 2022 meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 7,9 poin.

Tabel II.43.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skor Pola Pangan Harapan	skor	87.9	88.2	89	89.1	89.3	81.4

2.1.1.3.13. Indeks Ketahanan Pangan

Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung tugas dan peran Ketahanan Pangan dalam mewujudkan 17 target dalam SDGs, yang di antaranya adalah tanpa kemiskinan dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dalam menyampaikan data dan informasi pangan yang dituangkan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

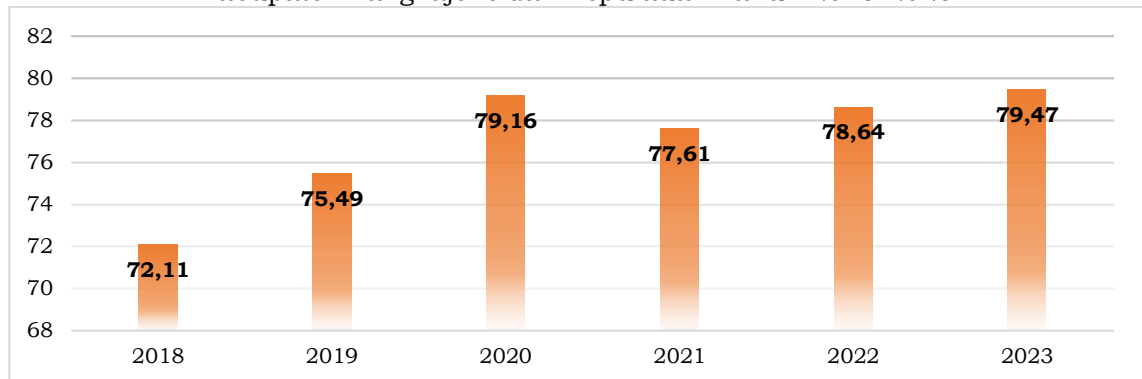
Penilaian IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, yang mencakup 9 (Sembilan) indikator penilaian:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Adapun gambaran trend peningkatan realisasi Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik II.3.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Nasional Tahun 2018-2023

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian ketahanan pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2018 sampai dengan 2023 umumnya berfluktuatif. Walaupun pada 3 (tiga) tahun awal mengalami peningkatan hingga mencapai 79,16% ditahun 2020 dan pada tahun 2023 sudah mencapai 79,47%.

Selanjutnya jika Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disandingkan dengan daerah tetangga yaitu meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone maka capaian IKP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling rendah diantara capaian daerah setara lainnya. Hal ini digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.44.
Realisasi Capaian Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru dan Kabupaten Bone
Tahun 2023

Indeks Ketahanan Pangan	Kabupaten Pangkep	Kabupaten Maros	Kabupaten Barru	Kabupaten Bone
	79,47	83,74	87,71	83,86

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Nasional Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian tersebut oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 menunjukkan peringkat IKP untuk Kabupaten Barru berada pada posisi ke-17 dengan nilai IKP 87,71. Selanjutnya Kabupaten Maros diposisi ke-81 dengan nilai IKP sebesar 83,74. Disusul Kabupaten Bone pada posisi ke-79 dengan nilai IKP sebesar 83,86, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati urutan ke-167 dari 416 Kabupaten se-Indonesia dengan nilai IKP sebesar 79,47. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kedepannya masih sangat perlu melakukan upaya dalam rangka meningkatkan capaian IKP pada periode berikutnya.

2.1.1.3.14. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)

Beberapa tahun terakhir dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, perubahan iklim, krisis ekonomi global, konflik, serta degradasi lingkungan hingga terganggunya rantai pasok pangan internasional merupakan beberapa hal penyebab terjadinya kerawanan pangan dan gizi.

Menghadapi kondisi tersebut pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus melakukan upaya penanganan rawan pangan dan gizi serta mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan.

Sejalan dengan arahan Presiden yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0%, ini tertuang dalam kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Penghitungan PoU ini merupakan kolaborasi antara NFA dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS. Di dalam susenas ada data modul konsumsi dan pengeluaran yang digunakan sebagai dasar penghitungan Prevalence of Undernourishment (PoU). "Data konsumsi dan pengeluaran digunakan sebagai dasar untuk penghitungan indikator PoU dan merupakan salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Persentase Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebanyak 9,84 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 hanya tersisa sebanyak 4,17 persen.

Tabel II.45.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	Realisasi Capaian			
		2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9.84	6.60	6.15	4.17

2.1.2. Aspek Demografi

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau daerah pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut.

Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses

pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sumber daya alam yang tersedia tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari penduduk. Dengan adanya penduduk, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhannya saja, tetapi lebih menekankan ke arah perbaikan kualitas hidup penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

Tinjauan terhadap aspek kependudukan, pada dasarnya merupakan hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, mengingat pentingnya data/informasi terkait dengan perkembangan dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah/kawasan, yang dijadikan dasar dalam menetapkan fungsi-fungsi kawasan, distribusi sarana dan prasarana, serta dasar melakukan estimasi/proyeksi kebutuhan pembangunan dalam wilayah/kawasan tersebut.

Pertambahan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Pertambahan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Dalam konteks Jumlah penduduk pada tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki jumlah penduduk sebanyak 357.846 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Labakkang yaitu 53.197 jiwa yang berarti kecamatan Labakkang menyumbang 14,87% dari total populasi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sedangkan Kecamatan Tondong Tallasa memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 10.382 jiwa atau 2,90% dari total populasi penduduk.

Tabel II.46.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lk. Tangaya	22.223	22.782	23.359	19.349	20.437	19.403	20.579
2	Lk. Kalmas	13.724	13.800	13.879	14.618	15.143	14.855	15.314
3	Lk. Tupabiring	19.175	20.071	20.330	17.728	18.371	17.754	18.879
4	Lk. Tupabiring Utara	11.589	11.581	11.557	13.565	14.195	13.707	14.500
5	Pangkajene	45.481	45.900	46.337	48.656	49.544	49.740	50.537
6	Minasatene	36.219	36.595	36.987	38.940	39.889	39.901	40.955
7	Balocci	16.188	16.244	16.304	16.560	16.770	16.653	16.915
8	Tondong Tallasa	8.941	8.940	8.945	10.099	10.423	10.305	10.382
9	Bungoro	42.627	44.679	45.382	43.879	44.549	44.574	45.167
10	Labakkang	46.440	46.694	46.964	51.616	52.593	52.884	53.197
11	Ma'rang	30.841	30.888	30.956	34.401	34.426	35.068	35.232
12	Segeri	21.501	19.556	19.445	22.339	21.914	22.636	22.095
13	Mandalle	14.842	14.944	15.049	14.025	13.975	13.946	14.094
	Pangkep	329.791	332.674	335.514	345.775	352.229	352.949	357.846

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangkep Tahun 2024

Tabel II.47.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2017 -2023

Kelompok Umur	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah
0-4	16.145	15.558	31.703	16.083	15.474	31.557	16.025	15.387	31.412	15.447	14.569	30.016	14.123	13.325	27.448	14.615	13.828	28.443	14.899	14.024	28.923
5-9	16.525	15.968	32.493	16.596	16.034	32.630	16.673	16.089	32.762	17.331	13.638	30.969	16.543	15.638	32.181	16.442	15.530	31.952	16.384	15.591	31.976
10-14	16.070	15.304	31.374	16.088	15.323	31.411	16.120	15.362	31.482	16.733	15.610	32.343	17.126	16.101	33.227	16.876	15.769	32.645	16.946	15.760	32.706
15-19	15.657	14.956	30.613	15.515	14.798	30.313	15.377	14.632	30.009	13.958	15.928	29.886	16.989	16.576	33.565	16.861	16.602	33.463	15.964	15.575	31.539
20-24	13.852	13.997	27.849	14.128	14.124	28.252	14.336	14.203	28.539	11.804	15.455	27.259	16.101	15.646	31.747	16.339	15.708	32.047	15.886	15.884	31.770
25-29	12.165	12.937	25.102	12.342	13.027	25.369	12.539	13.126	25.665	11.557	14.013	25.570	13.343	13.170	26.513	13.302	13.172	26.474	13.568	13.284	26.852
30-34	11.167	12.767	23.934	11.230	12.751	23.981	11.335	12.767	24.102	10.975	13.398	24.373	12.331	12.628	24.959	12.452	12.877	25.329	12.626	12.650	25.276
35-39	10.961	12.316	23.277	10.921	12.323	23.244	10.905	12.308	23.213	10.966	12.016	22.982	11.897	12.460	24.357	11.926	12.439	24.365	12.089	12.396	24.485
40-44	11.232	12.698	23.930	11.260	12.763	24.023	11.254	12.827	24.081	10.064	12.257	22.321	11.123	12.251	23.375	11.294	12.377	23.671	11.584	12.354	23.938
45-49	9.876	11.060	20.936	10.076	11.262	21.338	10.228	11.426	21.654	7.720	11.033	18.753	10.888	12.035	22.923	10.408	11.417	22.871	10.781	11.975	22.756
50-54	7.614	8.786	16.400	7.900	9.063	16.963	8.177	9.334	17.511	6.025	10.520	16.545	10.304	11.264	21.568	7.160	8.654	21.825	10.887	11.820	22.707
55-59	6.389	7.599	13.988	6.607	7.876	14.483	6.845	8.159	15.004	4.917	8.553	13.470	7.039	8.633	15.672	5.534	6.656	15.814	8.070	9.626	17.696
60-64	4.676	5.707	10.383	4.848	5.949	10.797	5.022	6.194	11.216	3.697	6.338	10.035	5.507	6.587	12.094	3.598	4.252	12.190	5.895	7.258	13.153
65+	7.282	10.527	17.809	7.524	10.789	18.313	7.782	11.082	18.864	9.428	12.993	22.421	9.525	13.075	22.600	9.145	12.715	21.860	10.121	13.948	24.069
Jumlah	159.611	170.180	329.791	161.118	171.556	332.674	162.618	172.896	335.514	169.454	176.321	345.775	172.840	179.389	352.229	173.191	179.758	352.949	175.700	182.146	357.846

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tiap tahunnya bertambah dan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 6 (enam) tahun ini disebabkan belum baiknya sistem pelaporan kematian berjenjang dari desa/kelurahan dan kecamatan, mengakibatkan data-data penduduk yang sudah lama meninggal namun datanya masih aktif.

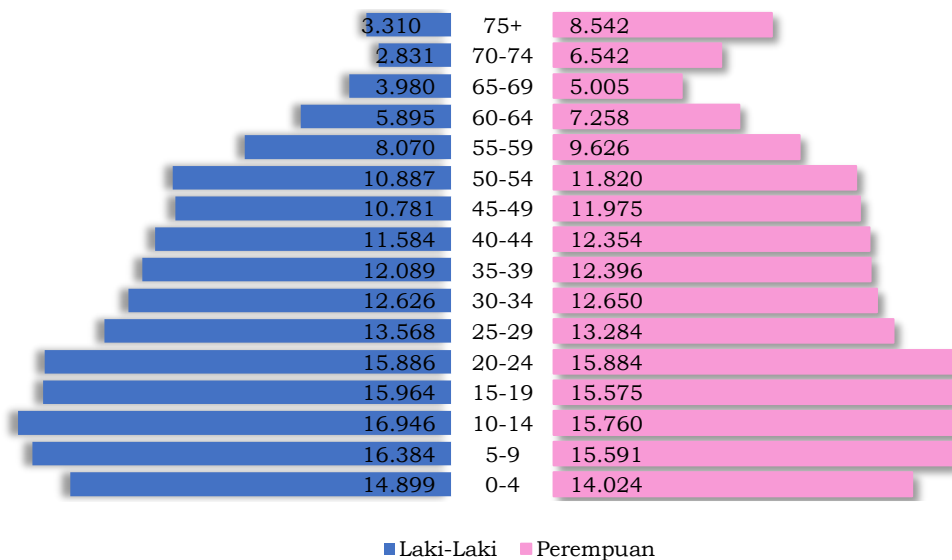
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur (interval 5 tahunan) dan jenis kelamin: Jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu jumlah penduduk sebelum mencapai usia genap 5 tahun. Kelompok umur ini sering disebut balita (bawah lima tahun). Penyebutan satuan tahun pada umur penduduk dilakukan dengan pembulatan ke bawah.

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk Kota Pangkajene dan Kepulauan, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 175.700 jiwa atau 49,09% dan jumlah penduduk perempuan 182.146 jiwa atau 50,90%. Komposisi umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk.

Grafik II.4.

Piramida Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024

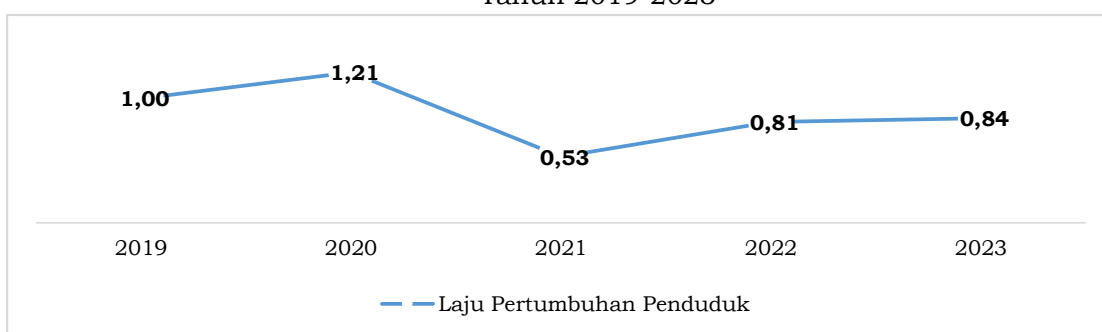
Pada piramida penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2023, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 15-19 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 4,74% dan penduduk perempuan 4,63% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 33.539 jiwa. Adapun komposisi penduduk terkecil berada pada rentang umur 70-74 tahun dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 0,79% dan penduduk perempuan 1,04%.

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara berpenduduk besar dan padat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran, sehingga diperlukan berbagai upaya yang berkesinambungan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dengan penduduk terbesar nomor empat di dunia, juga menghadapi persoalan yang serupa.

Definisi dari laju pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah angka rata-rata yang menunjukkan jumlah tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,81 kemudian naik menjadi 0,84 di tahun 2023.

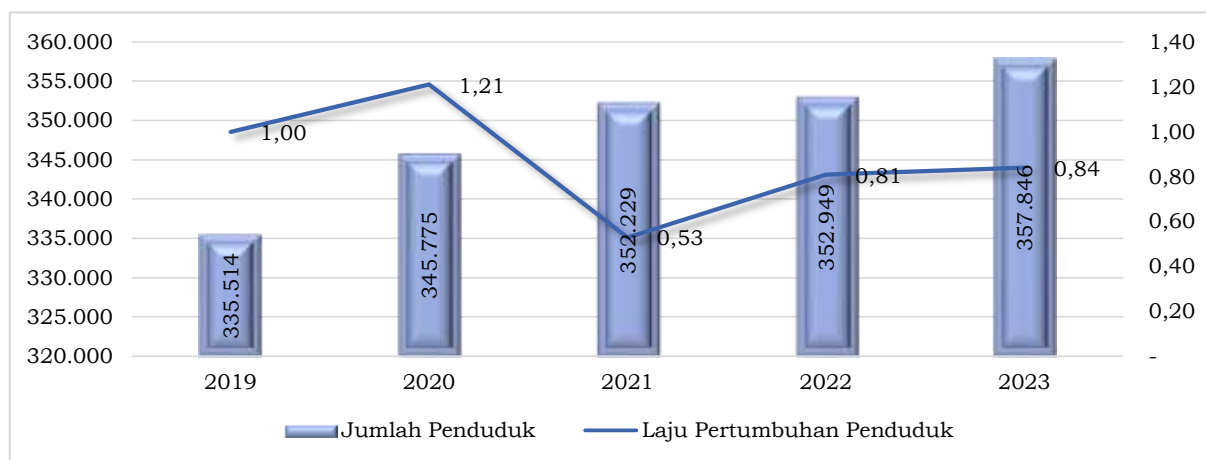
Grafik II.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019-2023



Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Grafik II.6.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019-2023



Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024,

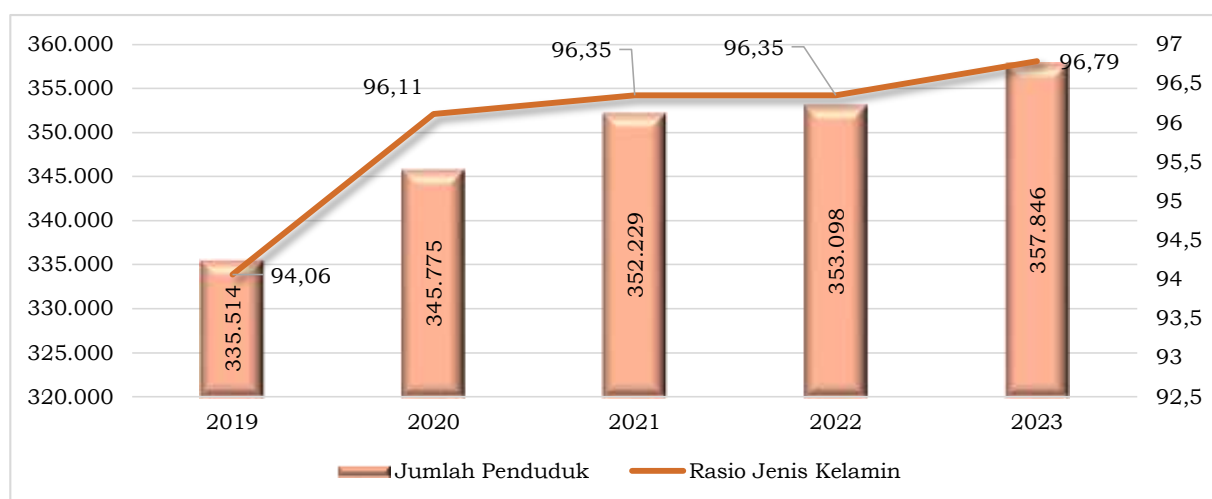
2.1.2.3. Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan pola yang meningkat.

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 173.201 jiwa atau 49,05% dan jumlah penduduk perempuan 179.897 jiwa atau 50,95%.

Berdasarkan Jumlah Penduduk tahun 2017 rasio jenis kelamin-perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 93,79 persen. Ini dapat diartikan dari setiap 100 perempuan terdapat 93 laki-laki. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendekati nilai ideal karena mendekati 100 persen yaitu di tahun 2022 rasio sebesar 96,35 persen.

Grafik II.7.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019-2023

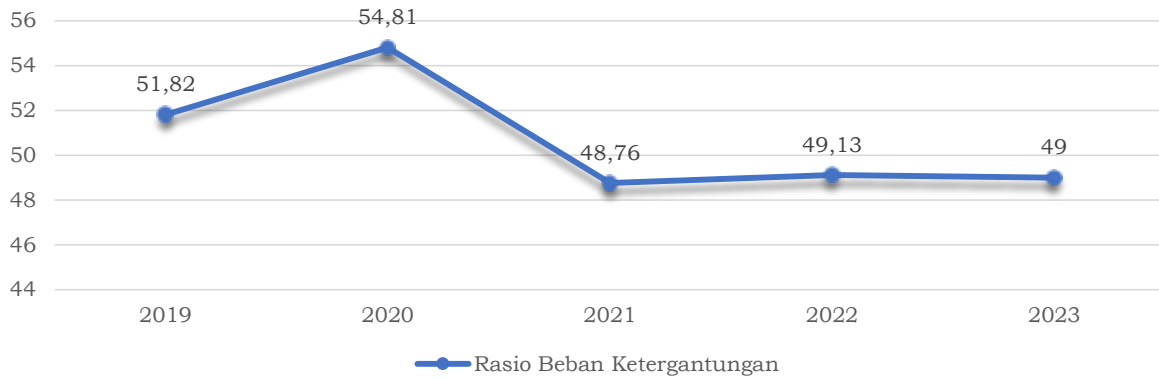


Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2024

2.1.2.4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya prosentase *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Sementara itu, untuk rasio beban ketergantungan yang dapat diartikan sebagai perbandingan antara penduduk usia non-produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur di atas 65 ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 16 – 64 tahun). Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Semakin rendah *Dependency Ratio*, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Grafik II.8.
Rasio Beban Ketergantungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2017-2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

2.1.2.5. Komposisi Penduduk

1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2017-2023 dapat menunjukkan jumlah yang selalu meningkat pada tiap tahunnya. Kecamatan dengan penduduk terpadat dari tahun 2017-2023 adalah Kecamatan Pangkajene yaitu 1.066 km² pada tahun 2023. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.48.
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2017-2023

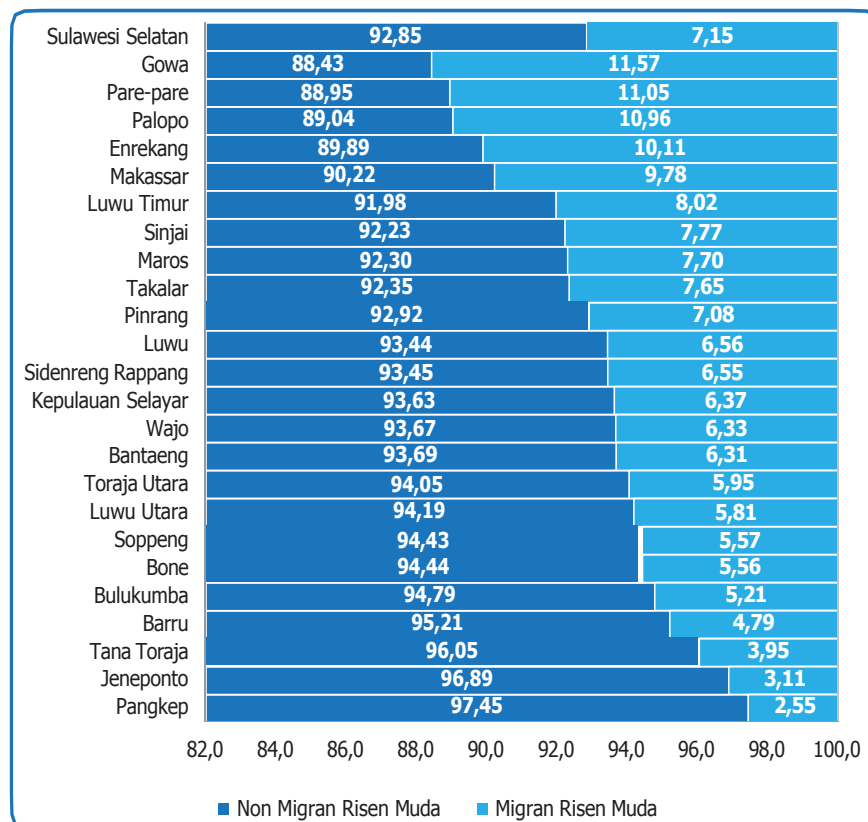
No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lk. Tangaya	185,19	189,85	162,23	161	161	162	171,49
2	Lk. Kalmas	149,99	150,82	161,23	160	160	162	167,37
3	Lk. Tupabiring	352,22	368,68	328,84	326	326	269	286,05
4	Lk. Tupabiring Utara	135,45	135,36	162,13	159	159	185	195,95
5	Pangkajene	959,72	968,56	1.037,65	1.027	1027	1050	1066,41
6	Minasatene	473,58	478,49	514,7	509	509	522	535,30
7	Balocci	112,82	113,21	118,82	115	115	116	117,89
8	Tondong Tallasa	80,40	80,4	93,28	91	91	93	93,36
9	Bungoro	473,00	495,77	489,09	487	487	495	501,19
10	Labakkang	471,66	474,24	534,42	524	524	522	540,29
11	Ma'rang	410,01	410,64	462,1	457	457	466	468,39
12	Segeri	274,67	249,82	287,26	285	285	289	282,26
13	Mandalle	369,57	372,11	356,35	349	349	347	350,95
	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	296,50	299,09	314,85	311	316	317	321,72

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep Tahun 2024

2. Migrasi Penduduk

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas administrasi paling kecil yaitu dusun. Penduduk yang tinggal di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terdiri dari penduduk migran dan non migran, di mana penduduk migran artinya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal yang melewati batas administratif provinsi pada periode waktu tertentu beserta kebalikannya pada non migran. Salah satu jenis penduduk migran yaitu migran risen yang merupakan penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda wilayah administrasi dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu. Adapun untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 2,55 migran risen muda dan 97,45 non migran risen muda.

Grafik II.9.
Persentase Penduduk Usia 15-29 Tahun Menurut Status Migran



Sumber: Badan Pusat Statistik, SP2020 Longform Tahun 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diuraikan dalam kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

2.2.1.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan dalam rangka memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD mengacu kepada global competitiveness index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari

empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing yaitu;

- Pilar 1: *Institusi* memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal
- Pilar 2: *infrastruktur* mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah.
- Pilar 3: *adopsi TIK* mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah
- Pilar 4: *Stabilitas ekonomi makro* memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah yang dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro
- Pilar 5: *Kesehatan* menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup.
- Pilar 6: *Keterampilan* mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah
- Pilar 7: *Pasar produk* menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Tidak dapat dimungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar.
- Pilar 8: *Tenaga kerja* dan besarnya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja.
- Pilar 9: *Sistem keuangan* dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran
- Pilar 10: *Ukuran pasar* memengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan mengeksploitasi skala ekonomi
- Pilar 11: *Dinamisme bisnis* menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan
- Pilar 12: *Kapabilitas inovasi* memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal

Adapun realisasi capaian dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.49.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Lingkungan Pendukung					
Pilar 1 (Institusi)	0,12	1,12	3,9	4,17	4,24
Pilar 2 (Infrastruktur)	0,05	3,25	3,16	2,37	3,14
Pilar 3 (Adopsi TIK)	0,08	4,00	1,5	3,28	4,47
Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	0,02	2,25.	2,05	2,93	2,91
SDM					
Pilar 5 (Kesehatan)	0,08	2,5	2,62	3,62	3,62
Pilar 6 (Keterampilan)	0,43	1,95	2,87	3,2	3,29
Pilar 7 (Pasar produk)	0,08	0,33	3,08	1,39	1,33
Pasar					
Pilar 8 (Pasar tenaga kerja)	0,06	3,49	3,5	2,35	2,57
Pilar 9 (Sistem keuangan)	0,04	2,00	2,00	3,29	0,82
Pilar 10 (Ukuran pasar)	0,06	0,33	3,00	1,15	4,37
Ekosistem Inovasi					
Pilar 11 (Dinamisme bisnis)	0,07	2,2	2,00	5,00	2,65
Pilar 12 (Kapabilitas inovas)	0,05	2,00	2,14	1,23	2,46
SKOR IDSD	0,06	2,56	2,64	2,83	2,99

Sumber: IDSD Balitbangda Kabupaten Pangkep Tahun 2019-2023

Jika ditinjau dari komponen IDSD yang mencakup 4 (empat) aspek sesuai capaian tabel tersebut maka dapat digambarkan analisis sebagai berikut:

- a. *Aspek Lingkungan pendukung* yang terdiri atas 4 (empat) Pilar, realisasi capaian dari tahun 2019-2022 umumnya berfluktuatif. Pilar 1 pada dimensi Keamanan, Modal Sosial, Check & Balances, Transparansi, Hak atas Kepemilikan, Orientasi Masa Depan Pemerintah cenderung meningkat. Begitupun halnya pada Pilar 3 pada dimensi Adopsi TIK juga mengalami peningkatan. Sedangkan Pilar 2 mengalami penurunan pada dimensi Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur utilitas kelistrikan, dan Infrastruktur utilitas air minum.
- b. *Aspek Sumber Daya Manusia* yang terdiri atas 3 (tiga) Pilar, realisasi capaian dari tahun 2019-2022 umumnya mengalami trend peningkatan. Sedangkan khusus pada pilar 7 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pada dimensi Persaingan domestik.
- c. *Aspek Pasar*, yang terdiri atas 3 (tiga) Pilar, realisasi capaian dari tahun 2019-2022 umumnya mengalami trend penurunan yaitu pada Pilar 8 dengan dimensi fleksibilitas, meritokrasi dan insentif dan Pilar 10 pada dimensi ukuran pasar. Sedangkan Pilar 9 pada dimensi Kedalaman, Stabilitas mengalami peningkatan
- d. *Aspek Ekosistem Inovasi*, yang terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu pada pilar 11 dan pilar 12 yang masing-masing mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022, yaitu Pilar 11 dengan dimensi persyaratan administrasi usaha dan pilar 12 dengan dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi, Riset, Komersialisasi.

Berdasarkan capaian aspek tersebut maka rata-rata dari hasil skoring IDSD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada pada tiga (tahun terakhir) yaitu 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami trend peningkatan masing-masing sebesar 0,06 ditahun 2019, kemudian 2,58 ditahun 2020, dan 2,64 ditahun 2021, 2,83 ditahun 2022 dan 2,99 ditahun 2023

Selanjutnya jika disandingkan disandingkan dengan daerah pada kawasan Makassar yang meliputi Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kota Makassar dan Kabupaten Maros, maka capaian IDSD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk satu tahun terakhir yaitu ditahun 2023 maka diperoleh gambaran perbandingan pada tabel berikut;

Tabel II.50.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kab.Gowa dan Kab.Takalar Tahun 2023

Indikator	Kab. Pangkep	Kab. Maros	Kota Makassar	Kab. Gowa	Kab. Takalar
Lingkungan Pendukung					
Pilar 1 (Institusi)	4,24	4,44	4,34	3,72	4,08
Pilar 2 (Infrastruktur)	3,14	2,91	2,54	3,07	3,19
Pilar 3 (Adopsi TIK)	4,47	4,33	4,91	4,33	4,35
Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	2,91	3,34	3,17	3,31	3,2
SDM					
Pilar 5 (Kesehatan)	3,62	3,79	4,03	3,89	3,66
Pilar 6 (Keterampilan)	3,29	3,52	4,17	3,36	3,35
Pilar 7 (Pasar riaduk)	1,33	3,37	4,22	3,3	2,35
Pasar					
Pilar 8 (Pasar tenaga kerja)	2,57	3,11	4,14	3,32	3,24
Pilar 9 (Sistem keuangan)	0,82	0,93	3,21	1,65	1,58
Pilar 10 (Ukuran pasar)	4,37	4,24	5,00	4,31	3,96
Ekosistem Inovasi					
Pilar 11 (Dinamisme bisnis)	2,65	2,82	2,71	2,48	3,78
Pilar 12 (Kapabilitas inovas)	2,46	2,75	4,41	2,48	1,76
SKOR IDSD	2,99	3,3	3,91	3,72	3,21

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut menggambarkan bahwa capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023 pada Kawasan Makassar menunjukkan variasi yang cukup signifikan antara kabupaten dan kota yang ada dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah dalam kawasan Makassar. Berikut hasil analisis IDSD berdasarkan skor yang telah dicapai untuk masing-masing kab/kota:

1. Kota Makassar dengan Skor IDSD: 3,91. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Kota Makassar menunjukkan daya saing yang paling tinggi di antara daerah lain. Skor yang relatif tinggi ini dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti infrastruktur yang lebih baik, akses ke pasar yang lebih luas, serta adanya berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mendukung perkembangan sumber daya manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki kebijakan yang lebih baik dalam hal pengembangan ekonomi dan investasi.
2. Kabupaten Gowa dengan Skor IDSD: 3,72. Kabupaten Gowa berada di posisi kedua setelah Kota Makassar. Skor ini menunjukkan bahwa Gowa memiliki potensi daya saing yang cukup baik. Sektor ekonomi yang berkembang, seperti pertanian, pariwisata, atau industri, yang mendukung peningkatan skor ini. Selain itu, kedekatan dengan Makassar juga dapat memberikan dampak positif terhadap daya saing Gowa.
3. Kabupaten Maros dengan Skor IDSD: 3,3. Dengan skor yang lebih rendah dibandingkan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam meningkatkan daya saing. Meskipun demikian, Maros memiliki potensi yang bisa dikembangkan, terutama dalam sektor pariwisata dan pertanian. Upaya pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini dapat membantu meningkatkan skornya di masa mendatang.
4. Kabupaten Takalar dengan Skor IDSD: 3,21. Kabupaten Takalar memiliki skor yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa daya saingnya masih perlu ditingkatkan. Terdapat kendala dalam hal infrastruktur, aksesibilitas, atau pengembangan sektor ekonomi. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menarik investasi dan mengembangkan potensi lokal.
5. Kabupaten Pangkep dengan Skor IDSD: 2,99. Dengan skor yang paling rendah, Kab.Pangkep menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal daya saing. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih kurangnya infrastruktur, akses ke pasar yang terbatas, dan masih rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Untuk memperbaiki kondisi ini perlu adanya kebijakan yang fokus pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat

Dari hasil analisis tersebut maka IDSD di Kawasan Makassar menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki posisi dominan dalam hal daya saing, diikuti oleh Kabupaten Gowa. Kabupaten Maros, Kab Takalar, dan khusus untuk Kab Pangkep yang menunjukkan perlunya peningkatan yang signifikan dalam meningkatkan daya saing, serta intervensi kebijakan dan program yang berfokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan sektor ekonomi lokal dalam meningkatkan capain IDSD.

Untuk Perbandingan provinsi dan nasional maka capaian skoring IDSD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga masih lebih rendah dengan skor nilai sebesar 2,99, 3,70 untuk provinsi dan 3,44 untuk nasional. Adapun gambaran realisasi capaian IDSD untuk tahun 2023 dari masing-masing komponen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.51.
Perbandingan Tingkat Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Pangkep, Provinsi dan Nasional Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023		
	Kab. Pangkep	Provinsi Sul-Sel	Nasional
Lingkungan Pendukung			
Pilar 1 (Institusi)	4,24	4,15	4,3
Pilar 2 (Infrastruktur)	3,14	3,33	2,71
Pilar 3 (Adopsi TIK)	4,47	3,49	3,58
Pilar 4 (IStabilitas Ekonomi Makro)	2,91	3,77	3,54
SDM			
Pilar 5 (Kesehatan)	3,62	3,83	3,79
Pilar 6 (Keterampilan)	3,29	3,91	3,77
Pilar 7 (Pasar rioduk)	1,33	2,61	2,64
Pasar			
Pilar 8 (Pasar tenaga kerja)	2,57	3,35	3,85
Pilar 9 (Sistem keuangan)	0,82	3,51	3,53
Pilar 10 (Ukuran pasar)	4,37	4,68	4,36
Ekosistem Inovasi			
Pilar 11 (Dinamisme bisnis)	2,65	4,02	3,22
Pilar 12 (Kapabilitas inovas)	2,46	3,7	3,03
SKOR IDSD	2,99	3,70	3,44

Sumber: IDSD Balitbangda Kabupaten Pangkep Tahun 2019-2023

Dari tabel perbandingan capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023 antara Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat nasional menunjukkan gambaran yang menarik mengenai posisi daya saing masing-masing dengan analisis sebagai berikut:

- Daya Saing Kabupaten Pangkep: Dengan Skor IDSD Kab. Pangkep yang rendah menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saingnya. Upaya untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan, dan mengembangkan sektor ekonomi lokal sangat diperlukan.
- Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional: Meskipun Provinsi Sulawesi Selatan memiliki skor yang lebih tinggi, dengan 3,70, ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Kab. Pangkep harus berupaya untuk menyelaraskan kebijakan dan program pengembangan dengan strategi yang lebih luas yang diterapkan di tingkat provinsi.
- Strategi Peningkatan: Kab. Pangkep diharapkan untuk mengadopsi keberhasilan provinsi dalam hal kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan sektor-sektor unggulan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan.

Secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa Kab. Pangkep perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saingnya, terutama dalam konteks yang lebih luas di tingkat provinsi dan nasional.

2.2.1.2. Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti

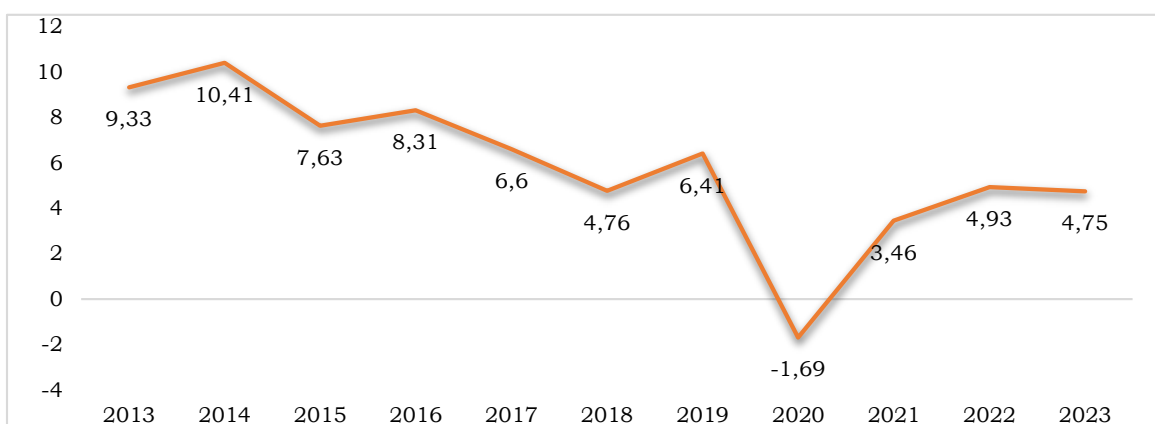
Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selain itu, kerja sama tidak hanya sebatas legal formal berbentuk dokumen kesepakatan bersama akan tetapi agar segera ditindaklanjuti perjanjian kerjasamanya sehingga akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung fluktuatif, yakni dari 6,6 persen pada tahun 2017, turun menjadi 4,76 persen pada 2018, naik menjadi 6,41 pada tahun 2019, mengalami kontraksi sebesar -1,69 persen pada 2020, naik pada tahun 2021 sebesar 3,46 persen dan naik kembali menjadi sebesar 4,93 persen pada tahun 2022 serta mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 4,75. Laju Pertumbuhan PDRB dari Tahun 2017-2023 disajikan pada grafik sebagai berikut:

Grafik II.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013-2023



Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023

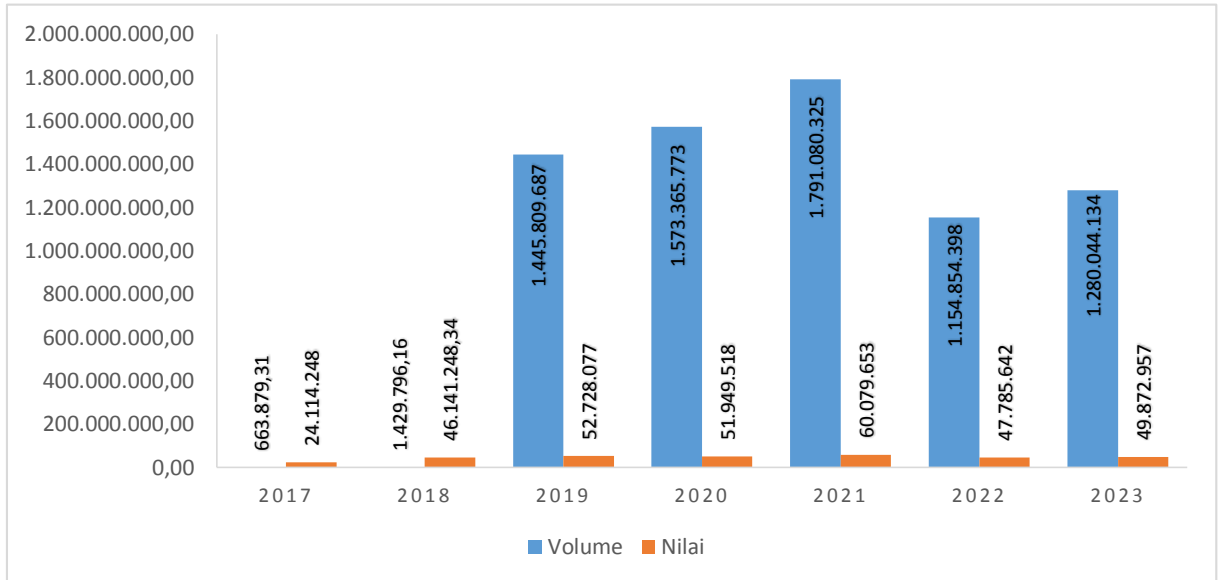
Bahwa Tren Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pangkep secara keseluruhan menunjukkan tren positif meskipun terjadi penurunan tajam pada tahun 2020, namun pemulihan yang terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup meskipun pertumbuhannya belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Tentunya ini menjadi tantangan kedepan bagaimana Kab.Pangkep bisa dengan konsisten menaikkan kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat capaian yang diharapkan.

2.2.1.4. Volume dan Nilai Ekspor

Volume dan Nilai Ekspor adalah indikator penting dalam perdagangan dan ekonomi suatu daerah. Volume ekspor menunjukkan seberapa besar produk yang keluar, sedangkan nilai ekspor mencerminkan nilai ekonomis dari ekspor tersebut. Kenaikan nilai ekspor tidak selalu sejalan dengan kenaikan volume, karena harga barang juga memengaruhi nilai tersebut.

Volume dan Nilai Ekspor menurut Pelabuhan Muat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berada di Pelabuhan Biring Kassi. Volume dan Nilai Ekspor dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 Volume yang dimuat sebanyak 1.280.044.134 kg dan Nilai FOB sebesar 49.872.957 US\$. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II.11.
Volume (kg) dan Nilai Ekspor (US\$)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator yang bisa dipakai dalam melihat atau menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang ada. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah.

Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja.

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen, turun 0,18 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 188.189 orang, berkurang 5.090 orang dibanding tahun 2022. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 turun sebesar 4,68 persen poin dibandingkan TPAK tahun 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 178.680 orang, menurun sebanyak 5.090 orang dari tahun 2022. Penduduk usia kerja adalah semua orang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Berikut perkembangan penduduk usia kerja dan angkatan kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Tabel II.52.
Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan Status Pekerjaan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 – 2023

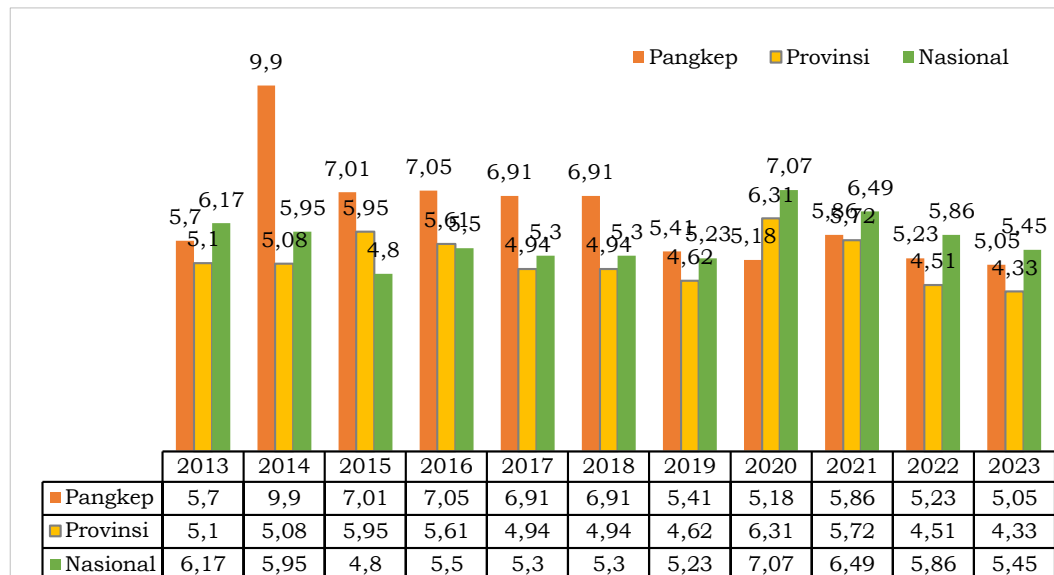
Kegiatan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	150.852	147.852	161.910	165.108	193.279	188.189
Bekerja	140.433	139.173	153.521	155.435	183.176	178.680
Tidak Bekerja	10.419	7.962	8.389	9.673	10.103	9.509
Bukan Angkatan Kerja	86.711	93.192	91.649	91.135	65.608	80.711
Sekolah	20.533	18.124	14.524	15.729	-	15.047
Mengurus Rumah Tangga	59.454	68.485	65.507	62.481	-	59.639
Lainnya	6.724	6.583	11.618	12.925	-	6.025
Jumlah	237.563	240.327	253.559	256.243	258.887	268.900
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,5	61,22	63,85	64,43	74,66	69,98
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,91	5,41	5,18	5,86	5,23	5,05

sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

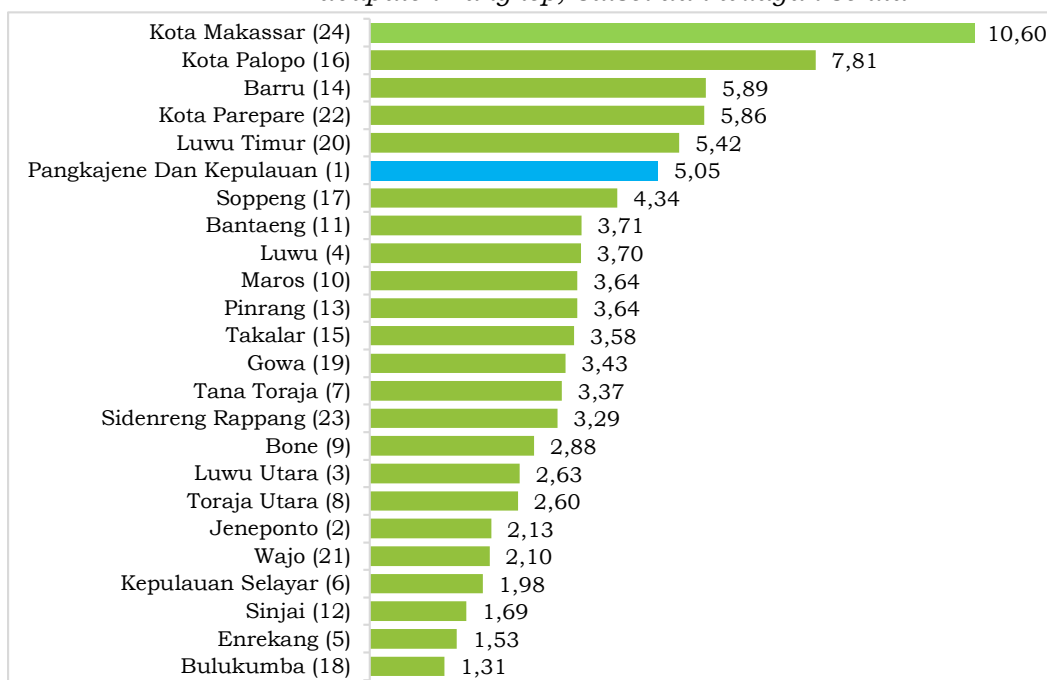
Berdasarkan hasil perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023, cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 nilai Angkatan Kerja sebesar 150.852 jiwa dengan jumlah Angkatan Kerja sebesar pekerja sebesar 140.433 jiwa. kemudian pada tahun 2019 Angkatan Kerja mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 147.135 dengan jumlah bekerja 139.173 jiwa. Kemudian Pada tahun 2019 Angkatan Kerja kembali meningkat sebesar 150.852 jiwa dengan jumlah pekerja mencapai 140.433 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah Angkatan Kerja sebesar 161.910 jiwa dengan jumlah pekerja sebesar 153.521 jiwa. Peningkatan ini juga berlangsung pada tahun 2021 sebesar 155.435 jiwa pekerja dengan Angkatan kerja sebesar 165.108 jiwa dan pada Tahun 2022 sebesar 183.176 pekerja dengan jumlah Angkatan Kerja sebesar 193.279 jiwa, kemudian pada Tahun 2023 nilai Angkatan Kerja turun menjadi 188.189 jiwa

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu lima tahun (2013-2023) cenderung fluktuatif. Secara lebih lengkap, perkembangan TPT Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.12.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.Pangkep, Provinsi dan Nasional Tahun 2013-2023



Grafik II.13.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023
Kabupaten Pangkep, Sulsel dan wilayah sekitar



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena banyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi. Pada tahun 2020 rupanya pertumbuhan ekonomi berkontraksi akibat bencana non pandemi covid-19 mengakibatkan pengangguran bertambah sehingga TPT naik. Tahun 2023 TPT mengalami penurunan sebesar 0,18 persen.

2.2.1.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja serta merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Berikut perkembangan penduduk usia kerja dan angkatan kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

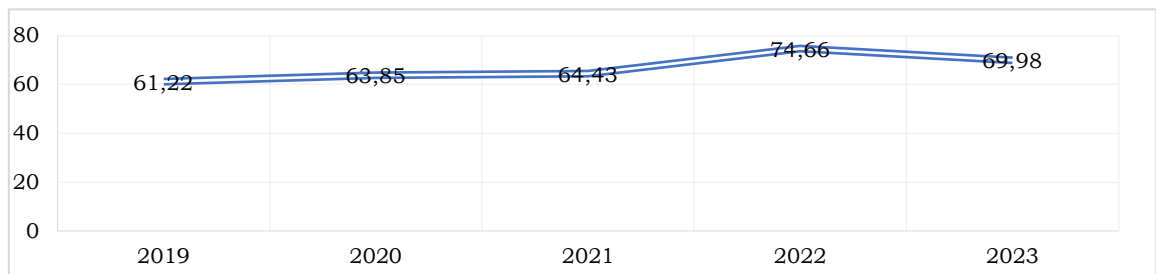
Tabel II.53.
TPAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 – 2023

S u	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,50	61,22	63,85	64,43	74,66	69,98

sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

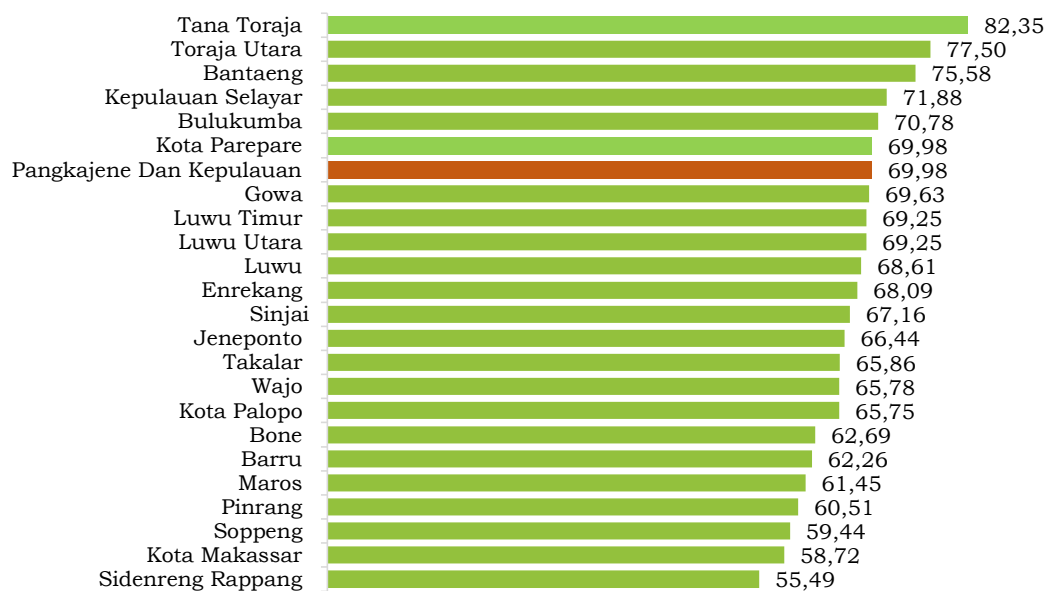
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu lima tahun (2018-2023) cenderung fluktuatif. Secara lebih lengkap, perkembangan TPAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.14.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2018-2023
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Grafik II.15.
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Pangkep, Sulsel dan wilayah sekitar



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

2.2.1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah persentase perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dari total populasi perempuan dalam kelompok usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas).

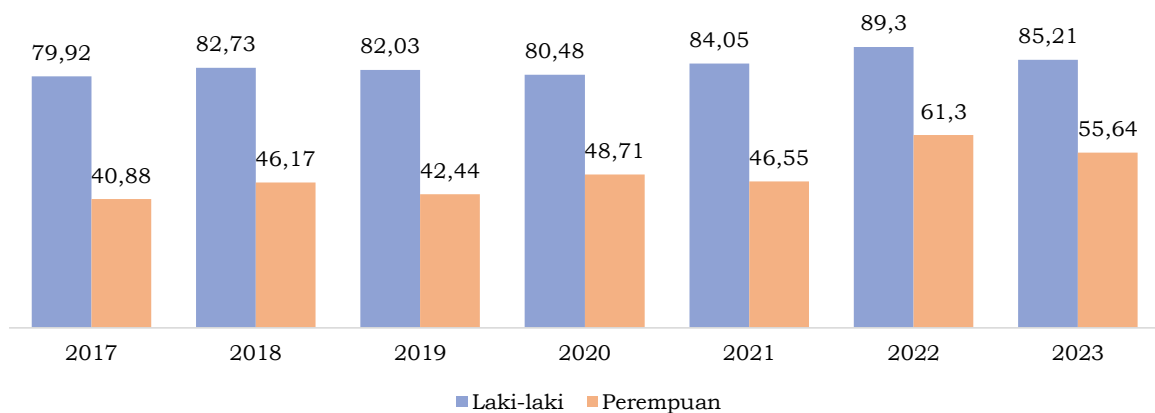
TPAK ini merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja dan perkembangan ekonomi.

Faktor yang memengaruhi TPAK perempuan meliputi:

1. Kebijakan sosial dan ekonomi: Seperti cuti melahirkan, ketersediaan fasilitas penitipan anak, dan perlindungan hukum untuk pekerja perempuan.
2. Budaya dan norma sosial: Peran gender tradisional dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja atau tinggal di rumah.
3. Akses ke pendidikan: Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin besar kemungkinan mereka berpartisipasi dalam angkatan kerja.
4. Fasilitas dan infrastruktur: Seperti transportasi, keamanan, dan akses terhadap pekerjaan formal.

Peningkatan TPAK perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperbaiki kesejahteraan keluarga, serta mengurangi kesenjangan gender dalam dunia kerja.

Grafik II.16.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2023 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

2.2.1.8. Produktivitas Tanaman Padi

Nilai Produktivitas tanaman padi merujuk pada jumlah hasil (produksi) yang diperoleh dari lahan pertanian yang ditanami padi dalam periode tertentu. Nilai ini biasanya diukur dalam satuan ton per hektar (ton/ha) dan mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti tanah, air, dan input pertanian lainnya dalam menghasilkan hasil panen.

Secara umum, nilai produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa praktik pertanian yang digunakan efektif, dan dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan produksi pangan.

Tabel II.54
Luas Panen, Rekap Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Padi (ton)	136.099,70	120.903,74	129.809,55	127.705,17	118.394,01	113.755,41
Luas Panen Tanaman Padi (ha)	30.953,28	26.183,26	26.202,13	26.419,25	26.838,34	26.361,25
Produktivitas Tanaman Padi (kw/ha)	43,97	46,18	49,54	48,34	44,11	43,15

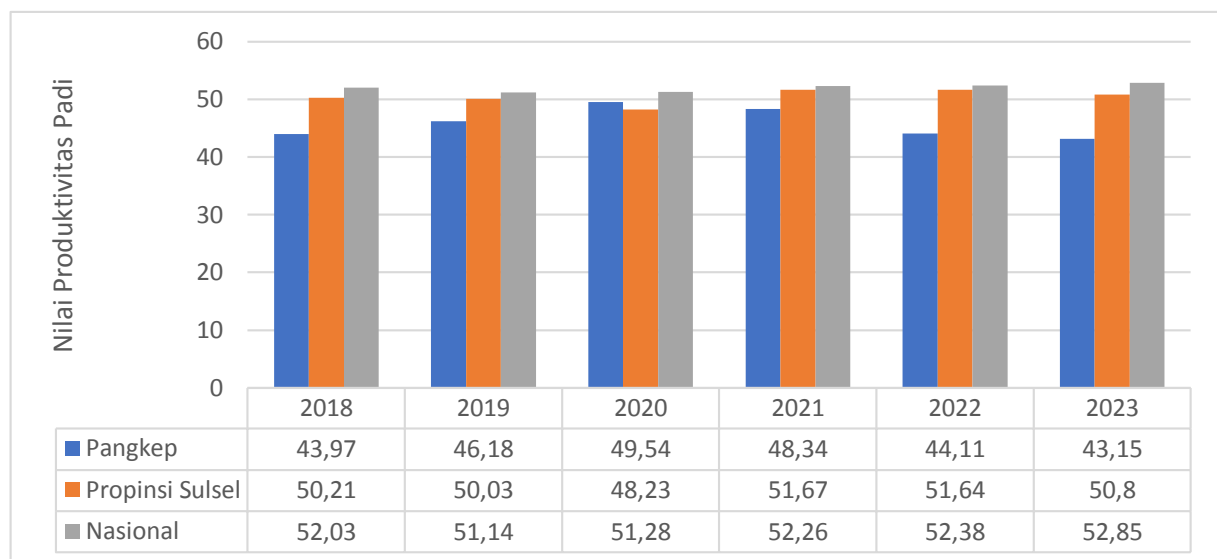
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Produktivitas Tanaman Padi pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami penurunan. Meskipun Luas Tanaman Padi terus bertambah namun disisi lain rekap produksi padi terus menurun mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan pupuk unggul, perubahan iklim, kualitas penurunan tanah, ketersediaan air irigasi hingga penggunaan teknologi pertanian yang modern.

Produktivitas padi dipengaruhi oleh berbagai factor yang dapat dibagi menjadi factor biotik, abiotic, dan manajemen. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1. Faktor Lingkungan, diantaranya Iklim, Kualitas kesuburan tanah, serta ketersediaan air yang berkelanjutan
2. Faktor Genetik, diantaranya pemilihan varietas padi yang unggul, tahan terhadap hama dan penyakit
3. Faktor Agronomis, diantaranya Pengelolaan Tanah yang baik, pemberian pupuk yang tepat, serta pengendalian hama dan penyakit.
4. Faktor Manajemen, diantaranya penentuan waktu tanam yang tepat, pemeliharaan tanaman, serta penggunaan teknologi pertanian yang modern.
5. Faktor Sosial-Ekonomi, diantaranya ketersediaan sumber daya pertanian, Pendidikan dan pelatihan petani serta kebijakan pemerintah yang mendukung produktivitas pertanian.

Grafik II.17.
Perbandingan Nilai Produktivitas Padi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Nilai Produktivitas Padi pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya pada rentang tahun 2021-2023 masih jauh diatas capaian nilai Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional. Meskipun Capaian Provinsi Sulsel masih di atas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan namun secara statistik juga mengalami penurunan nilai produktivitas pada 3 tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu penyuplai padi terbesar di Sulawesi Selatan. Selain itu, Nilai Produktivitas Padi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkontribusi terhadap nilai PDRB sektor pertanian untuk mendukung Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.1.9. Produksi Perikanan

Usaha perikanan menjadi mata pencaharian utama Sebagian besar penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang ditunjang dengan kondisi geografis yang menguntungkan, seperti akses perairan yang kaya akan sumber daya ikan.

1. *Produksi perikanan tangkap* di wilayah kabupaten pangkajene dan kepulauan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil tangkapan.

Beberapa komoditas perikanan tangkap yang dominan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi:

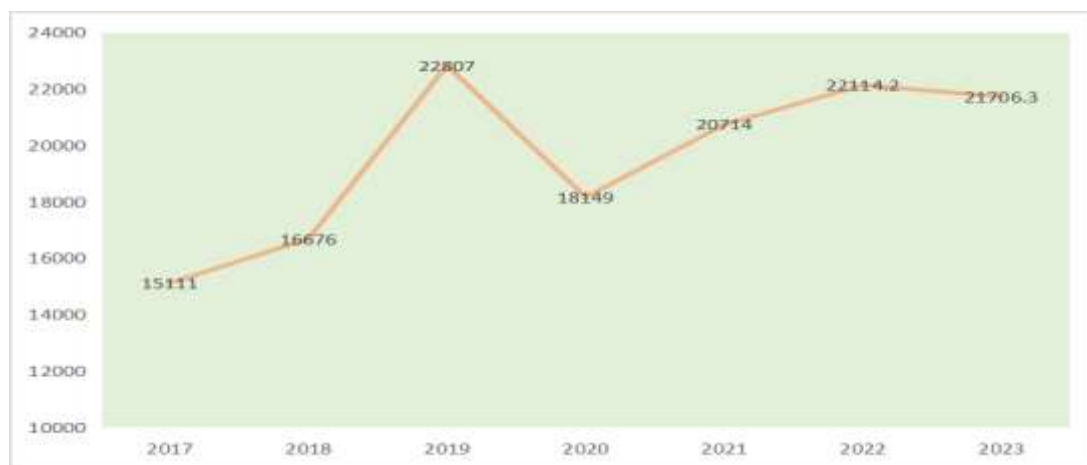
- a. Ikan Bandeng: Merupakan komoditas unggulan yang memiliki permintaan tinggi, baik di pasar lokal maupun ekspor. Produksi ikan bandeng di daerah ini menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam budidaya.
- b. Udang: Jenis udang seperti udang vanamei dan udang windu juga menjadi komoditas penting yang mendukung perekonomian lokal.
- c. Ikan Cakalang dan Kakap Merah: Selain ikan bandeng, ikan cakalang dan kakap merah juga banyak ditangkap dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Beberapa factor yang mempengaruhi perikanan tangkap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

- Faktor Lingkungan: Topografi laut, arus laut, dan kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap keberadaan ikan. Perubahan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dan ketersediaannya di perairan.
- Keterbatasan Infrastruktur: Ketersediaan fasilitas pendukung seperti pelabuhan dan alat tangkap yang memadai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Banyak fasilitas yang tidak teroptimalkan, yang dapat menghambat kegiatan penangkapan ikan.
- Keterampilan dan Pengetahuan Nelayan: Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam teknik penangkapan dan pengelolaan sumber daya perikanan dapat mengakibatkan hasil tangkapan yang tidak maksimal. Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.
- Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi telah memberikan dampak signifikan terhadap produksi perikanan tangkap, dengan pembatasan aktivitas yang mengurangi kemampuan nelayan untuk menangkap ikan dan mendistribusikannya ke pasar.

Berikut grafik capaian produksi perikanan Tangkap Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021;

Grafik II.18.
Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Sulawesi Selatan dan Dinas Perikanan Tahun 2024

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami tren yang fluktuatif dengan peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2019, diikuti oleh penurunan pada tahun 2020, dan pemulihan pada tahun 2021 dan 2022. Namun terjadi penurunan di tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sektor ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, ekonomi, dan kebijakan pengelolaan.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya merujuk pada efisiensi dan hasil yang diperoleh dari kegiatan budidaya ikan dan organisme perairan lainnya. Ini mencakup jumlah ikan atau organisme yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam satuan berat (kilogram) per satuan area (misalnya, hektar) atau per satuan volume (misalnya, ton).

Beberapa Jenis Budidaya perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain Budidaya Jaring Apung Laut, Budidaya Kolam Air Tenang, Budidaya Rumput Laut serta Budidaya Tambak Sederhana. Produksi perikanan budidaya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan di seluruh dunia.

Tabel II.55
Rekap Produksi, Luas Areal dan Produktivitas Perikanan Budidaya
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013-2023

Indikator	Satuan	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rekap Produksi Perikanan Budidaya	(ton)	140,268.90	167,730.70	202,078.10	226,369.50	301,369.50	336,454.10	468,312.30	442,605.20	473,025.40	427,456.30	311,560.70
Luas Areal Perikanan Budidaya	(ha)	14,291.10	14,291.10	14,291.10	14,290.70	14,490.20	15,901.60	14,492.30	14,491.65	14,490.60	14,491.70	14,491.70
Produktivitas Perikanan Budidaya	(ton/ha)	9.815	11.737	14.140	15.840	20.798	21.159	32.316	30.542	32.644	29.497	21.499

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Berdasarkan penyajian data 10 tahun terakhir yang diolah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat digambarkan nilai Produktivitas Perikanan Budidaya pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya pada rentang tahun 2021-2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada nilai rekap produksi perikanan budidaya yang menurun drastis, dimana Jenis Budidaya Rumput Laut mengalami penurunan produksi yang cukup besar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penurunan produksi budidaya rumput laut antara lain

kualitas air, perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, teknik budidaya yang tidak efisien, pengelolaan sumber daya yang buruk serta kurangnya pengetahuan dan teknologi.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan Sosial budaya, merupakan kondisi kesejahteraan dan kebudayaan masyarakat suatu daerah. Ada pun indikator yang digunakan untuk mengukur Sosial Budaya.

2.2.2.1. Umur Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Penghitungan Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.

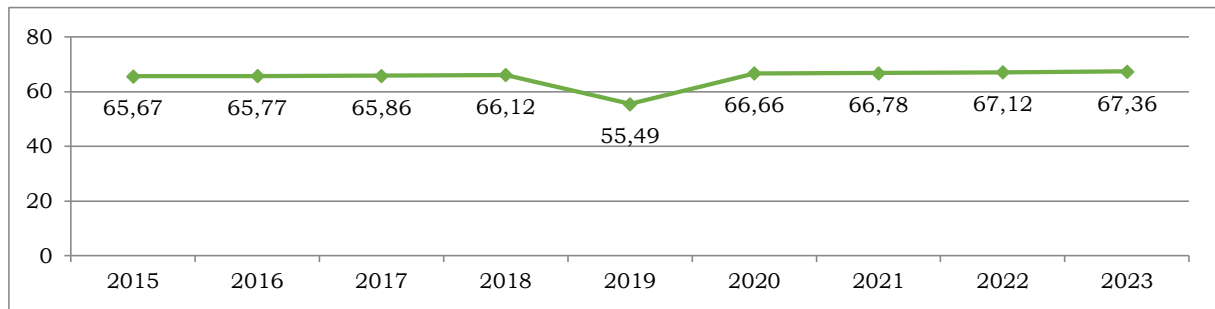
Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup atau panjang hidup yakni jumlah tahun maksimum penduduk untuk dapat hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Pada rumus perhitungan UHH diketahui bahwa umur semua orang yang meninggal dijumlah kemudian dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut, dengan dasar tersebut maka: 1). Kematian ibu dan bayi menurunkan UHH; 2). Kematian Balita Menurunkan UHH; 3). Kematian karena penyakit menular pada orang remaja, dewasa, dan usia produktif menurunkan UHH; 4). Kematian karena kecelakaan menurunkan UHH; 5). Umur penduduk diatas 76 tahun menaikkan UHH. Apabila ditemukan angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program social lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan angka harapan hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik.

Pada Negara berkembang, biasanya angka harapan hidup masih berkisar 40-60 tahun. Namun dalam Negara maju, angka harapan hidup relative lebih tinggi hingga mencapai umur 90 tahun.

Grafik II.19
Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Upaya yang dibutuhkan untuk menaikkan UHH antara lain dengan cara: 1). Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, Pemberian Mikro nutrient, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll); 2). Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Immunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular; 3). Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 4) Memperbaiki status gizi keluarga; 5). Survey Indeks Keluarga Sehat; 6). Perbaikan kesehatan lingkungan.

2.2.2.2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

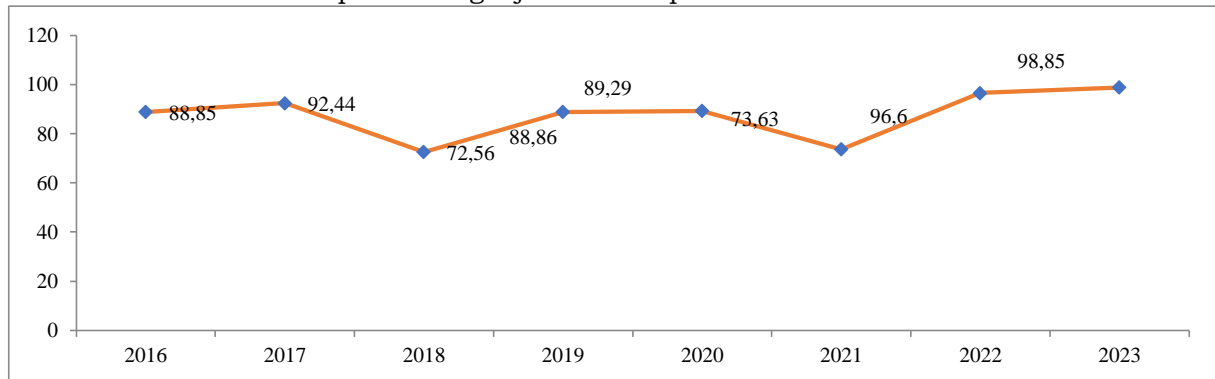
JKN bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga Negara Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin. Manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan bahwa Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Besarnya persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tidak terlepas dari karakteristik demografis, karakteristik rumah tangga, kondisi keuangan dipilih untuk pemeriksaan berdasarkan investigasi masa lalu dengan penyesuaian tertentu karena aksesibilitas informasi. Selain itu juga di tentukan oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan, biaya, sikap dan dukungan keluarga, usia, wilayah, riwayat penyakit kronis, status ekonomi, tempat tinggal, kemampuan membayar, kesediaan membayar, rata-rata pengeluaran bulanan, penghindaran resiko, jumlah kerugian, pendapatan, infoemasi religiusitas, keyakinan, pendidikan, pendapatan, motivasi, niat, kebijakan kelambagaan, persepsi, dukungan social, jarak dan sosialisasi.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2023 masih mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 88,85 persen kemudian meningkat 3,53 persen menjadi 92,44 persen di tahun 2017. Namun kemudian menurun 19,88 persen menjadi 72,56 persen di tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat masing-masing sebesar 88,86 persen dan 89,29 persen namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 15,66 persen menjadi 73,63 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 sebanyak 22,97 persen menjadi 96,60 persen. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yaitu 98,85 persen. Seperti pada grafik di bawah.

Grafik II.20
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 -2023

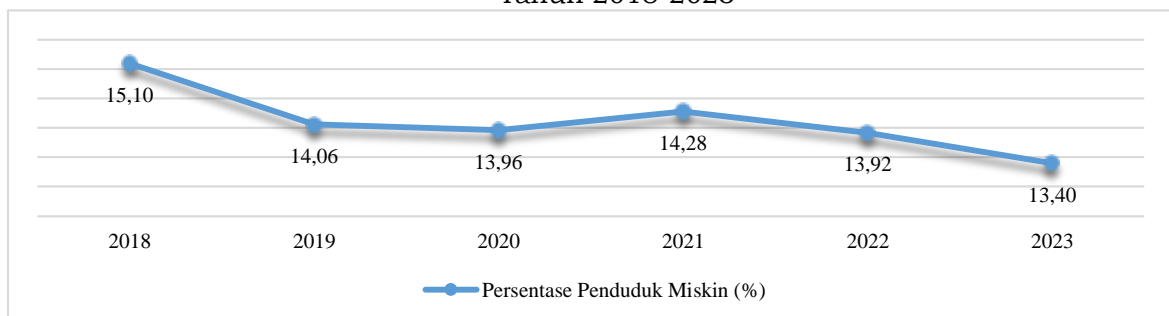


Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

2.2.2.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selama periode tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkurang sebanyak 870 jiwa, dari 48.400 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 47.530 ribu jiwa pada tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 0,87 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rentang waktu satu tahun, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin, dari 13,92 persen pada tahun 2022 menjadi 13,40 persen pada tahun 2023. Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut:

Grafik II.21.
Presentase Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018-2023

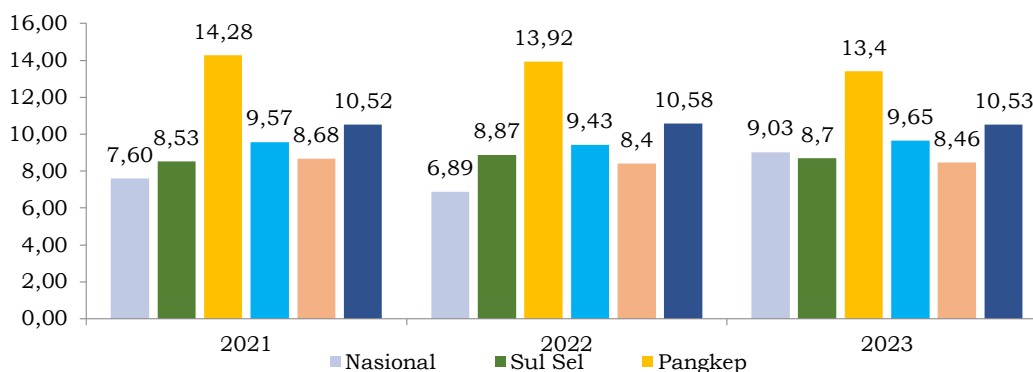


Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode tahun 2022 antara lain adalah:

- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) tinggi, berada pada urutan nomor 3 di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri atas indeks kesehatan, Indeks Pengeluaran dan Indeks Pendidikan relatif sedang.
- Jumlah penduduk hampir miskin relatif banyak
- Program perlindungan sosial masih belum tepat sasaran.

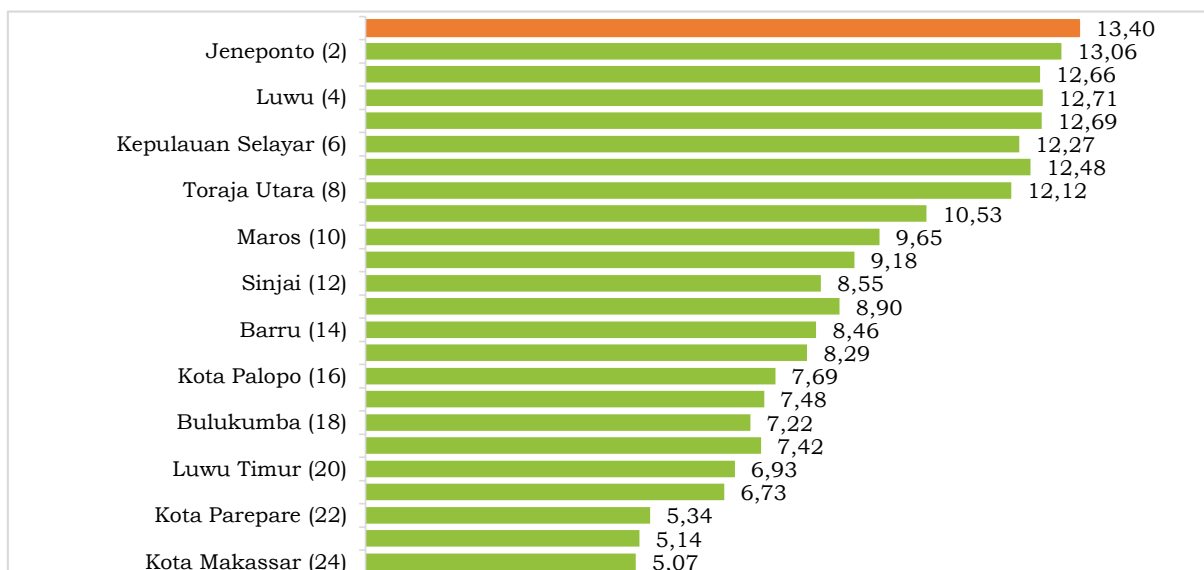
Grafik II.22.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkep dengan Nasional, Sulsel dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 sebesar 13,40% lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 8,70% dan lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional sebesar 9.03%, begitu juga dengan daerah di sekitarnya. Pemerintah baik pusat dan daerah terus berusaha dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat guna penurunan kemiskinan melalui program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, program padat karya, bedah rumah tidak layak huni, pemberdayaan pihak swasta dalam membantu penanggulangan kemiskinan baik melalui BAZNAS dan CSR perusahaan serta program 1 (satu) perangkat daerah mendampingi 5 (lima) warga miskin. Data tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibanding Kabupaten di Sulawesi Selatan selengkapnya seperti terlihat pada grafik berikut.:

Grafik II.23.
Persentase Kemiskinan Sulawesi Selatan Tahun 2023

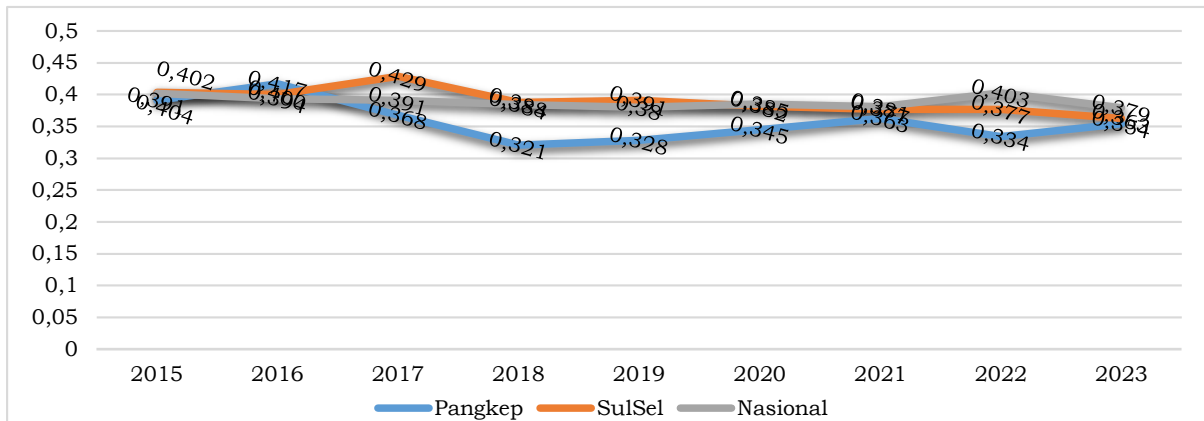


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

2.2.2.4. Indeks Gini

Rasio Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Rasio Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Berikut Grafik perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2023.

Grafik II.24.
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan, Provinsi, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024.

Rasio gini pada tahun 2015 adalah 0,368 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 6,6% pada tahun yang sama. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,76% menurunkan Rasio gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi 0,321. Sedangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 6,41%, Rasio gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan naik 0,328 pada tahun yang sama. Pada tahun 2020 Rasio gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan naik menjadi 0,345 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0,363 sedangkan tahun 2022 menjadi 0,334. Indikator Rasio gini Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diukur oleh Rasio gini adalah sebesar 0,354. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,363 dan Nasional sebesar 0,379, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Tantangan besar pembangunan adalah bagaimana dapat memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Upaya perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan adalah juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan manusia. sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau daerah dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long healthy life), dimensi pengetahuan (knowledge) dan dimensi standar hidup layak (descent standard of living).

Indikator pembentuk IPM meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2017-2023. Indeks komponen IPM di masing-masing Kabupaten sekitar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami peningkatan, data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.56
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2017 – 2023

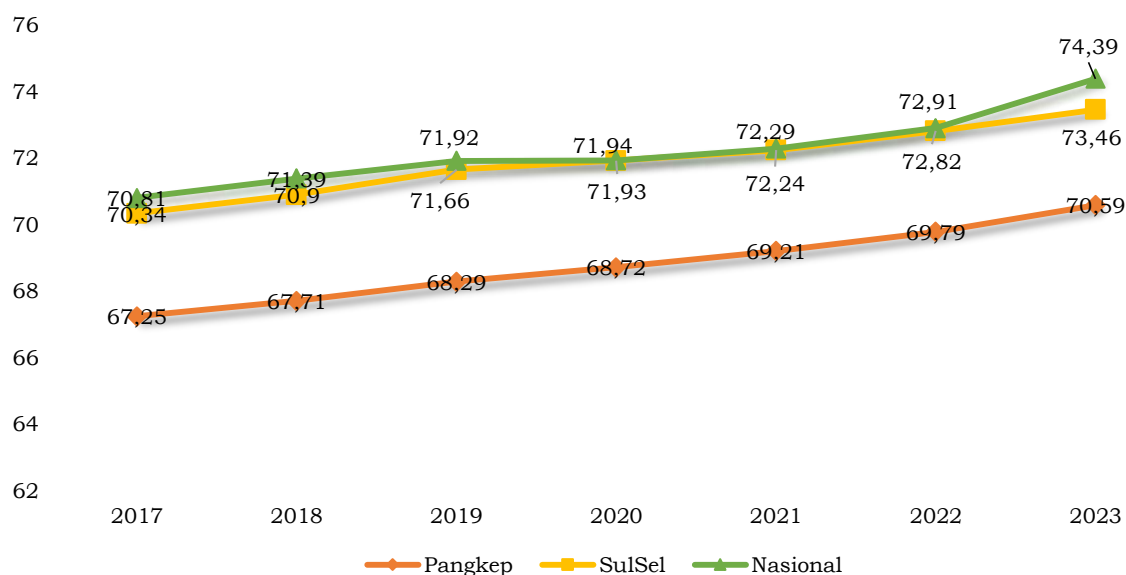
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Indeks Kesehatan	70,55	70,95	71,52	80,18	80,38	80,95	81,34
Angka Harapan Hidup (AHH)	65,86	66,12	66,49	72,12	72,25	72,62	72,87
B. Indeks Pendidikan	59,38	59,44	60,08	60,98	61,87	62,33	63,26
Harapan Lama Sekolah	12,40	12,41	12,51	12,76	12,77	12,78	12,80
Rata-rata Lama Sekolah	7,48	7,49	7,60	7,66	7,92	8,05	8,31
C. Indeks Pengeluaran	72,59	73,50	74,12	74,15	74,46	75,24	76,32
Paritas Daya Beli (Pengeluaran)	10.837	11.197	11.392	11.405	11.519	11.817	12.241
IPM Kabupaten Pangkep	67,25	67,71	68,29	71,31	71,81	72,41	73,23

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Dengan IPM sebesar 73,23 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami pertumbuhan IPM sebesar 0,82 dari tahun sebelumnya. Capaian level IPM Kabupaten mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 72,41. Komponen yang memiliki andil terbesar terhadap IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah indikator angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometric, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017 hingga 2023, namun masih berada di bawah provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik II.25.
Perkembangan IPM Kabupaten Pangkep, SulSel dan Nasional
Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Perkembangan kinerja IPM sempat melambat di tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19. Namun secara perlahan mulai bangkit di tahun 2021, bahkan tahun 2023 laju pertumbuhan semakin cepat sebesar 1,5 melampaui saat sebelum terjadi pandemic covid-19.

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Keluarga

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan iBangga merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan Pembangunan Keluarga yang digunakan untuk menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga meliputi atas 3 (tiga) dimensi dan 11 (sebelas) indikator, yaitu: 1) dimensi Ketentraman, terdiri atas 4 (empat) indikator; 2) dimensi Kemandirian, terdiri atas 5 (lima) indikator; dan 3) dimensi Kebahagiaan, terdiri atas 2 (dua) indikator.

Tabel II.57.
Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2023

Indeks Pembangunan Keluarga	Tahun		
	2021	2022	2023
	54,19	51,7	61,55

Sumber: Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2023

2.2.2.7. Indeks Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyebutkan Indeks Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Tabel II.58.
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 -2023

Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Tahun		
	2021	2022	2023
	70	76,4	60,75

Sumber: Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2023

2.2.2.8. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP Indonesia ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Sejak tahun 2018, Indonesia sudah memiliki Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan kepemudaan di tingkat nasional hingga di daerah sehingga kita dapat menilai keberpihakan pemerintah terhadap generasi mudanya.

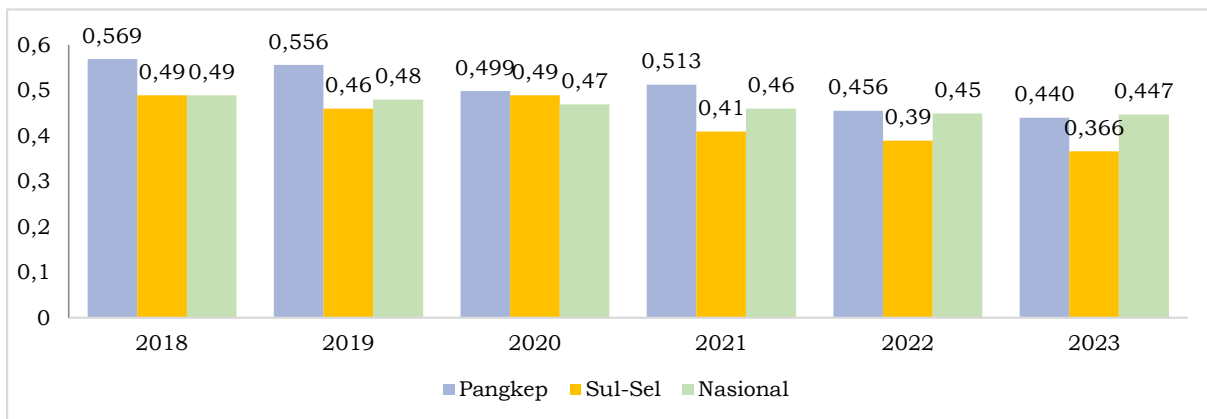
2.2.2.9. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tahun 2023 sebesar 0,44, turun 0,02 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,05 poin dan jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya mengalami penurunan yang fluktuatif. Indeks Ketimpangan Gender terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi pemberdayaan dan kesehatan reproduksi. Semakin kecil nilai Indeks Ketimpangan Gender, semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Jika dibandingkan dengan IKG Provinsi Sulawesi Selatan dan

Nasional, IKG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Ketimpangan gender adalah satu hambatan besar dalam pembangunan manusia. Ketika anak perempuan, remaja perempuan maupun perempuan dewasa tidak mendapatkan pendidikan dengan baik, sulit mengakses fasilitas kesehatan, dan tidak terlibat dalam panggung politik, maka kondisi ini menunjukkan ada ketimpangan bagi perempuan dalam proses pengembangan kapabilitas dan kemerdekaan untuk memilih jalan hidupnya. Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase perempuan meningkat dari 29,31 persen pada tahun 2021 menjadi 32,73 persen pada tahun 2022, sedangkan persentase laki-laki meningkat dari 35,69 persen pada tahun 2021 menjadi 38,74 persen pada tahun 2022. Selain itu, Indikator keterwakilan di parlemen pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase perempuan dari 11,43 persen di tahun 2021 menjadi 14,29 persen di tahun 2022.

Grafik II.26.
Perbandingan IKG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2.2.10. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi

Kondisi bidang keagamaan suatu wilayah menjadi gambaran salah satu bagian aspek kesejahteraan sosial budaya masyarakat. Untuk Kab. Pangkajene dan Kepulauan Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah beberapa diantaranya meliputi pengajian, perayaan hari besar agama, pelatihan dan perlombaan kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Adapun persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi selama Tahun 2019-2023 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.59.
Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 -2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kegiatan keagamaan	7	7	7	9	9
Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	7	7	7	9	9
Persentase kegiatan keagamaan difasilitasi (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2024

Dengan capaian persentase rata-rata sebesar 100%, menunjukkan semua kegiatan terlaksana dengan baik pada kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh factor tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Tentunya peran pemerintah

kedepan dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan tetap memperhatikan faktor lainnya seperti dukungan penganggaran dan memperluas keterlibatan masyarakat dari berbagai unsur.

2.2.2.11. Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi

Cagar budaya adalah warisan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Cagar budaya dilindungi oleh undang-undang untuk memastikan pelestarian dan perlindungannya bagi generasi mendatang. Berikut persentase cagar budaya yang ditetapkan pemerintah daerah Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 sampai dengan 2023;

Tabel II.60
Cagar Budaya yang Ditetapkan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 – 2023

Indikator	Tahun	
	2022	2023
Cagar Budaya teregistrasi	234	242
Cagar Budaya yang telah ditetapkan	6	32
Persentase cagar budaya yang telah ditetapkan (%)	2,56	13,22

Cagar budaya berfungsi sebagai identitas dan simbol dari kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Pada tahun 2022, terdapat 234 cagar budaya yang terdaftar, dan jumlah ini meningkat menjadi 242 cagar budaya pada tahun 2023, dengan penetapan yang signifikan dari 6 menjadi 32 cagar budaya, Peningkatan jumlah cagar budaya yang terdaftar dan ditetapkan dari tahun ke tahun mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Dengan pelestarian yang tepat, cagar budaya ini tidak hanya akan menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga identitas budaya.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Gambaran kondisi aspek daya Saing di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diuraikan dalam 4 (empat) hal, 1) Daya saing Ekonomi daerah, 2) Daya Saing SDM, 3) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur, dan 4) Daya saing Iklim Investasi.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Aspek Ekonomi merupakan salah satu komponen yang penting untuk menilai tingkat daya saing suatu daerah. Pembangunan ekonomi tentunya menjadi harapan daerah dimana perekonomian yang baik akan menunjang segala aktifitas yang berhubungan dengan perekonomian. Baik buruknya suatu perekonomian daerah tergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan terhadap segala sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Adapun indikator yang dapat menggambarkan pengelolaan perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yaitu;

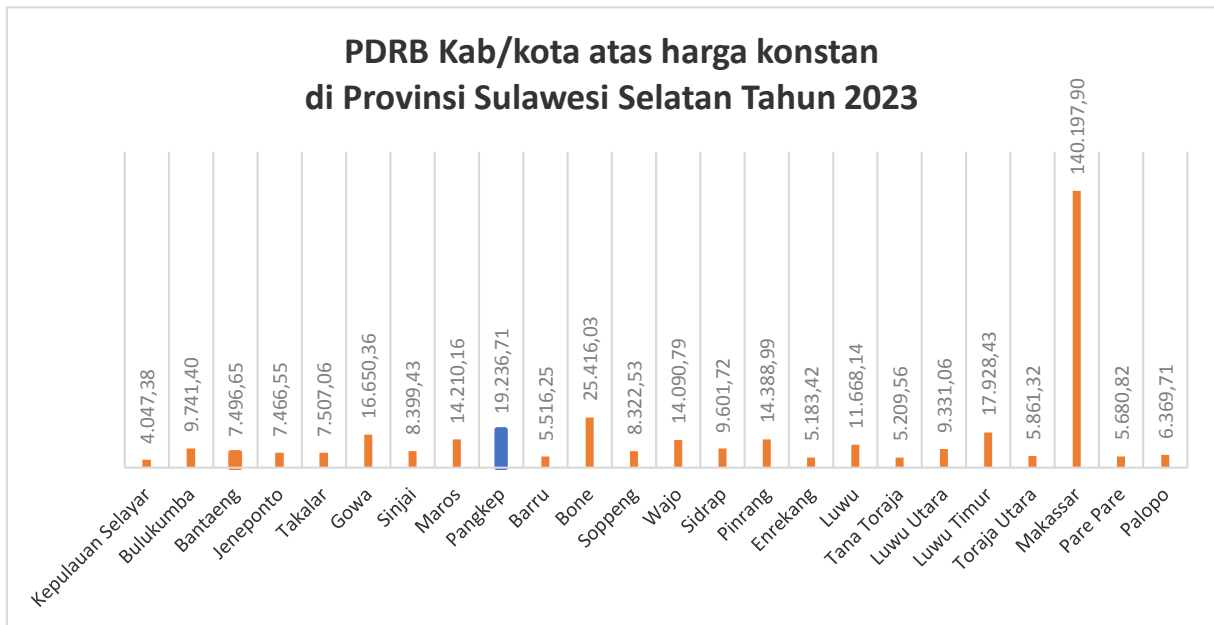
2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Untuk dapat melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu menganalisis kedudukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi Sulawesi

Selatan, dan selanjutnya juga melihat kedudukan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional. Kabupaten Pangkajene dan kepulauan PDRB berada pada peringkat ke 3 dari 24 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai PDRB atas harga konstan di tahun 2023 sebesar 19.236,71.

Grafik II.27.
Kedudukan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



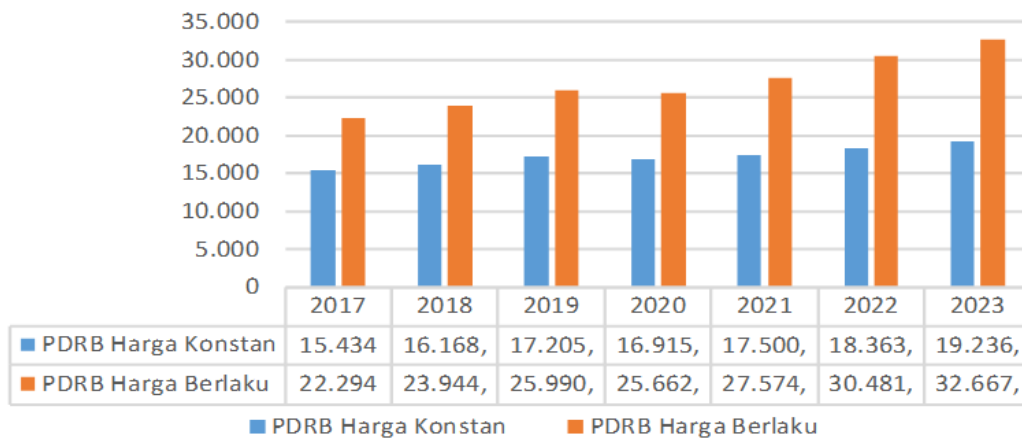
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 22,29 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.650,89 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 23,94 triliun rupiah. Pada tahun 2019 Nilai PDRB mencapai 25,99 triliun rupiah, jika dibandingkan dengan nilai PDRB di tahun 2020 mencapai 25,66 Milyar Rupiah mengalami penurunan sebesar 327,63 milyar rupiah, penurunan nilai PDRB ini dampak dari pandemic Covid 19. Di Tahun 2021 nilai PDRB mencapai 27,57 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,91 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 25,66 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kembalinya aktivitas ekonomi pasca adanya pandemi COVID-19 yang mulai teratasi (new normal) yang membuat roda perekonomian berputar kembali. Di tahun 2022 mencapai 30,48 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,907 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 25,57 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kembalinya aktivitas ekonomi pasca adanya pandemi COVID-19 yang mulai menghilang dan bangkitnya sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seperti industri pengolahan khususnya semen dan klinker serta sektor perikanan. Ditahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 32,667 triliun. PDRB Kabupaten Pangkep menunjukkan pertumbuhan yang baik dari sebelumnya dengan angka sekitar 7,18%. Hal ini merupakan indikasi positif bagi ekonomi daerah.

Berdasarkan harga konstan pada tahun 2017 angka PDRB mencapai 15,43 Triliun Rupiah, jika dibandingkan dengan angka PDRB tahun 2018 yang mencapai 16,16 Triliun Rupiah mengalami peningkatan sebesar 734,91 Milyar Rupiah. Di Tahun 2019 angka PDRB mencapai 17,20 Triliun Rupiah, jika dibandingkan dengan angka PDRB tahun 2020 mencapai 16,91 triliun Rupiah mengalami penurunan sebesar 289,94 milyar Rupiah. Penuruna angka PDRB dampak dari pandemic COVID 19. Pada tahun 2021 angka PDRB mencapai 17,50 triliun angka PDRB juga mengalami kenaikan sebesar 862,98

Milyar Rupiah dari pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh peningkatan produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Ditahun 2023 juga menunjukkan trend yang positif dengan naiknya pertumbuhan sebesar 4,75% atau naik dari tahun sebanyak 19,236 triliun. Adapun Nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan kepulauan disajikan pada grafik berikut:

Grafik II.28.
Pertumbuhan nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2017-2023



Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran pada tahun 2023 terjadi penurunan pertumbuhan pada beberapa komponen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Bahkan pada komponen Perubahan Inventori bernilai mines yaitu -85,14 persen, selain penurunan pada Konsumsi Rumah Tangga yang hanya sebesar 5,12 persen, demikian juga Pengeluaran Konsumsi LNPRT juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,49 persen. Berikut gambaran Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pangkep Tahun 2018 – 2023;

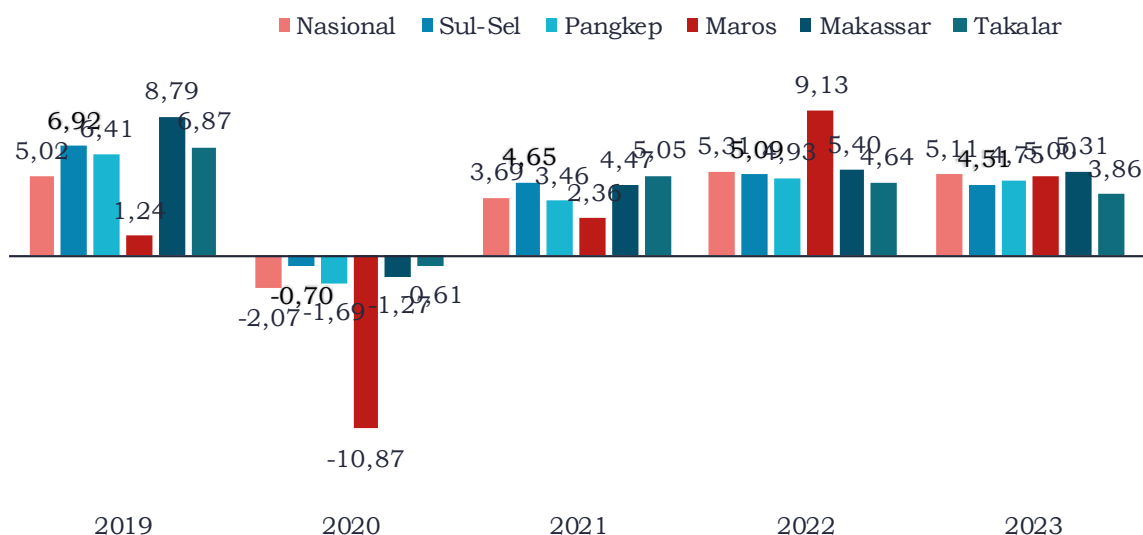
Tabel II.61.
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pangkep
Tahun 2018 – 2023 (%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	39,91	40,77	41,64	41,10	42,03	43,09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,88	1,23	1,16	1,11	1,15	1,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,13	5,16	5,15	4,92	4,59	4,99
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,27	14,50	15,62	16,46	16,32	16,37
Perubahan Inventori	1,29	0,27	0,44	0,06	0,36	0,05
Net Ekspor Barang dan Jasa	38,52	38,07	35,98	36,34	35,55	34,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep pada tiga tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan nasional, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, serta lebih tinggi dari Kabupaten Takalar.

Grafik II.29.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024.

Dalam rangka pembangunan daerah, diperlukan penentuan prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan tersebut adalah dengan melalui analisis struktur ekonomi secara menyeluruh. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama enam tahun terakhir (2017-2023) struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh 5 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi dan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 42,44 persen (angka ini menurun dari 42,85 persen di tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,07 persen (juga turun dari 21,13 persen di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,97 persen (naik dari 10,79 persen di tahun 2022). Diikuti oleh lapangan usaha sektor konstruksi sebesar 5,94 (naik sebesar 5,83 di tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen (meningkat dari 5,71 persen di tahun 2022). Distribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan dalam diagram berikut

Grafik II.30.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Panggalian; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan lapangan usaha Industri Pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan peranan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah Pertumbuhan kategori ini disebabkan karena meningkatnya kategori yang berhubungan langsung dengan kategori ini seperti konstruksi. Selain itu, Perusahaan pertambangan, khususnya pertambangan pasir dan kapus mulai kembali meningkatnya produksi akibat demand yang juga meningkat. Selain itu pertambangan yang dilakukan oleh usaha individu sudah mulai gencar kembali.

Sementara itu, penurunan yang terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kelangkaan yang terjadi pada ketersediaan pupuk dan diperparah dengan cuaca buruk dan bencana yang terjadi di sepanjang tahun 2022 untuk beberapa jenis tanaman khususnya tanaman bahan makanan.

Tabel II.62.
Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 – 2023

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	53,18	53,61	53,6	53,57	52,26	49,40	47,72	45,86	42,85	42,44	45,66
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,38	0,37	0,36	0,36	0,37	0,40	0,41	0,39	0,39	0,44	0,42

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Rasio Industri Pengolahan Dalam 2 dekade terakhir, kinerja pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum menunjukkan cenderung menurun, yaitu dari 53,18 persen pada tahun 2013 menjadi 45,66 persen pada tahun 2023. Penurunan ini semakin

drastis di tahun 2021 saat pandemi Covid19. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan terkontraksi sebesar 42,85 persen, namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 45,66 persen ditahun 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan pasar terhadap produksi semen tonasa yang cenderung mengalami peningkatan permintaan seiring dengan semakin bergeliatnya pembangunan infrastruktur.

Sektor pariwisata memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum cenderung fluktuatif pada kisaran 0,2 hingga 0,3. Pada tahun 2013 hingga 2019 terus meningkat hingga angka 0,41, kemudian di tahun terjadinya pandemi Covid 19 menurun pada angka 0,39, dan kembali membaik pada 2 tahun terakhir menjadi 0,44 pada tahun 2022 dan 0,42 pada tahun 2023.

2.3.1.2. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Di bidang pariwisata, penetapan kawasan Geopark Maros-Pangkep sebagai Unesco Global Geopark memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan manca negara yang cenderung meningkat dari tahun 2015 sejumlah 45.652 orang menjadi 17.354 orang pada tahun 2023. Pada masa pandemi Covid 19 terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebagai dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB). Meskipun jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung meningkat, namun pariwisata unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih perlu lebih dioptimalkan karena masih terbatas ragam atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan.

Tabel II.63.
Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 – 2023

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara	45.652	59.028	59.419	58.735	35.045	11.550	14.590	42.413	

2.3.1.3. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan singkatan dari Industri Kecil Menengah yang memproduksi barang-barang yang dijual oleh UKM (Usaha Kecil Menengah). Industri Kecil Menengah banyak dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti jenis IKM yang banyak dikembangkan seperti Usaha Kuliner, Konveksi, Usaha Kerajinan, dan masih banyak IKM yang bisa dilakukan. Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selalu berkembang dari tahun ke tahun, sampai pada tahun 2023 sebanyak 3.984. Beberapa strategi untuk membuat IKM menjadi lebih maju diantaranya Pemanfaatan Teknologi, Kreativitas dan Inovasi; Menggunakan Bahan Baku Dalam Negeri; Membuka Lapangan Kerja; serta Dukungan dari Pemerintah.

Tabel II.64.
Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	3032	3538	3984

2.3.1.4. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang dinilai memiliki kinerja baik atau "sehat" dari seluruh koperasi yang ada dalam suatu wilayah. Kesehatan koperasi ini biasanya diukur berdasarkan beberapa indikator standar, seperti Kesehatan Keuangan; Manajemen dan Tata Kelola; Partisipasi Anggota; serta Kepatuhan terhadap Regulasi.

Persentase ini memberikan gambaran tentang keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosialnya, serta menunjukkan efektivitas pengelolaan koperasi tersebut dalam memberikan manfaat bagi anggotanya dan masyarakat luas.

Tabel II.65.
Persentase Koperasi Sehat
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Persentase Koperasi Sehat	10,97	12,5	13,55

2.3.1.5. Return On Aset (ROA) BUMD

RoA (Return on Assets) BUMD mencerminkan seberapa baik aset yang dimiliki BUMD digunakan untuk menghasilkan laba. RoA BUMD menghitung seberapa efektif BUMD dalam menghasilkan keuntungan (laba bersih) dari total aset yang dimilikinya. RoA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BUMD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. RoA yang lebih rendah bisa mengindikasikan bahwa BUMD mungkin perlu melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset.

Tabel II.66.
RoA (Return on Assets) BUMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Laba	-4.818.110.139	255.732.096	263.525.656	-2.979.719.754	-2.306.464.093
Total Aset	26.593.683.972	20.132.232.822	16.055.610.666	11.074.554.918	10.250.422.073
RoA BUMD	-0,18%	1,27%	1,64%	-26,91%	-22,50%

2.3.1.6. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Inflasi yang terjadi pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diwakili oleh Kota Makassar sangat dinamis dari tahun 2013– 2023, dan pada tahun 2023 laju inflasi kota makassar yang berdampak pada laju inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 2,89. Setidaknya mempengaruhi kondisi laju inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masuk dalam Zona Makassar.

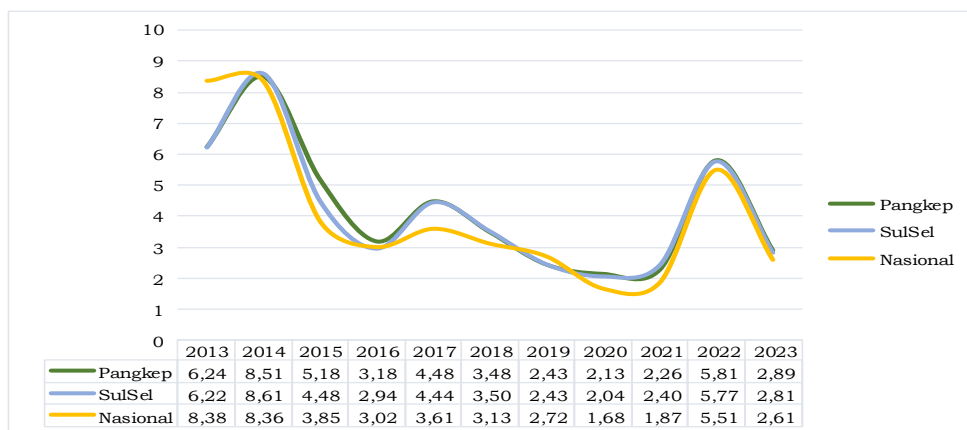
Tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2013-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih baik dibandingkan Sulawesi Selatan dan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 2,26 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember tahun 2021 terhadap Desember

2020) sebesar 2,26 persen. Laju inflasi Indonesia Tahun 2022 mengalami kenaikan akibat gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan gangguan sisi supply yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak negara. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market.

Inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,81 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,69 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,73 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,21 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,56 persen; kelompok transportasi sebesar 17,42 persen; kelompok rekreasi, Pangkajene dan Kepulauan, dan budaya sebesar 3,23 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,62 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,99 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Penyebab inflasi lain adalah adanya cuaca ekstrem menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga. Laju inflasi Indonesia bulan Desember 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y), laju inflasi Sulawesi Selatan sebesar 5,77 persen (y-o-y), sedangkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih rendah yaitu sebesar 5,81 persen (y-o-y). Inflasi di Indonesia masih terkendali dan menjadi terbaik kedua setelah negara Jepang dibandingkan inflasi negara yang tergabung dalam G-20.

Grafik II.31.
Tingkat Inflasi Kabupaten Pangkep, SulSel dan Nasional
Tahun 2013- 2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2023.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya Manusia adalah faktor Penentu daya saing Suatu daerah, tetapi Sumber daya manusia yang dimaksud bukan dalam artian jumlah melainkan lebih kepada kualitas. Inilah yang menjadi penjelasan mengapa suatu daerah dengan SDM yang berlimpah tetapi tidak mempunyai daya saing yang tinggi dikarenakan kualitasnya yang rendah.

Adapun indikator yang digunakan dalam meningkatkan Daya Saing SDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

2.3.2.1. Indeks Inovasi Daerah

Pengembangan dan penerapan suatu inovasi dapat menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Oleh karena itu,

pengembangan dan penerapan inovasi daerah dalam berbagai sektor terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan senantiasa memperhatikan dan penekanan pada tujuan dan arah pembangunan daerah maupun penguatan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai upaya mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan judul inovasi dan inovator dalam Surat Keputusan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 623 Tahun 2020. Salah satu capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 18 Desember 2020 meraih Piagam Penghargaan dan Piala sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendapatkan nilai tertinggi dengan angka 62,48 untuk klaster kabupaten dengan kategori sangat inovatif. Yang merupakan nilai tertinggi diantara 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tabel II.67.
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023

Indeks Inovasi Daerah	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	970 (inovatif)	2.410 (Sangat Inovatif)	2.276 (Sangat Inovatif)	60,02 (Sangat Inovatif)	56,90 (Inovatif)	62,48 (Sangat Inovatif)

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023

2.3.2.2. Indeks Literasi SD dan SMP

Indek Literasi merupakan Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Pada indeks Literasi ada 4 tingkat yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi siswa, yaitu:

- 1) Diatas Kompetensi minimum (Mahir) dengan nilai Rentang 2,10 s.d. 3,00
- 2) Mencapai Kompetensi minimum (Cakap) dengan nilai rentang 1,80 s.d. 2,09;
- 3) Dibawah Kompetensi minimum (dasar) dengan nilai rentang 1,40 s.d. 1,79; dan
- 4) Jauh dibawah Kompetensi minimum (Perlu Intervensi khusus) dengan nilai rentang 1,00 s.d. 1.3

Adapun indeks Literasi SD dan SMP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sebagai berikut:

Tabel II.68.
Indeks Literasi SD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2023

Tahun	Indeks Literasi	
	SD	SMP
2022	50,96	43,04
2023	62,79	43,49

Sumber: Rapor Pendidikan 2023, 31 Juli 2023

Dilihat dari data diatas pada jenjang SD dan SMP capaiannya dibawah 50 % dengan kategori sedang, dapat diartikan bahwa murid-murid di jenjang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah mampu menemukan informasi eksplisit pada bacaan dan mampu membuat tafsiran sederhana tentunya mereka membutuhkan bimbingan untuk memahami bacaan agar mampu menganalisis bacaan dengan baik.

2.3.2.3. Indeks Numerasi SD dan SMP

Indeks numerasi merupakan Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

Pada Indeks Numerasi ada 4 tingkat yang digunakan untuk mengukur kemampuan Numerasi siswa, yaitu:

- 1) Diatas Kompetensi minimum (Mahir) dengan nilai Rentang 2,10 s.d. 3,00
- 2) Mencapai Kompetensi minimum (Cakap) dengan nilai rentang 1,80 s.d. 2,09;
- 3) Dibawah Kompetensi minimum (dasar) dengan nilai rentang 1,40 s.d. 1,79; dan
- 4) Jauh dibawah Kompetensi minimum (Perlu Intervensi khusus) dengan nilai rentang 1,00 s.d. 1.39

Adapun Indeks Numerasi SD dan SMP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sebagai berikut:

Tabel II.69.
Indeks Numerasi SD dan SMP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2022-2023

Indeks Numerasi	Tahun	
	2022	2023
SD	27,08	44,86
SMP	36,29	28,01

Sumber: Rapor Pendidikan 2023, 31 Juli 2023

2.3.2.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

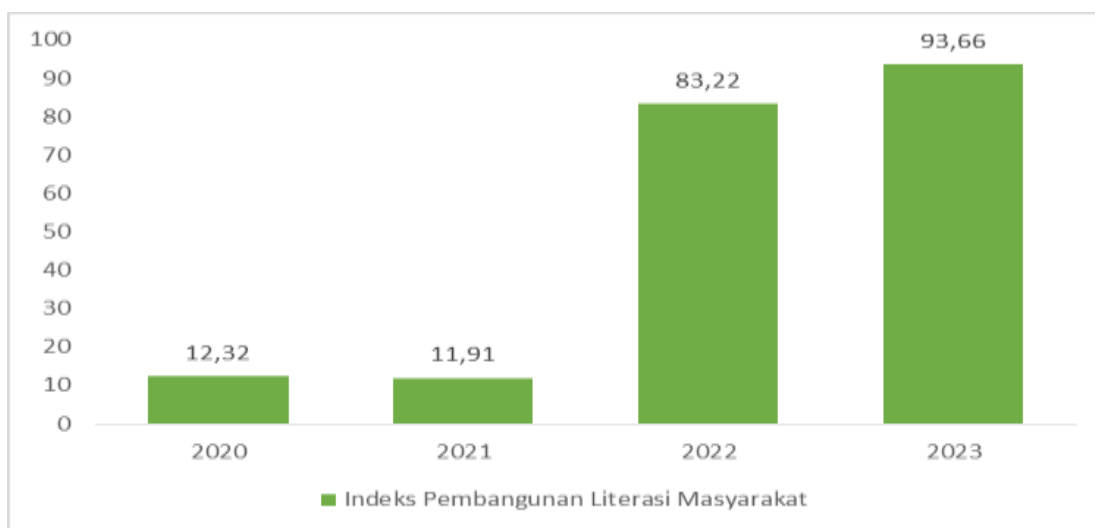
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
7. Anggota perpustakaan

Adapun hasil indeks Pembangunan Literasi Masyarakat kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2023, untuk tahun 2020 dan 2021 menggunakan hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik II.32
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2023



Sumber: Perpusnas, laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan literasi Masyarakat Tahun 2020-2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun indikator yang digunakan dalam Aspek Pelayanan Umum:

2.4.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2022 berada pada angka 65,75 dengan kategori “B” dan Predikat Cukup Baik. Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel II.70.
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2023

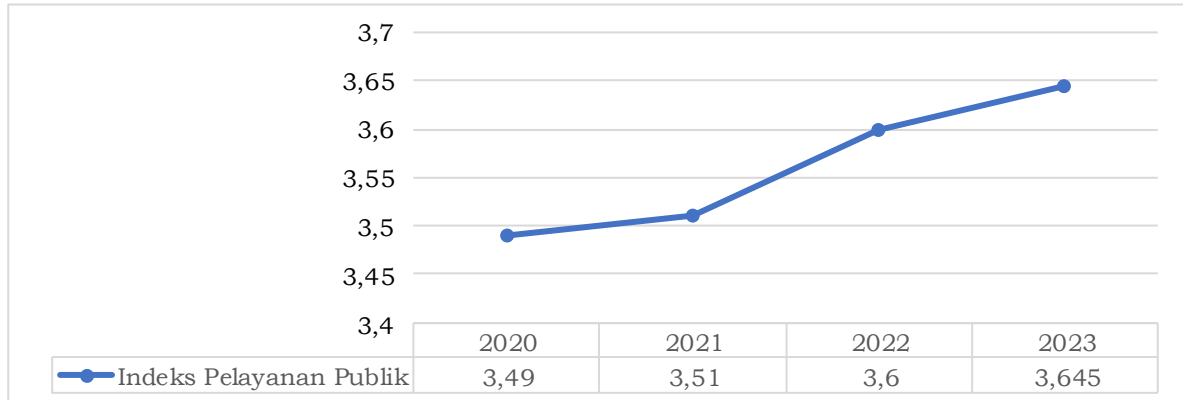
Tahun	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
2022	B	65,75	Cukup Baik
2023	AA	96,86	Istimewa

2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa negara berkewajiban meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. Sedangkan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka dilakukan evaluasi melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini akan

menghasilkan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Angka Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan kemudian diakumulasi menjadi angka untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP). Adapun capaian indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik II.33.
Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2023



Untuk mendapatkan angka Indeks Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini dilakukan oleh 3 (tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Utama yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan (3). Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 3 (tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel II.71.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023

No	Unit Layanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	85,02	B	Baik
2	Dinas Penanaman Modal & PTSP	94,15	B	Baik
3	RSUD Batara Siang	77,33	B	Baik
	Nilai Rata-Rata	84,98	B	Baik

2.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak diimplementasikan oleh sebagian besar Instansi Pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan layanannya, namun dalam penyelenggaraannya belum efektif, efisien, dan terpadu.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun hasil Evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2023.

Tabel II.72.
Indeks SPBE
Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2021-2023

Indeks SPBE	Tahun		
	2021	2022	2023
	2,11	2,12	2,31
	Cukup	Cukup	Cukup

Sumber: Peraturan Menteri PanRab tahun 2021 dan 2022

2.4.4. Indeks Survey Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. kuesioner elektronik SPI diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (whatsapp blast dan e-mail blast), maupun melalui tatap muka secara Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) di gadget enumerator.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut, juga semakin baik. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baru mulai dihitung pada tahun 2021 dengan nilai 72,1 namun pada tahun 2022 turun menjadi 70,77 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 74,41. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.73.
Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Survey Penilaian Integritas (SPI)	72,1	70,77	74,41

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan

1. Capaian IPM pada periode awal perencanaan sebesar 63,60, sampai dengan tahun berjalan (tahun 2022) yaitu 69,79. Ada upaya pertumbuhan dari penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan menggunakan kriteria United Nation Development Program (UNDP), IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$).
2. Angka Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan jumlah dan tingkat kemiskinan yang terus membaik dari mulai periode awal perencanaan sebesar 17,36 menurun sampai dengan capaian tahun berjalan RPJPD (tahun 2022) menjadi 13,92, namun angka ini masih terlalu besar dan merupakan stigma sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih diperhadapkan dengan beragam kendala.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan penurunan yang terus membaik dari mulai

periode awal perencanaan sebesar 9,64 menurun sampai dengan capaian tahun berjalan RPJPD (tahun 2022) menjadi 5,23.

4. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai periode awal perencanaan sebesar 9,84, karena adanya pandemi Covid-19 tidak bisa dipertahankan berada di atas rata-rata 6 per periodisasi RPJMD, sampai dengan capaian tahun berjalan RPJPD (tahun 2022) turun menjadi 4,93.
5. PDRB per Kapita di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tercatat di awal periode perencanaan sebesar 32,22 sampai dengan capaian tahun berjalan RPJPD (tahun 2022) naik menjadi 86,74.
6. Capaian Rasio Gini di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai dengan capaian tahun berjalan RPJPD (tahun 2022) sebesar 0,334.

2.5.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Secara keseluruhan faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran pokok RPJPD adalah penerapan aturan perundang-undangan dan kearifan lokal dalam kebijakan setiap periode penyelenggaraan pembangunan, menjawab setiap permasalahan indikator yang belum tercapai, agar dapat diputuskan secara bersama stakeholder (Pemerintah, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat dan Penerima Dampak) guna ditetapkan sebagai tujuan pencapaiannya pada periode berikutnya.

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja sasaran pokok RPJPD secara keseluruhan adalah penggunaan sumber daya (6M+T) yang tersedia, belum digunakan secara maksimal untuk proses bisnis pencapaian target yang telah ditetapkan.

2.5.3. Rekomendasi

Rekomendasi atau usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode berikutnya agar 10 indikator sasaran pokok yang belum tercapai agar dapat ditindak lanjuti untuk perencanaan berikutnya. 7 indikator sasaran pokok yang telah tercapai agar terus di pertahankan dan ditingkatkan kualitas. Beberapa sasaran pokok RPJMD terutama yang berhubungan dengan Indikator Makro Pembangunan yang belum tercapai atau belum maksimal pencapaiannya akan ditindaklanjuti pada RPJPD berikutnya.

Untuk meningkatkan kinerja berbagai indikator makro daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di tahun mendatang atau untuk penyusunan RPJPD berikutnya, direkomendasikan sebagai sasaran pokok dan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan implementasi-government dan inovasi layanan pada semua sektor
2. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif dan berfokus pada sektor unggulan yaitu pertanian, industri, dan perdagangan berbasis kearifan lokal
3. Peningkatan Pemenuhan Layanan Dasar baik sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas dalam menciptakan generasi emas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2045
4. Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon guna memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan.
5. Peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keswadayaan dan kemandirian lokal masyarakat bersinergi dalam proses pembangunan daerah.

Tabel II.74.
Capaian Kinerja RPJPD dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode Pelaksanaan Tahun 2005-2025

Sasaran Pokok dan Indikator Sasaran Pokok RPJPD	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	Periode I 2006-2011	Periode IV 2021-2026	Periode I 2006-2011	Periode IV 2021-2026	Periode I	Periode IV	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 1: Menjadi daerah yang maju mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mantap							Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025 pada Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap sasaran Pokok RPJPD per periode maka beberapa faktor penghambat yang ditemukan adalah;		Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025 maka beberapa hal yang menjadi perhatian untuk nantinya akan menjadi bahan rekomendasi terhadap arah kebijakan pada penyusunan RPJPD berikutnya adalah; 1. Peningkatan implementasi e-government dan inovasi layanan pada semua sektor 2. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif dan berfokus pada sektor unggulan yaitu pertanian, industri, dan perdagangan berbasis
Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan							Pada Sasaran Tata Kelola Pemerintahan melalui Penilaian Indikator Reformasi Birokrasi, baru dilaksanakan menjelang masuk Periode III RPJMD dan Periode IV dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 83,48% dan 76,80% dengan kategori Tinggi. Unsur pendukung yang memberikan kontribusi terhadap capaian tersebut selama Periode III dan IV adalah Nilai Sakip (100,58% dan 78,24%), IPKD (110,47% dan 102,22%), Indeks Pelayanan Publik (91,10% dan 102,38%) dan Indeks Inovasi Daerah (85,74% dan 94,83%) dengan rata-rata kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Hal ini membuktikan bahwa setiap periode Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendorong terciptanya Good Governance.		
Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	BB (> 70 - 80)	n/a	CC (53,76)	n/a	76,80%			
Nilai SAKIP	n/a	A (> 80 - 90)	n/a	B (62,59)	n/a	78,24%			
IPKD	n/a	72,5	n/a	74,11	n/a	102,22%			
Indeks Pelayanan Publik	n/a	81,55	n/a	83,49	n/a	102,38%			
Indeks Inovasi Daerah	n/a	60	n/a	56,9 (Inovatif)	n/a	94,83%			
Misi 2: Mengembangkan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat							1. Pada Periode Pertama I RPJMD (2005-2011) tidak bisa memperlihatkan gambaran tingkat capaian dari sasaran pokok RPJPD. hal ini disebabkan perencanaan pada periode I tidak terdokumentasi dengan baik (hardcopy/softcopy tidak ditemukan) sehingga tidak ada informasi data capaian yang bisa ditampilkan 2. Pada Sasaran Pokok Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan, untuk Periode II RPJMD (2011-2016) beberapa indikator sasaran pokok RPJPD tidak memunculkan target perencanaan, sehingga meskipun realisasi capaiannya		

Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat						
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,98	4,80 - 6,35	9,84	4,93	123,31%	102,71%
Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan	n/a	76,09	n/a	75,24	n/a	98,88%
PDRB/kapita	n/a	77,45	32,22	86,74	n/a	111,99%
Rasio Gini	n/a	0,300	n/a	0,334	n/a	111,33%
Tingkat kemiskinan	n/a	9,83	17,36	13,92	n/a	58,39%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	n/a	4,37	9,64	5,23	n/a	80,32%
Tingkat Inflasi	n/a	2,0-4,0	2,87	5,81	n/a	54,75%
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia						
IPM:	n/a	71,17	63,60	69,79	n/a	98,06%
1. Indeks Kesehatan						
2. Indeks Pendidikan						
3. Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)						
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	n/a	67,43	n/a	67,69	n/a	100,39%

ada (khususnya pada indikator IPKD, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengeluaran Perkapita, Tingkat Kemiskinan, IPG, IDG dan IDM) namun untuk mengukur tingkat capaian masing-masing pada indikator tersebut tidak bisa dilakukan sehingga tidak ada informasi data capaian yang ditampilkan.	Pada Sasaran Peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tingkat capaian selama 4 Periode masing-masing sebesar 123,31% (Periode I), 127,8% (Periode II), 40,71% (Periode III) dan 102,71% (Periode IV) dengan kategori rata-rata tingkat capaian Sangat Tinggi meskipun pada periode III mengalami penurunan signifikan akibat dampak dari covid-19. Salah satu strategi pembangunan yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan Pertumbuhan sektor-sektor dominan yang mampu mendorong tersedianya kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.	kearifan lokal
3. Pada Sasaran Pokok Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat untuk Periode III RPJMD (2016-2021), dari tujuh belas (17) indikator, maka ada dua (dua) indikator yang tingkat capainnya masih dibawah rata-rata yaitu Tingkat Kemiskinan sebesar 40,17% (sangat rendah) dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 66,15% (sedang). salah satu faktor penyebab rendahnya angka kemiskinan dan Pemberdayaan Gender adalah adanya dampak covid 19 dalam kurun waktu hampir 3 tahun selama periode III RPJMD sehingga juga berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat termasuk pada terbatasnya keterlibatan masyarakat perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Pada Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Capaian selama 3 Periode RPJMD masing-masing sebesar 100% (Periode II), 97,11% (Periode III) dan 98,06% (Periode IV) dengan kategori rata-rata Sangat Tinggi. Pengukuran tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 4 Periode RPJMD ini berfokus pada 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia yaitu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan peningkatan pendapatan melalui standar hidup layak masyarakat.	3. Peningkatan Pemenuhan Layanan Dasar baik sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas dalam menciptakan generasi emas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2045
4. Pada Sasaran Pokok Peningkatan Partisipasi Masyarakat untuk Periode IV RPJMD (2021-2026) yang merupakan periode transisi yang saat ini masih berlangsung, maka berdasarkan tingkat capaian tahun berjalan (2022) maka ada beberapa indikator sasaran pokok rpjpd yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu Tingkat	Pada Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Indeks Lingkungan Hidup (IKLHD), tingkat	4. Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon guna memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan
		5. Peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keswadayaan dan kemandirian lokal masyarakat bersinergi dalam proses pembangunan daerah

							<p>Kemiskinan sebesar 58,39% (rendah), Tingkat inflasi sebesar 54,75% (rendah) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 60,08% (rendah)</p>	<p>capaian selama 3 Periode RPJMD masing-masing sebesar 90,11% (Periode II), 119,15% (Periode III) dan 100,39% (Periode IV). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada peringkat 10 dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan. faktor yang mempengaruhi adalah Tingkat pengawasan terhadap kegiatan/ tempat usaha, Pemberian rekomendasi perijinan pembuangan air limbah dari industri rumah tangga maupun perusahaan selalu melalui kajian, Menjaga air sungai untuk selalu diupayakan tetap terjaga dari hulu sampai hilir dan Menjaga kualitas udara</p>	
Misi 3: Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan									
Sasaran 5: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat									
Indeks Desa Membangun (IDM)	n/a	0,759		0,6921	n/a	91,19%			
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n/a	90,12	87,75	90,61	n/a	100,54%			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	92,82	58,93	64,12	n/a	69,08%			
Rata-rata capaian kinerja (%)							90,12%	Rata-rata = 95,99%	
Predikat Kinerja							TINGGI	SANGAT TINGGI	

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Bonus demografi menjadi salah satu peluang dan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Meskipun belum mencapai puncaknya, bonus demografi Indonesia mulai dibayangi penuaan populasi. Ada 4 analisis masalah kependudukan Indonesia saat ini, antara lain adalah pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, demografi usia, dan urbanisasi. Jika tidak diatur dengan baik, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan kesulitan dalam menyediakan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan hidup dan lainnya.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi masalah soal kependudukan, misalnya adalah pengendalian kelahiran, pemerataan pembangunan, pengembangan infrastruktur, program Keluarga Berencana (KB), dan kebijakan migrasi. Apabila tidak terjadi konstanta demografi, akan terjadi ledakan demografi yang berimplikasi terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Harus ada keseimbangan terhadap pertumbuhan penduduk, kalau tidak pasti akan terjadi ledakan demografi yang mengakibatkan tekanan kebutuhan publik yang berpengaruh pada kualitas dan kuantitas kebutuhan atas pelayanan publik.

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk yang dimaksud bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Dapat dikatakan proyeksi penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Ketepatan atau ketajaman proyeksi penduduk sangat tergantung pada ketajaman asumsi tren komponen perubahan penduduk yang digunakan. Asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di masa yang akan datang, ditentukan oleh gambaran tren di masa yang lampau sampai dengan saat ini serta target yang hendak dicapai dimasa yang akan datang. Penentuan target dimasa yang akan datang tersebut tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen seperti perkembangan sosial ekonomi, pencapaian program kesehatan, keluarga berencana dan lain sebagainya.

Asumsi-asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang melandasi proyeksi bisa jadi tidak sesuai lagi dengan perubahan yang terjadi (kenyataan), khususnya untuk periode waktu proyeksi yang panjang. Oleh karena itu proyeksi penduduk secara periodik direvisi/diperbaiki dengan data mutakhir hasil sensus atau survei kependudukan yang tersedia.

Masalah kependudukan bersumber pada dua hal yaitu penambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi kependudukan terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan semakin banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan untuk menampungnya, jika daya tampung lapangan pekerjaan tidak memadai, maka akan banyak penduduk yang tidak bekerja atau menganggur.

Hal ini akan menimbulkan permasalahan kesejahteraan penduduk karena pendapatan seseorang tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara itu penyebaran penduduk yang tidak merata akan berpengaruh juga terhadap kondisi ketenagakerjaan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus

mampu membuat perencanaan di masa yang akan datang terkait dalam masalah ketenagakerjaan ini.

Dalam memecahkan masalah ini maka diperlukan suatu perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga kita dapat menentukan arah kebijakan apa yang akan diambil. Untuk itu maka diperlukan proyeksi penduduk. Proyeksi adalah perkiraan penduduk berdasarkan sensus penduduk. Disini perkiraan penduduk tidak hanya beberapa tahun sesudah sensus tetapi mungkin sampai beberapa puluh tahun sesudah sensus. Proyeksi penduduk menurut Multilingual Demographic Dictionary adalah : Perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi dimasa yang akan datang. Jadi, proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang jika fertilitas, mortalitas dan migrasi berada pada tingkat tertentu. Dengan Proyeksi Penduduk maka kita dapat memperhitungkan jumlah penduduk dimasa yang akan datang.

Proyeksi penduduk yang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan dengan menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Proyeksi penduduk Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan penghitungan proyeksi penduduk nasional. Selanjutnya, dihitung proyeksi penduduk per provinsi. Adapun hasil proyeksi penduduk nasional digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level provinsi. Dengan demikian, total penduduk seluruh provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk nasional yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi. Setelah itu, dihitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota. Hasil proyeksi penduduk provinsi digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level kabupaten/kota. Sehingga, total penduduk seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk provinsi yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan literasi.

2.6.1.1. Asumsi

Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang. Penghitungan proyeksi penduduk dengan menggunakan program Rural Urban Projection (RUP). Angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, maka diperlukan beberapa kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada setiap asumsi.

a. Asumsi Fertilitas

Angka fertilitas (kelahiran) sangat erat hubungannya dengan kuantitas penduduk dan dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi dan kesertaan berKeluarga Berencana pasangan usia subur. Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas yang umum digunakan adalah *Total Fertility Rate (TFR)* atau angka kelahiran total dan *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* atau angka kelahiran menurut

kelompok umur. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total (TFR).

Data yang diperlukan untuk memproyeksikan angka fertilitas adalah data tahun dasar proyeksi, nilai batas TFR, perkiraan tahun dasar tingkat kabupaten dan proyeksi TFR untuk tahun dasar berikutnya dari ekstrapolasi TFR. Proyeksi TFR dalam kaitannya dengan proyeksi angka TFR untuk semua kabupaten/kota mengikuti proyeksi angka TFR di level provinsi. Untuk setiap tahun yang diproyeksikan, perubahan relatif dalam komplemen TFR pada setiap kabupaten/kota sama dengan provinsi. Perhitungan proyeksi dilakukan dalam dua langkah yaitu:

- 1) Suatu rasio dibentuk dari komplemen $e(0)$ kabupaten untuk tahun dasar t dan tahun yang akan datang $t+n$, mewakili sejauh mana $e(0)$ provinsi mendekati batas atas t ke periode $t+n$.
- 2) Rasio ini dikalikan dengan komplemen dari TFR untuk tahun t . Hasilnya adalah estimasi dari pengurangan komplemen TFR dari t menjadi $t+n$ dan mewakili sejauh mana TFR mendekati batas atas periode t ke $t+n$.
- 3) Komplemen ini kemudian dikurangkan dari K untuk memberikan estimasi TFR untuk kabupaten pada tahun $t+n$.

b. Asumsi Mortalitas

Mortalitas (kematian) penduduk adalah salah satu dari variable demografi penting. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu indikator penting mortalitas adalah kematian bayi, balita, dan ibu. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang penting dalam mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kematian tidak hanya merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernafasan, salah gizi, penyakit-penyakit infeksi spesifik dan kondisi prenatal, tetapi juga merefleksikan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan secara umum tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Data yang diperlukan untuk memperkirakan angka mortalitas adalah data tahun dasar proyeksi, limit untuk setiap jenis kelamin, estimasi tahun dasar tingkat kabupaten dan estimasi atau proyeksi menurut jenis kelamin dari ekstrapolasi $e(0)$. Untuk setiap jenis kelamin, proyeksi $e(0)$ terkait dengan proyeksi angka $e(0)$ untuk semua wilayah di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengikuti proyeksi angka $e(0)$ Kabupaten. Untuk setiap tahun yang diproyeksikan, perubahan relatif pada jenis kelamin tertentu sebagai komplemen $e(0)$ untuk setiap wilayah sama dengan untuk kabupaten. Perhitungan proyeksi dilakukan dalam dua langkah:

- 1) Suatu rasio dibentuk dari komplemen $e(0)$ kabupaten untuk tahun dasar t dan tahun yang akan datang $t+n$, mewakili sejauh mana $e(0)$ kabupaten mendekati batas atas t ke periode $t+n$.
- 2) Rasio ini dikalikan dengan komplemen wilayah $e(0)$ untuk tahun t . Hasilnya adalah estimasi pengurangan komplemen wilayah $e(0)$ dari t menjadi $t+n$ dan merepresentasikan sejauh mana area wilayah $e(0)$ mendekati batas atas periode t ke $t+n$.
- 3) Komplemen ini kemudian dikurangi dari K untuk memberikan estimasi $e(0)$ untuk wilayah pada tahun $t+n$.

c. Asumsi Migrasi

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong dan daya tarik suatu wilayah yang menyebabkan perpindahan ke tempat lain. Daya dorong adalah penyebab orang pergi ketempat lain diantaranya dikarenakan di wilayah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu alasan migrasi adalah karena alasan melanjutkan pendidikan sehingga banyak penduduk desa datang ke kota dengan alasan melanjutkan pendidikan karena fasilitas pendidikan pada daerah asal tidak tersedia sesuai kebutuhan penduduk. Dengan memperhatikan faktor pemicu migrasi yang berlangsung sejak lama, maka diharapkan adanya strategi pembangunan yang merata bagi seluruh wilayah.

Migrasi merupakan komponen asumsi ketiga, setelah kelahiran dan kematian, yang memengaruhi besaran penduduk dalam penyusunan proyeksi penduduk tahun 2022-2045. Pola, arah, dan besaran migrasi sangat dinamis sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan angka migrasi saat ini dan masa yang akan datang.

2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk

Jumlah populasi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan jumlah penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mencatatkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kini telah mencapai sebanyak 355.610 ribu jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 0,75% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sebanyak 352.949 ribu jiwa.

Pada dasarnya, perkiraan jumlah penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sejalan dengan proyeksi penduduk Indonesia 2000 – 2035 yang telah disusun oleh BPS. Dalam proyeksinya, BPS memperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 394,72 ribu jiwa. Selanjutnya, berdasarkan kecenderungan pertumbuhan yang terjadi, diperkirakan jumlah penduduk menjadi 456,95 ribu jiwa pada tahun 2045.

Diperkirakan selama periode 2023-2045, pertumbuhan rata-rata pertahun penduduk Kabupaten pangkajene dan Kepulauan mengalami kecenderungan penurunan. Selama periode 2023-2045, penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertambah dengan kecepatan 1,15 persen per tahun. Secara terperinci perkiraan penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama tahun 2023 – 2045 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.75.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

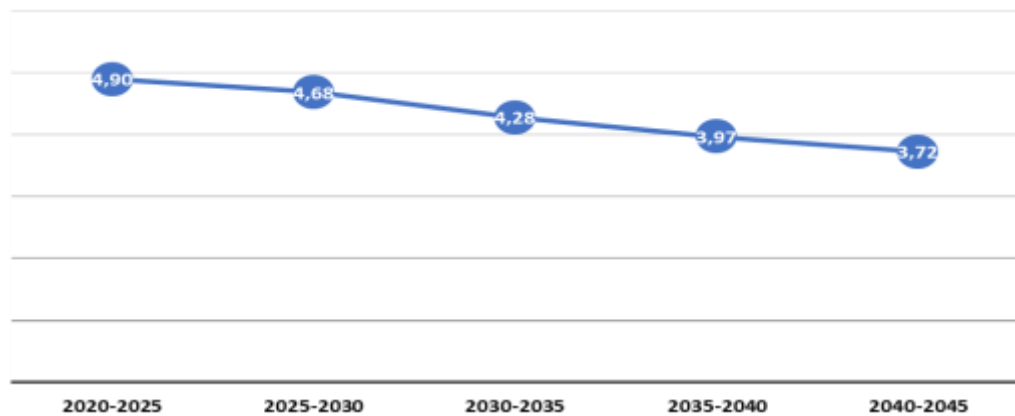
Penduduk Tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
357,85	362,69	379,68	395,92	411,64	427,96

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 355,61 ribu jiwa pada tahun 2023 diproyeksikan menjadi 427,96 ribu jiwa pada tahun 2045. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 2025-2045 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2025-2030 dan 2035-2045 penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan turun dengan kecepatan menjadi 1,23 persen menjadi 0,93 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat dari pada penurunan karena kematian. *Crude Birth Rate* (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan *Crude Death Rate* (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Grafik II.34.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Hasil Proyeksi 2020-2045



Sumber:Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.

2.6.1.3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel II.76.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020-2045

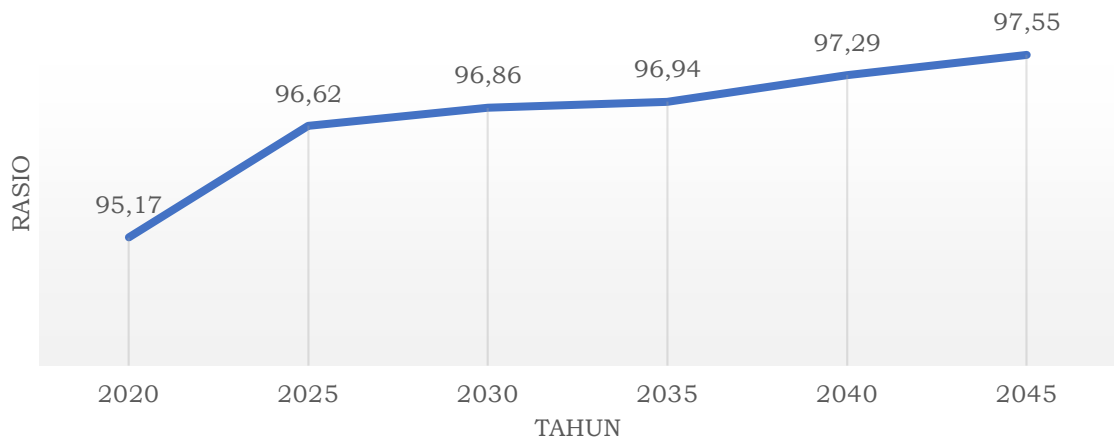
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	174,19	178,23	186,81	194,29	202,99	211,32
Perempuan	180,80	184,46	192,87	200,43	208,65	216,63
Rasio	96,34	96,62	96,86	96,94	97,29	97,55

Sumber:Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Rasio jenis kelamin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2045 menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki laki dan jumlah penduduk wanita sebesar 97,55 yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki laki.

Ketersediaan data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembanzgan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender serta untuk mengetahui perbandingan jumlah jenis kelamin perempuan dengan laki-laki.

Grafik II.35.
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Hasil Proyeksi, 2020-2045



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Berdasarkan grafik tersebut di atas, maka rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2025 – 2045 menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki laki yang dipengaruhi oleh rata rata perkiraan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dan/atau angka kematian bayi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian bayi laki-laki.

2.6.1.4. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

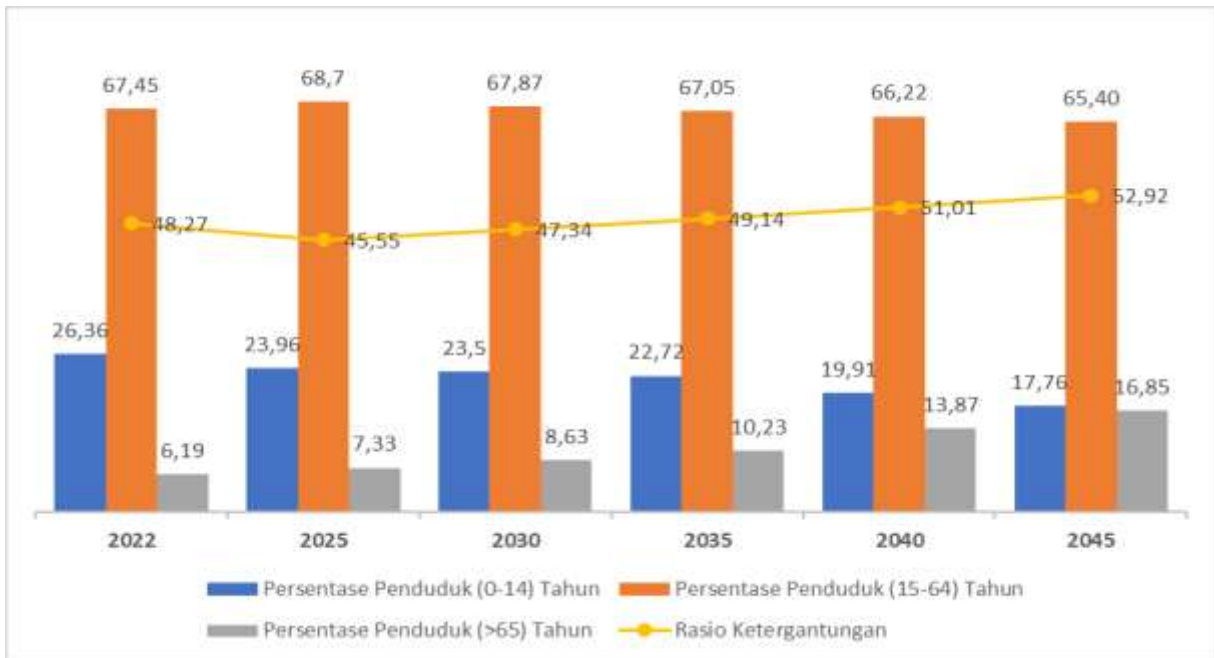
Tabel II.77.
Proyeksi Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menurut Kelompok Umur, 2023–2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022 (%)	Proyeksi Penduduk (Persentase)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	26,36	23,96	23,50	22,72	19,91	17,76
15-64 Tahun	67,45	68,70	67,87	67,05	66,22	65,40
>65 Tahun	6,19	7,33	8,63	10,23	11,63	13,08
Angka Ketergantungan	48,27	45,55	47,34	49,14	47,63	47,16

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, (Data diolah Bappelitbangda 2022)

Penurunan Tingkat fertilitas dan peningkatan kondisi Kesehatan masyarakat dan seiring dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat mendorong perubahan struktur penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Grafik penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih terpusat pada penduduk usia 15-64 tahun. Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sensus penduduk 2022 mencatat rasio ketergantungan sebesar 48,27 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 48 penduduk usia yang tidak produktif atau penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas pada tahun 2022.

Grafik II.36.
Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Hasil Proyeksi, 2020-2045



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Setidaknya ada lima kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi di masa datang. Pertama, pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kedua, pemerintah harus memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, pemerintah perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang. Keempat, pemerintah sebaiknya mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata. Terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota.

2.6.1.4.1. Penduduk Usia Produktif

Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif. Per tahun 2022 saja, berdasarkan data BPS kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 238,049 jiwa dari total 352.949 jiwa penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Apalagi pada tahun 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat.

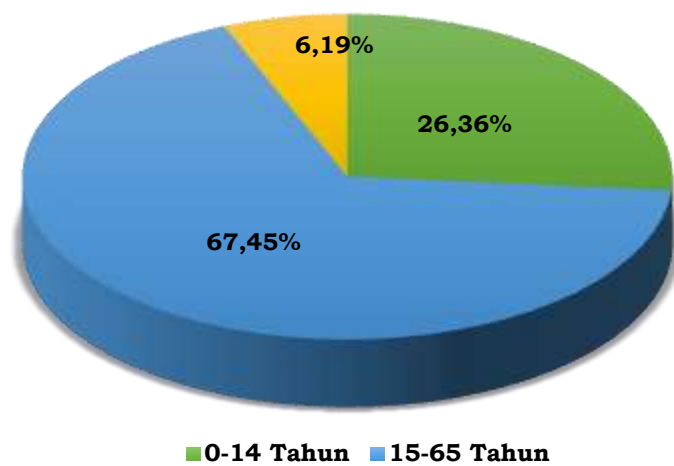
Pemerintah tentu saja telah melakukan ragam upaya untuk menyiapkan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Rasio Ketergantungan (RK) atau Rasio Beban Tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk

berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Data ini menunjukkan pembagian jumlah penduduk menurut usia muda, usia produktif, dan usia non produktif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 238.049 jiwa (67,45%) penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif /usia muda sebanyak 93.040 jiwa (26,36%) dan penduduk yang tidak produktif lagi/usia tua sebanyak 21.860 jiwa (6,19%).

Grafik II.37.
Persentase Penduduk Usia Produktif
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022



Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2023

2.6.1.4.2. Anak Usia Sekolah

Menurut definisi WHO (World Health Organization) Anak Usia Sekolah yaitu golongan anak yang berusia antara 7-15 tahun. Sedangkan di Indonesia lazimnya anak yang berusia 6-12 tahun (Kemenkes, 2008). Masa usia sekolah sering disebut sebagai masa intelektual. Pada tahap perkembangan usia anak sekolah dasar 6-12 tahun dan pada masa anak ini secara relatif lebih mudah dididik dari pada masa sebelum dan sesudahnya.

anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun (*middle childhood*). Kesehatan bagi anak sekolah tidak terlepas dari pengertian kesehatan pada umumnya. Anak pada usia ini telah memilih fisik yang lebih kuat sehingga kebutuhan untuk melakukan aktivitas tampak menonjol. Penampilannya dan pertumbuhan menjadi mantap pada diri anak tersebut. Kelompok anak usia sekolah merupakan kelompok rentan gizi, kelompok masyarakat yang paling mudah menderita kelainan gizi, bila masyarakat terkena kekurangan penyediaan bahan makanan. Pada umumnya kelompok ini berhubungan dengan proses pertumbuhan yang relatif pesat, yang memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah relatif besar Masalah berat badan rendah dan obesitas timbul karena golongan usia ini waktu yang dimiliki lebih banyak dihabiskan di luar rumah baik di sekolah maupun tempat bermain yang menghabiskan banyak tenaga. Dengan demikian terjadi ketidak-seimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar atau konsumsi makanan tidak seimbang dengan kalori yang diperlukan.

Anak usia satu tahun sampai remaja merupakan karakteristik sebagai periode laten dengan pertumbuhan fisik berlangsung tidak sedramatis dibandingkan ketika berstatus bayi. Di tahun pertama kehidupan, panjang bayi pertumbuhan fisiknya bertambah sekitar 50%, tetapi tidak demikian setelah usia bertambah sampai 4 tahun. Anak sekolah merupakan golongan yang mempunyai karakteristik dengan mulai mengembangkan kemandirian diri dan menentukan batasan-batasan norma dilingkungan sekitarnya. Variasi pertumbuhan dan perkembangan suatu individu baik variasi perkembangan fisik maupun variasi perkembangan kepribadian. Variasi tersebut diatas dipengaruhi oleh antara lain: pola makan, aktivitas dan asupan makanan. Ada beberapa karakteristik lain anak usia sekolah adalah sebagai berikut:

1. Anak banyak menghabiskan waktu di luar rumah.
2. Aktivitas fisik anak semakin meningkat
3. Pada usia ini anak akan mencari jati dirinya
4. Lebih aktif memilih makanan yang disukai
5. Pertumbuhan lambat
6. Pertumbuhan meningkat lagi pada masa pra remaja.

Tabel II.78.

Jumlah Murid Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Ajaran 2022-2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid Tahun Ajaran 2022/2023
1	Taman Kanak-Kanak	2.737
2	Raudatul Athfal (RA)	475
3	Sekolah Dasar	36.940
4	Madrasah Ibtidaiyah	1.023
5	Sekolah Menengah Pertama	14.325
6	Madrasah Tsanawiyah	3.053
7	Sekolah Menengah Atas	8.266
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	5.236
9	Madrasah Aliyah (MA)	2.402
Jumlah Anak Sekolah		74.457

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, Tahun 2023, (data diolah Bappelitbangda Pangkep)

2.6.1.4.3. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Peningkatan tersebut diikuti pula dengan menurunnya angka kelahiran serta kematian. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun. Kesempatan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk memajukan bangsa. Bonus demografi terbagi atas dua sisi. Keduanya ialah sisi kesempatan dan sisi tantangan.

Kesempatan yang maksud adalah momentum untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Namun tantangannya adalah sampai saat ini Indonesia masih memiliki beragam permasalahan dari beberapa aspek. Apabila ditinjau dari segi SDM tenaga kerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih sedikit yang berpendidikan menengah ke atas, akibatnya daya saing pun cukup rendah. Tak hanya itu, lapangan kerja juga masih sangat sedikit sehingga angka pengangguran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini masih cukup tinggi.

Dari permasalahan tersebut, pemerintah tentu mengupayakan agar generasi muda benar-benar siap menghadapi bonus demografi. Upaya pemerintah yang

saat ini dapat dirasakan generasi muda adalah kurikulum Merdeka Belajar. Di mana fokusnya adalah aspek pengembangan kreativitas dan inovasi dalam studi permasalahan. Pengukuran kualitas penduduk mengacu pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan/ekonomi. Pendidikan SDM merupakan komponen pertama dan utama. Pendidikan akan dapat mengubah cara dan olah pikir pendidik menjadi lebih baik, modern, dan maju. Dia terfokus untuk memajukan generasi muda melalui meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudahan dalam akses pendidikan, infrastruktur pendidikan yang lengkap dan tenaga pendidik yang amanah, berkualitas akan mewujudkan masyarakat yang modern.

Selanjutnya, penyediaan layanan kesehatan sebagai investasi jangka panjang, setiap manusia membutuhkan kesehatan. Sebagai layanan publik, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan berbagai kebijakan seperti jaminan kesehatan nasional, akses kesehatan, cakupan tenaga medis, fasilitas kesehatan terjangkau untuk meningkatkan usia harapan hidup manusia. Pada sisi lain, penyediaan lapangan pekerjaan memegang peranan yang sangat penting, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Pemerintah dan swasta harus memfasilitasi lapangan kerja bagi masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki daya saing, terampil dan berkemampuan untuk lebih kreatif menciptakan lapangan kerja.

Upaya pemerintah lainnya yaitu adanya Kartu Prakerja dengan harapan masyarakat bisa menciptakan wirausaha sehingga terciptalah lapangan kerja. Selain itu adanya dukungan pembiayaan UMKM dari pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dengan upaya pemerintah yang demikian, tentu sebagai warga negara juga harus berupaya mendukung usaha pemerintah mempersiapkan SDM siap bonus demografi. Generasi muda sebagai *agent of change* sudah sepatutnya memberikan pergerakan demi menyokong Indonesia emas. Pergerakan sederhana yang mungkin bisa dilakukan selain belajar adalah mengabdikan kepada masyarakat.

Melihat adanya kesempatan dan tantangan, tentunya bonus demografi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya komitmen dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan serta terlibatnya masyarakat sebagai agen perubahan. Apabila kedua komponen ini sudah satu visi maka dapat diyakini Indonesia emas 2045 bisa benar-benar terwujud.

2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pasar

Pemerintah menaruh perhatian besar pada pembangunan sarana dan prasarana pelayanan public utamanya yang terkait dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Sarana dan prasarana pelayanan public berperan besar dalam pembangunan wilayah, dimana keberadaannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aksesibilitas daerah, prevalensi stunting hingga pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public, khususnya yang terkait layanan dasar masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengatur perencanaan struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public sampai dengan Tahun 2045 dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan

prasarana yang memadai berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayani yang meliputi:

- a) Rumah/Tempat Tinggal dan Pemukiman
- b) Air
- c) Energi/Listrik
- d) Persampahan (8,17 Ha)
- e) Infrastruktur Kesehatan
- f) Insfrastruktur Pendidikan
- g) Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- h) Lainnya.

2.6.2.1. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Pemukiman

Tahun 2045 diprediksi menjadi tahun emas bagi Indonesia dengan adanya kemajuan pembangunan di berbagai bidang, termasuk di bidang infrastruktur. Pada Indonesia Emas 2045 tersebut, proyeksi demografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diperkirakan mengalami kenaikan. Salah satu dampak pertumbuhan penduduk tentunya adalah peningkatan kebutuhan rumah tempat tinggal bagi Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel II.79.
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu)	355,61	362,69	379,68	395,92	411,64	427,96
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)	109.784	111.619	116.206	120.794	125.382	129.970

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Kondisi pada tahun 2023 tercatat jumlah rumah yang ada sebanyak 109.784 unit dan diprediksi pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 111.619 unit dan di tahun 2045 akan meningkat menjadi 129.970 unit. Kebutuhan rumah/tempat tinggal ini meningkat seiring dengan penambahan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.6.2.2. Kebutuhan Air Bersih

Memantau akses penduduk terhadap sumber air layak (*improved drinking water*) berdasarkan asumsi bahwa sumber air menyediakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didasarkan pada perencanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dibagi atas jaringan perpipaan yang dilayani oleh PDAM dan bukan jaringan perpipaan yang terdiri dari sumur, bak penampung air hujan, dan mata air. Akses Masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap jaringan perpipaan pada tahun 2023 sebanyak 58.650 sambungan rumah yang melayani 355,61 ribu jiwa Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air minum, maka pada tahun 2045

jumlah penduduk yang harus terlayani sebanyak 427,96 ribu jiwa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 62.145 .

Tabel II.80.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/det)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	355,61	362,69	379,68	395,92	411,64	427,96
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (SR)	58.650	52.969	63.238	57.557	67.825	62.145
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/det)	173	216	231	246	261	276

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Pemerintah telah mencanangkan peningkatan pemenuhan akses air minum layak menjadi pemenuhan akses air minum aman, untuk itu pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara bertahap meningkatkan cakupan pelayanan akses air minum untuk memenuhi proyeksi kebutuhan debit air minum di 2045 sebesar 276 l/det.

2.6.2.3. Kebutuhan Energi dan Kelistrikan

Konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai inikator kemajuan sebuah negara, dikarenakan asumsi bahwa energy listrik digunakan untuk mendukung dan/atau menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah maka konsumsi energi listrik juga akan semakin meningkat Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan energi listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai, oleh karena itu prakiraan kebutuhan listrik jangka Panjang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat diperlukan agar dapat menggambarkan kondisi kelistrikan saat ini dan masa mendatang. Hal ini berpengaruh pada perkembangan kebutuhan energi listrik setiap sektor, antara lain sektor rumah tangga, sektor industri, sektor bisnis dan sektor publik yang merupakan konsumen dari energi listrik.

2.6.2.4. Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan permasalahan klasik yang kerap timbul dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini disebabkan karena setiap manusia dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti menghasilkan sampah. Volume timbulan sampah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana sampah merupakan suatu masalah dalam pengembangan kota. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, mengakibatkan volume sampah juga meningkat.

Tabel II.81.
Proyeksi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Timbulan Samph (Ton)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	355,61	362,69	379,68	395,92	411,64	427,96
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)	96.348	96.698	97.573	98.448	99.323	100.198
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) (unit)						
• TPA	1	1	1	1	1	1
• TPS	1	1	2	3	3	4
• TPS3R	3	3	4	4	5	5

Perhitungan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang didasarkan pada proyeksi timbulan sampah. Perhitungan proyeksi timbulan sampah menggunakan asumsi produksi sampah sebesar 0,5 kg/orang/hari, sehingga pada tahun 2045 diproyeksi jumlah timbulan sampah sebanyak 100,198 ton dan jumlah kebutuhan tempat pengolahan sampah terpadu sebanyak 3 TPA, 4 TPS, dan 5 TPS3R

2.6.2.5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia selain pangan, tempat tinggal dan Pendidikan karena manusia dalam keadaan sehat dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik, dan ini perlu ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang memadai. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar kesehatan bagi Masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk menyediakan layanan medis baik dasar maupun kompleks adalah Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotik.

2.6.2.6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia selain Kesehatan dan permukiman karena dengan peningkatan pendidikan manusia di suatu wilayah akan berdampak baik pada wilayah tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan yang baik akan meningkatkan angka pendidikan di suatu wilayah, hal ini dikarenakan dengan fasilitas yang memadai bagi seluruh penduduk akan mudah pula seluruh penduduk untuk mengakses fasilitas tersebut. Apabila ketersediaan fasilitas pendidikan sudah mampu memenuhi kebutuhan penduduk, harus dapat dipastikan bahwa setiap fasilitas tersebut terjangkau baik jarak optimal oleh setiap penduduk.

Fasilitas pendidikan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran terutama dalam proses belajar dan mengajar adalah Taman Kanak Kanak (TK) untuk menunjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk menunjang pendidikan dasar yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan.

Tabel II.82.

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	355,61	362,69	379,68	395,92	411,64	427,96
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan						
TK	751	770	796	834	890	965
SD/MI	2,038	2,050	2,074	2,115	2,197	2,319
SMP/MTs	597	600	606	618	642	678

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, (Data diolah Bappelitbangda 2023)

Berdasarkan table di atas, memperhatikan ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023, maka kesenjangan ketersediaan fasilitas pendidikan yang masih membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan di 2025 dibandingkan dengan kondisi tahun ini, dibutuhkan tambahan fasilitas TK sebanyak 19 unit, SD/MI sebanyak 12 unit, dan SMP/MTs sebanyak 3 unit.

Dan hingga tahun 2045 dibutuhkan sarana TK sebanyak 214 unit, sarana SD/MI sebanyak 281 unit, dan sarana SMP/MTs sebanyak 81 unit. Ini seiring dengan penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Nasional

Berdasarkan arah pembangunan wilayah Pulau Sumatera akan difokuskan sebagai Koridor industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia, Pulau Jawa akan di fokuskan terhadap koridor industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, Pulau Kalimantan akan berfokus pada koridor superhub ekonomi nusantara, Pulau Sulawesi akan berfokus pada koridor penunjang ekonomi IKN dan industri berbasis SDA, Pulau Bali-Nusa dan sekitarnya akan berfokus pada koridor superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara, Kepulauan Maluku akan berfokus pada koridor hub ekonomi biru timur, Pulau Papua akan berfokus pada koridor industri kimia dasar dan agro.

Gambar II.15
Klasifikasi Koridor Ekonomi berdasarkan Potensi Wilayah



Sumber: RPJPN 2025-2045

Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan sebagai “Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA” berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional kawasan Indonesia Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan hilirisasi mineral, dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun konektivitas antarwilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (Domestic Value Chain), diperkuat dengan Global Value Chain. Melalui skema kerja sama regional. Kedepannya pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan upaya-upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui perkuatan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah pembangunan tersebut pembangunan di wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas.

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.

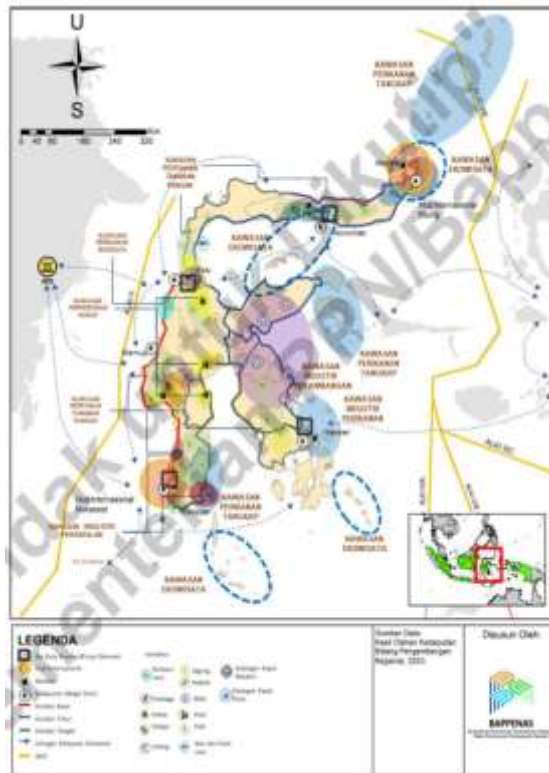
Kedua, pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa dan kopi.

Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi hub dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital.

Keempat, perbaikan tatakelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya dikawasan perbatasan.

Kelima, penigkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan resiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

Gambar II.16
Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Sulawesi



Sumber : RPJPN 2025-2045

2.7.2. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan

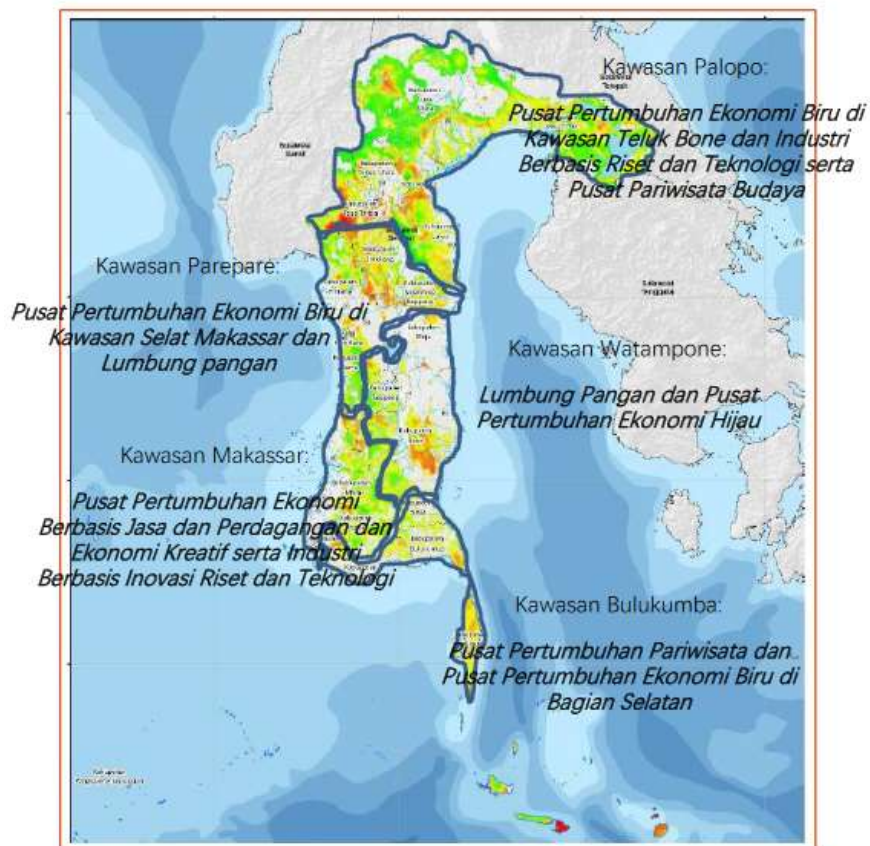
Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi masih terdapat kesenjangan antar kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, maka pada setiap kawasan pembangunan, sebagaimana menjadi misi pembangunan jangka panjang nasional, akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi ini didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Substansi transformasi dan landasan transformasi ini diterjemahkan kedalam 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Transformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan manusia Sulawesi Selatan yang unggul, dengan derajat kesehatan yang tinggi dan merata, tingkat dan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata, serta standar hidup yang layak untuk semua. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara pada pelayanan publik berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai pendapatan yang tinggi melalui pengembangan kawasan pembangunan berdasarkan potensi wilayah, pengembangan ekonomi biru di kawasan andalan laut Teluk Bone dan Selat Makassar, penerapan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan, diiringi

dengan implementasi transformasi digital, penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan rantai pasok global, dalam rangka memperkuat peran Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA.

Tematik transformasi ekonomi berdasarkan kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan diarahkan sebagai berikut. Kawasan Makassar (Takalar, Gowa, Makassar, Maros, dan Pangkajene Kepulauan) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Iptekin. Kawasan Bulukumba (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan. Kawasan Watampone (Bone, Soppeng, dan Wajo) diarahkan sebagai Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kawasan Palopo (Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tana Toraja) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone, Pusat Pertumbuhan Industri Pengolahan SDA Mineral, serta Pusat Pariwisata Budaya. Kawasan Parepare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan berbasis pertumbuhan ekonomi hijau mendukung IKN.

Gambar II.17
Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Kawasan Pembangunan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

Landasan transformasi yakni keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah, daya saing daerah, serta keamanan dan ketertiban masyarakat pada seluruh kawasan pembangunan. Demikian juga dengan landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian alih fungsi lahan hutan dan pertanian, serta memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, pada seluruh kawasan pembangunan tersebut.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dalam tataran pembangunan nasional, dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau, namun sampai saat ini belum optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Sedangkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan dan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

2.7.2.1. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Makassar

Kawasan Pembangunan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2021 yaitu sebesar 51,72 persen. Ini disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kota Makassar sebesar 36,67 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Makassar adalah Kabupaten Takalar dengan kontribusi sebesar 2,01 persen. Kawasan Makassar berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional sekaligus sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional MAMMINASATA yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, dan simpul transportasi internasional.

Peluang kontribusi ekonomi kawasan pembangunan Makassar bersumber dari letak geografi yang dilalui oleh wilayah ALKI II yang terhubung dengan IKN melalui kawasan andalan laut Selat Makassar. Di kawasan ini terdapat Kabupaten Takalar yang berperan sebagai kawasan industri strategis nasional dan merupakan bagian dari koridor Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta bandar udara serta kereta api terutama untuk angkutan barang.

Kawasan pembangunan Makassar diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Makassar diprioritaskan pada,

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM dan pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan dan ini diprioritaskan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan industri prioritas nasional berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan wisata maritim di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Takalar termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy untuk mendukung IKN; pengembangan kawasan UNESCO Global GeoPark sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis ekonomi hijau dan sirkuler serta penguatan kawasan konservasi strategis yaitu Kawasan Taman Nasional Bawakaraeng-Bulusaraung yang telah ditetapkan menjadi kawasan UNESCO Global Geopark termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah, baik regional maupun internasional di Kota Makassar; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan MAMMINASATA serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah berbasis regional.

Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

2.7.2.2. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Bulukumba

Kawasan Bulukumba memberikan kontribusi sebesar 10,18 persen terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2020. Sumbangan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 2,88 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan Tahun 2020 di Kawasan Bulukumba adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kontribusi sebesar 1,26 persen. Kawasan Bulukumba berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, berbasis klaster pembangunan ekonomi biru seiring ditetapkannya DPP Pariwisata Selayar-Makassar-Toraja dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebagai kawasan strategis Provinsi di kabupaten Kepulauan Selayar serta kawasan perikanan dan industry perikanan terpadu.

Kawasan pembangunan Bulukumba diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan. Peluang kontribusi ekonomi kawasan pembangunan Bulukumba sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru bersumber dari letak geografi yang terletak di Laut Flores dan merupakan bagian dari kawasan andalan laut Teluk Bone. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM yang didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta bandar udara.

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Bulukumba diarahkan pada prioritas sebagai berikut.

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM dan pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan. Ini diprioritaskan pada kabupaten Kepulauan Selayar, Sinjai, Bulukumba, dan Jeneponto.

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru dengan mengembangkan kawasan industri strategis berbasis komoditas unggulan khususnya perikanan tangkap yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi di Kabupaten Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi hijau berbasis komoditas pertanian hortikultura yang didukung oleh sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Bantaeng; pengembangan kawasan industri prioritas nasional di kabupaten Bantaeng; pengembangan kawasan Bulukumba dan Takabonerate sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan ancillary yang baik dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fungsi kawasan Taman Nasional Takabonerate sebagai kawasan konservasi.

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler dan berkelanjutan serta penguatan kawasan konservasi strategis nasional yaitu

Kawasan Taman Nasional Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar dan kawasan konservasi maritime strategis provinsi yaitu kawasan pembuatan perahu pinisi di Kabupaten Bulukumba termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Bantaeng dan Kepulauan Selayar; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital di kabupaten Jeneponto; peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), dan Tempat Pengolahan Sampah berbasis 3R berbasis regional.

Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi dan dampak perubahan iklim serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

2.7.2.3. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Watampone

Kawasan Watampone memberikan kontribusi sebesar 13,38 persen terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Bone sebesar 7,22 persen, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Watampone Tahun 2020 adalah Kabupaten Soppeng dengan kontribusi sebesar 2,25 persen. Kawasan Pembangunan Watampone diarahkan menjadi Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Peran Kawasan Watampone sebagai lumbung pangan tidak hanya sebagai lumbung pangan regional namun juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan IKN, sehingga untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo serta bandar udara di Kabupaten Bone. Untuk itu, pengembangan Kawasan Watampone diarahkan pada prioritas berikut.

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM dan pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan. Ini diprioritaskan pada Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo.

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan (khususnya sutera) di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan pengembangan sentra industri pengolahan komoditas perikanan di Kabupaten Bone.

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler dan berkelanjutan serta penguatan kawasan konservasi yaitu Taman Wisata Alam di Kabupaten Bone dan Soppeng serta pengelolaan terpadu Danau Tempe di Kabupaten Wajo dan daerah sekitarnya.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah di kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital serta pemanfaatan gas alam; peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Sampah dengan sistem 3R.

Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan

risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi dan dampak perubahan iklim serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

2.7.2.4. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Watampone

Kawasan Palopo memberikan kontribusi sebesar 15,04 persen terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2020 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Luwu Timur sebesar 4,25 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Palopo adalah Kabupaten Tana Toraja dengan kontribusi sebesar 1,50 persen. Peluang kontribusi ekonomi kawasan Palopo bersumber dari kondisi geografis berupa pegunungan dengan kekayaan alam mineral dan batuan yang melimpah dan ekosistem lautan yang merupakan bagian dari kawasan andalan laut Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur di kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako berperan sebagai kawasan pertambangan strategis nasional dengan komoditas nikel yang melimpah.

Selain itu kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional sekaligus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yakni bagian dari koridor Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta bandar udara terutama untuk angkutan barang dan angkutan pariwisata.

Kawasan pembangunan Palopo diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone dan Industri Berbasis Riset dan Teknologi serta Pusat Pariwisata Budaya. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Palopo diarahkan pada prioritas berikut.

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM dan pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan industri prioritas nasional berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi di Kabupaten Luwu, dan Luwu Timur; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy; pengembangan kawasan sentra pertanian dan perkebunan yang didukung oleh sentra industri pengolahan; dan pengembangan kawasan Toraja sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler dan berkelanjutan pada seluruh Kawasan serta penguatan kawasan konservasi strategis yaitu Kawasan cagar alam dan Taman Wisata Alam Danau di kabupaten Luwu Timur.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah di Kota Palopo dan Kabupaten Luwu; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan sampah dengan sistem 3R.

Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi dan gempa bumi serta

penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

2.7.2.5. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Parepare

Kawasan Parepare memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 11,55 persen yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Pinrang sebesar 3,97 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Parepare adalah Kota Parepare dengan kontribusi sebesar 1,45 persen. Kawasan Parepare berposisi sebagai Kawasan Strategis Nasional Parepare yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi dan lumbung pangan yang diarahkan untuk mendukung IKN. Kawasan Parepare memiliki letak geografi yang strategis yaitu dilalui oleh wilayah ALKI II yang terhubung dengan IKN melalui kawasan andalan laut Selat Makassar. Untuk memanfaatkan potensi tersebut maka dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta kereta api terutama untuk angkutan barang.

Kawasan Parepare diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung IKN. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Parepare diarahkan pada prioritas berikut.

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang.

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan kawasan sentra industri berbasis komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi di Kabupaten Enrekang, Sidenreng Rappang dan Barru; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap di Kabupaten Pinrang dan Barru untuk mendukung IKN; pengembangan ekonomi hijau terutama pengembangan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan.

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler dan berkelanjutan serta penguatan kawasan konservasi pesisir di kabupaten Barru termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan terutama di Kabupaten Sidrap.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah di Kota Parepare; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan Parepare serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Sampah 3R berbasis regional.

Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi dan dampak perubahan iklim serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

2.7.3. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Arah pengembangan pusat pertumbuhan dan kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggambarkan arahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah atau pusat tertentu yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Arah pengembangan pusat pertumbuhan dan kewilayahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ditinjau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah disusun sebagai hasil perencanaan tata ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam penataan ruang wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah ditentukan kebijakan dan strategi yang meliputi:

- a. Pengembangan sistem perkotaan sebagai gerbang dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berhirarki, berkarakter dan berdaya saing;
- b. Pengembangan perdesaan yang produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengembangan jaringan transportasi wilayah yang bersinergi dan berdayaguna bagi pembangunan wilayah;
- d. Pengembangan jaringan prasarana wilayah dalam mendukung pelayanan dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi wilayah;
- e. Peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai potensi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. Peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan;
- g. Pengembangan potensi industri dan pertambangan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- i. Pengelolaan sumber daya kepariwisataan yang inovatif dan responsif terhadap kecenderungan perkembangan pasar wisata; dan
- j. Penataan ruang wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang dalam konteks untuk mewujudkan kabupaten yang produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur wilayah terintegrasi dengan potensi sumber daya alam menuju masyarakat maju dan mandiri. Guna mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan arah kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan sistem perkotaan sebagai gerbang dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berhirarki, berkarakter dan berdaya saing, antara lain dengan a). penetapan pusat-pusat pelayanan yang telah berkembang dan pusat-pusat pelayanan baru yang memiliki keunggulan komparatif dan potensi pertumbuhan yang dapat menjadi keseimbangan perkembangan wilayah secara merata; dan b). menetapkan fungsi-fungsi pelayanan primer dan sekunder pada setiap pusat pertumbuhan yang dibarengi dengan pengembangan infrastruktur penunjangnya agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.
2. Pengembangan perdesaan yang produktif dan berkelanjutan, antara lain dengan; a). Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan sub-sub pusat pertumbuhan yang berbasis pertanian dan perkebunan melalui konsep pembangunan agropolitan; b). Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan sub-sub pusat pertumbuhan yang berbasis perikanan melalui konsep pembangunan minapolitan; c). Peningkatan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan; d). Pengembangan kelembagaan perdesaan dalam menunjang kegiatan ekonomi perdesaan; e). Pengembangan industrialisasi sektor unggulan serta peningkatan sentra-sentra perdagangan/jasa dan potensi UMKM di kawasan perdesaan; dan f). Pengembangan usaha perikanan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis dan industri.
3. Pengembangan jaringan transportasi wilayah yang bersinergi dan berdayaguna bagi pembangunan wilayah, antara lain dengan; a). Pengembangan jaringan transportasi darat dan laut yang terpadu dan bersinergi dengan rencana pengembangan jaringan transportasi nasional dan regional; b). Peningkatan fungsi ruang disekitar simpul-simpul jaringan transportasi (pelabuhan, terminal, rencana stasiun kereta api) yang

- berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat; c). membuka akses antar pusat pelayanan yang berpotensi terhadap perkembangan wilayah perdesaan; dan d). mendukung pengembangan pusat pelayanan baru yang berpotensi terhadap pembangunan sistem transportasi nasional dan regional di Daerah.
4. Pengembangan jaringan prasarana wilayah dalam mendukung pelayanan dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi wilayah, antara lain dengan;
 - a). pengembangan potensi sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; b). Pengembangan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian; c). pemanfaatan dan pengelolaan sumber air baku untuk pelayanan kebutuhan penduduk yang menyeluruh; d). penggunaan teknologi pengolahan air baku di kepulauan melalui sistem desalinasi dan pemanenan air hujan yang dilengkapi dengan prasarana sarana penunjangnya; e). peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan infrastruktur sanitasi yang berkualitas sesuai ketentuan perundangan; f). Peningkatan sistem jaringan telekomunikasi dengan pengembangan jaringan *fiber optic* serta penyediaan tower BTS bersama yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya; g). Peningkatan pelayanan dan penyaluran energi kelistrikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam (industri, pertambangan); dan h). Pengembangan kemandirian pengelolaan persampahan melalui pengembangan konsep-konsep pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai potensi dan daya dukung lingkungan, antara lain dengan; a). Pengembangan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; b). mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kegiatan budi daya di kawasan pesisir dan laut; dan, c). Pengembangan kawasan permukiman pesisir dan kepulauan yang memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan yang seimbang serta mempertimbangkan aspek kebencanaan.
 6. Peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan, antara lain dengan; a). Menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian pangan berkelanjutan melalui penetapan LP2B, dengan tetap memperhatikan kepentingan perkembangan kawasan permukiman di perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan; b). Pengembangan insentif dan disinsentif untuk mendukung LP2B; c). Pengembangan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana sebagai sentra-sentra produksi untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan d). penggunaan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian dan perkebunan.
 7. Pengembangan potensi industri dan pertambangan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, antara lain dengan; a). Pengembangan kawasan peruntukan industri dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi terwujudnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup; b). Penetapan kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri yang teraglomerasi; c). pengendalian terhadap aktivitas pertambangan melalui pengawasan yang ketat sesuai prosedur peraturan perundangan yang berlaku terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup; dan d). optimalisasi pengolahan lahan pasca penambangan dengan cara penjenjangan bertahap proses pengembalian rona alam menjadi peruntukan budidaya lainnya yang potensial dan bersifat konservasi terhadap tanah dan air.

8. Peningkatan fungsi kawasan lindung, antara lain dengan; a). Pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan melalui koordinasi lintas kewenangan dalam meningkatkan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat; b). Penegasan dan pengendalian fungsi Kawasan sepanjang pantai, sungai, waduk dan mata air sebagai fungsi lindung dengan penanaman kembali (reboisasi); c). Pengembangan ekosistem mangrove dengan fungsi pencegahan terhadap potensi bencana tsunami; d). menjaga eksistensi dan fungsi ruang terbuka hijau eksisting dalam kawasan perkotaan dan mengembangkan potensi ruang terbuka hijau dalam rangka mencapai persentase minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan e). melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.
9. Pengelolaan sumber daya kepariwisataan yang inovatif dan responsif terhadap kecenderungan perkembangan pasar wisata, antara lain dengan; a). pengembangan destinasi pariwisata yang dinamis terhadap perkembangan pasar pariwisata pada setiap potensi daya tarik wisata dan unsur destinasi pariwisata lainnya; b). menciptakan branding destinasi wisata unggulan di daerah sesuai karakteristik wilayah yang terpadu agar tercipta pemanfaatan sumber daya pariwisata yang menyeluruh; c). pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai industri pariwisata pada wilayah-wilayah pengaruh kegiatan wisata; d). pengembangan struktur perwilayahan dan kawasan pariwisata strategis sebagai referensi bagi penyediaan paket-paket wisata yang terintegrasi dengan pusat pelayanan wilayah; dan e). mengembangkan sistem informasi pariwisata daerah yang handal sebagai media komunikasi kepariwisataan secara menyeluruh.
10. Penataan ruang wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana, antara lain dengan; a). pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di daerah terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat permukiman penduduk di pesisir dan perdesaan; b). mengembangkan sistem pengendalian banjir yang terpadu dengan sistem pengelolaan sumber daya air serta penyediaan prasarana penanggulangan banjir; dan c). perencanaan dan penataan permukiman perkotaan dengan dukungan sarana dan prasarana kebencanaan yang fungsional dan terintegrasi dengan rencana struktur ruang wilayah.

Arahan penataan ruang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2043 terbagi menjadi arahan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. Sistem pusat permukiman kabupaten, yang terdiri atas:

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa Kawasan Perkotaan Pangkajene dan Kepulauan meliputi:
 - a) Kecamatan Pangkajene;
 - b) Kecamatan Minasa te'ne; dan
 - c) Kecamatan Bungoro.
- 2) Pusat-pusat lain yang terdiri atas:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 - (1) kawasan perkotaan balleangin di kecamatan balocci;
 - (2) kawasan perkotaan bantimurung di kecamatan tondong tallasa;
 - (3) kawasan perkotaan bungoro di kecamatan bungoro;

- (4) kawasan perkotaan labakkang di kecamatan labakkang;
 - (5) kawasan perkotaan bonto-bonto di kecamatan ma'rang;
 - (6) kawasan perkotaan segeri di kecamatan segeri;
 - (7) kawasan perkotaan tama'rupa di kecamatan mandalle;
 - (8) kawasan perkotaan sapuka di kecamatan liukang tangaya;
 - (9) kawasan perkotaan kalu-kalukuang di kecamatan liukang kalmas;
 - (10) kawasan perkotaan mattiro sompe di kecamatan liukang tupabbiring; dan
 - (11) kawasan perkotaan mattiro kanja di kecamatan liukang tupabbiring utara.
- b) Pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
- (1) pusat pelayanan lingkungan balocci baru di kecamatan balocci;
 - (2) pusat pelayanan lingkungan tondong kura di kecamatan tondong tallasa;
 - (3) pusat pelayanan lingkungan kabba di kecamatan minasa te'ne;
 - (4) pusat pelayanan lingkungan padang lampe di kecamatan ma'rang;
 - (5) pusat pelayanan lingkungan bawasalo di kecamatan segeri;
 - (6) pusat pelayanan lingkungan boddie di kecamatan mandalle;
 - (7) pusat pelayanan lingkungan sabalana di kecamatan liukang tangaya;
 - (8) pusat pelayanan lingkungan pammase di kecamatan liukang kalmas;
 - (9) pusat pelayanan lingkungan mattiro bone di kecamatan liukang tupabbiring;
 - (10) pusat pelayanan lingkungan mattiro langi di kecamatan liukang tupabbiring;
 - (11) pusat pelayanan lingkungan mattiro walie di kecamatan liukang tupabbiring utara; dan
 - (12) pusat pelayanan lingkungan mattiro bombang di kecamatan tupabbiring utara.

Gambar II.18
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pemukiman



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pangkep tahun 2024-2043

2. Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budidaya. Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai berikut:

Kawasan Lindung terdiri atas:

- a. Badan air dengan seluas kurang lebih 567 (lima ratus enam puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan balocci;
 - 2) kecamatan tondong tallasa;
 - 3) kecamatan minasa te'ne;
 - 4) kecamatan pangkajene;
 - 5) kecamatan bungoro;
 - 6) kecamatan labakkang;
 - 7) kecamatan ma'rang;
 - 8) kecamatan segeri; dan
 - 9) kecamatan liukang kalmas.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 7.986 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan balocci;
 - 2) kecamatan tondong tallasa;
 - 3) kecamatan bungoro;
 - 4) kecamatan ma'rang;
 - 5) kecamatan segeri; dan
 - 6) kecamatan mandalle.
- c. Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 3.313 (tiga ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- d. Kawasan konservasi dengan berupa taman nasional seluas kurang lebih 14.245 (empat belas ribu dua ratus empat puluh lima) hektare, terdapat:
 - 1) kecamatan balocci;
 - 2) kecamatan tondong tallasa; dan
 - 3) kecamatan minasa te'ne.
- e. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seluas kurang lebih 6 (empat) hektare, terdapat di kecamatan liukang tangaya.
- f. Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah seluas kurang lebih 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di kecamatan tondong tallasa.
- g. Kawasan ekosistem mangrove, seluas kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan pangkajene;
 - 2) kecamatan bungoro;
 - 3) kecamatan labakkang;
 - 4) kecamatan ma'rang;
 - 5) kecamatan segeri;
 - 6) kecamatan mandalle;
 - 7) kecamatan liukang tangaya; dan
 - 8) kecamatan liukang tupabbiring utara.

Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi berupa hutan produksi tetap, seluas kurang lebih 5.060 (lima ribu enam puluh) hektare, terdapat di:
 - (a) kecamatan balocci;
 - (b) kecamatan tondong tallasa;
 - (c) kecamatan minasa te'ne;
 - (d) kecamatan bungoro;
 - (e) kecamatan labakkang;
 - (f) kecamatan ma'rang; dan
 - (g) kecamatan segeri.
- b. Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 703 (tujuh ratus tiga) hektare, terdapat di:
 - a) kecamatan balocci;

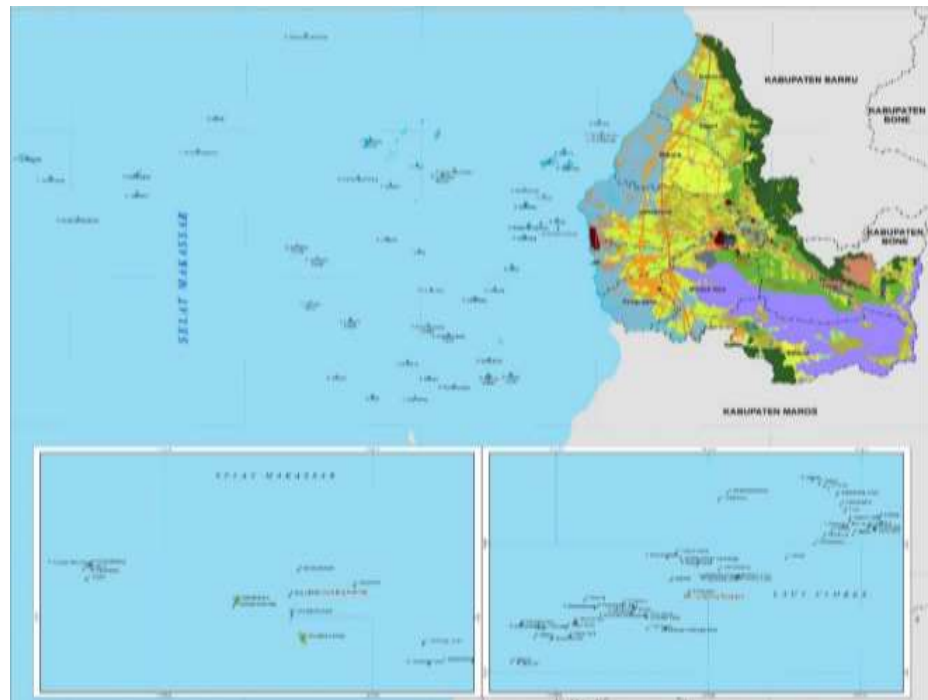
- b) kecamatan tondong tallasa;
 - c) kecamatan bungoro;
 - d) kecamatan labakkang; dan
 - e) kecamatan segeri.
- c. Kawasan pertanian meliputi:
- a) kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 14.203 (empat belas ribu dua ratus tiga) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan balocci;
 - 2) kecamatan tondong tallasa;
 - 3) kecamatan minasa te'ne;
 - 4) kecamatan pangkajene;
 - 5) kecamatan bungoro;
 - 6) kecamatan labakkang;
 - 7) kecamatan ma'rang;
 - 8) kecamatan segeri; dan
 - 9) kecamatan mandalle.

kawasan tanaman pangan terdapat lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 13.271 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:

 - 1) kecamatan balocci;
 - 2) kecamatan tondong tallasa.
 - 3) kecamatan minasa te'ne;
 - 4) kecamatan pangkajene;
 - 5) kecamatan bungoro;
 - b) kawasan tanaman hortikultura, seluas kurang lebih 2.354 (dua ribu tiga ratus lima puluh empat) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan balocci;
 - 2) kecamatan labakkang;
 - 3) kecamatan ma'rang; dan
 - 4) kecamatan segeri.
 - c) kawasan perkebunan seluas kurang lebih 12.970 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
 - d) Kawasan peternakan, seluas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan minasa te'ne;
 - 2) kecamatan labakkang;
 - 3) kecamatan ma'rang;
 - 4) kecamatan segeri; dan
 - 5) kecamatan mandalle.
- d. Kawasan perikanan meliputi:
- a) kawasan perikanan tangkap, seluas kurang lebih 2 (dua) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan labakkang; dan
 - 2) kecamatan liukang tupabbiring utara.
 - b) kawasan perikanan budi daya seluas kurang lebih 11.944 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di:
 - 1) kecamatan minasa te'ne;
 - 2) kecamatan pangkajene;
 - 3) kecamatan bungoro;
 - 4) kecamatan labakkang;
 - 5) kecamatan ma'rang;
 - 6) kecamatan segeri;
 - 7) kecamatan mandalle; dan
 - 8) kecamatan liukang tupabbiring utara.
- e. Kawasan pergarahan, seluas kurang lebih 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) hektare, terdapat di:
- a) kecamatan bungoro;
 - b) kecamatan labakkang; dan
 - c) kecamatan ma'rang.

- f. Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
 - a) kawasan pertambangan mineral meliputi:
 - 1) kawasan pertambangan bukan logam seluas kurang lebih 452 (empat ratus lima puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. kecamatan balocci;
 - b. kecamatan tondong tallasa;
 - c. kecamatan minasa te'ne; dan
 - d. kecamatan bungoro.
 - 2) kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) hektare, terdapat di:
 - a. kecamatan balocci;
 - b. kecamatan tondong tallasa;
 - c. kecamatan minasa te'ne;
 - d. kecamatan bungoro; dan
 - e. kecamatan labakkang.
 - b) kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektare, terdapat di:
 - a. kecamatan minasa te'ne;
 - b. kecamatan bungoro;
 - c. kecamatan liukang kalmas;
 - d. kecamatan liukang tangaya;
 - e. kecamatan liukang tupabbiring; dan
 - f. kecamatan liukang tupabbiring utara.
- g. Kawasan peruntukan industri, seluas kurang lebih 484 (empat ratus delapan puluh empat) hektare, terdapat di:
 - a) kecamatan tondong tallasa;
 - b) kecamatan bungoro; dan
 - c) kecamatan labakkang.
- h. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektare terdapat di:
 - a) kecamatan balocci;
 - b) kecamatan labakkang;
 - c) kecamatan liukang tupabbiring; dan
 - d) kecamatan tupabbiring utara.
- i. Kawasan permukiman, meliputi:
 - a) kawasan permukiman perkotaan, seluas kurang lebih 3.785 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.dan
 - b) kawasan permukiman perdesaan, seluas kurang lebih 6.344 (enam ribu tiga ratus empat puluh empat) hektare terdapat diseluruh kecamatan.
- j. Kawasan transportasi, seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a) kecamatan minasa te'ne;
 - b) kecamatan pangkajene;
 - c) kecamatan bungoro;
 - d) kecamatan labakkang;
 - e) kecamatan ma'rang;
 - f) kecamatan segeri; dan
 - g) kecamatan mandalle.
- k. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektare, terdapat di:
 - a) kecamatan balocci;
 - b) kecamatan minasa te'ne;
 - c) kecamatan pangkajene;
 - d) kecamatan bungoro;
 - e) kecamatan labakkang;
 - f) kecamatan segeri;
 - g) kecamatan liukang kalmas;
 - h) kecamatan liukang tangaya; dan
 - i) kecamatan liukang tupabbiring.

Gambar II.19
Peta Rencana Pola Ruang



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pangkep tahun 2024-2043

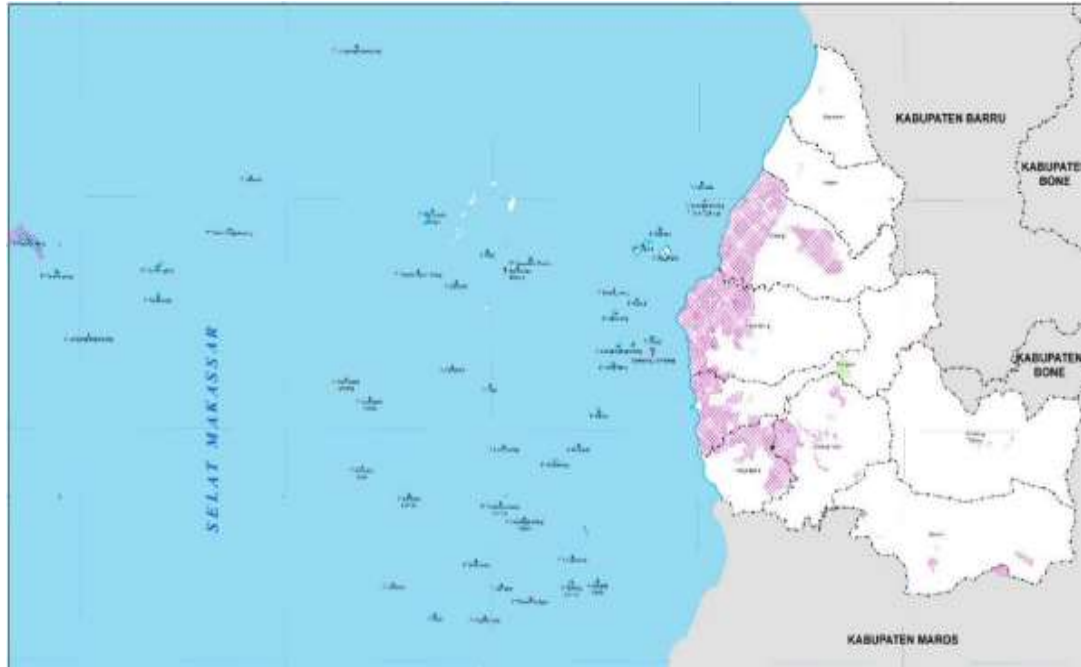
3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis yang ada di kabupaten meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - 1) kawasan perkotaan terintegrasi pangkajene-bungoro-minasa te'ne terdapat di:
 - a) kecamatan minasa te'ne;
 - b) kecamatan pangkajene; dan
 - c) kecamatan bungoro.
 - 2) kawasan cepat tumbuh pengembangan minapolitan Labakkang, terdapat di:
 - a) kecamatan ma'rang;
 - b) kecamatan minasa te'ne;
 - c) kecamatan pangkajene;
 - d) kecamatan bungoro;
 - e) kecamatan labakkang; dan
 - f) kecamatan segeri.
 - 3) kawasan pengembangan agropolitan ma'rang di kecamatan ma'rang.
 - 4) kawasan industri maritim indonesia (KIMI), terdapat di:
 - a) kecamatan bungoro; dan
 - b) kecamatan labakkang.
 - 5) kawasan destinasi pariwisata geopark, terdiri atas:
 - a) bulu sipong early hunting scene, dewi lamsang natural pond karst, dan leang lonrong subterranean river di kecamatan minasa te'ne;
 - b) camba-cambang reef island di kecamatan liukang tupabbiring utara;
 - c) kapoposang reef island dan panambungan reef island di kecamatan liukang tupabbiring;
 - d) parenreng oceanic crust rocks di kecamatan segeri;
 - e) pateteyang-cempaga metamorphic complex di kecamatan bungoro;
 - f) bantimala chert complex, dan pateteyang-cempaga metamorphic complex di kecamatan tondong tallasa; dan
 - g) balocci pinnacle karst, tompo'bulu-bulusaraung volcanics, dan tonasa industrial heritage site di kecamatan balocci.

- 6) kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas:
 - a) kawasan religi pulau salemo di kecamatan liukang tupabbiring utara;
 - b) perkampungan arajang bissu, dan taman purbakala sumpang bita di kecamatan balocci; dan
 - c) perkampungan prasejarah bellae di kecamatan minasa te'ne
- 7) kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan industri semen tonasa di kecamatan bungoro.

Gambar II.20
Peta Penetapan Kawasan Strategis



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini dilakukan untuk dapat memetakan permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil evaluasi terhadap permasalahan pembangunan pada RPJPD sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan mendasar yakni permasalahan pembangunan tidak ditelaah dalam tiga kolom yang terdiri dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah sehingga tidak terlihat sumber paling mendasar dari masalah – masalah yang ada.

Pada dokumen RPJPD ini perumusan permasalahan sudah disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan identifikasi isu strategis untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di masa yang akan datang.

3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ketidaksiesuaian pembangunan dengan kondisi riil yang dibuat saat perencanaan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory dan dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Sedangkan Permasalahan pembangunan daerah pada program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari; (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan kondisi daerah yang telah dijabarkan pada Bab II dokumen ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

1. Belum Optimalnya Daya Saing Daerah

Nilai Skoring Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditahun 2023 masih rendah jika disandingkan dengan IDSD Provinsi Sulawesi Selatan dan IDSD Nasional dengan capaian indeks hanya 2.99. Sementara skoring IDSD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,70 lebih tinggi dari IDSD Nasional dengan nilai indeks sebesar 3,44. Rendahnya capaian IDSD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini

umumnya dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi masih rendah.

2. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Kualitas dan daya saing SDM tercermin dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; rendahnya literasi digital masyarakat; rendahnya derajat kesehatan masyarakat; serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam sepuluh tahun terakhir IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 70,59 persen(2023), dimana persentase idealnya antara 85 persen sampai dengan 100 persen. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, namun begitu masih berada dibawah IPM Provinsi yaitu 73.46 persen (2023) dan Nasional yaitu 74.39 persen (2023).

3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori “A” dengan skor >85, Kategori “BB” skor 70 – 85, dan Kategori “B” skor 60 – 70. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2023 tercatat sebesar 58,34 atau kategori “CC” (2023), dimana pencapaiannya tidak terlepas dari hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit meliputi: pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reformasi. Komponen hasil meliputi: akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah, dipengaruhi rendahnya SDM yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi; Kurangnya profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan kurang optimal; Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN; serta belum optimalnya penerapan peraturan ASN.

4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat memberikan permasalahan serius yang berdampak kepada berbagai aspek mulai ekonomi, kesehatan bahkan sampai masalah kerawanan sosial. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan di daerah.

Selama ini penanganan kemiskinan di daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum dilakukan secara komprehensif. Jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang luas serta anggaran daerah yang terbatas menjadi kendala bagi sebagian besar pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Namun kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi

penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Tercermin dari pencapaian Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 10 tahun terakhir mencapai 13,40% (2023), serta di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,70% dan Nasional sebesar 9,36%. Pencapaian Persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih dijumpai permasalahan yang perlu ditangani, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan persentase penduduk miskin, yaitu rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya pengangguran.

5. Tingkat Kerawanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Masih Cukup Tinggi.

Kualitas hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi yang belum berjalan dengan baik. Indikasinya di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti indeks demokrasi masih berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal masih cukup tinggi, serta angka kriminalitas belum cukup menggambarkan kondisi yang aman dalam menjalankan aktivitas keseharian masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan; ketidaksetaraan akses ke hukum di masyarakat terutamanya di daerah-daerah terpencil. Pelanggaran hak asasi manusia seperti penahanan yang sewenang-wenang, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, konflik dan ketidakstabilan politik, teknologi keamanan siber masih kurang, tingkat pendidikan, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas, akses terhadap layanan kesehatan mental masih terbatas; peredaran narkoba dan sejumlah kejahatan psikotropika lainnya yang belum terselesaikan. Berbagai aspek penegakan hukum negara, daerah dan bahkan sosial yang tidak konsisten dan tidak tuntas ini mendorong masih besarnya tingkat kerawanan sosial yang menyebabkan terganggunya ketenteraman, dan ketertiban umum masih cukup tinggi pada sejumlah daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. Rendahnya Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tercermin dari pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 4,75% mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 4,93%. Kondisi ini perlu didorong untuk tetap tumbuh positif mengingat sempat mengalami penurunan -1,69% ditahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang melanda, serta tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah, yaitu rendahnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur serta terjadinya kesenjangan antar wilayah, serta rendahnya pendapatan per kapita dan tingginya disparitas pendapatan serta daya saing.

Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian. Namun, jika melihat tren bahwa pertumbuhan ketiga sektor fluktuatif dan cenderung melambat pada lima tahun terakhir. Industri yang berorientasi pada padat modal menghadapi tantangan deindustrialisasi dini. Kondisi deindustrialisasi muncul ketika terjadi penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor industri pengolahan tidak lagi menjadi pangsa kontribusi terhadap perekonomian. Berdasarkan telaah dokumen, permasalahan tersebut dipicu oleh belum optimalnya daya saing industri dan investasi yang berdampak pada pindahnya industri ke daerah lain sekaligus berdampak pada gelombang pengangguran. Selain itu dari faktor sumber daya manusia utamanya angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja. Dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Maka dari itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi entrepreneur untuk membuka peluang inovasi, pasar baru, dan dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki sektor ekonomi potensial berbasis SDA yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata dan peternakan belum menunjukkan performa yang baik karena produktivitasnya yang stagnan. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya regenerasi petani. Sektor pertanian dan kelautan dan perikanan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam arti luas juga berperan untuk ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang bergizi.

7. Belum Optimalnya Ketersediaan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta Masih Tingginya Ketimpangan Antar Wilayah.

Dapat dilihat dari belum meratanya ketersediaan jalan, jembatan, drainase, gedung pemerintah yang berkualitas di semua wilayah; belum meratanya penyediaan/ pembangunan PSU perumahan dan permukiman yang berkualitas; kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal sehingga belum mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi; belum meratanya ketersediaan akses komunikasi dan informasi yang berkualitas disemua wilayah serta masih perlunya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan; akses layanan sumber air minum aman belum merata dan berkelanjutan; perlunya peningkatan kualitas air sungai.

Sebagai daerah kepulauan, salah satu pokok masalah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah keterbatasan infrastruktur dasar terutama untuk ketersediaan air minum dan sanitasi di pulau-pulau. Selain itu, sarana-prasarana perhubungan dari daratan ke pulau kecil ataupun antar pulau kecil seperti pelabuhan/dermaga dan kapal/perahu angkutan terus memerlukan tambahan dan pemeliharaan. Insfrastruktur jalan ke daerah pedalaman dan dataran tinggi serta jalan desa juga belum

menghubungkan secara baik antar desa dan kecamatan. Keterbatasan infrastruktur wilayah dan dasar mengganggu perekonomian dan pelayanan publik.

Ketimpangan antar wilayah juga turut mewarnai dinamika pembangunan manusia di Indonesia khususnya di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Luasnya wilayah Pangkajene dan Kepulauan dan tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antar kecamatan, antar pulau, antara wilayah pegunungan, pesisir dan kepulauan dengan kabupaten. Dalam tujuan pembangunan wilayah sampai tahun 2045, Pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus berupaya mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Salah satu sasaran yang harus dicapai dalam dua puluh tahun mendatang adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan di seluruh daerah di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

8. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) idealnya berpredikat sangat baik ketika berada pada kisaran nilai >80, predikat “Baik” kisaran nilai 60-70, predikat “Cukup Baik” 50- 60, dan predikat “Kurang Baik” < 50.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 66,39% atau masuk kategori baik, menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan yang perlu dioptimalkan melalui pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 0,94 (2023), menunjukkan kapasitas penanggulangan bencana tingkat kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu ditingkatkan sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga menjadi lebih efektif. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup, dipengaruhi meningkatnya emisi gas rumah kaca; belum optimalnya pengelolaan sampah; dan terjadinya degradasi lingkungan akibat pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara; perubahan cuaca dan iklim serta belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan.

Melimpahnya sumber daya alam kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nyatanya menimbulkan polemik terkait distribusi dan pemanfaatannya. Pemerintah memiliki peran besar untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam dan prioritas pembangunan seperti apa yang ingin diraih. Ironinya, hasil ekstraksi dan pemanfaatan SDA dinilai belum bisa mensejahterakan rakyat sepenuhnya. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut kebutuhan manusia. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia di samping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas.

9. Kurangnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Dipengaruhi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana; belum optimalnya fungsi sistem penanganan bencana; belum optimalnya koordinasi dan pemenuhan standar ketahanan daerah; serta belum seluruh desa terbentuk desa tangguh bencana.

Melimpahnya sumber daya alam kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nyatanya menimbulkan polemik terkait distribusi dan pemanfaatannya. Pemerintah memiliki peran besar untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam dan prioritas pembangunan seperti apa yang ingin diraih. Ironinya, hasil ekstraksi dan pemanfaatan SDA dinilai belum bisa mensejahterakan rakyat sepenuhnya. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut kebutuhan manusia. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia di samping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas. Masalah lingkungan terjadi pada tiga dimensi wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (pada dataran tinggi dan pedalaman terjadi degradasi lingkungan akibat berkurangnya tutupan lahan dan perluasan area pertambangan. Selain itu beberapa sungai menyebabkan banjir pada musim hujan. Pada daerah pesisir terjadi abrasi pantai dan berkurangnya area mangrove. Ini disebabkan oleh aktivitas pertanian, pertambangan, pertambangan serta fenomena alam terkait perubahan iklim.

10. Kearifan Lokal Masih Belum Dipertimbangkan Sebagai Modal Dasar Pembangunan Terutama Untuk Menggerakkan Transformasi Masyarakat Dan Pembangunan.

Dalam kaitan dengan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dianggap masih memiliki nilai-nilai agama yang belum optimal, terutama terkait kemampuan literasi keagamaan dalam mendukung pembangunan inklusif, moderat serta berorientasi kemaslahatan. Dari sisi budaya, karakter dan jati diri daerah yang kita wariskan dari nenek moyang kita ternyata saat ini juga terancam dengan berbagai unsur negatif budaya global. Berbagai kearifan lokal masih belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan terutama untuk menggerakkan transformasi masyarakat dan pembangunan. Berkaitan dengan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dapat melindungi anak-anak dari ancaman krisis moral dan karakter.

Sebagai daerah kepulauan, menjadi kewajiban seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kualitas lingkungan hidup, termasuk laut, supaya tidak menimbulkan biaya kesehatan akibat adanya pencemaran, seperti pengotoran laut yang saat ini masih tinggi. Selain itu, status tempat pembuangan akhir (TPA) melebihi kapasitas daya tampung. Apabila tidak ada tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka semua TPA di wilayah kabupaten pangkajene dan

kepulauan sudah over load pada tahun 2030. dari sisi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, disebutkan bahwa kualitas udara, air, tutupan lahan, dan air laut di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang cenderung menurun.

11. Efisiensi Pengusahaan, Pemanfaatan Energi dan Kemandirian Pangan Belum Berjalan Dengan Baik.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih mengandalkan potensi dari industri pengolahan, Padahal, sebagai wilayah yang memiliki karakteristik pegunungan, dataran rendah dan kepulauan yang masih kaya sumber-sumber potensi energi terbarukan masih sangat memungkinkan untuk pengembangan energi terbarukan. Kurangnya infrastruktur energi yang memadai dapat menjadi penghambat utama. Tanpa jaringan distribusi yang baik, sulit untuk memastikan bahwa energi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien. Disisi lain Manajemen pengelolaan yang tidak efektif dalam pengusahaan dan pemanfaatan energi dapat menyebabkan inefisiensi. Ini bisa termasuk perencanaan yang buruk, kurangnya pengawasan, atau korupsi. Masyarakat dan pelaku industri mungkin kurang memiliki kesadaran atau edukasi mengenai pentingnya efisiensi energi. Ini bisa menyebabkan praktik-praktik yang boros energi. Kebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak mendukung efisiensi energi dapat menjadi hambatan. Ini bisa termasuk kurangnya insentif untuk penggunaan energi terbarukan atau tidak adanya standar efisiensi energi. Penggunaan teknologi yang sudah ketinggalan zaman atau kurang efisien dapat menyebabkan pemanfaatan energi yang tidak optimal.

Terkait dengan kemandirian pangan, tentunya menjadi super penting. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung belum stabil, meskipun setiap tahun mengalami peningkatan namun peningkatan kebutuhan tidak hanya dari sisi ketersediaan, tetapi juga kualitas perlu dibarengi juga dengan perbaikan konsumsinya. Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi dan juga keamanan pangan menjadi permasalahan, dan tentunya rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan masih menjadi permasalahan saat ini.

3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

3.2.1. Isu Strategis Nasional

Dalam posisinya, isu-isu strategis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirumuskan terkait dengan konteks Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam konstelasi regional dan posisinya secara nasional. Isu strategis tersebut disintesis berdasarkan pembacaan situasi dan kondisi terkini.

Isu strategis nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, meliputi: 1) Produktivitas Rendah; 2) IPTEKIN dan Riset Lemah; 3) Deindustrialisasi Dini; 4) Pariwisata dibawah potensinya; 5) Ekonomi laut belum optimal; 6) Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil; 7) Integrasi domestik terbatas; 8) Kualitas SDM yang makin rendah; 9) Kemiskinan; 10) Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa; 11) Pembangunan belum berkelanjutan; 12) Tata Kelola

pemerintahan belum optimal; 13) Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah, dan 14) Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah. Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang meliputi:

1. Tingkat produktivitas dalam persaingan global;
2. Produktivitas tenaga kerja;
3. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN);
4. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti;
5. Deindustrialisasi dini;
6. Produktivitas sektor pertanian;
7. Pemanfaatan potensi pariwisata;
8. Pengembangan dan pemanfaatan ekonomi laut;
9. Penciptaan nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan koperasi;
10. Peningkatan integrasi dan kerjasama ekonomi domestik antar wilayah;
11. Pengembangan kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi;
12. Kualitas SDM bidang pendidikan;
13. Akses pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal;
14. Akses dan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan;
15. Pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan;
16. Pemanfaatan konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara dalam peningkatan angkutan barang dan penumpang;
17. Pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
18. Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mencapai ekonomi hijau;
19. Ketahanan ekologi;
20. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
21. Peningkatan akses energi;
22. Penggunaan energi terbarukan;
23. Efisiensi energi;
24. Peningkatan kualitas dan harmonisasi regulasi;
25. Reformasi birokrasi;
26. Intervensi politik dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah;
27. Kebijakan fiskal pro-pertumbuhan;
28. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang;
29. Kapasitas pembiayaan dalam percepatan prioritas pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas;
30. Perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital;
31. Transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah;
32. Kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan;
33. Integritas partai politik dalam pembangunan;
34. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi;
35. Pancasila sebagai landasan ke dalam norma dan praktik kehidupan, pembentukan karakter dan jati diri bangsa menghadapi ancaman budaya global, serta kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

3.2.2. Isu Strategi Provinsi Sulawesi Selatan

Isu strategis Provinsi Sulawesi Selatan dua puluh tahun kedepan sebagai berikut:

1. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

2. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Magnetnya, pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan endowment factor dan

letak geografisnya akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia.

Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah sebagai dampak backward and forward linkage dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut.

Selain itu, perlu dioptimalkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada peran kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Perlu dioptimalkan pula pengembangan wilayah berdasarkan koridor pemerataan yang diarahkan pada fungsi kabupaten sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan meliputi poros pengembangan Selatan-Selatan, Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah, Poros pengembangan Selatan – Utara, Poros pengembangan Utara – Utara, dan Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah, menjadi tantangan sekaligus peluang tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang lebih merata di Sulawesi Selatan.

Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai Kawasan Bulukumba yang merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi local yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai Kawasan Industri Prioritas Nasional yaitu KI Bantaeng dan KI Takalar;

Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone yang merupakan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan yang didukung oleh industri pengolahan sumberdaya pertanian dan perikanan dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri;

Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sector unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industri serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; KSN Parepare; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Selain itu, kawasan ini juga ditopang oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional;

Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sector unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industri serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja; dan

Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

3. Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional.

Kebijakan nasional dalam penguatan sistem logistik nasional, salah satunya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional yang terjangkau untuk semua wilayah. Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat

Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

4. Pemanfaatan Bonus Demografi.

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

5. Ekosistem Transformasi Digital.

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis drone dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga

komoditi, ataupun perkembangan e-commerce produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

6. Daya Dukung DayaTampung dan Kerusakan Lingkungan.

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah hingga mencapai 65,32 persen. Meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Penurunan lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati menurun sebesar 54,58 persen. Selain itu, daya dukung air menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Walau secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori terlampaui dan melewati ambang batas antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

7. Hilirisasi.

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam suatu industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai

penyangga pangan IKN dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastuktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan dan permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Akan tetapi, di sisi lain, beragamnya potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan peningkatan nilai tambah oleh masyarakat menjadi potensi yang baik agar dapat mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat dan sektor unggulan daerah.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

8. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelebagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan public semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui autonomous investment maupun induced investment sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Dukungan pemerintah daerah di Sulsel terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui

kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulsel sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulsel.

3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Isu strategis daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (Nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan), dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1. Kesejahteraan yang Adil dan Merata

Kesejahteraan sering menjadi fokus kebijakan sosial dan pembangunan di seluruh dunia. Kesejahteraan memiliki beberapa cakupan aspek, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga tentang kualitas hidup dan kebahagiaan. Dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan, maka terdapat beberapa isu yang masih perlu ditangani di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan Masyarakat.

2. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dibandingkan daerah lain dalam menetapkan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, isu yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu perkembangan ekonomi lokal merupakan proses pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sehingga hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari pengembangan ekonomi lokal. Isu daya saing daerah ini juga berkaitan dengan nilai investasi dan Industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penyediaan infrastruktur dasar sebagai bentuk dukungan untuk Daya Saing Daerah juga menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai perekonomian yang berdaya saing. Kehidupan yang layak dimulai dengan perumahan yang layak, dan tindakan untuk meningkatkan kualitas perumahan dapat memberikan dampak positif yang besar pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu, belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur antar bidang sehingga upaya untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan menjadi terhambat, termasuk belum tersedianya Dokumen Tata Bangunan dan Lingkungan yang berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

3. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim

Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memadai sesuai dengan ketentuan, dimana salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya menunjukkan bahwa data ketersediaan RTH di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan persentase yang selanjutnya berkontribusi besar terhadap indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang belum mencapai target (ketercapaian 61,3%). Prosentase RTH setiap kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditargetkan memenuhi persentase luasan RTH publik 20% dan persentase luasan RTH privat 10%, demikian pula perlu upaya untuk memenuhi kebutuhan RTH untuk skala yang lebih kecil, seperti taman RT dan taman RW.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang salah satunya terjadi pada kasus pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi bahaya/Rawan Bencana. Rendahnya ketaatan pada RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan oleh terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Isu penanganan persampahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masih belum optimal juga menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan dua puluh tahun ke depan. Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan yang harus diatasi. Mengacu pada hasil proyeksi produksi sampah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2045 terus mengalami peningkatan, maka hal ini perlu menjadi fokus pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meningkatkan strategi atau teknologi pengelolaan sampah dan sarana prasarana persampahan di masa sekarang agar pada waktu yang akan datang volume sampah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak mengalami over capacity. Harapannya kedepan dapat menciptakan TPA dengan Sistem Sanitary Landfill. Oleh karena adanya bahaya pencemaran air tanah oleh air lindi TPA sampah maka pengelolaan TPA sampah yang baik sangat diperlukan. Hal ini mengingat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, dan beberapa tempat mengambil air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat sehingga kualitas air tanah yang baik sangat penting untuk mensuplai kebutuhan air Masyarakat. Dengan demikian, perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan upaya untuk menjawab tantangan perubahan iklim.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berkarakter

Isu strategis yang perlu diperhatikan untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dua puluh tahun kedepan adalah pendidikan untuk seluruh jenjang dan lapisan masyarakat, Kesehatan untuk semua dan perlindungan sosial. Pendidikan usia dini yang masih rendah serta belum tercapainya zero angka putus sekolah menjadi permasalahan utama yang menjadi isu strategis pembentuk kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan adanya permasalahan kenakalan remaja yang belum tertangani dengan baik. Dimana terjadi kasus pernikahan dini pada remaja yang disebabkan karena kurangnya kontrol pergaulan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk (stunting) berpengaruh nyata pada kualitas Sumberdaya manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun-tahun mendatang.

Kasus stunting yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi salah satu isu kesehatan pada anak yang harus diperhatikan. Permasalahan stunting merupakan isu yang faktor penyebabnya datang dari berbagai dimensi juga diakibatkan oleh banyak dimensi. Selain kasus stunting, upaya pemenuhan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sumber Daya manusia yang unggul dan berkarakter.

5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif

Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif mejadi isu penting untuk mengoptimalkan Tata Kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan Data dan penerapan manajemen data yang berkualitas dan terbaharui dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan program pembangunan menjadi upaya strategis dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan sistem berbasis digital dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah. Koordinasi antar instansi dan perangkat daerah dengan peningkatan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan atau tugas dalam sebuah entitas akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan dalam pengambilan Keputusan.

6. Bonus Demografi

Isu Bonus Demografi berupa peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan meningkat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan sistem kesejahteraan. tantangan kesehatan dan perawatan, ketidakpastian keuangan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tantangan pendidikan, perubahan dalam pasar tenaga kerja, penurunan mobilitas tenaga kerja, perubahan dalam struktur keluarga, dan penyediaan perumahan yang sesuai dengan lansia yang dapat mengakibatkan perubahan dalam permintaan perumahan.

Berdasarkan hasil proyeksi 20 tahun kedepan menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tua (65-75+) mengalami peningkatan. Walaupun proyeksi jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga meningkat, tetapi porsinya terus berkurang. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk usia tua berbanding

lurus dengan porsinya, yakni sama-sama meningkat. Hal ini juga ditunjukkan pada angka ketergantungan yang terus meningkat. Walaupun angka ketergantungan tersebut masih berada dibawah 50, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pada tahun 2045 tetap bisa mendapatkan bonus demografi. Selain itu, kondisi ini juga memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1. Visi Daerah

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Gambar IV.1
Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2045



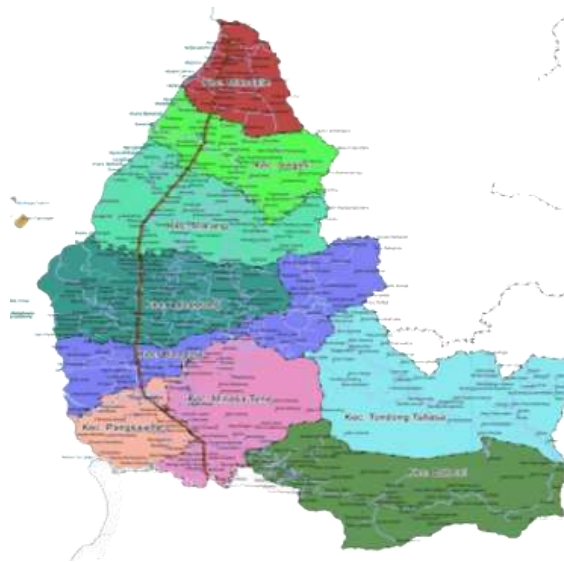
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pangkep, 2024.

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, seluruh wilayah di Indonesia harus memiliki visi yang menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 yang mengarahkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Perumusan visi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didasarkan pada beberapa konsideran dalam perencanaan pembangunan. Konsideran perumusan visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdiri dari RPJP Nasional, RPJP Provinsi Sulawesi Selatan, tren global, tren regional, isu,

permasalahan, dan potensi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini maupun yang menjadi tantangan 20 tahun ke depan, dan pertimbangan hasil pembangunan sebelumnya.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di masa mendatang menjadi harapan dan impian bagi seluruh masyarakat luas khususnya yang tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik penduduk asli, pendatang, domisili maupun yang berkunjung di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus selaras dengan arah tujuan pembangunan di level regional atau level nasional. Berdasarkan pertimbangan kondisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini, isu dan tantangan 20 tahun ke depan, potensi wilayah dan memperhatikan aspirasi dari stakeholders pembangunan, maka Visi Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

**VISI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
"PANGKEP MANDIRI, MAJU, BERDAYA SAING, RELIGIUS DAN
BERKELANJUTAN DALAM EKOSISTEM EKONOMI HIJAU DAN BIRU"**



Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Mandiri, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru, adalah sebagai berikut:

- Mandiri** : Kondisi dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah sehingga dapat berposisi sejajar dengan daerah lain dalam melaksanakan pelayanan umum yang menjadi kewenangan kabupaten untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Maju** : Kondisi dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki struktur perekonomian yang kuat terhadap gejolak dan perubahan, memiliki standar hidup yang tinggi, kesejahteraan masyarakat merata didukung oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

- Berdaya Saing : Kondisi dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki daya saing daerah yang tinggi dalam berbagai aspek.
- Religius : Mencerminkan sikap dan keyakinan yang kuat serta perilaku moral yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan sebagai ciri khas kearifan lokal masyarakat kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bingkai semangat keberagaman dalam kebersamaan yang dibangun melengkapi proses pembangunan dengan terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
- Berkelanjutan : Kondisi dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bersesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tangguh dalam menghadapi berbagai konteks kerentanan, termasuk dampak perubahan iklim.
- Ekosistem Ekonomi Hijau : Kondisi dimana sistem perekonomian Pangkep yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Kondisi ini dicirikan oleh integrasi prinsip ekonomi hijau dalam berbagai sektor terutama pertanian, industri, transportasi, pariwisata, dan energi. Melalui pertanian berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, pariwisata ramah lingkungan, infrastruktur transportasi hijau, pengelolaan limbah terpadu, pendidikan lingkungan, dan inovasi teknologi hijau, akan tercipta lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.
- Ekosistem Ekonomi Biru : Ekosistem ekonomi biru ditekankan pada pilar ekonomi berupa perikanan tangkap dan budidaya, manufaktur berbasis maritim, dan pariwisata berbasis maritim; pilar sosial berupa ketenagakerjaan berkompetensi maritim, kesehatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau, riset dan pendidikan maritim; pilar lingkungan berupa kualitas sumberdaya dan konservasi laut serta energi terbarukan. Pada tahun 2045 Pangkajene dan Kepulauan akan berkontribusi atas terwujudnya posisi Sulawesi Selatan dan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang didukung oleh budaya bahari yang kuat. Integrasi pembangunan pada bentang alam (landscape) dan bentang laut (seascape) merupakan bagian penting menuju Pangkep Mandiri, Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru.

Adapun keterkaitan antara visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.2.

Penyelarasan Visi RPJP Nasional dengan Visi Provinsi RPJPD
Provinsi Sulawesi Selatan dan Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2045



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pangkep, 2024

a. Sasaran Visi

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Kabupaten yang Mandiri, Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi Hijau dan Biru, terdapat 5 Sasaran Visi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang juga selaras dengan Sasaran Visi Nasional dan Sasaran Visi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meningkat utamanya didukung Peningkatan Pendapatan per Kapita; (2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Sasaran pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meningkat mencapai sekitar 11,86 persen pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2045 utamanya didukung meningkatnya pendapatan per kapita ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 581,61 juta rupiah pada tahun 2045 dalam mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju dan pencapaian sasaran visi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai sekitar 230 juta rupiah pada tahun 2045. Upaya peningkatan pendapatan per kapita terutama didorong oleh peningkatan pembangunan sektor industri, pertanian, perikanan dan kelautan. Pembangunan sektor tersebut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditunjukkan dengan pencapaian indikator kontribusi PDRB sektor industri sebesar 63,19 persen (angka target Provinsi Sulawesi Selatan), kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 37,13 persen (angka target Provinsi Sulawesi Selatan), dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebesar 30,0 (angka target Provinsi Sulawesi Selatan) pada tahun 2045.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen dan ketimpangan yang berkurang dan sasaran visi Provinsi Sulawesi Selatan kemiskinan 0,00-0,75 persen dan ketimpangan yang berkurang ditunjukkan dengan rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,301-0,310. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka diharapkan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan semakin menurun. Sasaran Visi ini ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang semakin menurun pada kisaran 0,00-0,75 persen (angka target Provinsi Sulawesi Selatan), rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,310, meningkatnya kontribusi PDRB

Kabupaten menjadi sebesar 5,25 persen (angka target Provinsi Sulawesi Selatan), dan Indeks Ketahanan Pangan menjadi sebesar 99,95 (angka target Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) pada tahun 2045.

Sasaran ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat, sejalan dengan sasaran visi nasional kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat ditunjukkan dengan *Global Power Index* peringkat 15 dan sasaran visi Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan indikator meningkatnya daya saing daerah menjadi sebesar 4,00 pada tahun 2045. Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang juga semakin meningkat, diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi sebesar 3,57 pada tahun 2045 dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menjadi sebesar 92,2 pada tahun 2045, serta Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi sebesar 60,27 pada tahun 2045.

Sasaran keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,73 pada tahun 2045 dan sasaran Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,73 pada tahun 2045. Sasaran ini didukung dengan mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas serta kesehatan. Sasaran tersebut di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia menjadi sebesar 82,75 persen pada tahun 2045.

Sasaran kelima, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*, mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju *net zero emission* dan sasaran visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditunjukkan dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 51,47 persen pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060. Sasaran kelima ini merupakan gambaran komitmen Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau, serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran ini diukur dengan indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 69,93 persen (angka target Provinsi Sulawesi Selatan) pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060.

Sasaran Visi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1.
Sasaran Utama Pencapaian VISI RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Indikator		Based Line 2025	Target 2045
1.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Inklusif menuju peningkatan Pendapatan per Kapita	1.	PDRB/kapita (Rp. Juta)	103,52	581,61
		2.	Indeks Ekonomi Biru	108,52	341,05
		3.	Indeks Ekonomi Hijau	74,53	100
		4.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	46,77	63,19
2.	Pemerataan kesejahteraan dan	5.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,91	0,75
		6.	Rasio Gini (Indeks)	0,350	0,310

	pembangunan melalui Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	7.	Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkep terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	4,99	5,25
		8.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,97	7,37
3.	Meningkatnya daya saing daerah	9.	Indeks Inovasi Daerah	64,95	89,55
		10.	Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,57
4.	Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	11.	Indeks Pembangunan Manusia	74,40	87,12
5.	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission yang adaptif terhadap perubahan iklim)	12.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,38	86,13
		13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,91	78,14

Menjadi Pangkep Mandiri, Maju, Berdaya Saing, Religius Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru. Tercermin dalam lima sasaran visi yang diselaraskan dengan sasaran visi RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045 dan sasaran visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 yang digambarkan dalam tabel IV.2. Berikut:

Tabel IV.2.
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJP Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025–2045

No.	RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045				RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045				RPJP Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2025 – 2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 – 30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	76,58 – 77,35	422,16-497,92	Meningkatnya pendapatan/ perkapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	103,52	581,61
		2. Kontribusi PDB Maritim (persen)	7,6	15,0		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29		2. Indeks Ekonomi Biru	108,52	341,05
		3. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (persen)	20,8	28,0		3. Kontribusi PDRB Industri	12,95-13,05	18,62-19,92		3. Indeks Ekonomi Hijau	74,53	100
										4. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	46,77	63,19
2.	Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (persen)	6,0 – 7,0	0,5- 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat kemiskinan (%)	7,30- 7,89	0,19- 0,69	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (persen)	10,91	0,75
		2. Rasio Gini (Indeks)	0,379- 0,382	0,377- 0,320		2. Rasio Gini (Indeks)	0,371- 0,376	0,309- 0,332		2. Rasio Gini (Indeks)	0,350	0,310
		3. Kontribusi PDRB KTI (persen)	21,5 (2022)	28,5		3. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional (%)	3,21	3,23		3. Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkep terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	4,99	5,25
						4. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50- 6,30	6,90- 8,94		4. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,97	7,37
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	1. Indeks Inovasi Daerah	54- 55	75-80	Meningkatnya Daya Saing Daerah	1. Indeks Inovasi Daerah	64,95	89,55
						2. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		2. Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,57
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0.54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	74,40	87,12

No.	RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045				RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045				RPJP Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2025 – 2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,00	89,74	Berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	1. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,38	86,13
						2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	84,75		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,91	78,14

4.3. Misi Daerah

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh stakeholder. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematis berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur.

Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, ditetapkan 8 misi Pembangunan, yang dituangkan dalam transformasi yang menyeluruh di seluruh bidang Pembangunan, agar dapat mewujudkan Pembangunan maju dalam segala hal dan berkelanjutan. 8 (delapan) Misi Pembangunan tersebut adalah:

Gambar IV.3.
Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2045



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pangkep, 2023

Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode sebelumnya. Tabel di bawah ini merupakan perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045.

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kualitas SDM berkaitan erat dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh. Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatif siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan. Harapannya akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, sehingga memiliki jiwa kemandirian yang tinggi.

Peningkatan kesehatan masyarakat diupayakan dalam hal kesehatan ibu, bayi, KB dan kesehatan reproduksi; perbaikan gizi masyarakat, pembudayaan gerakan masyarakat sehat; peningkatan pengendalian penyakit serta penguatan sistem kesehatan, obat, dan makanan. Kesehatan menjadi faktor yang sangat penting guna mempersiapkan generasi emas 2045 guna pewujudan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Terkait perlindungan social yang adaptif dengan mengembangkan berbagai jenis program perlindungan sosial yang mencakup asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, bantuan pangan, dan pendidikan. Mendorong program-program yang melibatkan kontribusi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, terutama kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan.

Transformasi ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2045 ditunjukkan dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah agar tumbuh menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan didukung penerapan ekonomi hijau dan biru, melalui peningkatan produktivitas yang didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan pemerataan, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan indikator kemajuan ekonomi yang tak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, melainkan juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja.

Perekonomian yang maju dan berkeadilan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong Penciptaan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta pengembangan industri berbasis usaha mikro, kecil dan menengah baik pada industri pengolahan/manufaktur maupun pada industri ekstraktif, termasuk dalam pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi biru. Ekonomi hijau sebagai bagian penting transformasi ekonomi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan mendorong ekosistem yang sehat dan produktif; pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata; penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan pengendalian emisi GRK.

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip *good governance* dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik.

Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pembangunan nasional. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Transformasi tata kelola pemerintahan dalam dua puluh tahun ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan inovatif (*dynamic governance*). Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat. Kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka dapat disebut telah berhasil menerapkan *good governance* dengan baik, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Daerah; peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit; penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah; penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah

Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentraman

Meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang dimotori oleh aparat penegak hukum yang adil, bersih dan berwibawa serta didukung oleh seluruh masyarakat. Dengan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial dan ekonomi makro daerah yang stabil, maka tiga substansi transformasi yang didorong lebih mudah

terwujud. Keberhasilan misi ini akan memberikan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat dan sebagai bagian dari perwujudan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

Misi 5. Mewujudkan Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh.

Misi ini mencakup pada peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan iklim, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya; serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Termasuk upaya Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Begitu juga dengan pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi dasar perencanaan pembangunan Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan. Hal tersebut diupayakan dengan konservasi SDA untuk menjaga ketahanan energi-pangan-air, manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular, serta meningkatkan kapasitas resiliensi terhadap bencana dan krisis iklim. Selain itu juga menjalankan target global dan nasional untuk penurunan emisi GRK.

Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu harus terus diupayakan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk memberikan kehidupan yang baik bagi generasi selanjutnya. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang perlu diantisipasi adalah perubahan iklim. Perubahan iklim akibat pemanasan global memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di muka bumi, kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan maupun kemarau, dan munculnya berbagai bencana seperti kekeringan, badai, banjir dan longsor. Pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dampak yang timbul berupa badai, banjir dan kenaikan permukaan air laut.

Bencana alam saat ini telah menjadi ancaman yang serius bagi seluruh kehidupan manusia, maka dari itu perlu upaya-upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana sehingga dapat meminimalisir risiko bencana, diantaranya konservasi lingkungan, seperti penghijauan, pelestarian hutan, dan pengelolaan air yang berkelanjutan, dapat membantu menjaga ekosistem yang mendukung ketahanan masyarakat terhadap bencana. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan dapat menjadi kunci untuk mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan.

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan.

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu

kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Daerah mampu menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien serta untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni infrastruktur penunjang perekonomian, infrastruktur perkotaan, infrastruktur perumahan dan permukiman. Selain itu, pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis diuntungkan oleh kedekatannya dengan pusat pertumbuhan nasional (Kota Pangkajene) tetapi juga pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan serta harus meminimalkan kerusakan lingkungan serta memperhatikan kelestariannya.

Misi 7. Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan dilakukan secara menyeluruh memberikan peran yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh wilayah, diharapkan dapat tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menghilangkan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Bersinar 2045. Pembangunan Infrastruktur nantinya merupakan pembangunan dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu, infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat sekitar. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada lagi infrastruktur yang terbangun dengan mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Misi 8. Mewujudkan Daya Saing Daerah untuk Kestinambungan Pembangunan.

Suatu kemampuan yang dimiliki berdasarkan kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Daya saing ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner. Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya operasional usaha sehingga usaha menjadi lebih efisien dan kompetitif. Sedangkan pemanfaatan teknologi akan mempermudah proses produksi, sehingga akan mampu dihasilkan produk berkualitas baik dengan harga kompetitif, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh pasar. Sementara itu SDM akan sangat menentukan daya saing daerah melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dengan skill tinggi.

Dalam penyusunan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terlepas dari Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka penyalarsan antara Misi RPJP Nasional, Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045 dengan Misi RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Adapun keterkaitan antara Misi RPJPN 2025 – 2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2045 dan Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel IV.3.
Penyalarsan Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

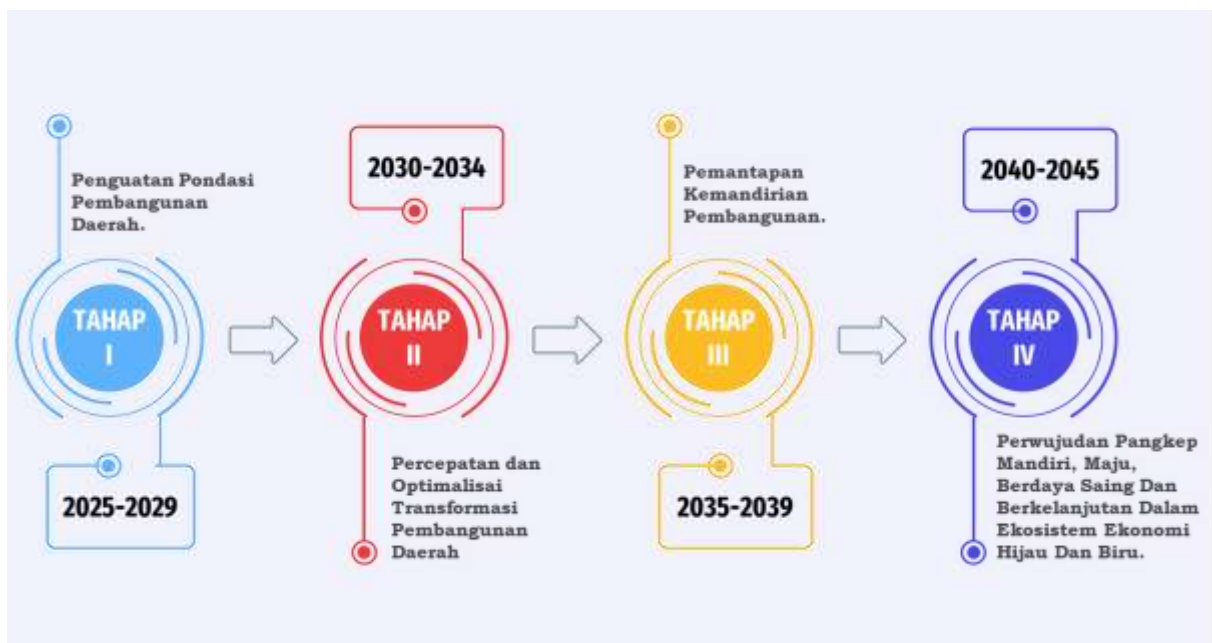
No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045	RPJP Daerah Kabupaten Pangkep
	Agenda	Misi	Misi	Misi
1.	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan
3.		Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif
4.	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Mewujudkan Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentraman
5.		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memelihara Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Mewujudkan Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh
6.	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan
7.		Sarana dan Prasarana yang berkualitas	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan.
8.		Kesinambungan Pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Daya Saing Daerah untuk Kesinambungan Pembangunan

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Arah kebijakan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini di bagi menjadi 4 tahapan dengan tema setiap tahapannya, sebagai berikut.

Gambar V.1.
Tahapan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2025-2045



Arah kebijakan pembangunan daerah direncanakan ke dalam 4 periode dalam rentang waktu 5 tahun pada masing-masing periode. Arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode I (2025-2029) Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan pada kebijakan “Penguatan Pondasi Pembangunan”. Periode pertama ini dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.; penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yang tinggi dan berkelanjutan; peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif; penguatan stabilitas sosial politik, keamanan dan ketentram; peningkatan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh; peningkatan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan; peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata dan berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.

Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing dalam pencapaian Transformasi Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif. Pembangunan diarahkan pada pemenuhan dan akses pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh.

Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat guna mewujudkan pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan. Mempercepat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan potensi wilayah guna mendukung penerapan ekonomi hijau dan biru.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif dan Adaptif difokuskan pada pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif dan akuntabel berlandaskan petukaran informasi terbuka; melalui peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit; penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah; penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentram Diarahkan pada upaya penguatan dukungan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tahap ini pengembangan budaya hukum yang mengedepankan keseimbangan transformasi tata kelola ketentraman dan ketertiban masyarakat, akuntabel berbasis digital, dan penguatan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai lebih ditingkatkan. Stabilitas ekonomi daerah ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor.

Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh. diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan iklim, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya; serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan diarahkan pada pemerataan pembangunan antar wilayah, baik antara wilayah perkotaan dan perdesaan, maupun antara daratan dan pulau. Pada tahap ini diperkuat upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penuntasan RDTR kecamatan, serta penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, serta penguatan dukungan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global. Memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni infrastruktur penunjang perekonomian, infrastruktur perkotaan, infrastruktur perumahan dan permukiman. Selain itu, pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan

pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan.

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman), peningkatan konektivitas antar wilayah, serta peningkatan pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Daya Saing Daerah untuk Kestinambungan Pembangunan, diarahkan padapeningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner.

Arah kebijakan tahap pertama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yakni mendorong perekonomian lokal, mendorong kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, mendorong penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, adil, merata dan tepat sasaran, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, serta mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode II (2030-2034) Percepatan dan Optimalisasi Transformasi Pembangunan Daerah

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan pada kebijakan “Percepatan dan Optimalisasi Transformasi Pembangunan Daerah”. dilakukan dengan percepatan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; optimalisasi pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yang tinggi dan berkelanjutan; optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif; optimalisasi stabilitas sosial politik, keamanan dan ketentram; optimalisasi masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh; optimalisasi Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan; percepatan aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata dan berkelanjutan serta optimalisasi daya saing daerah untuk kestinambungan pembangunan.

Kualitas SDM yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing, diarahkan pada akselerasi dan percepatan pembangunan SDM yang inklusif untuk penguatan daya saing SDM menjadi semakin berkualitas menuju SDM yang unggul guna percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan, difokuskan pada akselerasi percepatan peningkatan pendapatan per kapita, produktifitas daerah serta percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat untuk pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan. Optimalisasi daya saing sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan didukung pemantapan penerapan ekonomi hijau dan biru.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif, difokuskan pada optimalisasi pemantapan kelembagaan Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi yang didukung oleh SDM yang kompetitif, pemantapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, pemantapan partisipasi masyarakat sipil, dan pemantapan kebijakan pembangunan

berbasis big data dan Artificial Intellegent, serta perluasan cakupan sektor pada pembiayaan non pemerintah.

Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentram, diarahkan untuk optimalisasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang aman dan tertib, bebas korupsi, serta kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahap ini dilakukan upaya pemantapan ketertiban dan keamanan sebagai daya tarik global; kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan asset; perbaikan tata kelola melalui pendekatan *Corruption Impact Assessment*, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik; serta perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh. diarahkan pada percepatan penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas. Pada tahap ini manusia, keluarga dan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin religius, tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; pemantapan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam pencapaian penerapan ekonomi hijau dan biru secara komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penerapan energi baru terbarukan, sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah yang terkelola dengan baik serta pemantapan sistem ketahanan pangan, air, dan energi.

Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan, diarahkan pada optimalisasi integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni infrastruktur penunjang perekonomian, infrastruktur perkotaan, infrastruktur perumahan dan permukiman. Selain itu, pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan.

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pemenuhan infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman), percepatan pembangunan konektivitas antar wilayah, serta optimalisasi pemenuhan pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Daya Saing Daerah untuk Kesyukuran Pembangunan diarahkan pada optimalisasi infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner.

Arah kebijakan tahap kedua Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, antara lain meningkatkan perekonomian lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat akses layanan kesehatan dan sistem pendidikan,

meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan mengakses data daerah atau informasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

5.1.3. Arah Kebijakan Periode III (2035-2039) Pemantapan Kemandirian Pembangunan

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan pada kebijakan “Pemantapan Kemandirian Pembangunan”.

Periode ketiga ini dilakukan dengan pemantapan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; pemantapan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yang tinggi dan berkelanjutan; pemantapan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif; pemantapan stabilitas sosial politik, keamanan dan ketentram; pemantapan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh; pemantapan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; pemantapan aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata dan berkelanjutan serta pemantapan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.

Kualitas SDM yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing, difokuskan pada pemantapan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan penguatan kualitas hidup keluarga untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dengan memastikan pelaksanaan transformasi sosial.

Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan, difokuskan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan kerja, serta pemantapan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat untuk pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan. Peningkatan daya saing sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan didukung pemantapan penerapan ekonomi hijau dan biru dengan menekankan pada perluasan dan penguatan rantai nilai, penguasaan teknologi tinggi, penguatan daya saing industri, serta mendukung Sulawesi Selatan dalam memantapkan posisi sebagai pintu gerbang dan barometer Kawasan Timur Indonesia.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif difokuskan pada pemantapan dan perluasan transformasi tata kelola melalui kelembagaan Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi yang didukung oleh SDM yang kompetitif, pemantapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, pemantapan partisipasi masyarakat sipil, dan pemantapan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent, serta perluasan cakupan sektor pada pembiayaan non pemerintah.

Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentram diarahkan untuk pemantapan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang aman dan tertib, bebas korupsi, serta kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahap ini dilakukan upaya pemantapan ketertiban dan keamanan sebagai daya tarik

global; kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan asset; perbaikan tata kelola melalui pendekatan *Corruption Impact Assessment*, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik; serta perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh diarahkan pada pemantapan penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas. Pada tahap ini manusia, keluarga dan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin religius, tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; pemantapan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam pencapaian penerapan ekonomi hijau dan biru secara komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penerapan energi baru terbarukan, sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah yang terkelola dengan baik serta pemantapan sistem ketahanan pangan, air, dan energi.

Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan diarahkan pada pemantapan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni infrastruktur penunjang perekonomian, infrastruktur perkotaan, infrastruktur perumahan dan permukiman. Selain itu, pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan.

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan, difokuskan pada pemantapan pemenuhan infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman), percepatan pembangunan konektivitas antar wilayah, serta optimalisasi pemenuhan pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Daya Saing Daerah untuk Kestinambungan Pembangunan diarahkan pada pemantapan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner.

Arah kebijakan tahap ketiga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu mempertahankan pengembangan UMKM dan IKM serta investasi untuk mendukung perekonomian lokal, mempertahankan upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan Masyarakat, mempertahankan layanan dan sistem pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas, mempertahankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan Masyarakat, serta mempertahankan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang didukung keterbukaan informasi daerah atau pemerintah berbasis TIK dengan melibatkan atau berkolaborasi dan koordinasi antar sektor.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode IV (2040-2045) Perwujudan Pangkep Mandiri, Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru.

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan pada kebijakan “Perwujudan Pangkep Mandiri, Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru”.

Periode keempat ini dilakukan dengan perwujudan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; perwujudan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yang tinggi dan berkelanjutan; perwujudan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif; perwujudan stabilitas sosial politik, keamanan dan ketentram; pemantapan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh; perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; perwujudan aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata dan berkelanjutan serta perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.

Kualitas SDM yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing, difokuskan pada perwujudan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan penguatan kualitas hidup keluarga untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas.

Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan, difokuskan pada perwujudan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan kerja, serta pemantapan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat untuk pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan. Peningkatan daya saing sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan didukung pemantapan penerapan ekonomi hijau dan biru.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif, difokuskan pada perwujudan kelembagaan Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi yang didukung oleh SDM yang kompetitif, pemantapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, pemantapan partisipasi masyarakat sipil, dan pemantapan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent, serta perluasan cakupan sektor pada pembiayaan non pemerintah.

Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentram diarahkan untuk perwujudan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang aman dan tertib, bebas korupsi, serta kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahap ini dilakukan upaya pemantapan ketertiban dan keamanan sebagai daya tarik global; kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan asset; perbaikan tata kelola melalui pendekatan *Corruption Impact Assessment*, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik; serta perluasan kolaborasi peningkatan daya saing

sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh diarahkan pada perwujudan penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas. Pada tahap ini manusia, keluarga dan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin religius, tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; pemantapan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam pencapaian penerapan ekonomi hijau dan biru secara komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penerapan energi baru terbarukan, sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah yang terkelola dengan baik serta pemantapan sistem ketahanan pangan, air, dan energi.

Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan, diarahkan pada perwujudan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni infrastruktur penunjang perekonomian, infrastruktur perkotaan, infrastruktur perumahan dan permukiman. Selain itu, pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan.

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan difokuskan pada perwujudan pemenuhan infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman), percepatan pembangunan konektivitas antar wilayah, serta optimalisasi pemenuhan pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Daya Saing Daerah untuk Kestinambungan Pembangunan diarahkan pada perwujudan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner.

Arah kebijakan tahap keempat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, antara lain mewujudkan perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berdaya saing melalui pengembangan sektor unggulan yang berkelanjutan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan demokratis dengan memanfaatkan teknologi informasi; Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan; Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; Serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan melalui langkah-langkah transformasi di daerah yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 serta pencapaian visi Indonesia Emas.

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang progresif dan dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 memuat 17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Berikut Gambaran keterkaitan misi, sasaran pokok dan arah pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1.

Penyelarasan Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
Transformasi Sosial	IE.1 Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Transformasi Sosial	1. Terwujudnya manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera	1. Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Terwujudnya Kualitas Manusia Kabupaten Pangkep Yang Unggul dan Sejahtera	1. Kesehatan Untuk Semua	1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		2. Kesehatan Ibu dan Anak				2. Kesehatan Ibu dan Anak				2. Kesehatan Ibu dan Anak
		a) Angka Kematian Ibu (AKI)				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				a) Persentase persalinan di fasilitas Kesehatan
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
		3. Insidensi Tuberkulosis (per100.000 penduduk)				3. Penanganan Tuberkulosis:				3. Penanganan Tuberkulosis:
						a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)				a) Cakupan penemuan dan Penanganan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)
						b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate) (%)				b) Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPND Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembang- unan	Indikator Utama Pembangu- nan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembang- unan	Indikator Utama Pembangu- nan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangun- an	Indikator Sasaran Pokok
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
	IE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran			2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran			2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran
		a) Rata-rata nilai PISA				a). Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk				
		i). Membaca				i). Literasi Membaca				
		ii). Menulis				ii). Numerasi				
		iii). Sains								
						b). Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk				a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota
						i). Literasi Membaca				i) Literasi Membaca
						ii). Numerasi				ii) Numerasi
		b). Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)				c). Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)				b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
		c). Harapan lama sekolah				d). Harapan Lama Sekolah				d) Harapan Lama Sekolah
		6. Angka partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)				6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi				6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
		7. Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)				7. Presentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)				7. Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan
	IE.3 Perlindungan	8. Tingkat Kemiskinan (%)			3. Perlindungan	8. Tingkat Kemiskinan (%)			3. Perlindungan	8. a) Tingkat Kemiskinan b) Indeks

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok
	sosial yang adaptif				Sosial yang Adaptif				Sosial yang Adaptif	Gini
		9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan (%)				9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga- kerjaan (%)				9.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan
		10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)				10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)				10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Trans- formasi Ekonomi	IE.4 Iptek, Inovasi, dan Produkti vitas Ekonomi	11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)		2. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis Iptekin si Selatan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi dan Produkti fitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Misi 2 : Mewujud kan Pembang unan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produkti vitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelan jutan.	2. Terwujudnya Perekonomian Kabupaten Pangkep yang Kokoh dan Merata berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi dan Produkti fitas Ekonomi	11.Rasio PDRB Industri Pengolahan
		12. Pengemban gan Pariwisata				12. Pengemban gan Pariwisata				12. Pengembangan Pariwisata
		a). Rasio PDB Pariwisata (%)				a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
		b). Devisa Pariwisata (miliar USD)				b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Bintang (Ribu orang)				b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)
		13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)				13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)				13.Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lap Usaha Kab/Kota
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
		a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)				a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)				
						b) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level provinsi (%)				a) jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
		b) Rasio kewirausahaan (%)				c) Rasio kewirausahaan Provinsi (%)				
		c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)				d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)				b) Persentase koperasi sehat di kab/kota
		d) Return on Asset (RoA) BUMN (%)				e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)				c) Return on Aset (ROA) BUMD
						f) Nilai Tukars Petani				d. Proporsi PDRB Kab.Pangkep terhadap Produktifitas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
						g) Nilai Tukar Nelayan				
		15. Tingkat pengangguran Terbuka (%)				15. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)				15.Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)				16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)				16.a.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
		17. Tingkat Penguasaan IPTEK				17. Tingkat Penguasaan IPTEK				17.Tingkat Penguasaan IPTEK
		a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)				a) Indeks Kapabilitas Inovasi				a) Indeks Kapabilitas Inovasi
		b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)								b) Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD
	IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		3. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau, ekonomi biru dan transformasi digital	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	Misi 8 : mewujudkan Daya Saing Daerah untuk Kesenambungan Pembangunan	3. Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai pusat pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan wisata maritim termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy untuk mendukung IKN	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18.Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
		a) Indeks Ekonomi Hijau				a) Indeks Ekonomi Hijau				Kontribusi Pilar Lingkungan thd Penerapan Ekonomi Hijau a) Kualitas air permukaan

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok
										(BOD), b) Kualitas udara (No2), c) Kualitas Tutupan Lahan
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Prime				Penerapan Ekonomi Biru d) Produktivitas Perikanan Tangkap e) Produktivitas Perikanan Budidaya
	IE.6 Transfor- masi Digital	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)			6. Transfor- masi Digital	19. Indeks Pembangu nan Teknologi Informasi dan komunikasi			6. Transfor- masi Digital	19. Perswentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
	IE.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)		4. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	Misi 7 : Mewujud kan Aksesibi litas Infrastruk tur yang Mudah, Berkua litas, Merata dan Berkelan jutan	4. Terwujudnya pengembangan infrastruktur Kabupaten Pangkep sebagai pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah, baik regional maupun internasional	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)				21. Pembentu kan Modal Tetap Bruto (% PDRB)				21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)				22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)				22. a. Net Ekspor Barang dan Jasa b.PDRB Kab/Kota Menurut Pengeluaran
	IE.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuh an Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanju tan		5. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai penggerak agropolitan.	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuh an	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanju tan	Misi 6. Mewujud kan Pemban gunan Kewilaya han Yang Merata Dan Berkeadi lan.	5. Terwujudnya konektivitas antar daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuh an	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan
		a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)				a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolit an terhadap nasional				a) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros, Pangkep) b) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi
		b) Rumah Tangga				b) Rumah Tangga				c) Rumah Tangga

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok
		dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanju tan (%)				dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanju tan				dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		c) Persentase Desa Mandiri (%)				c) Persentase desa mandiri				d) Persentase desa mandiri e) Indeks Layanan Infrastruktur
Trans formasi Tata Kelola	IE.9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berinteg ritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum		6. Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan Yang berintegritas dan adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegri tas Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	Misi 3 : Mewujud kan Tata Kelola Pemerinta han Yang Berkua litas, Kolabora tif Dan Adaptif	6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangkep yang efektif dan efisien termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berinteg ritas Adaptif	24.Indeks Reformasi Hukum
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				25. Indeks SPBE				25.Indeks SPBE
		26. Indeks Pelayanan Publik				26. Indeks Pelayanan Publik				26.Indeks Pelayanan Publik
		27. Anti Korupsi				27. Indeks Integritas Nasional				27.Indeks Integritas
		a) Indeks Integritas Nasional								a) Indeks Survey Penilaian Integritas
		b) Indeks Persepsi Korupsi								b) Indeks Persepsi Anti Korupsi
										c) Indeks Maturitas SPIP
Suprema si Hukum, Stabilitas, dan Kepemim pinan Indonesia	IE.10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangu nan Hukum		7. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	28. Persentase Penyelesa ian Tindak Pidana	Misi 4 : Mewujud kan Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentra man	7. Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	28.a) Persentase gangguan tantrimum yang dapat diselesaikan b) Persentase perda dan perkada yang ditegakkan
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)				29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya				29.Persentase tindak kriminal yang ditangani
		30. Indeks Demokrasi Indonesia				30. Indeks Demokrasi Provinsi				30.Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Politik
	IE.11 Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)		8. Terwujudnya Sulawesi Selatan	11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap	Misi 8 : mewujud kan Daya	8. Terwujudnya Kabupaten Pangkep	11. Stabilitas Ekonomi Makro	31.Rasio Pajak Daerah terhadap

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok
				sebagai daerah dengan daya saing	Daerah	PDRB (%)	Saing Daerah untuk Kesenambungan Pembangunan	sebagai daerah dengan daya saing yang optimal	Daerah	PDRB
		32. Tingkat Inflasi (%)				32. Tingkat Inflasi (%)				32. Tingkat Inflasi Gabungan
		33. Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan				33. Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan				33. Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)
		a) Aset Perbankan /PDB (%)				a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)				
		b) Aset Dana Pensiun/ PDB (%)				b) Aset Dana Pensiun/ PDRB (%)				
		c) Aset Asuransi/ PDB (%)				c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata Rata Tahunan				
		d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)								
		e) Total Kredit/ PDB (%)				d) Total Kredit/ PDRB (%)				
		34. Inklusi Keuangan (%)				34. Inklusi Keuangan (%)				34. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	IE.12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Asia Power Index (Diplomatic Influence)			12. Ketangguhan Diplomas dan Daya Saing Daerah Tinggi	35. Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti			12. Ketangguhan Diplomas dan Daya Saing Daerah Tinggi	35. Persentase Kerjasama Kab/kota dengan dengan Kab/Kota lainnya/ Province/City Sister/ Skala Regional/ Nasional/ Internasional yang ditindaklanjuti
		36. Asia Power Index (Military Capability)				36. Indeks Ketahanan Nasional				36. Indeks Daya Saing Daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE.13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		9. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh .	9. Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37.a) Persentase benda, bangunan, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
										b) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama				38. Indeks Kerukunan Umat Beragama				38. Persentase kegiatan keagamaan yang

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPND Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok
		(IKUB)								mendapatkan dukungan/ fasilitasi
	IE.14 Keluarga Berkuali tas, Kesetaraan Gender dan Masyara kat Inklusif	39. Indeks Pembangu nan Kualitas Keluarga			14. Keluarga Berkuali tas, Kesetaraan Gender, dan Masyara kat Inklusif	39. a) Indeks Pembangu nan Kualitas Keluarga			14. Keluarga Berkuali tas, Kesetaraan Gender, dan Masyara kat Inklusif	39. a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
						b) Indeks Perlindung an Anak				b) Indeks Perlindungan Anak
						c) Indeks Pembangu nan Pemuda				c) Indeks Pembangunan Pemuda
		40. Indeks Ketimpang an Gender (IKG)				40. Indeks Ketimpang an Gender				40. Indeks Ketimpangan Gender
	IE.15 Lingkun gan Hidup Berkuali tas	41. Indeks Pengelolaan Keanekarag aman Hayati			15. Lingkun gan Hidup Berkuali tas	41. Indeks Pengelolaan Keanekarag aman Hayati Daerah			15. Lingkun gan Hidup Berkuali tas	41. Penguran gan Ancaman keanekaraga man Hayati a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keaneka ragaman Hayati b) Indeks pertanaman (IP) padi c) Proporsi sawah irigasi d) Produktifitas Budidaya Perikanan tambak e) Angka Konsumsi Ikan
		42. Kualitas Lingkunga n Hidup				42. Kualitas Lingkunga n Hidup				42. Kualitas Lingkungan Hidup
		a) Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup				a) Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
						c) Pengelolaan Sampah				c) Pengelolaan Sampah
		c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)				i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)				i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah
						ii) Proporsi Rumah Tangga				ii) Proporsi Rumah Tangga (RT)

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembang unan	Indikator Utama Pembangu nan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok
						(RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpu lan Sampah (% RT)				Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (RT)
	IE.16 Berketaha nan Energi, Air, dan Kemandi rian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		10. Terwujudnya Sulawesi Selatan Dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim yang tinggi, didukung ketersedia an sarana dan prasarana yang berkualitas	16. Berketaha nan Energi, Air dan Kemandi rian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan		10. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pangkep yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	16. Berketaha nan Energi, Air dan Kemandi rian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan
		a. Ketahanan Energi				a) Ketahanan Energi				a) Ketahanan Energi
		- Indeks Ketahanan Energi				i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)				i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
						ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)				
		b. Prevalensi ketidacuk upan pangan (%)				b) Ketahanan Pangan				b) Ketahanan Pangan
						i) Prevalensi Ketidakcu kupan Konsumsi Pangan (%)				i) Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan
						ii) Indeks Ketahanan Pangan				ii) Indeks Ketahanan Pangan
						iii) Skor Pola Pangan Harapan				iii) Skor Pola Pangan Harapan
		c. Ketahanan Air				c) Ketahanan air				c) Ketahanan air
		- Kapasitas Tampung an Air (m3/kapita)				i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*				i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)				ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)				ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
	IE.17 Resiliensi terhadap	44. Proporsi Kerugian			17. Resiliensi terhadap	44. Indeks Risiko Bencana			17. Resiliensi terhadap	44. Indeks Risiko Bencana

RPJPN Tahun 2025-2045			RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045			
Misi	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Misi	Sasaran pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
	Bencana dan Perubahan Iklim	Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)			Bencana dan Perubahan Iklim				Bencana dan Perubahan Iklim	
		45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				Penurunan Emisi GRK Tahunan
		a. Kumulatif				a. Kumulatif				a. Kumulatif
		b. Tahunan				b. Tahunan				b. Tahunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Sasaran 1; Terwujudnya Kualitas Manusia Kabupaten Pangkep Yang Unggul dan Sejahtera,

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar yang berkualitas secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan yang sehat, cerdas, dan sejahtera difokuskan pada tiga arah pembangunan yaitu Kesehatan untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata, dan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Berikut penjelasan arah pembangunan dimaksud beserta arah kebijakan transformasinya.

Arah Pembangunan 01. Kesehatan Untuk Semua

Dengan arah kebijakan meliputi: 1) perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; 2) pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan; 7) pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; 8) perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah afirmasi tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP), 9) pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah afirmasi; 10) percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; 11) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; 12) percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; 13)

penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; 14) penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan; 15) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

Arah Pembangunan 02. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Dengan arah kebijakan meliputi: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus melalui: (a) perluasan bantuan pembiayaan pendidikan, (b) penyediaan sarana prasarana sesuai standar dan aman bencana, (c) prioritas pada daerah area blankspot layanan pendidikan lainnya untuk distribusi dan pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan, pengembangan sekolah virtual dan kelas jauh berbasis digital, serta penguatan sekolah boarding dan semi boarding; 2) penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada: (a) penguatan kurikulum pendidikan dasar dan (b) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3) penguatan revitalisasi dan relevansi pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berbasis potensi dan keunggulan daerah, teknologi serta berorientasi pada kompetensi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*); 4) solidasi penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat terutama pada area blankspot layanan pendidikan.

Arah Pembangunan 03. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Dengan arah kebijakan meliputi: 1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; 2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; 3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; 4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; 5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; 6) percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; 7) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 8) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat; 9) penguatan pengendalian inflasi daerah; 10) Kemandirian Pangan dengan: a) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; b) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; c) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*); d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu.

Tabel V.2
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan,
dan Target Terwujudnya Kualitas Manusia Kabupaten Pangkep
Yang Unggul dan Sejahtera Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya Kualitas Manusia Kabupaten Pangkep Yang Unggul dan Sejahtera	1. Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,38	78,62
		Kesehatan Ibu dan Anak		
		a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100	100
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	29,15	20,65
		Penanganan Tuberkulosis:		
		a) Cakupan penemuan dan Penanganan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	68,35	77,35
		b) <i>Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS (%)</i>	89,8	98,8
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota		
		i) Literasi Membaca	63,89	74,94
		ii) Numerasi	63,46	74,51
		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,4	10,51
		d) Harapan Lama Sekolah	13,09	14,66
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,36	20,46
		Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	9,40	20,20
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,91	0,75
		b) Indeks Gini	0,350	0,310
		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,08	0,38
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	35,2	93,36

5.2.2. Sasaran 2; Terwujudnya Perekonomian Kabupaten Pangkep yang Kokoh dan Merata berbasis Iptekin.

Perwujudan sasaran pokok ini dilakukan secara bertahap dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, utamanya peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok. Terwujudnya Perekonomian Kabupaten Pangkep yang Kokoh dan Merata berbasis Iptekin. difokuskan satu arah pembangunan yaitu Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

Arah Pembangunan 04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Dengan arah kebijakan meliputi: 1) penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah; 2) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor; 3) penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi; 4) penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan; 5) penguatan kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah; 6) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi; 7) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi; 8) penguatan ekspor produk unggulan daerah; 9) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional; 10) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional; 11) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah; 12) penguatan sistem distribusi produk perdagangan; 13) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha.

Tabel V.3

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Perekonomian Kabupaten Pangkep yang Kokoh dan Merata Berbasis Iptekin Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya Perekonomian Kabupaten Pangkep yang Kokoh dan Merata berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	46.77	63.19
		Pengembangan Pariwisata		
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,622	0,904
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	7.949	56.107
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,45	0,57
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
		a) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota (%)	4004	4204
		b) Persentase koperasi sehat di kab/kota	16,57	46,69
		c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0	0
		d. Proporsi PDRB Kab.Pangkep terhadap Produktifitas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,85	37,13
		Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,80	2,99
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42,84	51,16
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,76	117,64
		Tingkat Penguasaan IPTEK		
		a) Indeks Kapabilitas Inovasi	64,95	89,55
b) Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	0,0779	0,1227		

5.2.3. Sasaran 3; Terwujudnya Kabupaten Pangkep Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Biru Terutama Perikanan Tangkap Dan Wisata Maritim Termasuk Pengembangan Dan Pemanfaatan Potensi Blue Energy Untuk Mendukung IKN.

Penerapan pembangunan ekonomi hijau dan biru yang didukung transformasi digital, akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Dalam rangka terwujudnya Kabupaten Pangkep Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Biru terutama perikanan tangkap dan wisata maritim termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy untuk mendukung IKN difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru serta Transformasi Digital. Arah Pembangunan beserta arah kebijakan transformasinya adalah sebagai berikut:

Arah Pembangunan 05. Penerapan Ekonomi Hijau

Dengan arah kebijakan meliputi pembangunan penerapan ekonomi hijau yang diperkuat oleh penerapan ekonomi biru. Arah kebijakan transformasi dalam rangka penerapan ekonomi hijau adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan berbasis keunggulan wilayah, 2) Pengelolaan lahan, wilayah kepulauan, dan pesisir secara berkelanjutan, 3) Peningkatan rehabilitasi lahan, pesisir dan kepulauan, 4) Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif, 5) Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan, 6) Pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman lokal, 7) Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam, 8) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, terutama berbasis sumberdaya perairan, untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, serta pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan, dan 9) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.

Arah Pembangunan 06. Transformasi Digital

Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang dapat mendukung perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kebijakan untuk membangun transformasi digital yang handal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan pada: 1) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan, 2) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok, 3) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis, dan 4) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill

melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.

Tabel V.4

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kabupaten Pangkep Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Biru Terutama Perikanan Tangkap Dan Wisata Maritim Termasuk Pengembangan Dan Pemanfaatan Potensi Blue Energy Untuk Mendukung IKN Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya Kabupaten Pangkep Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Biru Terutama Perikanan Tangkap Dan Wisata Maritim Termasuk Pengembangan Dan Pemanfaatan Potensi Blue Energy Untuk Mendukung IKN	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		
		Kontribusi Pilar Lingkungan thd Penerapan Ekonomi Hijau		
		a) Kualitas air permukaan (BOD),	76.53 (Baik)	80.53 (Baik)
		b) Kualitas udara (NO2),	76.91 (Baik)	82.91 (Baik)
		c) Kualitas Tutupan Lahan	63,85 (Sedang)	65,22 (Sedang)
		Penerapan Ekonomi Biru		
		d) Produktivitas Perikanan Tangkap	23987,3	46797,3
	e) Produktivitas Perikanan Budidaya	25,667.87	30,524.60	
	6. Transformasi Digital	a) % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	22,22	86,11

5.2.4. Sasaran 4; Terwujudnya pengembangan infrastruktur Kabupaten Pangkep sebagai pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah, baik regional maupun internasional.

Posisi geostrategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan potensi besar untuk menjadi hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia sekaligus Nasional. Perwujudan sasaran ini difokuskan pada satu arah pembangunan yaitu Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Berikut penjelasan arah pembangunan beserta arah kebijakan transformasinya.

Arah Pembangunan 07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dengan sasaran pokok: a. Meningkatnya pembangunan konektivitas yang berkualitas dan menyeluruh di semua wilayah, dengan arah kebijakan meliputi: 1) pemantapan jalan dan jembatan serta pelabuhan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa; 2) peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan. b. Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman bagi seluruh penduduk yang inklusif dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan meliputi: 1) penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat; 2) penguatan pengelolaan sumber daya air. c. Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, dengan arah kebijakan:

penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang. d. Mewujudkan pemukiman yang aman dan layak huni serta peningkatan penanganan Kawasan kumuh, dengan arah kebijakan: penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak. dalam perekonomian domestic dan global diarahkan pada : 1) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama keterhubungan kawasan Mamminasata Plus, 2) City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan, 3) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif., 4) Pengembangan multi -infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas sulawesi, 5) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global., 6) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi., 7) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul., 8) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 9) Pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global., 10) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Sulawesi., 11) pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas

Tabel V.5

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya pengembangan infrastruktur Kabupaten Pangkep sebagai pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah, baik regional maupun internasional Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya pengembangan infrastruktur Kabupaten Pangkep sebagai pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah, baik regional maupun internasional	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	8,67	5,25
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	17,07	24,07
		Net Ekspor Barang dan Jasa	8110	13640,4
		PDRB Kab/Kota Menurut Pengeluaran	729,717,430.45	1,501,151,210.96

5.2.5. Sasaran 5; Terwujudnya konektivitas antar daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan.

Terwujudnya konektivitas antar daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, merupakan sebuah upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk; Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas: Konektivitas yang lebih baik antara wilayah daratan dan pulau-pulau kecil, serta antara desa dan kota, mempermudah transportasi barang dan orang, yang dapat menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Mengurangi kesenjangan pembangunan: Konektivitas ini dapat membantu mengurangi ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga pembangunan lebih merata di seluruh wilayah kabupaten.

Arah Pembangunan 08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkotaan maupun perdesaan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pentingnya mempertimbangkan kedua wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan pembangunan yang memperhatikan baik perkotaan maupun pedesaan akan membantu menyeimbangkan distribusi ekonomi, mengurangi disparitas regional, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk. Kebijakan transformasi pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan pada : 1) Pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda., 2) Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif, 3) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) dan Pangkajene Kepulauan, untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung., 4) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) dan Pangkajene Kepulauan, untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 5) Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PDRB., 6) Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PDRB., 7) Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, insentif pajak, dan kemudahan akses ke sumber daya. Promosi investasi daerah kepada investor domestik dan asing dengan menyoroti potensi ekonomi dan peluang bisnis.

Tabel V.6

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya konektivitas antar daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya konektivitas antar daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
		a) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros, Pangkep)	1,81	2,23
		b) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	4,99	5,25
		c) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	49,5	100
		d) Persentase desa mandiri	1,538	9,231
		e) Indeks Layanan Infrastruktur	3,21	3,91

5.2.6. Sasaran 6; Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangkep yang efektif dan efisien termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal.

Perwujudan sasaran ini difokuskan pada satu arah Pembangunan yaitu Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

Arah Pembangunan 09. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif

Tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif mengedepankan pengelolaan pemerintahan yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran, transparansi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta penggunaan inovasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, dan merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pemerintahan. Kebijakan transformasi tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif diarahkan pada : 1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai, 2) Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi, 3) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah, 4) Penyediaan NGWF (Firewall Jaringan) dan WAF (Firewall Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi, 5) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, 6) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas

tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 7) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi, 8) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah, 9) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tata kelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 10) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, 11) Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital, 12) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, 13) Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan middle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government, 14) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, 15) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, dan 16) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.

Tabel V.7

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pangkep Yang Efektif Dan Efisien Termasuk Penataan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance Dan Kemandirian Fiskal Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangkep yang efektif dan efisien termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	69,2	92,2
		Indeks SPBE	2,48	4,48
		Indeks Pelayanan Publik	3,75	4,85
		a) Indeks Survey Penilaian Integritas	75,88	98,97
		b) Indeks Persepsi Anti Korupsi	94,89	100
		c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 5

5.2.7. Sasaran 7; Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai Daerah aman, demokratis dan stabil.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah aman, demokratis, dan stabil mencerminkan upaya yang terus menerus untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Penegakan hukum yang kuat, proses demokrasi yang transparan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dapat mengantar Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan menjadi model bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Perwujudan sasaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah aman, demokratis dan stabil difokuskan pada satu arah pembangunan yaitu Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

Arah Pembangunan 10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Berkeadilan.

Ketaatan hukum, ketertiban, keamanan, dan demokrasi berkeadilan merupakan pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan transformasi ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh, dan demokrasi berkeadilan diarahkan pada: 1) Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif, 2) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial, dan 3) Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah.

Tabel V.8

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai Daerah Aman, Demokratis Dan Stabil Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	a) Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan	100	100
		b) Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100	100
		Persentase tindak kriminal yang ditangani	100	100
		Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Politik	30	30

5.2.8. Sasaran 8; Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan daya saing yang optimal.

Terwujudnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah dengan daya saing yang optimal memerlukan kombinasi dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, stabilitas ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan daya saing yang optimal difokuskan pada dua arah Pembangunan yaitu Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dan Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

Arah Pembangunan 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas ekonomi makro daerah adalah kondisi perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mampu berjalan dengan baik tanpa mengalami fluktuasi yang tajam dan tidak terduga. Stabilitas ekonomi makro daerah adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan transformasi untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah

diarahkan pada : 1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD), 2) Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis, 3) Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah, 4) Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (green financing), pendanaan biru (blue financing), dan pembiayaan alternatif lainnya, 5) Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten/kota, dan 6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Sasaran Strategis 12. Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi

Kerjasama antar daerah dan daya saing daerah yang tinggi merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kebijakan transformasi dalam rangka peningkatan Kerjasama antar daerah dan daya saing daerah yang tinggi diarahkan pada: 1) Membangun kerjasama regional dan internasional dengan membangun hubungan kerjasama dengan daerah lain di dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ini bisa melibatkan promosi potensi lokal seperti perikanan, pariwisata bahari, dan produk-produk agrikultur yang menjadi kekuatan daerah, 2) Mendorong investasi asing dan domestik dengan mengembangkan kebijakan insentif investasi yang menarik bagi investor, terutama dalam sektor-sektor unggulan daerah seperti, dan 3) Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.

Tabel V.9

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kabupaten Pangkep Sebagai Daerah Dengan Daya Saing Yang Optimal Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan daya saing yang optimal	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,079	0,229
		Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3,4-4	1,1 - 3,2
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	49	14
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,73	100
	12. Ketangguhan Diploma dan Daya Saing Daerah Tinggi	Persentase Kerjasama Kab/kota dengan Kab/Kota lainnya/ Province/City Sister/ Skala Regional/ Nasional/ Internasional yang ditindaklanjuti	100	100
		Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,57

5.2.9. Sasaran 9; Terwujudnya Kabupaten Pangkep Sebagai Daerah Dengan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Yang Tinggi.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah dengan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tinggi adalah sebuah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki

hubungan yang harmonis dan kuat antar individu dan kelompok, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik secara efektif, mencakup pula keberhasilan dalam memelihara dan menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai tradisional yang memperkaya identitas daerah, serta masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu mengembangkan praktik berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok ini, difokuskan pada tiga arah pembangunan yaitu Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; serta Berketahanan Energi, Air, dan Pangan, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

Arah Pembangunan 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju menunjukkan integrasi harmonis antara agama yang dimaknai dalam konteks manfaat bersama (maslahat) dan pembangunan budaya yang progresif dan inklusif. Tidak hanya tentang menjalankan praktik keagamaan dengan benar tetapi juga mengembangkan dan memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan transformasi untuk beragama maslahat dan berkebudayaan maju diarahkan pada : 1) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial, 2) Pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya, 3) Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi, 4) Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat, 5) Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, 6) Penguatan kerukunan antar umat beragama, 7) Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual masyarakat sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika, dan 8) Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Arah Pembangunan 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menunjukkan sebuah tatanan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan meraih potensinya sepenuhnya, serta dapat mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan yang lebih besar. Kebijakan transformasi untuk keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diarahkan pada : 1) Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, 2) Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, 3) Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system

perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah, 4) Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, 5) Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan, 6) Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector, 7) Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative, 8) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, 9) Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional, 10) Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi, dan 11) Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di kabupaten.

Arah Pembangunan 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas merupakan kondisi di mana lingkungan alam dan sosial mendukung kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem, bukan hanya tentang kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan. Kebijakan transformasi dalam rangka menciptakan lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan pada : 1) Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat, 2) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana, 3) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi, 4) Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, 5) Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan, 6) Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan local, 7) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan, 8) Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan, 9) Penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan, 10) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan,

agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbenkakai, 11) Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau, 12) Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, 13) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman, 14) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, 15) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan, 16) Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, dan 17) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah.

Tabel V.10

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kabupaten Pangkep Sebagai Daerah Dengan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Yang Tinggi Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	51	234
		b) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	84,81	95
		Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	100	100
	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	53,2	63,2
		b) Indeks Perlindungan Anak	78,11	90,3
		c) Indeks Pembangunan Pemuda	54,58	69 - 75
		Indeks Ketimpangan Gender	0,421	0,231
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati		
		a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	100	100
		Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati		
		b) Indeks pertanaman (IP) padi	2	2
		c) Proporsi sawah irigasi	59,60	59,75
		d) Produktifitas Budidaya Perikanan tambak	3,05	4,00
		e) Angka Konsumsi Ikan	60,62	97,36
		Kualitas Lingkungan Hidup		
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	78,14
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	5	40
		c) Pengelolaan Sampah		
		i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,23	90,0
	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	60	100	

- 5.2.10. Sasaran 10; Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pangkep yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat meningkatkan ketahanannya terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi, serta pengelolaan risiko yang proaktif. Hal ini akan melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok ini, difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu Lingkungan Hidup Berkualitas, dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

Arah Pembangunan 16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Berketahanan energi, air, dan pangan merupakan hal penting dalam konteks keberlanjutan dan keberhasilan suatu daerah dalam memastikan ketersediaan sumber daya vital untuk kehidupan manusia. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk membangun masyarakat Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan yang stabil dan sejahtera. Kebijakan transformasi untuk berketahanan energi, air dan pangan diarahkan pada : 1) Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food Energy Water (FEW) Nexus, 2) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik, 3) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik, 4) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, 5) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi, 6) Peningkatan kapasitas energi Listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, terutama yang berbasis sumberdaya perairan, 7) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga terutama di pesisir dan pulau, dan sektor transportasi; 8) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat, kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan, 9)Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain, 10) Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, 11) Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau atau terkena dampak bencana, 12) Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim, 13) Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas, 14) Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, 15) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif

dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air, 16) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat, 17) Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal, 18) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, dan 19) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, dan pengawasan kualitas air minum.

Arah Pembangunan 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk tidak hanya bertahan hidup saat terjadi bencana atau perubahan iklim, tetapi juga untuk pulih dengan cepat, mengurangi kerentanan terhadap dampak masa depan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah mengalami krisis tersebut. Secara keseluruhan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim bukan hanya tentang respons terhadap krisis saat terjadi, tetapi juga tentang upaya preventif, adaptasi jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan lingkungan di masa depan. Kebijakan transformasi untuk mencapai resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Sulawesi Selatan diarahkan pada : 1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, 2) Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi, 3) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim, 4) Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, 5) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 6) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim, 7) Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, 8) Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon, 9) Peningkatan rehabilitasi hutan/ lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal, 10) Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, 11) Penerapan efisiensi energy dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi, dan 12) Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.

Tabel V.11

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pangkep yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
			2025	2045
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pangkep yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
		a) Ketahanan Energi		
		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	311750,5	314864,9
		b) Ketahanan Pangan		
		i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	10,79	2,22
		ii) Indeks Ketahanan Pangan	81,35	99,95
		iii) Skor Pola Pangan Harapan	90,9	99,9
		c) Ketahanan air		
		i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	320,5	320,5
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	69,34	100	
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	164,23	136,46
		Penurunan Emisi GRK Tahunan		
		a. Kumulatif	0,19	12,62
b. Tahunan		1,00	51,47	

Dalam kerangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, arah kebijakan transformasi diarahkan untuk mencapai sasaran pokok yang dijabarkan dari arah pembangunan, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.12

Keterkaitan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan dengan Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
1.	Terwujudnya Kualitas Manusia Kabupaten Pangkep Yang Unggul dan Sejahtera	1. Kesehatan untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,38	78,62
				2	Kesehatan Ibu dan Anak		
				Peningkatan kualitas dan		a) Persentase persalinan di	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan		fasilitas kesehatan		
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	29,15	20,65
			Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen	3	Penanganan Tuberkulosis:		
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.		a) Cakupan penemuan dan Penanganan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	68,35	77,35
			Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan		b) <i>Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS (%)</i>	89,8	98,8
			Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multi sektor	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100
			Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis Masyarakat				
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di wilayah kepulauan).				
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di wilayah kepulauan)				
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.				
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota		
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.		i) Literasi Membaca	63,89	74,94
			Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT).		ii) Numerasi	63,46	74,51
			Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,4	10,51
			Perluasan dan peningkatan bantuan		c) Harapan Lama Sekolah	13,09	14,66

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			pendanaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.				
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,36	20,46
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	9,40	20,20
			Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.				
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.				
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.				
			Penyelenggaraan pendidikan yang				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
			berkualitas dan berkeadilan.			
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.			
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di wilayah kepulauan).			
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di wilayah kepulauan)			
			Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).			
			Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global			
			Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di wilayah kepulauan).				
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di wilayah kepulauan).				
		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada daerah pesisir dan kepulauan.	8	a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,91	0,75
			Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.		b) Indeks Gini	0,350	0,310
			Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,08	0,38
			Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan	10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	35,2	93,36

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
			ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas			
			Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil dan kepulauan			
			Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas			
			Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.			
			Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan.			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
2.	Terwujud nya Perekonomian Kabupaten Pangkep yang Kokoh dan Merata berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi Tinggi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian dan perikanan.	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	46,77	63,19
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi pertanian	12	Pengembangan Pariwisata		
			Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,622	0,904
			Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	7.949	56.107
			Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lap Usaha Kab/Kota)	0,45	0,57
			pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			dan industri.				
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan		a) Jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota	4004	4204
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		b) Persentase koperasi sehat di kab/kota	16,57	46,69
			Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.		c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0	0
			Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		d. Proporsi PDRB Kab.Pangkep terhadap Produktifitas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,85	37,13
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.				
			Penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu	15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,80	2,99

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			Kota Negara (IKN)				
			Perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani dan nelayan	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42,84	51,16
			Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan pada sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritiman		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,76	117,64
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
			Peningkatan akses perempuan ke pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional, Penegakan hukum yang kuat terhadap diskriminasi gender di tempat kerja.		a) Indeks Kapabilitas Inovasi	64,95	89,55
			Mendorong kewirausahaan perempuan melalui pemberian akses ke modal, pelatihan bisnis, dan jaringan dukungan.				
			Mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja, seperti manufaktur, pertanian, dan jasa. Mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) melalui dukungan finansial dan pelatihan. Meningkatkan akses ke modal bagi wirausahawan		b) Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	0,0779	0,1227

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
			baru. Penyediaan pelatihan bisnis dan mentor bagi pengusaha muda. Mempromosikan kewirausahaan melalui program-program inkubator bisnis.			
			Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok			
			Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan			
			Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber			
			Memasukkan riset sebagai prioritas dalam rencana pembangunan daerah. Membentuk konsorsium riset antara			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			pemerintah daerah, universitas, dan sektor swasta.				
3.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai pusat pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan wisata maritim termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy untuk mendukung IKN	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan	18	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		
			Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif. Dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain		Kontribusi Pilar Lingkungan thd Penerapan Ekonomi Hijau		
			Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif		a) Kualitas air permukaan (BOD),	76.53 (Baik)	80.53 (Baik)
			Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam		b) Kualitas udara (No2),	76.91 (Baik)	82.91 (Baik)
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		c) Kualitas Tutupan Lahan	63,85 (Sedang)	65,22 (Sedang)

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		
					Baseline 2025	Target 2045	
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.		Penerapan Ekonomi Biru		
			Peningkatan kapasitas dan akses Informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat di implementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform.		d) Produktivitas Perikanan Tangkap	23987.3	46797.3
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.		e) Produktivitas Perikanan Budidaya	25.667.87	30.524.60
		6. Transformasi Digital	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan	19	a) % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	22,22	86,11

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
			logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi).			
			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pambangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.			
			Memperluas akses internet ke daerah pedesaan dan terpencil melalui investasi infrastruktur. Menyediakan perangkat digital dengan harga terjangkau atau program subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menyediakan pelatihan dan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			sumber daya bagi guru untuk mengajar literasi digital secara efektif.				
4.	Terwujud nya pengembangan infrastruktur Kabupaten Pangkep sebagai pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah, baik regional maupun internasional.	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama keterhubungan kawasan Mamminasata Plus.	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	8,67	5,25
			City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	17.07	24.07
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	22	Net Ekspor Barang dan Jasa	8110	13640,4
			Pengembangan multi - infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas sulawesi		PDRB Kab/Kota Menurut Pengeluaran	729,717,430.45	1,501,151,210.96
			Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		
					Baseline 2025	Target 2045	
			ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global				
			Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi				
			Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul				
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/ metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.				
			Pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global				
			Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off)				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Sulawesi.				
			pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas				
		8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda.	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
			Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif		a) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros, Pangkep)	1,81	2,23
			Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) dan Pangkajene Kepulauan, untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.		b) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	4,99	5,25
			Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ekonomi digital.		c) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	49,5	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
			Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PDRB.	d) Persentase desa mandiri	1,538	9,231
			Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, insentif pajak, dan kemudahan akses ke sumber daya. Promosi investasi daerah kepada investor domestik dan asing dengan menyoroti potensi ekonomi dan peluang bisnis.	e) Indeks Layanan Infrastruktur	3,21	3,91
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.			
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk			
			Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh			
			Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif			
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			kelembagaan, serta adopsi teknologi.				
			Mengembangkan rencana induk (master plan) infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Menerapkan teknologi informasi dan sistem manajemen proyek yang efisien untuk mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur.				
			Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Memastikan bahwa proyek infrastruktur memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan.				
			Pemanfaatan stasiun KA sebagai kawasan transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar pusat-pusat kegiatan.				
			Pembangunan dan peningkatan jalan daerah menuju yang menghubungkan pusat produksi, pusat pengolahan dan pusat distribusi serta daerah-daerah yang masih terisolir.				
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangkep yang efektif dan efisien termasuk penataan	9. Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	24	Indeks Reformasi Hukum	69,2	92,2
			Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang	25	Indeks SPBE	2,48	4,48

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
	keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal		memiliki filter untuk harmonisasi				
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	26	a) Indeks Pelayanan Publik	3,75	4,85
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah		b) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	75,88	98,97
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.		b) Indeks Persepsi Anti Korupsi	94,89	100
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendu		c) Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 5
6.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	28	a) Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan	100	100
			Perkuatan pengendalian		b) Persentase perda dan	100	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko		perkada yang ditegakkan		
			Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	100	100
				30	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Politik	30	30
7.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan daya saing yang optimal	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,079	0,229
			Penguatan pengendalian inflasi daerah.	32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3,4-4	1,1 - 3,2
			Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	33	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	49	14
			Mendorong penguatan sektor keuangan syariah	34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79.73	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah				
8.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	12. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi	Membangun kerjasama regional dan internasional dengan membangun hubungan kerjasama dengan daerah lain di dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ini bisa melibatkan promosi potensi lokal seperti perikanan, pariwisata bahari, dan produk-produk agrikultur yang menjadi kekuatan daerah.	35	Persentase Kerjasama Kab/kota dengan Kab/Kota lainnya/ Province/City Sister/ Skala Regional/Nasional/ Internasional yang ditindaklanjuti	100	100
			Mendorong investasi asing dan domestik dengan mengembangkan kebijakan insentif investasi yang menarik bagi investor, terutama dalam sektor-sektor unggulan daerah seperti perikanan, kelautan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis lokal.	36	Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,57
			Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan				
			Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah				
			2) Peningkatan daya saing dan				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global				
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	37	a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	51	234
			Pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya, khususnya yang merupakan bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep;		b) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	84,81	95
			2) Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global				
			Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	38	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi	100	100
			Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat				
			Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan				
			Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif				
		15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya setempat.	41	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati		
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana		a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	100	100
			Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi		Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati		
			Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai		b) Indeks pertanaman (IP) padi	2	2
			Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan		c) Proporsi sawah irigasi	59,60	59,75

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			teknologi terkini dan terjangkau				
			Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan		d) Produktifitas Budidaya Perikanan tambak	3,05	4,00
			Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman		e) Angka Konsumsi Ikan	60,62	97,36
			Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	42	Kualitas Lingkungan Hidup		
			Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	78,14
			Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	5	40
					c) Pengelolaan Sampah		
					i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,23	90,0
					ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	60	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
9.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pangkep yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
			Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, khususnya pada wilayah kepulauan		a) Ketahanan Energi		
			Peningkatan kapasitas energi Listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, terutama yang berbasis sumberdaya perairan		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	311750,5	314864,9
					b) Ketahanan Pangan		
					i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	10,79	2,22
					ii) Indeks Ketahanan Pangan	81,35	99,95
					iii) Skor Pola Pangan Harapan	90.9	99.9
					c) Ketahanan air		
					i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	320,5	320,5
					ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	69,34	100
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sampah terpadu hulu- hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan	44	Indeks Risiko Bencana	164.23	136.46	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi		Indikator Utama Pembangunan	Target	
						Baseline 2025	Target 2045
			sampah dengan pengembangan circular economy				
			Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	45	Penurunan Emisi GRK Tahunan		
					a. Kumulatif	0,19	12,62
					b. Tahunan	1,00	51,47

Indikator utama pembangunan merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mencapai sasaran pokok berdasarkan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan dan ketercapaian sasaran pokok, serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan indikator utama pengukur keberhasilan sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyelarasan indikator utama pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan indikator utama pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan berikut targetnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.13.

Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Berdasarkan Tahapan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025- 2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Base line	Target	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Terwujudnya Kualitas Manusia Kabupaten Pangkep Yang Unggul dan Sejahtera	1. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,38	78,62	74,69	76,00	77,31	78,62
			2	Kesehatan Ibu dan Anak						
				a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100	100
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	29,15	20,65	27,03	24,9	22,78	20,65
			3	Penanganan Tuberkulosis:						
				a) Cakupan penemuan dan Penanganan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	68,35	77,35	70,6	72,85	75,1	77,35
				b) <i>Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS (%)</i>	89,8	98,8	92,05	94,3	96,55	98,8
			4	Cakupan kepesertaan	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Base line	Target	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
				jaminan kesehatan nasional (%)							
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota							
			i)	Literasi Membaca	63,89	74,94	66,65	69,42	72,18	74,94	
			ii)	Numerasi	63,46	74,51	66,22	68,98	71,75	74,51	
			b)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,4	10,51	8,93	9,45	9,98	10,51	
			d)	Harapan Lama Sekolah	13,09	14,66	13,48	13,87	14,26	14,66	
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,36	20,46	12,48	15,40	18,02	20,46	
			7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	9,40	20,20	12,52	15,40	18,00	20,20	
		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a)	Tingkat Kemiskinan (%)	10,91	0,75	8,37	5,83	3,29	0,75
				b)	Indeks Gini	0,350	0,310	0,342	0,332	0,322	0,310
			9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,08	0,38	0,16	0,23	0,31	0,38	
		10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	35,2	93,36	49,74	64,28	78,82	93,36		
2.	Terwujudnya Perekonomian Kabupaten Pangkep yang Kokoh dan Merata berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	46,77	63,19	50,69	54,56	58,74	63,19	
			12	Pengembangan Pariwisata							
			a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,622	0,904	0,693	0,764	0,834	0,904	
			b)	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	7.949	56.107	19.989	32.029	44.067	56.107	
			13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lap Usaha Kab/Kota)	0,45	0,57	0,48	0,51	0,54	0,57	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
			a)	Jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota	4004	4204	4054	4104	4154	4204	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Base line	Target	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
				b) Persentase koperasi sehat di kab/kota	16,57	46,69	24.10	31,63	39,16	46,69
				c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0	0	0	0	0	0
				d. Proporsi PDRB Kab.Pangkep terhadap Produktifitas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,85	37,13	26,42	29,99	33,56	37,13
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,80	2,99	4,37	3,82	3,20	2,99
			16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42,84	51,16	44,92	47	49,08	51,16
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,76	117,64	86,23	96,71	107,18	117,64
			17	Tingkat Penguasaan IPTEK						
				a) Indeks Kapabilitas Inovasi	64,95	89,55	71,1	77,25	83,4	89,55
				b) Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	0,0779	0,1227	0,0891	0,1003	0,01115	0,1227
3.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai pusat pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan wisata maritim termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy untuk mendukung IKN	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru						
				Kontribusi Pilar Lingkungan thd Penerapan Ekonomi Hijau						
				a) Kualitas air permukaan (BOD),	76.53 (Baik)	80.53 (Baik)	77.53 (Baik)	78.53 (Baik)	79.53 (Baik)	80.53 (Baik)
				b) Kualitas udara (No2),	76.91 (Baik)	82.91 (Baik)	78.41 (Baik)	79.91 (Baik)	81.41 (Baik)	82.91 (Baik)
				c) Kualitas Tutupan Lahan	63,85 (Sedang)	65,22 (Sedang)	64,2 (Sedang)	64,54 (Sedang)	64,88 (Sedang)	65,22 (Sedang)
				Penerapan Ekonomi Biru						
				d) Produktivitas Perikanan Tangkap	23987,3	46797,3	29689,8	35392,3	41094,8	46797,3
				e) Produktivitas Perikanan Budidaya	25,667.87	30,524.60	26,882.05	28,096.23	29,310.42	30,524.60
		6. Transformasi Digital	19	a) % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	22,22	86,11	36,11	50,00	63,89	86,11
4.	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Kabupaten Pangkep sebagai pendukung konektivitas	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	8,67	5,25	7,99	7,13	6,28	5,25
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	17.07	24.07	18,82	20,57	22,32	24.07
			22	Net Ekspor Barang dan Jasa	8110	13640,4	9498,6	10879,2	12259,8	13640,4
				PDRB Kab/Kota Menurut Pengeluaran	729,717,4 30.45	1,501,151 ,210.96	922,575, 875.58	1,115,434 320.71	1,308,292 765.83	1,501,151, 10.96

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Base line	Target	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4				
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045				
	dan logistik antar wilayah, baik regional maupun internasional.	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan										
				a) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros, Pangkep)	1,81	2,23	1,92	2,02	2,12	2,23				
				b) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	4,99	5,25	5,11	5,19	5,25	5,25				
				c) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	49,5	100	68,35	82,96	97,57	100				
				d) Persentase desa mandiri	1,538	9,231	1,538	6,154	7,692	9,231				
				e) Indeks Layanan Infrastruktur	3,21	3,91	3,385	3,56	3,735	3,91				
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangkep yang efektif dan efisien termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal	9. Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	24	Indeks Reformasi Hukum	69,2	92,2	74,95	80,7	86,45	92,2				
			25	Indeks SPBE	2,48	4,48	2,98	3,48	3,98	4,48				
			26	a) Indeks Pelayanan Publik	3,75	4,85	4,03	4,30	4,58	4,85				
			27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	75,88	98,97	81,65	87,43	93,2	98,97				
				b) Indeks Persepsi Anti Korupsi	94,89	100	96,13	97,37	98,6	100				
				c) Indeks Maturitas SPIP								Level 3	Level 5	Level 4
6.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	10. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh	28	a) Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100				
				b) Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100				
			29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	100	100	100	100	100	100				
			30	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Politik	30	30	30	30	30	30				
7.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,079	0,229	0,139	0,154	0,214	0,229				
			32	Tingkat Inflasi Gabungan	3,4-4	1,1 - 3,2	2,94-3,84	2,37-3,64	1,79-3,44	1,1 - 3,2				
			33	Persentase Peningkatan	49	14	40	31	22	14				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Base line	Target	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	dengan daya saing yang optimal			Investasi Daerah (%)							
		34		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79.73	100	84.80	89.86	94.93	100	
		12. Ketangguhan Diplomasi Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi	35		Persentase Kerjasama Kab/kota dengan Kab/ Kota lainnya/ Provinsi/ City Sister/ Skala/ Regional/ Nasional/ Internasional yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
			36		Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,57	3,16	3,29	3,43	3,57
8.	Terwujudnya Kabupaten Pangkep sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	51	234	99	146	194	234	
				b) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	84,81	95	87,37	89,93	92,49	95	
			38	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	100	100	100	100	100	100	
			14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	53,2	63,2	55,7	58,2	60,7	63,2
				b) Indeks Perlindungan Anak	78,11	90,3	81,13	84,15	87,17	90,3	
				c) Indeks Pembangunan Pemuda	54,58	69 - 75	57,5 - 59	61,3- 64,2	65,1- 68,5	69 - 75	
		40		Indeks Ketimpangan Gender	0,421	0,231	0,374	0,326	0,279	0,231	
			15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Pengurangan Ancaman Keaneekaragaman Hayati						
				a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	100	100	100	100	100	100	
				Pemanfaatan Keberlanjutan Keaneekaragaman Hayati							
				b) Indeks pertanaman (IP) padi	2	2	2	2	2	2	
				c) Proporsi sawah irigasi	59.60	59.75	59.64	59.68	59.72	59.75	
				d) Produktifitas Budidaya Perikanan tambak	3,05	4,00	3,28	3,52	3,76	4,00	
				e) Angka Konsumsi Ikan	60,62	97,36	69,81	78,99	88,18	97,36	
				42	Kualitas Lingkungan Hidup						
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	78,14	74,97	76,03	77,08	78,14	
				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	5	40	7	10,46	20,5	40	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Base line	Target	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
					2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
				c) Pengelolaan Sampah						
				i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,23	90,0	40,0	56,57	73,23	90,0
				ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	60	100	70	80	90	100
9.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pangkep yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan						
				a) Ketahanan Energi						
				i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	311750,5	314864,9	312529,1	313307,7	314086,3	314864,9
				b) Ketahanan Pangan						
				i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	10,79	2,22	9,08	6,93	4,79	2,22
				ii) Indeks Ketahanan Pangan	81,35	99,95	86	90,65	95,3	99,95
				iii) Skor Pola Pangan Harapan	90,9	99,9	93,15	95,4	97,65	99,9
				c) Ketahanan air						
				i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	320,5	320,5	320,5	320,5	320,5	320,5
				ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	69,34	100	80	83,36	90,37	100
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana	164.23	136.46	157.29	150.35	143.41	136.46	
		45	Penurunan Emisi GRK Tahunan							
		a. Kumulatif	0,19	12,62	0,81	2,39	7,07	12,62		
		b. Tahunan	1,00	51,47	4,34	11,00	32,02	51,47		

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana dan Prasarana

5.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana berdasarkan Kecamatan

- a) Arah pembangunan Kecamatan Pangkajene, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Pangkajene dan Kepulauan, diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi wilayah berbasis ekonomi biru melalui pengembangan kawasan minapolitan. Untuk itu pengembangan Kecamatan Pangkajene diarahkan pada Pertama perwujudan masyarakat Pangkajene Kepulauan yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. Kedua, perwujudan kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis

digitalisasi ekonomi dan inovasi serta pemanfaatan Iptek untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas perikanan budidaya dan pertanian tanaman pangan. Ketiga, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat, perwujudan stabilitas keamanan daerah diprioritaskan pada penegakan hukum dan pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersinergi dan partisipatif; Kelima, perwujudan kabupaten Pangkajene Kepulauan sebagai daerah berketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local, peningkatan ketahanan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung di sempadan pantai dan kawasan ekosistem mangrove, peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas melalui pemenuhan dan penguatan ketahanan energi, pemenuhan akses rumah tangga terhadap air minum aman dan penguatan kemandirian pangan dan air, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui penyediaan jalur evakuasi bencana dan penguatan tanggul penahan abrasi pantai. **Keenam**, pembangunan infrastruktur yang berkualitas diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan jalan daerah, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpan local, dan pengembangan stasiun KA sebagai simpul transpotasi yang terintegrasi antar moda serta optimalisasi pemanfaatan jalur KA Lintas Makassar-Parepare. Keenam, pembangunan kewilayahan yang merata diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, khususnya pemenuhan akses akan hunian layak yang berkelanjutan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) komunal. Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan daya saing daerah yang optimal berbasis teknologi dan digitalisasi melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, peningkatan pajak daerah, peningkatan investasi daerah melalui pemanfaatan sumber daya unggulan berbasis pengembangan kawasan minapolitan dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

- b) **Arah pembangunan Kecamatan Minasate'ne**, yang berfungsi sebagai bagian dari pusat kegiatan wilayah (PKW) Pangkajene yang berperan sebagai pusat pelayanan jasa sebagaimana ditetapkan dalam RTRWK Pangkajene Kepulauan, diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan

Ekonomi wilayah berbasis ekonomi biru melalui pengembangan kawasan minapolitan dan kawasan pariwisata alam Geopark. Untuk itu pengembangan Kecamatan Minasate'ne diarahkan pada **Pertama** perwujudan masyarakat Pangkajene Kepulauan yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar. **Kedua**, perwujudan Kecamatan Minasate'ne sebagai bagian dari PKW Pangkajene dan destinasi pariwisata berbasis Geopark yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi serta pemanfaatan Iptek untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, khususnya komoditas perikanan budidaya, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan serta pertambangan. **Ketiga**, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik. **Keempat**, perwujudan stabilitas keamanan daerah diprioritaskan pada penegakan hukum dan pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersinergi dan partisipatif; **Kelima**, perwujudan kabupaten Pangkajene Kepulauan sebagai daerah berketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local di perkampungan pra sejarah Bellae, peningkatan ketahanan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung di sempadan pantai dan kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas melalui pemenuhan dan penguatan ketahanan energi, pemenuhan akses rumah tangga terhadap air minum aman dan penguatan kemandirian pangan dan air, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui penyediaan jalur evakuasi bencana dan penguatan tanggul penahan abrasi pantai. **Keenam**, pembangunan infrastruktur yang berkualitas diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan jalan nasional dan jalan daerah, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpan local, dan pengembangan simpul transportasi yang terintegrasi antar moda serta peningkatan kapasitas dan pelayanan jalur KA Lintas Makassar-Parepare. **Ketujuh**, pembangunan kewilayahan yang merata diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, khususnya pemenuhan akses akan hunian layak yang berkelanjutan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) komunal. Kedelapan, pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan

daya saing daerah yang optimal berbasis teknologi dan digitalisasi melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiscal, peningkatan pajak daerah, peningkatan investasi daerah melalui pemanfaatan sumber daya unggulan berbasis pengembangan kawasan minapolitan dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam kaidah pelaksanaan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, mekanisme perubahan serta komunikasi publik.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

2. Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Jika digambarkan sejak dari atas, dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah (APBD). Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Periodisasi RPJPD mengikuti periodisasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045.
- b. Substansi visi dan delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas dalam RPJPN dan visi dan misi RPJPD provinsi menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
- c. Penentuan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator pembangunan RPJPD mengacu pada Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPN, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi.
- d. Dokumen RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah.
- e. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD, dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, dan memperhatikan RTRW dan KLHS RPJMD.

- f. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- g. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi.
- h. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.
- i. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

6.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPN dan dokumen perencanaan turunannya (termasuk RPJPD) menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, dalam dokumen perencanaan pembangunan dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result- Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

6.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

1. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iv) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD; integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan

pelaksanaan proyek prioritas pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

2. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik.

Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

3. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahir (*forcemajeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

4. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik dalam RPJPD Tahun 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka

kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan (*asset value capture*). Yang ada dapat digunakan secara optimal.

6. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

